

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENDAHULUAN

#### 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
4. Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan;
6. Informasi tentang perubahan posisi keuangan.

#### 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

## **B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **1) Ekonomi Makro**

Pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, target pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar 7,4%. Dengan melihat kondisi perekonomian dan potensi yang ada, pertumbuhan ekonomi (dengan Migas) Kabupaten Bojonegoro diperkirakan pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 10%.

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik. Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

Langkah-langkah strategis ditahun 2018 pada prinsipnya adalah melanjutkan program prioritas yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri di Jawa Timurdan Nasional, antara lain ditempuh dengan:

1. Memantapkan Pondasi Pembangunan Berkelanjutan Bojonegoro berdasarkan arah kebijakan terhadap 10 Isu Utama, yaitu :
  - a. Isu Pangan, dilakukan dengan meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri dengan mendorong semua program urusan pertanian dan urusan lain terkait guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, hortikultura,

- perkebunan, peternakan, dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan;
- b. Isu Energi, dilakukan dengan upaya mengembangkan energi alternatif terbarukan;
  - c. Isu Wisata, Industri manufaktur dan Jasa, ditempuh melalui :
    - 1) Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
    - 2) Meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian, dan jasa untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
    - 3) Mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan;
    - 4) Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta desa wisata;
    - 5) Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi wilayah desa/kecamatan setempat, dan mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu);
    - 6) Mendukung terwujudnya 13 kawasan industri dan pariwisata.
  - d. Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dilakukan dengan upaya:
    - 1) Penanganan banjir, kekeringan, longsor, dan anomali iklim melalui sistem pengelolaan air terpadu (dengan pembangunan waduk, bendung gerak, embung, resapan biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota), serta peningkatan kerjasama lintas Perangkat Daerah;
    - 2) Mengembangkan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan ekonomis;
  - e. Isu Reformasi Birokrasi, Modal Sosial dan Modal Manusia, dilakukan melalui upaya:
    - 1) Meningkatkan pelayanan prima di semua wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
    - 2) Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
    - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui pemberian jaminan kesehatan (JKN/Jamkesda untuk masyarakat miskin) dan pendidikan (DAK Pendidikan Desa/Kelurahan, Bosda Madin, dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi), Tugas Belajar Dokter, Diklat Guru dan PNS;
    - 4) Mengimplementasikan prinsip Kabupaten Welas Asih pada semua aspek pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik;
  - f. Isu Pengelolaan Ketertiban Hukum dan Sosial, akan ditempuh melalui upaya:
    - 1) Mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif;
    - 2) Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan daerah lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya
  - g. Isu Pembangunan Desa Lewat Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), dilakukan dengan upaya:

- 1) Menerapkan Spirit Utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam kebijakan dan program pada urusan pembangunan melalui 6 (Enam) Pilar Pembangunan;
  - 2) Melaksanakan dan memantapkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC);
  - 3) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui GDSC, yang diarahkan melalui:
    - Fokus pada 20 indikator
    - Optimalisasi anggaran
    - Pemantapan tatakelola dan kelembagaan
    - Berorientasi kepada *output* dan *outcome*
- h. Isu Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan, dilakukan dengan:
- 1) Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target nasional sesuai post-2016 Development agenda;
  - 2) Melaksanakan program-program yang bersifat *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*;
- i. Isu Infrastruktur, dilakukan dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pusat budaya dan industri kreatif, penuntasan pembangunan RSUD;
- j. Isu Anggaran, dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan melalui upaya :
- 1) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan (anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 10%);
  - 2) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah;
  - 3) Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk membiayai program-program prioritas dan untuk investasi yang produktif, aman, dan berkelanjutan melalui pembentukan dana abadi.
2. Prioritas bidang industri dan pariwisata melalui Pengembangan 13 Kawasan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain:
- a. Pengembangan Kawasan Kasur Lantai di Kecamatan Baureno
  - b. Pengembangan Kawasan Olahan Kayu di Kecamatan Bojonegoro, Kasiman, Kalitidu dan Margomulyo
  - c. Pengembangan Kawasan Gerabah di Kecamatan Malo
  - d. Pengembangan Kawasan Batik Jonegoroan di Kecamatan Temayang
  - e. Pengembangan Kawasan Holtikultura di kawasan Klino
  - f. Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Kecamatan Kedungadem dan Gondang
  - g. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kapas, Dander, Kalitidu dan Trucuk
  - h. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kalitidu, Dander, Kapas dan Sukosewu
  - i. Pengembangan Kawasan Wisata Migas di Kecamatan Kedewan, Malo, Gayam dan Ngasem
  - j. Pengembangan Kawasan Wisata Religi di Kecamatan Malo dan Kalitidu
  - k. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Temayang (Jono) dan Ngasem (Kayangan Api)
  - l. Pengembangan Kawasan Wisata Hutan di Kecamatan Dander dan Malingmati (Tambakrejo)

- m. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Kecamatan Sekar berbasis Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
3. Optimalisasi Penanganan Masalah Pendidikan
- a. Gerakan Ayo Sekolah  
Memastikan sekolah memiliki data yang valid, ditunjang teknologi IT, masyarakat Bojonegoro usia 4–18 tahun harus bersekolah baik disekolah formal maupun non formal (Paket A, B dan C), melalui gerakan:
    - 1) Sinkronisasi data ( validasi data → data indikator pendidikan )
    - 2) Sadar data
    - 3) Sadar lingkungan
    - 4) Koordinasi aksi
    - 5) Bulan gerakan ayo sekolah
    - 6) Bulan gerakan aksi
    - 7) Apresiasi anak sekolah
    - 8) Apresiasi anak terampil
  - b. Gerakan anti drop out sekolah, untuk mewujudkan agar anak tetap sekolah hingga menengah atas, melalui :
    - 1) Gerakan kasih sayang
    - 2) Kawan sejawat saling mengingatkan
    - 3) Guru asuh tidak hanya wali murid
  - c. Peningkatan kualitas hasil belajar, dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas baik kemampuan gurunya, pengelolaan/manajemen sekolah dan fasilitas sekolah yang memadai.
    - 1) Dinas pendidikan harus mengawal dengan baik proses belajar mengajar
    - 2) Kualitas sekolah dan guru

Selain kebijakan-kebijakan prioritas sebagaimana diuraikan diatas, beberapa kegiatan yang merupakan rencana kerja dan prioritas pembangunan ditahun 2018, diklasifikasikan sesuai bidang prioritas antara lain:

- 1. Prioritas Bidang Pangan
  - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan di Desa Deling dan Miyono (Sekar), Jari, Pragelan, Sambongrejo (Gondang), Sumberjo Kidul (Sukosewu), Kaliombo (Purwosari)
  - b. Pengembangan Lumbung Pangan Desa di Desa Tejo dan Kanor (Kanor), Rendeng (Malo), Margomuyo dan Sumberejo (Margomulyo)
  - c. Bantuan Keuangan Pengembangan Jambu Biji
  - d. Pembangunan Jalan UsahaTani (JUT) 34 Lokasi
  - e. Pembangunan JITUT/JIDES 20 Lokasi dan 6 paket sumur bor
- 2. Prioritas Bidang Wisata Dan Industri Manufaktur
  - a. Pengembangan DestinasiWisata Dander Water Park, Kayangan api, dan Waduk Pacal
  - b. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kapas, Dander, Kalitidu, Kasiman, Kedewan, Malo, Gondang, Temayang, dan Margomulyo
- 3. Prioritas Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan
  - a. Pembuatan sumur resapan (20 unit)
  - b. Pembangunan IPAL Biogas (16 unit)
  - c. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
  - e. Penataan dan pemeliharaan RTH
  - f. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan (Pendampingan GBB)
- h. Pembangunan fasilitas air bersih untuk rekonstruksi korban pasca bencana (pengadaan sumur bor dan water tower)
- 4. Prioritas Bidang Reformasi Birokrasi, Modal Sosial Dan Modal Manusia
  - a. Pembangunan Gedung Sekolah PAUD
  - b. Pembangunan Puskesmas
  - c. Pembangunan Pustu
  - d. Pengadaan Pusling
  - e. Rehabilitasi sedang/berat Pustu
  - f. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
  - g. JKN
  - h. Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)
  - i. Hibah kepada KPU
  - j. Hibah kepada Panwas
  - k. DAK Pendidikan SLTA sebanyak 48.185 siswa
  - l. Bantuan Lansia Miskin 200 lansia
  - m. Rumah Tidak Layak Huni
- 5. Prioritas Bidang Pengelolaan Ketertiban Hukum dan Sosial
  - a. Pengamanan Pilkada kepada Kodim
  - b. Pengamanan Pilkada kepada Polres
  - c. Hibah Operasional Polres
- 6. Prioritas Bidang GDSC
  - a. Penambahan Ruang Kelas PAUD
  - b. Hibah BOP PAUD
  - c. Honor tenaga PAUD
  - d. Penambahan Ruang Kelas SD
  - e. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara/Fasilitas Parkir (Pagar Sekolah, Paving Halaman) SD
  - f. Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD
  - g. Pengadaan Mebelair SD
  - h. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SD
  - i. Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SD
  - j. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan SD
  - k. Penambahan Ruang Sekolah Menengah SMP/SMA
  - l. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMP
  - m. Penyediaan BOS untuk SDN
  - n. Penyediaan BOS untuk SMPN/SATAP
- 7. Prioritas Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan
  - a. Pembangunan Saluran Drainase
  - b. Pengembangan IPAL Kelurahan Banjarjo Kecamatan Bojonegoro
  - c. Pengembangan IPAL Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro
  - d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
  - e. Peningkatan Kualitas Rumah
  - f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
  - g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Buyut Dalem Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro
  - h. Pembangunan Taman
  - i. Pengembangan Taman Bukit Cinta dan Taman Desa Gunung Sari (Sendang Gong)
- 8. Prioritas Bidang Anggaran

- a. Dana Abadi
- 9. Prioritas Bidang Infrastruktur
  - a. Pembangunan Gedung SD/MI/SLB (11 paket)
  - b. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SD/MI (37 paket)
  - c. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI (26 paket)
  - d. Pembangunan Gedung SMP/MTs (9 paket)
  - e. Pembangunan 3 RSUD
  - f. Pembangunan Sarana dan Prsarana PUSDIKLAT Lanscap
  - g. Pembangunan Gedung Kantor PUSDIKLAT dan Pengembangan SDM
  - h. Pembangunan Pusat Budaya Kreatif di Kec. Dander
  - i. Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Temayang
  - j. Pengadaan Tanah Perluasan RSUD Padangan
  - k. Pengadaantanahrumah potong hewan (RPH) Bojonegoro
  - l. Pengadaantanahpasar hewan Kecamatan Trucuk
  - m. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  - n. Pembangunan/Peningkatan saluran irigasi
  - o. Pemeliharaan jaringan irigasi di 3 wilayah
  - p. Pembangunan Check Dam
  - q. Rehabilitasi Check Dam
  - r. Pembangunan Embung
  - s. Perkuatan Tebing Kali/Avoer dan Pembangunan Talud Afvoer
  - t. Pembangunan pintu pengendali banjir
  - u. Pembangunan jalan akses jembatan Bojonegoro-Trucuk (sisi Trucuk)
  - v. Pembangunan jembatan Trucuk tahap III
  - w. Pembangunan jembatan
  - x. Pembangunan saluran drainase
  - y. Pembangunan TPT
  - z. Rehab pemeliharaan jalan
  - aa. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
  - bb. Pemeliharaan rutin jalan dan sarana prasarana pendukungnya
  - cc. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
  - dd. Peningkatan jalan
  - ee. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Stadion Letjend H. Sudirman
  - ff. Pembangunan jaringan listrik pedesaan

## 2) Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

- a. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- b. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
- c. Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang cenderung terus meningkat, perlu dilakukan pendekatan dalam



menyusun skala prioritas pada setiap kebijakan.

**a) Kebijakan Pendapatan Daerah**

**(1) Pendapatan Daerah**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2018 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
3. Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak)

Target Pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018:

**(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- (a)) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (b)) Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah



serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- (c)) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
  - (d)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - (e)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - (f)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - (g)) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - (h)) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- (2)) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- (a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
- (b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Lain-lain PAD Yang Sah:

- (a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- (b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

**(b) Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- (a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- ((1)) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
- ((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- (b)) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2018, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- ((1)) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
- ((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan lokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66.C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- (c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- ((1)) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
- ((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

(2)) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

(3)) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK kabupaten Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

**(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1)) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2017.
- (2)) Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
- (3)) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan



kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- (5)) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- (6)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (7)) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar

negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (8)) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (9)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- (10)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, dan apabila belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, maka akan ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2018.
- (11)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari provinsi dianggarkan dalam APBD Kabupaten sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- (12)) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan dimaksud akan disesuaikan pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (13)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

## **(2) Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan.**

### **(a) Pendapatan Asli Daerah**

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu :

- a) Bidang Pendapatan
  - (1)) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah
  - (2)) Peningkatan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi/BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi/ BUMD
  - (3)) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah

- (4) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi
- b) Bidang Pelayanan Publik
  - (1) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
  - (2) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
  - (3) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kualitas kinerja
- c) Bidang Kelembagaan
  - (1) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan
  - (2) Pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab
  - (3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - (4) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi
  - (5) Optimalisasi UPTD

**(b) Dana Perimbangan**

- 1) Memperjuangkan redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya perolehan dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, DBHCHT dan Pajak Rokok
- 2) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

**b) Kebijakan Belanja Daerah**

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan, dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang menyentuh secara langsung seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif dan efisien, baik terhadap belanja pelayanan publik maupun belanja aparatur daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang efektif dan efisien, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2018, secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- 2) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  - Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
  - Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
  - Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2018 dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Belanja Tidak Langsung
  - (a) Belanja Pegawai
    - (1)) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
    - (2)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2018.
    - (3)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan *acress* maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
    - (4)) Penganggaran dana jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Sedangkan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- (5)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN.
- (6)) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (7)) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (8)) Tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018 pada dana transfer ke daerah, dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(b) Belanja Subsidi

Penganggaran Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari



APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- (d) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah  
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan
  - (1)) Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
  - (2)) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (3)) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- (f) Belanja Tidak Terduga  
Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD 2018 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat



bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang terukur, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(a) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah, maka penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

(3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

(4) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis

belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
  - (6) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- (c) Belanja Modal
- (1) Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 harus didasarkan pada *Money Follow Program Prioritas*, dan tidak lagi didasarkan pada *Money Follow Function*.
  - (2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

**c) Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, meliputi:

(1) Penerimaan Pembiayaan

(a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.

(b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

(a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

(b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- (c) Pemerintah daerah menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- (d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (e) Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusia. Sumber dananya didapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari Dana Bagi Hasil Migas. Kebijakan ini merupakan implementasi transformasi pembangunan **eksklusif** menjadi **inklusif**, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro, sekaligus mengantisipasi tidak terealisasinya target Penerimaan DBHM yang ditetapkan.
- (f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### a) Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.823.752.241.464,20 atau mencapai 143,96% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp3.350.746.300.371,78. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.799.551.816.210,77 atau 59,51% dari realisasi Tahun 2017 yang senilai Rp3.024.200.425.253,43.

#### (1) Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp425.167.970.431,02 atau 113,51% dari anggaran sebesar Rp374.561.070.778,81. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp23.020.168.294,41 atau 5,14% dibandingkan realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp448.188.138.725,43. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan pajak daerah	88.492.705.377,50	94.593.395.280,00	106,89	87.889.266.165,20
2	Pendapatan retribusi daerah	20.472.371.477,25	19.844.707.742,00	96,93	54.288.552.381,63
3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.222.868.490,48	18.121.803.634,95	89,61	18.231.016.223,48
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	245.373.125.433,58	292.608.063.774,07	119,25	287.779.303.955,12
<b>JUMLAH</b>		<b>374.561.070.778,81</b>	<b>425.167.970.431,02</b>	<b>113,51</b>	<b>448.188.138.725,43</b>

**(2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.991.503.924.460,00 atau 138,37% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp2.884.637.627.555,97. Sementara itu, untuk Tahun 2017, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.576.012.286.528,00 sehingga Tahun 2018 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp1.415.491.637.932,00 atau 54,95%.

**(a) Transfer Pemerintah Pusat**

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.814.660.800.562,00 atau 174,63% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp2.184.403.156.669,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 102,06% atau senilai Rp1.926.760.490.904,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp1.887.900.309.658,00.

Pada Tahun 2018 Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut:

**Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	163.826.694.000,00	251.636.029.601,00	153,60	153.491.992.086,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	943.277.341.200,00	2.281.171.868.831,00	241,83	623.083.786.839,00
3	Dana Alokasi Umum	932.445.113.000,00	932.357.598.649,00	99,99	932.445.113.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	76.878.227.469,00	69.725.202.232,00	90,70	66.568.924.202,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	67.975.781.000,00	279.770.101.249,00	411,57	47.237.403.531,00
6	Dana Alokasi Khusus Tambahan	0,00	0,00	0,00	65.073.090.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.184.403.156.669,00</b>	<b>3.814.660.800.562,00</b>	<b>174,63</b>	<b>1.887.900.309.658,00</b>

**(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

Transfer pemerintah pusat-lainnya Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp17.250.000.000,00 atau 3,08% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp560.295.869.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2017 yang senilai Rp524.895.096.537,00 mengalami penurunan sebesar Rp507.645.096.537,00 atau 96,71%. Realisasi ini merupakan Dana Insentif Daerah, sedangkan Dana Otonomi Khusus, realisasinya dialihkan ke Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Dana Desa dan DAK Non Fisik untuk Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah dan Tunjangan Khusus Guru.

**(c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2018 sebesar Rp147.434.223.898,00 atau mencapai 115,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.779.701.886,97 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.077.469.935,00 atau 2,69% dari realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp151.511.693.833,00. Penurunan realisasi Tahun 2018 tersebut disebabkan penurunan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Adapun rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

**Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.174.384.528,32	36.529.087.032,00	110,11	33.914.735.152,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.369.228.107,92	37.658.157.178,00	184,88	24.558.005.300,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.749.666.088,73	23.351.703.360,00	65,32	36.286.885.859,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	233.506.105,00	225.222.369,00	96,45	216.199.807,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	38.252.917.057,00	49.670.053.959,00	129,85	56.535.867.715,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>127.779.701.886,97</b>	<b>147.434.223.898,00</b>	<b>115,38</b>	<b>151.511.693.833,00</b>

**(d) Bantuan Keuangan**

Secara umum, Bantuan Keuangan terealisasi Rp12.158.900.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp12.158.900.000,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp453.713.500,00 atau sebesar 3,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp11.705.186.500,00.

**Tabel 4. Bantuan Keuangan**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bantuan Keuangan	12.158.900.000,00	12.158.900.000,00	100,00	11.705.186.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.158.900.000,00</b>	<b>12.158.900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.705.186.500,00</b>

**(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada tahun 2018 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp407.080.346.573,18 atau 444,67% dari anggaran sebesar Rp91.547.602.037,00. Realisasi ini merupakan Pendapatan Hibah Dana



BOS dan Pendapatan Lainnya yang merupakan pendapatan Hibah Dana Desa. Sedangkan pada Tahun 2017 Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat pada Lain-Lain PAD yang Sah. Pada tahun 2017 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00.

**Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	91.547.602.037,00	90.715.879.573,18	99,09	0,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	316.364.467.000,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>91.547.602.037,00</b>	<b>407.080.346.573,18</b>	<b>444,67</b>	<b>0,00</b>

**b) Belanja Daerah**

Secara akumulatif anggaran belanja Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp2.422.493.445.368,82 atau 82,71% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.928.850.210.359,72. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp195.016.149.850,82 atau 8,76% dari realisasi Tahun 2017 yang senilai Rp2.227.477.295.518,00. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

**(1) Belanja Operasi**

Belanja operasi Tahun 2018 terealisasi Rp1.821.101.063.687,90 atau 84,52% yaitu dari anggaran Rp2.154.671.906.092,88. Realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp172.608.392.271,70 atau 10,47% dari realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp1.648.492.671.416,20. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

**Tabel 6. Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.183.095.252.533,19	1.017.533.334.032,98	86,01	995.662.927.381,00
2	Belanja Barang dan Jasa	811.557.363.766,69	671.762.552.372,57	82,77	574.061.177.467,20
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	75.600.000,00	33,90	156.800.000,00
4	Belanja Hibah	154.002.289.793,00	127.732.077.282,35	82,94	76.903.266.568,00
5	Belanja Bantuan Sosial	5.794.000.000,00	3.997.500.000,00	68,99	1.708.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.154.671.906.092,88</b>	<b>1.821.101.063.687,90</b>	<b>84,52</b>	<b>1.648.492.671.416,20</b>

**(2) Belanja Modal**

Belanja modal selama Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp601.338.047.080,92 atau 78,00% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp770.978.304.266,84. Jumlah realisasi Tahun 2018 ini mengalami kenaikan 4,86% atau senilai Rp27.881.377.927,12 dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp573.456.669.153,80. Tidak terealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:



**Tabel 7. Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	11.096.981.196,00	725.423.250,00	6,54	21.317.897.550,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.066.586.421,66	142.873.891.529,80	90,39	86.729.210.037,80
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.549.123.860,83	153.161.358.323,09	71,06	148.631.056.352,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	365.181.592.572,07	286.469.922.122,91	78,45	290.463.504.465,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.046.740.216,28	17.368.341.855,12	86,64	26.284.800.749,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.037.280.000,00	739.110.000,00	71,25	30.200.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>770.978.304.266,84</b>	<b>601.338.047.080,92</b>	<b>78,00</b>	<b>573.456.669.153,80</b>

**(3) Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga Tahun 2018 terealisasi Rp54.334.600,00 mencapai 1,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000,00 sedangkan Tahun 2017 belanja tak terduga terealisasi Rp5.527.954.948,00.

**c) Transfer**

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2018 Rp699.681.089.403,00 terealisasi sebesar Rp662.932.025.381,00 atau 94,75%. Belanja transfer mengalami kenaikan senilai Rp62.504.609.896,57 atau 10,41% dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp600.427.415.484,43.

**d) Pembiayaan**

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2018 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp279.075.352.965,77 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

**(1) Penerimaan Pembiayaan**

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp277.784.999.390,94 terealisasi sebesar Rp279.075.352.965,77 atau 100,46%. Realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan senilai Rp197.586.067.825,83 atau 242,47% dibanding realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp81.489.285.139,94. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

**Tabel 8. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	277.784.999.390,94	277.817.959.190,94	100,01	79.051.687.855,78
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	1.257.393.774,83	0,00	2.437.597.284,16
<b>JUMLAH</b>		<b>277.784.999.390,94</b>	<b>279.075.352.965,77</b>	<b>100,46</b>	<b>81.489.285.139,94</b>

**(2) Pengeluaran Pembiayaan**

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sama dengan realisasi Tahun 2017 yang sebesar Rp0,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

**Tabel 9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2) Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi dan Organisasi**

**a) Belanja Menurut Fungsi**

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Realisasi Belanja menurut fungsi pada TA 2018 dan 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 10. Realisasi Belanja Menurut Fungsi**

No	Fungsi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pelayanan umum	1.181.630.677.226,20	1.036.958.007.067,25	87,76	908.733.545.154,63
2	Ketertiban dan Keamanan	44.696.349.649,00	35.059.704.486,00	78,44	30.070.687.552,00
3	Ekonomi	103.633.309.088,00	86.051.544.476,58	83,03	84.321.301.632,00
4	Lingkungan Hidup	52.177.417.466,50	35.817.330.800,00	68,65	48.274.565.408,00
5	Perumahan dan Fasilitasi umum	572.068.339.730,50	441.183.418.070,54	77,12	390.175.280.170,00
6	Kesehatan	716.574.935.719,14	610.116.411.552,42	85,14	515.960.395.992,80
7	Pariwisata dan Budaya	22.348.389.133,43	19.672.096.043,47	88,02	14.427.230.699,00
8	Pendidikan	908.557.700.639,95	797.751.648.941,56	87,80	810.227.142.183,00
9	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	26.844.181.110,00	22.815.309.312,00	84,99	25.714.562.211,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.628.531.299.762,72</b>	<b>3.085.425.470.749,82</b>	<b>85,03</b>	<b>2.827.904.711.002,43</b>

**b) Belanja Menurut Organisasi**

Realisasi Belanja menurut Organisasi pada TA 2018 dan 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 11. Realisasi Belanja Menurut Organisasi**

Kode	OPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.01.01	Dinas Pendidikan	857.289.077.833,95	760.718.381.988,63	88,74	765.898.373.607,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	313.001.210.470,99	250.035.222.129,15	79,88	211.536.678.930,80
1.02.02	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	229.714.624.480,15	210.250.171.037,00	91,53	193.192.607.949,00
1.02.03	RSUD Kelas D Sumberrejo	47.563.704.595,00	44.292.040.548,00	93,12	33.970.708.436,00
1.02.04	RSUD Kelas D Padangan	56.399.008.822,00	50.059.205.836,00	88,76	34.500.392.577,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	317.846.577.466,00	256.157.149.844,76	80,59	249.543.693.292,00
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	24.888.083.950,00	22.813.668.108,15	91,67	24.063.795.323,00

Kode	OPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	356.726.946.530,00	257.567.787.502,83	72,20	211.623.404.221,00
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.900.104.922,00	4.468.922.611,00	75,74	4.617.626.951,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	14.224.907.775,00	11.710.216.343,00	82,32	8.351.911.954,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.299.281.308,00	5.713.743.465,00	61,44	13.074.988.876,00
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	13.752.536.644,00	11.159.752.367,00	81,15	7.001.949.282,00
1.06.01	Dinas Sosial	7.015.712.533,00	6.138.178.604,00	87,49	4.535.743.864,00
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16.214.422.043,00	14.829.868.837,00	91,46	16.551.211.377,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.438.800.459,00	3.475.887.498,00	78,31	2.706.929.756,00
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	23.952.669.510,00	22.565.252.510,00	94,21	17.126.317.752,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.025.229.659,00	7.078.125.851,00	78,43	5.322.725.760,00
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.183.630.131,00	6.288.481.468,00	76,84	5.966.376.268,00
2.09.01	Dinas Perhubungan	16.833.865.660,00	15.703.818.255,00	93,29	13.210.084.187,00
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.617.266.738,00	8.843.671.057,00	91,96	8.577.035.246,00
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.257.827.165,00	3.634.703.960,00	85,37	2.966.337.381,00
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.472.387.807,00	3.854.693.029,00	86,19	2.845.538.010,00
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.119.840.783,00	6.980.795.628,00	85,97	5.242.973.672,00
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.287.989.133,43	19.612.096.043,47	87,99	14.323.790.699,00
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.025.607.285,00	3.398.588.128,00	84,42	2.848.335.570,00
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	13.755.303.172,00	12.562.150.956,00	91,33	10.232.468.762,00
3.03.01	Dinas Pertanian	35.216.726.531,00	28.144.716.071,58	79,92	19.897.072.881,00
3.06.01	Dinas Perdagangan	12.406.069.788,00	8.892.849.833,00	71,68	13.246.609.329,00
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.842.934.134,00	8.223.541.601,00	83,55	6.654.096.219,00
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	11.231.692.962,00
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	789.492.513,00	570.845.800,00	72,31	759.573.240,00
4.01.03	Sekretariat Daerah	82.646.518.061,00	59.980.410.861,90	72,57	90.395.144.340,20
4.01.04	Sekretariat DPRD	66.534.872.812,00	50.342.858.602,00	75,66	24.180.139.775,00
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	10.758.960.099,00	9.709.031.218,00	90,24	8.855.661.022,00
4.01.06	Kecamatan Kapas	3.162.369.738,00	2.709.031.335,00	85,66	2.502.911.799,00
4.01.07	Kecamatan Balen	3.265.633.084,00	2.824.487.047,00	86,49	2.606.321.415,00
4.01.08	Kecamatan Sumberrejo	3.355.355.482,00	2.929.445.681,00	87,31	2.737.260.945,00
4.01.09	Kecamatan Kanor	3.016.787.848,00	2.267.661.470,00	75,17	2.337.101.201,00

Kode	OPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
4.01.10	Kecamatan Baureno	3.208.952.530,00	2.711.137.133,00	84,49	2.497.026.845,00
4.01.11	Kecamatan Sugihwaras	2.667.463.699,00	2.229.179.245,00	83,57	2.022.473.314,00
4.01.12	Kecamatan Kepohbaru	2.947.332.184,00	2.446.462.752,00	83,01	2.428.714.339,00
4.01.13	Kecamatan Kedungadem	3.285.467.717,00	2.777.095.794,00	84,53	2.633.858.743,00
4.01.14	Kecamatan Sukosewu	2.621.398.905,00	2.164.986.718,00	82,59	2.143.675.518,00
4.01.15	Kecamatan Trucuk	2.486.258.614,00	2.088.494.359,00	84,00	1.963.207.626,00
4.01.16	Kecamatan Malo	2.543.713.688,00	2.160.102.879,00	84,92	2.022.274.804,00
4.01.17	Kecamatan Kalitidu	2.571.338.123,00	2.151.215.371,00	83,66	2.084.647.046,00
4.01.18	Kecamatan Dander	2.750.121.875,00	2.231.687.785,00	81,15	2.113.793.500,00
4.01.19	Kecamatan Padangan	2.560.410.827,00	2.100.948.763,00	82,06	1.974.053.876,00
4.01.20	Kecamatan Purwosari	2.598.003.393,00	2.223.661.986,00	85,59	2.032.816.337,00
4.01.21	Kecamatan Kasiman	2.500.951.437,00	2.046.412.579,00	81,83	1.939.935.460,00
4.01.22	Kecamatan Kedewan	2.102.383.553,00	1.680.407.009,00	79,93	1.530.448.278,00
4.01.23	Kecamatan Ngasem	2.528.471.933,00	2.123.552.708,00	83,99	1.981.748.847,00
4.01.24	Kecamatan Ngambon	2.154.116.908,00	1.674.463.117,00	77,73	1.542.765.171,00
4.01.25	Kecamatan Tambakrejo	2.541.791.004,00	2.029.223.137,00	79,83	1.875.272.681,00
4.01.26	Kecamatan Ngraho	2.583.186.048,00	2.179.756.246,00	84,38	1.941.657.448,00
4.01.27	Kecamatan Margomulyo	2.686.224.392,00	1.668.369.219,00	62,11	1.706.321.718,00
4.01.28	Kecamatan Temayang	2.427.895.697,00	1.962.576.192,00	80,83	1.904.310.837,00
4.01.29	Kecamatan Bubulan	1.895.123.694,00	1.477.918.710,00	77,99	1.512.672.700,00
4.01.30	Kecamatan Gondang	2.222.763.305,00	1.772.451.584,00	79,74	1.521.012.212,00
4.01.31	Kecamatan Sekar	2.132.797.884,00	1.702.462.314,00	79,82	1.665.520.482,00
4.01.32	Kecamatan Gayam	2.441.068.187,00	1.985.043.665,00	81,32	1.897.812.799,00
4.02.01	Inspektorat	8.497.498.744,00	6.280.497.593,00	73,91	6.527.652.403,00
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.744.087.668,00	8.477.305.950,00	87,00	6.562.703.945,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - OPD	26.735.803.054,00	12.070.999.388,00	45,15	10.259.560.710,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPKD	862.900.379.196,00	794.791.537.263,35	92,11	684.723.937.000,43
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	20.078.034.389,20	11.529.969.465,00	57,43	11.645.427.966,00
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.315.924.149,00	8.180.098.700,00	66,42	8.013.823.566,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.628.531.299.762,72</b>	<b>3.085.425.470.749,82</b>	<b>85,03</b>	<b>2.827.904.711.002,43</b>

### 3) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya efisiensi anggaran, gagal lelang, perubahan-APBD Tahun 2018 baru disahkan akhir bulan Oktober, menyebabkan ada beberapa paket pekerjaan yang jangka waktu pelaksanaannya pada akhir bulan Desember 2018, sehingga waktu pencairan menumpuk di akhir bulan Desember 2018, terjadinya gagal bayar karena sistem perbankan telah tutup (closing date) pada akhir Tahun 2018, paket pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun karena ketersediaan material pabrikan untuk pembangunan tidak

sesuai jadwal dan faktor cuaca sehingga pekerjaan terhenti karena hujan dan longsor galian tanah.

#### D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

##### 1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Tabel 12. Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi**

Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.01.06	Kecamatan Kapas
1.02.01	Dinas Kesehatan	4.01.07	Kecamatan Balen
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.01.08	Kecamatan Sumberrejo
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.01.09	Kecamatan Kanor
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.01.10	Kecamatan Baureno
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.01.11	Kecamatan Sugihwaras
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.12	Kecamatan Kepohbaru
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.13	Kecamatan Kedungadem
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	4.01.14	Kecamatan Sukosewu
1.06.01	Dinas Sosial	4.01.15	Kecamatan Trucuk
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.01.16	Kecamatan Malo
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.01.17	Kecamatan Kalitidu
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.01.18	Kecamatan Dander
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.01.19	Kecamatan Padangan
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.01.20	Kecamatan Purwosari
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.01.21	Kecamatan Kasiman
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.01.22	Kecamatan Kedewan
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.01.23	Kecamatan Ngasem
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.01.24	Kecamatan Ngambon
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.01.25	Kecamatan Tambakrejo
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.01.26	Kecamatan Ngraho
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.01.27	Kecamatan Margomulyo
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.01.28	Kecamatan Temayang
3.03.01	Dinas Pertanian	4.01.29	Kecamatan Bubulan
3.06.01	Dinas Perdagangan	4.01.30	Kecamatan Gondang
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.01.31	Kecamatan Sekar
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.01.32	Kecamatan Gayam

Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.02.01	Inspektorat
4.01.03	Sekretariat Daerah	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.04	Sekretariat DPRD	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

Pada tahun 2018, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/225/KEP/412.013/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada RSUD Kelas D Padangan dan Nomor: 188/226/KEP/412.013/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada RSUD Kelas D Sumberrejo.

**Tabel 13. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi**

Kode SKPD	Nama BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT.Asri Dharma Sejahtera, PT.Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT. Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## 2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
2. Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan –LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.



### 3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

#### a) Kebijakan Umum

- (1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- (3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
- (4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
- (7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- (8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
- (9) Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- (11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- (12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
- (13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
- (14) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04)



- (15) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (16) Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- (17) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04).
- (18) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- (19) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
- (20) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- (21) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (22) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- (23) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

**b) Pendapatan LRA**

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (7) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;

- (9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**c) Belanja**

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
- (3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

**d) Transfer**

- (1) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- (3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**e) Pembiayaan**

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
- (5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- (7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

**f) Pendapatan LO**

- (1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- (2) Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- (3) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- (4) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
  - (a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
  - (b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- (5) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

- (7) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**g) Beban**

- (1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- (2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- (3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
- (4) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- (5) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
- (6) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
- (7) Beban diakui pada:
  - (a) Saat timbulnya kewajiban;
  - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- (8) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- (9) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- (10) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu;
- (11) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- (12) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;

- (13) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- (14) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
- (15) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

#### **h) Aset**

- (1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- (3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
- (5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- (6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- (10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- (11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak

- untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
- (12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
  - (13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
  - (14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
  - (15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - (16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
  - (17) Persediaan disajikan sebesar :
    - (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
  - (18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
    - (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait;
    - (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
    - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat.
  - (19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
  - (20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
  - (21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
  - (22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- (23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
- (24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
- (25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
- (26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
  - (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
  - (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;
  - (c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan;
  - (d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
  - (e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
  - (f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
  - (g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
  - (h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
  - (i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
  - (j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
  - (k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
  - (l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
- (29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;

- (30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- (31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
- (32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
- (33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- (34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- (35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- (36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- (37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
- (38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
- (39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- (40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
- (43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
- (45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;

- (46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
- (49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- (50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- (51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- (54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- (55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- (56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- (57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- (58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
- (59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
- (60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;

- (61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- (62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

**i) Dana Cadangan**

- (1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
- (2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

**j) Kewajiban**

- (1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
- (5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
- (8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
- (9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasikan;
- (10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- (11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;

- (12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- (13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- (14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
- (15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
- (16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**k) Ekuitas**

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
- (2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
- (3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

**l) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

**m) Koreksi Kesalahan**

- (1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;

- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- (5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

#### **4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

##### **b) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, dan Laporan Perubahan SAL sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

### **E. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### **7.E.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **7.E.1.a Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp4.823.752.241.464,20 atau 143,96% dengan rincian sebagai berikut:



### 7.E.1.a.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp425.167.970.431,02 atau 113,51% dari anggaran sebesar Rp374.561.070.778,81 yang terdiri dari:

**Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pajak Daerah	88.492.705.377,50	94.593.395.280,00	106,89	87.889.266.165,20
2	Retribusi Daerah	20.472.371.477,25	19.844.707.742,00	96,93	54.288.552.381,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.222.868.490,48	18.121.803.634,95	89,61	18.231.016.223,48
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	245.373.125.433,58	292.608.063.774,07	119,25	287.779.303.955,12
<b>JUMLAH</b>		<b>374.561.070.778,81</b>	<b>425.167.970.431,02</b>	<b>113,51</b>	<b>448.188.138.725,43</b>

Jumlah tersebut terdiri dari :

- (a) Pajak Daerah sebesar Rp94.593.395.280,00 atau sebesar 106,89% dari anggaran sebesar Rp88.492.705.377,50 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 15. Pajak Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.730.216.104,00	3.757.429.920,00	137,62	2.042.159.274,00
2	Pajak Restoran	5.530.526.575,35	6.838.188.415,00	123,64	5.929.505.221,00
3	Pajak Hiburan	619.337.494,65	584.855.553,00	94,43	434.909.661,00
4	Pajak Reklame	2.365.021.099,00	2.388.224.502,00	100,98	2.235.093.229,00
5	Pajak Penerangan Jalan	36.500.583.288,00	38.503.010.257,00	105,49	34.467.987.935,00
6	Pajak Parkir	320.782.874,00	362.530.622,00	113,01	374.961.522,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	529.679.303,00	683.861.425,00	129,11	442.733.141,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	35.280.000,00	25.142.000,00	71,26	23.375.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.760.156.968,50	1.425.641.969,00	81,00	1.910.490.283,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.917.750.000,00	26.524.842.102,00	102,34	25.404.172.007,20
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.183.371.671,00	13.499.668.515,00	110,80	14.623.878.892,00
<b>JUMLAH</b>		<b>88.492.705.377,50</b>	<b>94.593.395.280,00</b>	<b>106,89</b>	<b>87.889.266.165,20</b>

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 40,70% atau sebesar Rp38.503.010.257,00 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

Tidak tercapainya target Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Hiburan tidak tercapai pada saat perencanaan penerimaan, seluruh bagian bulan diperkirakan akan menerima penyeteroran

pajak hiburan secara flat atau bahkan mungkin lebih, namun didalam perjalanannya terdapat bagian bulan yang tidak sesuai dengan estimasi yaitu pada saat bulan Ramadhan dan bulan setelah libur hari besar. Hal ini terjadi karena dimungkinkan titik jenuh masyarakat didalam menikmati hiburan atau daya beli masyarakat menurun setelah Libur Hari Raya Idul Fitri dan libur panjang anak sekolah.

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak tercapai dikarenakan tertundanya pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan di proyek Jambaran Tiyung Biru (JTB) yang kami perkirakan akan dibayarkan pada tahun 2018, namun setelah kami konfirmasi ke PT. ReKayasa Industri melalui PT YIN, bahwa pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada proyek tersebut akan dibayarkan pada akhir kegiatan setelah keseluruhan verifikasi jumlah, jenis dan kubikasi bahan galian terperinci dan tervalidasi.
3. Pajak Sarang Burung semenjak 3 tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan :
  - Jumlah produksi yang semakin menurun karena populasi sarang burung walet semakin sedikit di Bojonegoro.
  - Isu internasional bahwa adanya sarang burung sintetis yang mengakibatkan turunnya harga pasar sarang burung walet dari Indonesia.

(b) Retribusi Daerah sebesar Rp19.844.707.742,00 atau 96,93% dari anggaran sebesar Rp20.472.371.477,25 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16. Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	16.846.206.699,11	15.554.179.119,00	92,33	50.761.301.203,63
2	Retribusi Jasa Usaha	2.766.253.213,14	3.567.884.353,00	128,98	2.001.325.570,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	859.911.565,00	722.644.270,00	84,04	1.525.925.608,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.472.371.477,25</b>	<b>19.844.707.742,00</b>	<b>96,93</b>	<b>54.288.552.381,63</b>

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 78,38% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp15.554.179.119,00. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum  
Retribusi jasa umum pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp15.554.179.119,00 atau sebesar 92,33% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Rincian Retribusi Jasa Umum**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	6.929.412.000,00	4.876.119.400,00	70,37	40.650.258.316,00
2	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	109.125.712,50	273.705.500,00	250,82	229.995.000,00
3	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.600.000.000,00	8.007.792.000,00	105,37	7.511.091.000,00
4	Ret. Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	89.840.000,00
5	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	1.322.000.000,00	1.396.920.000,00	105,67	1.307.560.000,00
6	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	840.668.986,61	852.967.719,00	101,46	860.083.387,63
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	146.674.500,00	325,94	112.473.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.846.206.699,11</b>	<b>15.554.179.119,00</b>	<b>92,33</b>	<b>50.761.301.203,63</b>

Retribusi jasa umum yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2018 adalah retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena Klaim JKN Non Kapitasi bulan Juni s/d Desember 2018 yang belum terbayar oleh BPJS.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.567.884.353,00 atau sebesar 128,98% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Rincian Retribusi Jasa Usaha**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	1.481.558.213,14	2.196.419.395,00	148,25	580.717.570,00
2	Ret. Pasar/Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemda	10.500.000,00	54.161.958,00	515,83	14.500.000,00
3	Ret.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	110.250.000,00	91.300.000,00	82,81	129.800.000,00
4	Ret.Rumah Potong Hewan	109.145.000,00	124.975.000,00	114,50	120.050.000,00
5	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.054.800.000,00	1.101.028.000,00	104,38	1.156.258.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.766.253.213,14</b>	<b>3.567.884.353,00</b>	<b>128,98</b>	<b>2.001.325.570,00</b>

Retribusi Jasa Usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2018 adalah retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa. Hal ini disebabkan karena adanya revitalisasi pesanggrahan Dander pada bulan Agustus s/d Desember 2018

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp722.644.270,00 atau sebesar 84,04% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 19. Rincian Perizinan Tertentu**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	836.525.565,00	701.858.270,00	83,90	606.722.600,00
2	Ret. Izin Gangguan/Keamanan	0,00	0,00	0,00	911.803.008,00
3	Ret. Izin Trayek	7.000.000,00	4.400.000,00	62,86	7.400.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	16.386.000,00	16.386.000,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>859.911.565,00</b>	<b>722.644.270,00</b>	<b>84.04</b>	<b>1.525.925.608,00</b>

Pendapatan dari retribusi perizinan tertentu yang tidak terealisasi secara optimal diantaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Izin Trayek. Retribusi IMB hanya terealisasi sebesar Rp701.858.270,00 atau 83,90% dari anggaran yang telah ditetapkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengurus ijin untuk melegallitaskan bangunan yang dimiliki. Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp4.400.000,00 atau 62,86% dari anggaran yang telah ditetapkan karena sesuai PP no 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pada pasal 79 ayat 1 bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendasarkan hal tersebut untuk saat ini pengusaha angkutan umum masih menunggu proses pengurusan kepemilikan angkutan dari perorangan menjadi Badan Hukum sesuai dengan PP yang dimaksud. Sedangkan untuk Retribusi Izin Gangguan/Keamanan, pada Tahun 2018 tidak dianggarkan dan dipungut karena tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan yang dapat menghambat iklim investasi di daerah sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp18.121.803.634,95 atau sebesar 89,61% dari anggaran sebesar Rp20.222.868.490,48 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

**Tabel 20. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	13.154.595.900,48	13.242.728.671,20	100,67	13.104.595.900,48
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	3.334.087.831,00	3.334.087.831,00	100,00	4.531.610.922,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	741.959.586,00	740.628.858,75	99,82	0,00
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	2.102.929.900,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	120.562.273,00	120.562.274,00	100,00	0,00
7	Pendapatan BPR Jatim	768.733.000,00	683.796.000,00	88,95	574.849.000,00
8	Pendapatan Griya Dharma Kusuma	0,00	0,00	0,00	19.960.401,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.222.868.490,48</b>	<b>18.121.803.634,95</b>	<b>89,61</b>	<b>18.231.016.223,48</b>

Pada saat ini PD Apotik Sidowaras dalam proses pembekuan operasional kegiatan apotik sesuai SK nomor 188/232/KEP/412.11/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada RSUD Kelas B Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo.

Pada tahun 2018 PD Pasar dalam proses pengalihkelolaan kepada Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya mulai tanggal 1 Januari 2019 secara penuh pengelolaan pasar daerah berada dibawah tupoksi Dinas Perdagangan serta ex karyawan PD Pasar akan dipekerjakan di Dinas Perdagangan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) yang diikat dalam perjanjian kontrak.

Pada Tahun 2018 pendapatan dari Griya Dharma Kusuma tidak dianggarkan karena berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2017, PT. Griya Dharma Kusuma masih mengalami kerugian sehingga Tahun 2018 tidak dapat menyetorkan pendapatan.

Bagian laba PT. Asri Dharma Sejahtera tidak lagi dicatat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetapi dialihkan ke Lain-lain PAD yang Sah karena bagian laba PT ADS yang diterima oleh Pemkab Bojonegoro bukan deviden melainkan komitmen fee sebesar US\$50.000,00 per tahun.

- (d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp292.608.063.774,07 atau sebesar 119,25% dari anggaran sebesar Rp245.373.125.433,58 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 21. Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan	342.333.125,00	293.038.000,00	85,60	111.595.876,00
2	Pendapatan Jasa Giro	2.046.678.334,49	11.500.112.519,46	561,89	6.374.463.508,77
3	Pendapatan Bunga	1.893.650.000,00	9.444.163.082,75	498,73	1.120.082.788,64
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.380.536.939,75	5.610.571.902,78	235,69	2.115.832.320,49
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	5.537.571.565,22	0,00	1.732.353.416,01
6	Pendapatan dari Pengembalian	1.592.875.000,00	2.324.675.576,83	145,94	329.110.410,00
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	1.325.784,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	130.066.200,00
10	Pendapatan dari BLUD	184.236.595.448,00	209.110.943.972,99	113,50	138.651.231.418,02
11	Pendapatan Lain-lain	7.272.808.616,34	2.446.975.443,04	33,65	142.130.254,54
12	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	160.989.111,00	0,00	32.059.328,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.607.647.970,00	46.179.022.600,00	101,25	44.852.656.096,00
14	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	93.918.749.970,66
<b>JUMLAH</b>		<b>245.373.125.433,58</b>	<b>292.608.063.774,07</b>	<b>119,25</b>	<b>287.779.303.955,12</b>

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 71,46% dihasilkan dari pendapatan BLUD Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan yaitu sebesar Rp209.110.943.972,99 dengan rincian sebagai berikut:

(a)	Pendapatan BLUD AKBID	Rp	755.509.118,61
(b)	Pendapatan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Rp	167.087.037.731,11
(c)	Pendapatan BLUD RSUD Sumberrejo	Rp	21.134.426.328,49
(d)	Pendapatan BLUD RSUD Padangan	Rp	20.133.970.794,78
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>209.110.943.972,99</b>

Dari pendapatan BLUD senilai Rp209.110.943.972,99 tersebut, Rp2.849.575.636,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

Pada tahun 2018, Pendapatan Dana BOS dimasukkan ke dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbeda dengan tahun 2017 yang mencatat Pendapatan Dana BOS dalam pos Lain-lain PAD yang sah.

#### 7.E.1.a.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp3.991.503.924.460,00 atau sebesar 138,37% dari anggaran sebesar Rp2.884.637.627.555,97 yang terdiri dari:

**Tabel 22. Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.184.403.156.669,00	3.814.660.800.562,00	174,63	1.887.900.309.658,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	560.295.869.000,00	17.250.000.000,00	3,08	524.895.096.537,00
3	Transfer Pemerintah Daerah	127.779.701.886,97	147.434.223.898,00	115,38	151.511.693.833,00
4	Bantuan Keuangan	12.158.900.000,00	12.158.900.000,00	100,00	11.705.186.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.884.637.627.555,97</b>	<b>3.991.503.924.460,00</b>	<b>138,37</b>	<b>2.576.012.286.528,00</b>



- (a) Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.814.660.800.562,00 atau sebesar 174,63% dari anggaran sebesar Rp2.184.403.156.669,00. Pendapatan Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

**Tabel 23. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>163.826.694.000,00</b>	<b>251.636.029.601,00</b>	<b>153,60</b>	<b>153.491.992.086,00</b>
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	105.451.742.200,00	153.345.543.645,00	145,42	97.293.396.177,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	0,00	42.890.426.800,00	0,00	0,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	24.267.497.800,00	20.582.163.156,00	84,81	21.627.784.483,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	34.107.454.000,00	34.817.896.000,00	102,08	34.570.811.426,00
<b>2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)</b>	<b>943.277.341.200,00</b>	<b>2.281.171.868.831,00</b>	<b>241,83</b>	<b>623.083.786.839,00</b>
	- Provisi Sumber Daya Hutan	361.443.600,00	712.842.147,00	197,22	389.766.467,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	565.816.200,00	701.234.591,00	123,93	447.937.200,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	910.490.981.400,00	2.244.185.894.997,00	246,48	595.026.643.107,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	1.463.343.000,00	4.352.245.562,00	297,42	3.760.576.101,00
	- Pertambangan Panas Bumi	21.255.500,00	31.203.994,00	146,80	18.057.860,00
	- Pertambangan Umum	501.200,00	814.447.240,00	162,49 9,45	58.865.576,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	30.374.000.300,00	30.374.000.300,00	100,00	23.381.940.528,00
<b>3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>932.445.113.000,00</b>	<b>932.357.598.649,00</b>	<b>99,99</b>	<b>932.445.113.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>76.878.227.469,00</b>	<b>69.725.202.232,00</b>	<b>90,70</b>	<b>66.568.924.202,00</b>
	- Bidang Pendidikan	6.914.699.000,00	6.514.042.100,00	94,21	21.764.205.702,00
	- Bidang Kesehatan	32.501.988.000,00	28.163.563.464,00	86,65	15.401.373.000,00
	- Bidang Lingkungan Hidup	763.839.837,00	763.839.837,00	100,00	0,00
	- Bidang Infrastruktur Jalan	17.686.095.000,00	17.686.095.000,00	100,00	18.025.577.500,00
	- Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.421.007.000,00	2.394.704.900,00	70,00	0,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	598.711.000,00	598.711.000,00	100,00	0,00
	- Bidang Perdagangan	2.747.137.226,00	2.747.137.226,00	100,00	817.500.000,00
	- Bidang Air Minum dan Sanitasi	10.895.603.000,00	9.507.961.300,00	87,26	6.611.570.000,00
	- Bidang Pariwisata	1.349.147.406,00	1.349.147.405,00	100,00	0,00
	- Bidang Kedaulatan Pangan	0,00	0,00	0,00	3.948.698.000,00
<b>5</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>67.975.781.000,00</b>	<b>279.770.101.249,00</b>	<b>411,57</b>	<b>47.237.403.531,00</b>
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	32.904.000.000,00	32.884.257.543,00	99,94	28.503.690.500,00
	- Tunjangan Profesi Guru	0,00	216.692.071.378,00	0,00	0,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	0,00	573.300.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	- Bantuan Operasional Kesehatan	20.107.404.000,00	19.921.482.732,00	99,08	11.292.366.485,00
	- Akreditasi Rumah Sakit	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Akreditasi Puskesmas	1.856.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Jaminan Persalinan	2.348.823.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Operasional KB	8.072.040.000,00	7.816.898.900,00	96,84	5.532.697.546,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.087.514.000,00	1.651.721.696,00	79,12	1.908.649.000,00
	- Tunjangan Khusus Guru	0,00	230.369.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Tambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.073.090.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.184.403.156.669,00</b>	<b>3.814.660.800.562,00</b>	<b>174,63</b>	<b>1.887.900.309.658,00</b>

Realisasi DBH Pajak dan dan bukan Pajak (SDA) yang masing-masing sebesar 153,60% dan 241,83% dari target disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- (1) Asumsi awal penetapan target penerimaan DBH PAPBD 2018 sebesar 70 % dari prognosa APBN 2018 adalah karena tidak adanya perubahan APBN 2018 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa penyaluran DBH pada tahun berjalan, besaran maksimal penyaluran s/d Triwulan III adalah 70% dari pagu prognosa APBN, selain itu juga memperhitungkan kemungkinan pemotongan penyaluran karena adanya Lebih Bayar DBH s/d tahun 2017 sebesar 699,7 Milyar.
- (2) Naiknya harga minyak (ICP) dan kurs dollar secara otomatis PNBPN Migas naik drastis, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI mengambil kebijakan DBH Triwulan IV 2018 disalurkan secara utuh ditambah dengan tambahan DBH Triwulan IV atas perubahan alokasi DBH sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH dan Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut belum pernah terjadi selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 bahwa transfer DBH Triwulan IV ditiadakan sedangkan pada penyaluran Triwulan I s/d III dipotong untuk pengembalian lebih bayar DBH.
- (3) Adanya transfer atas sebagian kurang Bayar DBH s/d Tahun 2017, yaitu DBH SDA sebesar Rp170.489.070.904,00.
- (4) Berdasarkan PMK Nomor 103 Tahun 2018, Kurang Bayar DBH Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp703.087.158.787,00, dengan adanya penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH Tahun 2017 pada bulan Desember maka Kurang Bayar DBH berkurang menjadi Rp532.598.087.883,00, namun demikian yang perlu menjadi catatan bahwa Lebih Bayar DBH s/d 2017 masih sebesar Rp699.778.271.638,00, untuk itu maka dalam proyeksi penerimaan DBH, Badan Pendapatan Daerah selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 guna menghindari potensi hutang belanja sebagaimana pernah terjadi tahun sebelumnya.

Dana BOP PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, dan Bantuan Operasional KB, pada tahun 2017 dicatat dalam pos pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya. Sedangkan pada tahun 2018 dimasukkan dalam pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena merupakan komponen dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Akreditasi Rumah Sakit, Akreditasi Puskesmas dan Jaminan Persalinan merupakan sub bidang dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Transfer dari pusat dijadikan satu dalam Bantuan Operasional Kesehatan dan tidak dirinci per sub bidang sehingga tidak ada realisasi untuk Dana Akreditasi Rumah Sakit, Akreditasi Puskesmas dan Jaminan Persalinan.

- (b) Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp17.250.000.000,00 atau sebesar 3,08% dari anggaran sebesar Rp560.295.869.000,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 24. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>1</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>543.045.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Dana Otonomi Khusus	316.364.467.000,00	0,00	0,00	332.980.300.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	225.877.733.000,00	0,00	0,00	181.423.506.537,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	573.300.000,00	0,00	0,00	2.637.000.000,00
	- Tunjangan Khusus Guru	230.369.000,00	0,00	0,00	354.290.000,00
<b>2</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>17.250.000.000,00</b>	<b>17.250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Dana Insentif Daerah	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>560.295.869.000,00</b>	<b>17.250.000.000,00</b>	<b>3,08</b>	<b>524.895.096.537,00</b>

Dana desa yang sebelumnya dicatat sebagai dana otonomi khusus, pada tahun ini dicatat pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai Pendapatan Hibah Dana Desa. Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru merupakan komponen dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik, maka pada tahun 2018 dicatat dalam pos pendapatan transfer pemerintah pusat, tidak seperti Tahun 2017 yang dicatat pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya.

- (c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp147.434.223.898,00 atau sebesar 115,38% dari anggaran sebesar Rp127.779.701.886,97 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 25. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33.174.384.528,32	36.529.087.032,00	110,11	33.914.735.152,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.369.228.107,92	37.658.157.178,00	184,88	24.558.005.300,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.749.666.088,73	23.351.703.360,00	65,32	36.286.885.859,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	233.506.105,00	225.222.369,00	96,45	216.199.807,00
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	38.252.917.057,00	49.670.053.959,00	129,85	56.535.867.715,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>127.779.701.886,97</b>	<b>147.434.223.898,00</b>	<b>115,38</b>	<b>151.511.693.833,00</b>

(d) Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp12.158.900.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sehingga mengalami kenaikan 3,88% atau Rp453.713.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp11.705.186.500,00. Bantuan Keuangan dari provinsi dipergunakan untuk:

**Tabel 26. Rincian Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Provinsi Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00	225.000.000,00	100
2	Bantuan Keuangan Provinsi Honor 197 Perawat	3.427.800.000,00	3.427.800.000,00	100
3	Bantuan Keuangan Provinsi Honor 6 Dokter	180.000.000,00	180.000.000,00	100
4	Bantuan Keuangan Hari Aksara Internasional	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS SMP	168.000.000,00	168.000.000,00	100
6	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	100
7	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS TK	180.000.000,00	180.000.000,00	100
8	Bantuan Keuangan Honor Guru Non PNS TK	391.200.000,00	391.200.000,00	100
9	Bantuan Keuangan BOP Madin	100.000.000,00	100.000.000,00	100
10	Bantuan Keuangan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.302.900.000,00	7.302.900.000,00	100
11	Setoran PEMB KEU Jalin Matra	100.000.000,00	100.000.000,00	100
12	Bantuan Keuangan HUT Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.158.900.000,00</b>	<b>12.158.900.000,00</b>	<b>100</b>

### 7.E.1.a.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp407.080.346.573,18 atau 444,67% dari anggaran senilai Rp91.547.602.037 merupakan pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 untuk seluruh SD Negeri dan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Pendapatan Bunga BOS serta Pendapatan Lainnya yang merupakan pendapatan Hibah Dana Desa. Sedangkan pada Tahun 2017 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah untuk hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut

**Tabel 27. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>			
1	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Margomulyo	1.645.600.031,00	1.626.080.000,00	98,81

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
2	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngraho	2.710.885.633,00	2.680.320.000,00	98,87
3	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Tambakrejo	3.392.700.090,00	3.341.120.000,00	98,48
4	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngambon	805.600.000,00	799.200.000,00	99,21
5	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Bubulan	856.600.000,00	851.360.000,00	99,39
6	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Temayang	1.805.901.000,00	1.783.520.000,00	98,76
7	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sugihwaras	2.283.603.200,00	2.257.120.000,00	98,84
8	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kedungadem	3.760.937.660,00	3.715.040.000,00	98,78
9	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kepohbaru	2.450.650.000,00	2.422.240.000,00	98,84
10	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Baureno	2.891.592.000,00	2.886.880.000,00	99,84
11	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kanor	2.259.400.000,00	2.267.840.000,00	100,37
12	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sumberrejo	2.685.345.000,00	2.643.360.000,00	98,44
13	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Balen	2.432.175.001,00	2.399.680.000,00	98,66
14	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sukosewu	1.492.640.969,00	1.468.160.000,00	98,36
15	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kapas	2.473.355.777,00	2.443.200.000,00	98,78
16	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Bojonegoro	4.633.766.000,00	4.608.640.000,00	99,46
17	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Trucuk	1.891.800.000,00	1.876.960.000,00	99,22
18	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Dander	4.094.467.561,00	4.047.200.000,00	98,85
19	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ngasem	2.335.518.076,00	2.304.960.000,00	98,69
20	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kalitidu	2.330.000.000,00	2.297.280.000,00	98,60
21	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Malo	1.728.022.918,00	1.711.360.000,00	99,04
22	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Purwosari	1.865.284.000,00	1.849.600.000,00	99,16
23	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Padangan	2.499.238.084,00	2.388.480.000,00	95,57
24	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kasiman	1.777.866.971,00	1.764.480.000,00	99,25
25	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Kedewan	990.397.650,00	996.160.000,00	100,58
26	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Gondang	1.462.200.000,00	1.454.080.000,00	99,44
27	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Sekar	1.835.545.579,00	1.841.920.000,00	100,35
28	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Gayam	1.709.970.946,00	1.681.120.000,00	98,31
29	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	28.446.537.891,00	28.025.000.000,00	98,52
30	Pendapatan Bunga BOS	0,00	283.519.573,18	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah Dana Bos</b>	<b>91.547.602.037,00</b>	<b>90.715.879.573,18</b>	<b>98,78</b>
<b>II</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>			

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana Desa	0,00	316.364.467.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>316.364.467.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>407.080.346.573,18</b>	<b>0,00</b>

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp3.991.503.924.460,00 atau mencapai 82,75% dari total pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai Rp407.080.346.573,18 atau sebesar 8,44%. Pada tahun 2018 Penerimaan BOS sudah dianggarkan dalam APBD sehingga sudah dicatat dalam LRA TA 2018.

#### 7.E.1.b Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Tahun 2018 adalah Rp2.422.493.445.368,82 atau sebesar 82,71% dari anggaran Rp2.928.850.210.359,72 dengan rincian sebagai berikut:

##### 7.E.1.b.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.821.101.063.687,90 atau sebesar 84,52% dari anggaran sebesar Rp2.154.671.906.092,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 28. Belanja Operasi**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.183.095.252.533,19	1.017.533.334.032,98	86,01	995.662.927.381,00
2	Belanja Barang dan Jasa	811.557.363.766,69	671.762.552.372,57	82,77	509.759.462.542,20
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	75.600.000,00	33,90	156.800.000,00
4	Belanja Hibah	154.002.289.793,00	127.732.077.282,35	82,94	134.724.942.393,00
5	Bantuan Sosial	5.794.000.000,00	3.997.500.000,00	68,99	8.188.539.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.154.671.906.092,88</b>	<b>1.821.101.063.687,90</b>	<b>84,52</b>	<b>1.648.492.671.416,20</b>

Jumlah tersebut terdiri dari :

##### 7.E.1.b.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.017.533.334.032,98 atau sebesar 86,01% dari anggaran sebesar Rp1.183.095.252.533,19 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 29. Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.071.319.133.875,04</b>	<b>911.779.870.321,00</b>	<b>85,11</b>	<b>905.064.309.961,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	975.214.405.651,93	834.452.066.790,00	85,57	847.887.941.074,00



No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
2	Tambahan Penghasilan	74.143.462.900,00	61.913.348.727,00	83,50	47.426.407.750,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp./Angg. DPRD /KDh/WKDh	10.562.400.000,00	10.462.400.000,00	99,05	4.380.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	5.566.750.000,11	631.427.671,00	11,34	754.875.476,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.056.500.000,00	2.858.173.226,00	93,51	2.492.898.435,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.775.615.323,00	1.462.453.907,00	52,69	2.122.187.226,00
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>111.776.118.658,15</b>	<b>105.753.463.711,98</b>	<b>94,61</b>	<b>90.598.617.420,00</b>
1	Uang Lembur	7.404.636.978,00	6.322.977.408,00	85,39	5.701.743.776,00
2	Belanja Pegawai Dana BOS	76.477.000,00	74.727.000,00	97,71	0,00
3	Belanja Pegawai (Non Honorarium Pengelola) Dana BOS	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	16.492.000,00
4	Belanja Pegawai BLUD	70.958.770.489,15	68.816.158.611,00	96,98	57.242.002.415,00
5	Honorarium Pelayanan JKN	29.238.769.191,00	28.347.981.692,98	96,95	26.702.839.229,00
6	Honorarium Tim Pengelola/Penyusun/LPSE	68.045.000,00	25.005.000,00	36,75	70.040.000,00
7	Belanja Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah	1.382.900.000,00	724.684.000,00	52,40	0,00
8	Honorarium Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	2.617.120.000,00	1.412.530.000,00	53,97	865.500.000,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>1.183.095.252.533,19</b>	<b>1.017.533.334.032,98</b>	<b>86,01</b>	<b>995.662.927.381,00</b>

#### 7.E.1.b.1.a Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp671.762.552.372,57 atau sebesar 82,77% dari anggaran sebesar Rp811.557.363.766,69. Sedangkan di Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp509.759.462.542,20 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp162.003.089.830,37 atau 31,78%.

**Tabel 30. Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	38.361.265.020,05	33.411.016.769,94	87,10	31.694.104.233,20
2	Belanja Bahan/Material	35.897.999.224,71	33.341.229.967,77	92,88	38.054.155.898,00
3	Belanja Jasa Kantor	53.418.846.712,06	45.173.169.148,53	84,56	43.498.916.427,00
4	Belanja Premi Asuransi	4.710.386.719,00	3.463.684.860,00	73,53	267.424.516,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.753.937.689,32	8.899.845.679,00	75,72	5.252.849.372,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.071.171.923,22	21.625.433.911,40	86,26	19.626.145.485,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.366.932.100,00	1.563.882.235,00	66,07	1.496.966.380,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.314.605.000,00	1.035.008.319,00	78,73	983.982.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.704.215.500,00	2.825.569.233,00	76,28	2.014.462.201,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	33.883.025.277,35	27.004.685.011,00	79,70	21.663.935.315,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.228.550.000,00	1.037.765.800,00	84,47	2.738.654.262,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.251.134.000,00	1.189.667.650,00	95,09	1.079.508.450,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.084.568.300,00	2.902.133.131,00	94,09	2.238.655.345,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
14	Belanja Perjalanan Dinas	74.331.211.518,00	53.880.436.358,63	72,49	43.538.258.565,00
15	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	8.785.000,00	7.350.000,00	83,67	0,00
16	Belanja Pemeliharaan	10.977.987.430,43	9.561.902.893,00	87,10	8.096.421.122,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	7.073.160.607,00	5.076.151.500,00	71,77	5.309.042.600,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.452.239.000,00	4.190.209.062,48	64,94	842.705.500,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	511.875.000,00	264.495.000,00	51,67	665.890.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.647.687.878,50	1.515.928.443,00	41,56	1.929.724.200,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	297.161.000,00	187.756.100,00	63,18	114.195.000,00
22	Belanja Honorarium PNS	27.466.213.120,00	17.468.429.547,00	63,60	24.064.257.142,00
23	Belanja Honorarium Non PNS	93.459.541.960,00	86.782.205.679,00	92,86	80.671.899.562,00
24	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	1.177.314.000,00	1.139.339.000,00	96,77	1.058.624.000,00
25	Belanja Barang Dana BOS	1.015.100.602,74	975.077.145,98	96,06	0,00
26	Belanja Barang Inventaris/ Non Aset Tetap	11.013.159.964,56	9.354.094.846,55	84,94	8.136.711.080,00
27	Belanja Pembelian/ Pembibitan	216.825.000,00	134.025.000,00	61,81	112.762.500,00
28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	234.100.000,00	224.441.000,00	95,87	14.192.276.746,00
29	Belanja Beban Pajak	11.600.000,00	9.603.268,00	82,79	7.917.350,00
30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	132.526.811.038,00	118.504.304.315,00	89,42	78.593.676.093,00
31	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	89.577.191.889,00	69.112.462.368,00	77,15	51.939.560.558,00
32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.223.229.800,00	11.081.977.123,00	72,80	7.172.852.200,00
33	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.802.213.500,00	586.020.000,00	32,52	1.392.658.690,00
34	Belanja Hibah Barang/Jasa	58.863.842.437,75	47.111.250.504,29	80,03	0,00
35	Belanja Bantuan Sosial Barang	38.213.982.275,00	34.018.948.753,00	89,02	0,00
36	Belanja Jasa Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat	103.750.000,00	103.620.000,00	99,87	67.500.000,00
37	Belanja Akomodasi Pengiriman MTQ	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
38	Belanja diklat, bimtek, lokakarya, seminar, workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD	712.750.000,00	348.250.000,00	48,86	328.500.000,00
39	Uang Saku	7.212.417.680,00	6.057.111.050,00	83,98	3.738.067.500,00
40	Belanja pengukuran, pemetaan, pemisahan, pengembalian batas dan rekomendasi tanah	60.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
41	Honorarium penyelenggara ujian dan diklat	210.355.000,00	154.912.500,00	73,64	608.095.000,00
42	Honorarium Petugas Teknis	1.635.034.300,00	1.504.307.800,00	92,00	1.916.742.500,00
43	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.567.854.000,00	3.768.405.000,00	67,68	3.277.910.000,00
44	Belanja pembayaran pendaftaran lomba yang diikuti sekolah	130.573.300,00	99.435.600,00	76,15	22.303.250,00
45	Belanja rehabilitasi dan	5.700.000.000,00	5.013.887.000,00	87,96	0,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	rekonstruksi pasca bencana				
46	Belanja biaya distribusi SPPT PBB P2	16.759.000,00	16.172.000,00	96,50	16.030.000,00
47	Belanja Jasa Kesehatan	60.000.000,00	36.951.800,00	61,59	0,00
48	Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	0,00	0,00	0,00	1.240.600.000,00
49	Belanja Kontribusi	0,00	0,00	0,00	78.121.500,00
	<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>811.557.363.766,69</b>	<b>671.762.552.372,57</b>	<b>82,77</b>	<b>509.759.462.542,20</b>

Dalam anggaran dan realisasi belanja barang tersebut, termasuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang merupakan anggaran yang dialokasikan pada belanja barang jasa untuk hibah dan bantuan sosial kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Belanja tersebut terealisasi masing-masing sebesar Rp47.111.250.504,29 dan Rp34.018.948.753,00. Rincian masing-masing belanja per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 31. Rincian Belanja Belanja Hibah Barang/Jasa**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas PKP dan Cipta Karya	32.367.376.230,29	Sejumlah Rp8.070.033.276,67 belum diserahkan kepada pihak ketiga
2	Dinas Pendidikan	260.756.800,00	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.468.000,00	
4	Dinas Sosial	243.272.000,00	
5	Dinas Lingkungan Hidup	236.118.974,00	
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	16.867.500,00	
7	Dinas Pertanian	13.843.508.000,00	
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	47.883.000,00	
	<b>Jumlah Belanja Hibah Barang/Jasa</b>	<b>47.111.250.504,29</b>	

**Tabel 32. Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas PKP dan Cipta Karya	33.175.478.153,00	Sejumlah Rp195.388.380,00 belum diserahkan kepada pihak ketiga
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	
3	Dinas Sosial	443.174.400,00	
4	Dinas Ketahanan Pangan	170.449.950,00	
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	29.846.250,00	
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial Barang</b>	<b>34.018.948.753,00</b>	

Pada realisasi belanja barang dan jasa terdapat koreksi atas belanja pada Dinas PKP dan Cipta Karya karena denda yang dipotongkan

langsung dari termyn senilai Rp125.575.830,00 untuk belanja hibah barang dan Rp5.924.450,00 untuk belanja bantuan sosial barang.

#### 7.E.1.b.1.c Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp75.600.000,00 sebesar 33,90% dari anggaran sebesar Rp223.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi pada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan mulai tanggal 23 April s/d 14 Mei 2018 di 14 (empat belas) kecamatan yang berupa penyediaan paket bahan pokok berupa beras kualitas premium kemasan 5 Kg sejumlah 1.500 Kg dengan subsidi Rp2.000,00 per Kg, minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 600 liter dengan subsidi Rp2.000,00 per liter, serta gula pasir sebanyak 600 Kg dengan nilai subsidi Rp2.000,00 per Kg. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dua penyedia jasa dengan nilai Rp33.600.000,00 dan Rp42.000.000,00. Pelaksanaan Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 33. Belanja Subsidi**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Belanja Subsidi (Dinas Perdagangan)	223.000.000,00	75.600.000,00	33,90	156.800.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>223.000.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>33,90</b>	<b>156.800.000,00</b>

Belanja subsidi pada Dinas Perdagangan dicairkan dengan SP2D nomor 0164/LS-PPKD/2018 tanggal 7 Juni 2018 senilai Rp75.600.000,00.

#### 7.E.1.b.1.d Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 merupakan realisasi belanja hibah kepada Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi dalam bentuk uang sebesar Rp127.732.077.282,35 atau sebesar 82,94% dari anggaran sebesar Rp154.002.289.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 34. Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>I</b>	<b>Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>57.128.302.293,00</b>	<b>46.670.755.928,00</b>	<b>81,69</b>	<b>12.745.011.568,00</b>
	Terdiri Dari:				
	Hibah kepada KPU / Kesbang	42.252.959.293,00	33.705.499.393,00	79,77	7.928.327.068,00
	Hibah kepada Panwaslu Kabupaten Bojonegoro / Kesbang	7.948.343.000,00	6.464.797.535,00	81,34	3.366.684.500,00
	Hibah kepada Polres / Satpol PP	1.200.000.000,00	773.459.000,00	64,45	1.200.000.000,00
	Hibah Pengamanan Pilkada kepada KODIM / Satpol PP	1.357.800.000,00	1.357.800.000,00	100,00	0,00
	Hibah Pengamanan Pilkada kepada POLRES / Satpol PP	4.369.200.000,00	4.369.200.000,00	100,00	0,00
	Hibah Kepada Kemenag (Musabaqoh Quroatul Kutub)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Hibah kepada Sub Denpom	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
<b>II</b>	<b>Hibah Kepada Badan/</b>	<b>96.873.987.500,00</b>	<b>81.061.321.354,35</b>	<b>83,68</b>	<b>64.158.255.000,00</b>

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	<b>Lembaga/Organisasi Masyarakat</b>				
	Terdiri Dari:				
1.	<b>Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>578.200.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>57,07</b>	<b>823.700.000,00</b>
	MUI / Kesbang	100.000.000,00	57.000.000,00	57,00	150.000.000,00
	Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Kesbang	478.200.000,00	273.000.000,00	57,09	511.200.000,00
	BAMAG	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	DPC PEPABRI	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	PP Polri	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	PWRI	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Yayasan Gerontologi Abiyoso	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	LVRI	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	DHC 45	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Wanita Katolik	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Paguyuban Lansia Pandowo	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.	<b>Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
	LSM INSPEKTRA / Kesbang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	LSM ANGLING DHARMA / Kesbang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	LSM Tropis	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	LSM Ploso Jenar	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	LSM Bangkit Mandiri	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	LSM LSPM	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3	<b>Hibah kepada Palang Merah Indonesia ( PMI ) / Kesra</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>286.000.000,00</b>	<b>57,20</b>	<b>500.000.000,00</b>
4	<b>Hibah kepada PRAMUKA / Kesra</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
5	<b>Hibah kepada KONI / Dispora</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>1.402.120.854,35</b>	<b>56,08</b>	<b>2.744.040.000,00</b>
6	<b>Hibah kepada Forum PAUD Kab.Bojonegoro / Diknas</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200.000,00</b>
7	<b>Hibah kepada Taman Bacaan Masyarakat /TBM / Diknas</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Hibah kepada PGRI / Diknas</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
9	<b>Hibah kepada IGTKI / Diknas</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00</b>
10	<b>Hibah kepada Badan Amil Zakat / Kesra</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
11	<b>Hibah kepada Badan Hisab Rukyat / Kesra</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
12	<b>Hibah Bidang Keagamaan / Bagian Kesra</b>	<b>1.395.000.000,00</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>485.000.000,00</b>
13	<b>Hibah Pendistribusian SPPT PBB kepada BKM</b>	<b>17.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Hibah kepada PD Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bojonegoro / Kesra</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00</b>
15	<b>Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing / Dinas Peternakan</b>	<b>562.500.000,00</b>	<b>562.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Hibah kepada Taman Pendidikan Quran ( TPQ ) /</b>	<b>837.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000.000,00</b>

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	<b>Bagian Kesra</b>				
17	Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik BOP PAUD) / DIKNAS	32.785.800.000,00	31.529.400.000,00	96,17	28.414.200.000,00
18	Hibah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM - DAK Pendidikan) (DIKNAS)	3.910.000.000,00	3.328.200.000,00	85,12	3.258.100.000,00
19	Hibah Infrastruktur Pedesaan Bidang Pendidikan (DIKNAS)	27.401.745.500,00	21.276.755.500,00	77,65	8.250.000.000,00
20	Hibah kepada Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT)	70.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
21	Hibah kepada LPTQ / Bagian Kesra	495.000.000,00	0,00	0,00	285.000.000,00
22	Hibah BPPDGS/ Diknas	11.920.105.000,00	11.706.345.000,00	98,21	11.199.870.000,00
23	Hibah Infrastruktur Pedesaan Bidang Kesra (BAG.KESRA)	3.360.000.000,00	2.485.000.000,00	73,96	1.130.000.000,00
24	Hibah kepada KNPI / Kesbang	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
25	Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih / CIPTA KARYA	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00	490.000.000,00
26	Hibah Pembangunan MCK dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama (Dinas PKP Cipta Karya , DAK)	6.630.000.000,00	4.680.000.000,00	70,59	0,00
27	Hibah kepada Hizbul Wathan / Dinas Pariwisata	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Hibah PAUD (TMMD) / Dinas Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
29	Hibah kepada Ponpes Al Rosyid / Dinas Pendidikan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Hibah PAUD/SD/SMPSwasta (Pemberian Honorarium Kinerja Kepala/Guru Non PNS) / Dinas Pendidikan	696.000.000,00	696.000.000,00	100,00	0,00
31	Hibah Bidang Kebudayaan / Dinas Pariwisata	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Hibah Bidang Sosial / Dinas Sosial	65.000.000,00	0,00	0,00	690.000.000,00
33	Hibah Bidang Pemuda dan Olahraga / DISPORA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Hibah Bidang Kesehatan / Dinas Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Hibah Kepada TK/TPA di bawah naungan LPPTK-BKPRMI (Bagian Kesra)	0,00	0,00	0,00	616.500.000,00
36	Hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab. Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	40.645.000,00
37	Hibah Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
38	Hibah Kepada BKPRMI Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
39	Hibah kepada DEKOPINDA Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
40	Hibah untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	0,00	0,00	0,00	2.957.000.000,00
41	Hibah kepada Muslimat NU Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00



No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	<b>Total Belanja Hibah</b>	<b>154.002.289.793,00</b>	<b>127.732.077.282,35</b>	<b>82,94</b>	<b>76.903.266.568,00</b>

Selain hibah dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa. Hibah barang/jasa ini pada tahun 2018 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp58.863.842.437,75 dan terealisasi sebesar Rp47.111.250.504,29.

#### 7.E.1.b.1.e Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.997.500.000,00 atau sebesar 68,99% dari anggaran sebesar Rp5.794.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
<b>Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>686.000.000,00</b>	<b>85,75</b>
Terdiri dari:			
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	800.000.000,00	686.000.000,00	85,75
<b>Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan</b>	<b>4.994.000.000,00</b>	<b>3.311.500.000,00</b>	<b>66,31</b>
Terdiri dari:			
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000,00	940.000.000,00	94,00
Bantuan Sosial Lansia	200.000.000,00	173.000.000,00	86,50
Bantuan sosial yang tidak direncanakan	539.000.000,00	323.500.000,00	60,02
Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah / Dinas Cipta Karya	3.255.000.000,00	1.875.000.000,00	57,60
<b>JUMLAH</b>	<b>5.794.000.000,00</b>	<b>3.997.500.000,00</b>	<b>68,99</b>

Selain bantuan sosial dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa. Bantuan sosial barang/jasa ini pada Tahun 2018 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp38.213.982.275,00 dan terealisasi sebesar Rp34.018.948.753,00.

#### 7.E.1.b.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp601.338.047.080,92 atau sebesar 78,00% dari anggaran sebesar Rp770.978.304.266,84 dan terdiri dari:

**Tabel 36. Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	11.096.981.196,00	725.423.250,00	6,54	21.317.897.550,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	158.066.586.421,66	142.873.891.529,80	90,39	86.729.210.037,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	215.549.123.860,83	153.161.358.323,09	71,06	148.631.056.352,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	365.181.592.572,07	286.469.922.122,91	78,45	290.463.504.465,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.046.740.216,28	17.368.341.855,12	86,64	26.284.800.749,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.037.280.000,00	739.110.000,00	71,25	30.200.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>770.978.304.266,84</b>	<b>601.338.047.080,92</b>	<b>78,00</b>	<b>573.456.669.153,80</b>

**(a) Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp725.423.250,00 atau 6,54% dari anggaran sebesar Rp11.096.981.196,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp 20.592.474.300,00 atau 96,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp21.317.897.550,00.

**Tabel 37. Belanja Modal Tanah**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	191.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7.655.000.000,00	0,00	0,00	19.676.686.000,00
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.250.581.196,00	725.423.250,00	22,32	1.640.311.550,00
<b>JUMLAH</b>		<b>11.096.981.196,00</b>	<b>725.423.250,00</b>	<b>6,54</b>	<b>21.317.897.550,00</b>

**(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp142.873.891.529,80 atau 90,39% dari anggaran sebesar Rp158.066.586.421,66. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp 56.143.681.492,00 atau sebesar 64,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp86.729.210.037,80.

**Tabel 38. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.520.181.482,00	1.496.945.650,00	98,47	653.520.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	105.228.100,00	99.340.849,00	94,41	347.474.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	23.341.600.572,00	21.495.621.423,00	92,09	7.068.046.420,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	367.500.000,00	362.575.000,00	98,66	10.983.000,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	170.946.000,00	144.146.000,00	84,32	49.001.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	50.300.000,00	47.016.000,00	93,47	84.895.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.223.920.544,00	1.148.122.000,00	93,81	218.192.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	388.450.000,00	384.005.000,00	98,86	70.786.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	66.101.000,00	61.705.772,00	93,35	29.802.525,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.668.319.850,53	3.986.690.661,00	70,33	3.224.387.247,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.514.271.257,69	12.239.183.222,80	84,33	6.679.491.336,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.252.444.581,35	13.209.027.058,27	92,69	11.339.988.658,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.491.764.499,00	1.369.094.965,00	91,78	718.085.935,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.000.212.002,54	1.817.472.932,65	90,86	1.113.297.716,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.144.569.825,00	3.687.961.147,00	88,98	641.998.061,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	105.604.082,42	102.942.000,00	97,48	48.075.000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	75.057.360.046,00	69.228.510.169,70	92,23	49.688.816.802,80
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	323.870.000,00	312.810.000,00	96,59	1.356.010.558,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	11.458.093.450,00	10.453.942.740,00	91,24	2.527.051.465,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	259.869.629,13	257.407.043,38	99,05	508.114.614,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	153.000.000,00	147.372.000,00	96,32	2.100.000,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	14.950.000,00	11.200.000,00	74,92	6.987.000,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	90.000.000,00	89.250.000,00	99,17	110.005.500,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing	9.200.000,00	1.587.500,00	17,26	0,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	11.212.000,00	9.690.000,00	86,43	6.827.500,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	965.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.277.617.500,00	710.272.396,00	55,59	224.307.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>158.066.586.421,66</b>	<b>142.873.891.529,80</b>	<b>90,39</b>	<b>86.729.210.037,80</b>

**(c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp153.161.358.323,09 atau 71,06% dari anggaran sebesar Rp215.549.123.860,83. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp 4.418.309.496,09 atau sebesar 2,97 % dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp148.631.056.352,00.

**Tabel 39. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	213.376.553.860,83	151.311.073.190,25	70,91	147.722.616.357,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	700.000.000,00	584.179.232,84	83,45	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	600.000.000,00	515.246.000,00	85,87	387.791.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	205.040.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	872.570.000,00	750.859.900,00	86,05	315.608.995,00
	<b>Jumlah</b>	<b>215.549.123.860,83</b>	<b>153.161.358.323,09</b>	<b>71,06</b>	<b>148.631.056.352,00</b>

**(d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp286.469.922.122,91 atau 78,45% dari anggaran sebesar Rp365.181.592.572,07. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp8.869.515.257,69 atau sebesar 3,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp290.463.504.465,00.

**Tabel 40. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	175.139.099.572,03	134.997.763.640,48	77,08	130.749.225.135,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	64.799.784.816,00	54.166.480.803,12	83,59	69.556.317.600,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.291.237.270,00	6.025.521.000,00	95,78	9.377.312.750,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	33.504.310.642,04	28.351.396.918,31	84,62	30.021.279.820,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	750.656.000,00	684.951.000,00	91,25	887.793.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	61.815.402.121,00	40.869.723.527,00	66,11	24.519.077.700,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	571.279.000,00	571.279.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	41.472.000,00	40.126.000,00	96,75	6.230.000,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	15.815.000.000,00	15.105.705.000,00	95,52	14.157.416.867,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	484.905.000,00	0,00	0,00	150.938.447,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	149.427.000,00	124.139.000,00	83,08	198.493.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	5.815.459.151,00	5.529.276.234,00	95,08	9.285.710.132,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	3.560.000,00	3.560.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	1.533.289.694,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	20.420.320,00
	<b>Jumlah</b>	<b>365.181.592.572,07</b>	<b>286.469.922.122,91</b>	<b>78,45</b>	<b>290.463.504.465,00</b>

**(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp17.368.341.855,12 atau 86,64% dari anggaran sebesar Rp20.046.740.216,28. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp8.916.458.893,88 atau 33,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.284.800.749,00.

**Tabel 41. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	12.243.173.690,81	12.015.152.895,90	98,14	18.981.236.380,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- PengadaanTerbitan	5.892.000,00	5.892.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-BarangPerpustakaan	7.599.090,36	7.296.135,00	96,01	20.080.520,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	911.519.515,78	733.286.111,22	80,45	366.033.880,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	255.895.377,00	244.890.377,00	95,70	13.692.021,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanTanaman	15.591.500,00	15.591.500,00	100,00	300.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	6.537.959.000,00	4.278.386.986,00	65,44	6.873.707.948,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Dana BOS	69.110.042,33	67.845.850,00	98,17	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.046.740.216,28</b>	<b>17.368.341.855,12</b>	<b>86,64</b>	<b>26.284.800.749,00</b>

**(f) Belanja Modal Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Pengadaan Software Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp739.110.000,00 atau 71,25% dari anggaran sebesar Rp1.037.280.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp708.910.000,00 atau 2.347,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp30.200.000,00.

**7.E.1.b.3 Belanja Tidak Terduga**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp54.334.600,00 atau sebesar 1,70% dari anggaran sebesar Rp3.200.000.000,00. Belanja tersebut berupa pengembalian sisa dana bantuan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke Rekening Kas Umum Negara - Pengelolaan Hibah Ditjen Perimbangan Keuangan. Belanja tersebut terdiri atas:

**Tabel 42. Belanja Tidak Terduga**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengembalian sisa dana bantuan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke Rekening Kas Umum Negara - Pengelolaan Hibah Ditjen Perimbangan Keuangan	54.334.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>54.334.600,00</b>

**7.E.1.b.4 Transfer**

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp662.932.025.381,00 atau sebesar 94,75% dari anggaran sebesar Rp699.681.089.403,00. Transfer tersebut terdiri dari :



Tabel 43. Belanja Transfer

Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.844.707.695,00	12.379.745.270,00	96,38	15.255.132.285,05
Transfer Bantuan Keuangan	686.836.381.708,00	650.552.280.111,00	94,72	585.172.283.199,38
<b>JUMLAH</b>	<b>699.681.089.403,00</b>	<b>662.932.025.381,00</b>	<b>94,75</b>	<b>600.427.415.484,43</b>

**(a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.379.745.270,00 atau sebesar 96,38% dari anggaran sebesar Rp12.844.707.695,00 yang terdiri dari:

Tabel 44. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.849.270.545,00	8.849.270.545,00	100,00	8.063.070.275,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	2.047.237.150,00	2.047.237.150,00	100,00	5.717.839.110,05
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi	1.752.000.000,00	1.350.910.800,00	77,11	1.297.235.200,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perhutani	196.200.000,00	132.326.775,00	67,44	176.987.700,00
<b>JUMLAH</b>	<b>12.844.707.695,00</b>	<b>12.379.745.270,00</b>	<b>96,38</b>	<b>15.255.132.285,05</b>

**(b) Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp650.552.280.111,00 atau sebesar 94,72% dari anggaran sebesar Rp686.836.381.708,00 yang terdiri dari:

Tabel 45. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)	Ket
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa:</b>	<b>22.691.104.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Bantuan Stimulan Lomba Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
DAK Vocasional	565.497.560,00	0,00	0,00	0,00	
DAK Pendidikan desa	21.825.607.212,00	0,00	0,00	0,00	
Pembangunan TPT Jl.Baureno – Kepohbaru	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :</b>	<b>1.202.918.052,00</b>	<b>1.109.703.000,00</b>	<b>92,25</b>	<b>838.935.468,00</b>	Jumlah Kursi di DPRD:
Partai PAN	150.585.486,00	138.916.500,00	92,25	105.020.874,00	6
Partai PDIP	132.683.226,00	122.401.500,00	92,25	92.535.534,00	5
Partai Demokrat	148.268.436,00	136.779.000,00	92,25	103.404.924,00	7
Partai Gerindra	123.772.746,00	114.181.500,00	92,25	86.321.214,00	5
Partai Golkar	161.050.422,00	148.570.500,00	92,25	112.319.298,00	7
Partai Hanura	54.124.662,00	49.930.500,00	92,25	37.747.458,00	2
Partai PKPI	42.601.200,00	39.300.000,00	92,25	29.710.800,00	1
Partai PKS	83.207.298,00	76.759.500,00	92,25	58.030.182,00	4
Partai PKB	132.971.028,00	122.667.000,00	92,25	92.736.252,00	6

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)	Ket
Partai PPP	107.444.454,00	99.118.500,00	92,25	74.933.586,00	5
Partai Nasdem	66.209.094,00	61.078.500,00	92,25	46.175.346,00	2
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa)</b>	<b>316.364.467.000,00</b>	<b>316.364.467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>332.980.300.000,00</b>	
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa ( ADD )</b>	<b>203.954.914.820,00</b>	<b>203.954.914.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171.644.991.381,38</b>	
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa ( DAK Pendidikan )</b>	<b>51.002.192.788,00</b>	<b>49.689.419.050,00</b>	<b>97,43</b>	<b>72.654.369.350,00</b>	
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa:</b>	<b>91.620.784.276,00</b>	<b>79.433.776.241,00</b>	<b>86,70</b>	<b>7.053.687.000,00</b>	
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB / Bappenda	737.761.000,00	706.046.000,00	95,70	707.937.000,00	
Bantuan DAK Vocasional (Bagian Kesra)	830.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa / Dinas Cipta Karya	745.000.000,00	745.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00	
Bantuan Keuangan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	292.700.000,00	73,18	0,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Dinas PMD	3.477.500.000,00	2.917.500.000,00	83,90	3.101.750.000,00	
Bantuan Keuangan Dinas Sosial	70.000.000,00	35.000.000,00	50,00	0,00	
Bantuan Keuangan Dispora	3.595.000.000,00	1.715.000.000,00	47,71	0,00	
Bantuan Keuangan DP3A dan KB	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan Dinas Pariwisata	890.000.000,00	855.000.000,00	96,07	0,00	
Bantuan Keuangan DLH	1.334.625.000,00	686.625.000,00	51,45	0,00	
Bantuan Keuangan PU Bina Marga	79.090.898.276,00	71.480.905.241,00	90,38	0,00	
Bantuan Keuangan Kantor Arsip	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bantuan Pengembangan Jambu Biji (Dinas Pertanian)	0,00	0,00	0,00	1.194.000.000,00	
Bantuan Keuangan Pembangunan Polindes (Dinas Kesehatan)	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>686.836.381.708,00</b>	<b>650.552.280.111,00</b>	<b>94,72</b>	<b>585.172.283.199,38</b>	50

Penganggaran bantuan kepada desa yang tidak dilengkapi dengan rincian menyebabkan tidak adanya realisasi pada bantuan kepada desa. Sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 bahwa belanja bantuan keuangan kepada desa harus dirinci berdasarkan nama desa penerima bantuan keuangan. Bantuan DAK Vocasional (Bagian Kesra) tidak terealisasi karena Peraturan Bupati tentang DAK Vocasional belum ditetapkan. Bantuan Keuangan (DP3A dan KB) tidak ada realisasi karena tidak ada pengajuan dari desa penerima bantuan keuangan tersebut. Bantuan Keuangan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) tidak ada realisasi karena tidak tercantum di SK tentang penerima bantuan keuangan.

#### 7.E.1.c Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### 7.E.1.c.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp279.075.352.965,77 atau sebesar 100,46% dari anggaran sebesar Rp277.784.999.390,94 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 46. Penerimaan Pembiayaan**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	<b>Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>277.784.999.390,94</b>	<b>277.817.959.190,94</b>	<b>100,01</b>	<b>79.051.687.855,78</b>
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	277.784.999.390,94	277.784.999.390,94	100,00	79.051.687.855,78
	Koreksi SiLPA	0,00	32.959.800,00	0,00	0,00
2	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.393.774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.597.284,16</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>277.784.999.390,94</b>	<b>279.075.352.965,77</b>	<b>100,46</b>	<b>81.489.285.139,94</b>

Koreksi SiLPA merupakan koreksi kesalahan pencatatan pada tahun 2011 yang terdiri dari kesalahan pencatatan pengembalian retribusi melalui belanja tak terduga sebesar Rp6.865.000,00 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp26.094.800,00.

Tahun 2018 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp1.257.393.774,83 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 47. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	96.901.237,28
2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	34.446.617,50
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	818.466.920,05
4	Dinas Pertanian	188.779.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	88.750.000,00
6	Bagian Perekonomian	30.050.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.257.393.774,83</b>

Penerimaan pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp500.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 masih berada di rekening bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan baru disetorkan ke rekening kas daerah pada tanggal 11 Januari 2019. Penerimaan pembiayaan diakui pada Tahun 2018, untuk penyetoran kas di Tahun 2019 diakui sebagai perpindahan dari kas di bendahara penerimaan ke kas daerah.

### 7.E.1.c.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 48. Pengeluaran Pembiayaan**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 7.E.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>277.784.999.390,94</b>
<b>Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>Rp</b>	<b>277.817.959.190,94</b>
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>(32.959.800,00)</b>
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018	Rp	4.823.752.241.464,20
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018	Rp	(2.422.493.445.368,82)
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2018	Rp	(662.932.025.381,00)
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>1.738.326.770.714,38</b>
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018	Rp	279.075.352.965,77
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018	Rp	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>279.075.352.965,77</b>
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>2.017.402.123.680,15</b>

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### 7.E.2.a Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	277.784.999.390,94	79.051.687.855,78

Nilai SAL awal sebesar Rp277.784.999.390,94 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2017. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2018.

#### 7.E.2.b Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>	<u>Tahun 2017 (Rp)</u>
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	277.817.959.190,94	79.051.687.855,78

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2017 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2018, yaitu sebesar Rp277.817.959.190,94.

#### 7.E.2.c Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>	<u>Tahun 2017 (Rp)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2.017.402.123.680,15	277.784.999.390,94

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp2.017.402.123.680,15

**Tabel 49. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan	3.350.746.300.371,78	4.823.752.241.464,20	143,96	3.024.200.425.253,43
Belanja dan Transfer	3.628.531.299.762,72	3.085.425.470.749,82	84,89	2.827.904.711.002,43
Surplus (Defisit)	(277.784.999.390,94)	1.738.326.770.714,38	(625,78)	196.295.714.251,00
Pembiayaan Netto	277.784.999.390,94	279.075.352.965,77	100,45	81.489.285.139,94
<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.402.123.680,15</b>	<b>0,00</b>	<b>277.784.999.390,94</b>

Terjadi peningkatan SiLPA yang cukup signifikan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan. Naiknya harga minyak (ICP) dan kurs dollar berimbas pada kenaikan PNBPN Migas, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI mengambil kebijakan DBH Triwulan IV 2018 disalurkan secara utuh ditambah dengan tambahan DBH Triwulan IV atas perubahan alokasi DBH sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian DBH dan Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2018, serta adanya transfer atas sebagian kurang Bayar DBH s/d Tahun 2017.

#### 7.E.2.d Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>	<u>Tahun 2017 (Rp)</u>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	32.959.800,00	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas kesalahan penjumlahan padatahun 2011 atas pengembalian retribusi

melalui belanja tak terduga sebesar Rp6.865.000,00 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp26.094.800,00.

#### 7.E.2.e Saldo Anggaran Lebih Akhir

	<u>Tahun 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>Tahun 2017</u> <u>(Rp)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.017.402.123.680,15	277.784.999.390,94

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp2.017.402.123.680,15.

### 7.E.3. NERACA

#### 7.E.3.a. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.316.744.707.903,99 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

#### 7.E.3.a.1 Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.131.805.865.777,57 terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja dibayar di muka dengan penjelasan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
Kas	2.017.402.123.680,15	277.817.959.190,94
Piutang	90.257.829.855,49	105.654.375.567,52
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(21.979.234.530,99)	(19.882.145.003,05)
Persediaan	46.095.980.106,25	65.161.636.714,71
Belanja dibayar di muka	29.166.666,67	99.166.666,67
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.131.805.865.777,57</u></b>	<b><u>428.850.993.136,79</u></b>

#### (a) Kas

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
Kas	2.017.402.123.680,15	277.817.959.190,94

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Umum Daerah	<b>Rp 1.960.162.109.889,91</b>
- Kas di BLUD	<b>Rp 41.658.898.631,88</b>
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 38.855.925.720,26
Rek. Kas Akbid No.0081016500	Rp 141.790,35
Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	Rp 1.498.739.996,78
Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	Rp 1.304.091.124,49



- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	26.437.552,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	475.031.443,00
- Kas di Bendahara JKN / FKTP	Rp	13.414.851.905,89
- Kas Lainnya (BOS)	Rp	1.664.794.257,47
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.017.402.123.680,15</b>

**(1) Kas di Bendahara Umum Daerah**

Saldo Kas di BUD pada Neraca	Rp	1.960.162.109.889,91
Saldo Kas di Rekening Bank Jatim	Rp	1.970.963.997.493,30
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>10.801.887.603,39</b>

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku adalah sebesar Rp1.960.162.109.889,91 sedangkan menurut rekening koran adalah sebesar Rp1.970.963.997.493,30. Selisihnya merupakan *Outstanding* SP2D per tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp10.801.887.603,39 yang terdapat pada empat SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang senilai Rp4.609.863.344,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya senilai Rp5.577.979.930,39, Dinas Pendidikan senilai Rp355.458.000,00 dan Dinas Perdagangan senilai Rp258.586.329,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran A**.

**(2) Kas di Bendahara Penerimaan**

Pada Tahun 2018 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan pada 4 (empat) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan Tahun 2017 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan pada 2 (dua) SKPD, yaitu RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan.

**Tabel 50. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas Di Bendahara Penerimaan	Saldo 31Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
RSUD Sumberrejo	1.614.552,00	0,00	1.614.552,00	0,00
RSUD Padangan	19.590.100,00	0,00	19.590.100,00	0,00
Dinas Koperasi dan UM	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	432.344.485,00	0,00	432.344.485,00
Kec. Bojonegoro	0,00	10.311.958,00	0,00	10.311.958,00
<b>JUMLAH</b>	<b>21.204.652,00</b>	<b>475.031.443,00</b>	<b>21.204.652,00</b>	<b>475.031.443,00</b>

Penambahan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp475.031.443,00 terdiri dari kas di bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp32.350.000,00 yang merupakan setoran dari angsuran UKM UD. Tunas Karya senilai Rp500.000,00 yang masih tersimpan di rekening bendahara penerimaan pertanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 11 Januari 2019 serta retribusi kios Rajekwesi yang belum disetorkan s/d tanggal 31 Desember 2018

senilai Rp31.850.000,00 dan baru disetorkan ke kas daerah tanggal 2 April 2019. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp25.000,00 adalah pengganti biaya transfer atas klaim BPJS yang belum terbayar sampai tanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 28 Januari 2019. Kas di bendahara penerimaan Kecamatan Bojonegoro senilai Rp10.311.958,00 adalah retribusi sewa tanah ex.bengkok Kelurahan Jetak yang belum disetor s/d tanggal 31 Desember 2018 dan baru disetorkan ke kas daerah pada tanggal 7 Pebruari dan 9 April 2019. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah merupakan setoran pajak PBB di rekening penampungan PBB senilai Rp432.344.485,00 yang belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2018 dan disetorkan pada tanggal 3 Januari 2019 dan 8 Pebruari 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 51. Rincian Kas di Rekening Penampungan PBB**

No. Rekening	Peruntukan	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)
0081000662	PBB P-2 Bjn wilayah tengah	184.899.904,00
0081000671	PBB P-2 Bjn wilayah timur	43.880.839,00
0081000689	PBB P-2 Bjn wilayah selatan	35.588.138,00
0081000697	PBB P-2 Bjn wilayah barat	167.169.523,00
0081000905	Tunggakan PBB P-2 Tahun 2001 s.d 2012	806.081,00
<b>JUMLAH</b>		<b>432.344.485,00</b>

Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan merupakan setoran dari pelayanan kesehatan yang masih tersimpan di rekening bendahara penerimaan RSUD Sumberrejo senilai Rp1.614.552,00 dan RSUD Padangan senilai Rp19.590.100,00 pada Tahun 2017 yang disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara penerimaan RSUD Sumberrejo pada Tanggal 2 Januari 2018 dan oleh Bendahara penerimaan RSUD Padangan pada Tanggal 10 Januari 2018.

### (3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada Tahun 2018, jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp26.437.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 52. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas Di Bendahara Pengeluaran	Saldo 31Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31Des 2018
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	346.860,00	0,00	346.860,00	0,00
Kecamatan Gondang	0,00	26.437.552,00	0,00	26.437.552,00
<b>JUMLAH</b>	<b>346.860,00</b>	<b>26.437.552,00</b>	<b>346.860,00</b>	<b>26.437.552,00</b>

Penambahan kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp26.437.552,00 berasal dari sisa UP Kecamatan Gondang senilai Rp.4.873.152,00 yang disetorkan pada tanggal 10 Januari 2019 dan sisa TU Kecamatan Gondang senilai Rp21.564.400,00 yang disetorkan pada tanggal 11 Januari 2019.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp346.860,00 berasal dari sisa UP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2018.

**(4) Kas di BLUD**

Kas di bendahara BLUD merupakan saldo kas di bendahara BLUD yang terdiri atas tiga RSUD dan satu BLUD Akademi Kebidanan. Jumlah kas pada bendahara BLUD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp41.658.898.631,88 dan Rp26.981.203.206,89 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 53. Kas di Bendahara BLUD**

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0081011866	38.855.925.720,26	26.855.768.079,15
2	Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro	0081016500	141.790,35	125.435.127,74
3	RSUD Padangan	0081006857	1.498.739.996,78	0,00
4	RSUD Sumberrejo	0691002136	1.304.091.124,49	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>41.658.898.631,88</b>	<b>26.981.203.206,89</b>

Tidak ada kas tunai pada ketiga BLUD tersebut. Sedangkan untuk RSUD Sumberrejo, jumlah kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.304.091.124,49 yang terdiri dari kas di rekening bank sebesar Rp1.298.578.832,49 dan kas tunai sebesar Rp5.512.292,00.

**(5) Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**

Pada Tahun 2018 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain:

**Tabel 54. Kas di Bendahara FKTP**

No	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2017	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2018
1	FKTP Margomulyo	574.732.287,00	1.220.584.400,00	1.313.822.418,00	481.494.269,00
2	FKTP Ngraho	1.435.030.260,30	2.537.189.700,00	3.211.343.742,70	760.876.217,60
3	FKTP Tambakrejo	783.414.189,00	2.004.844.550,00	1.998.284.124,00	789.974.615,00
4	FKTP Ngambon	182.296.356,00	517.900.925,00	578.596.696,98	121.600.584,02
5	FKTP Sekar	907.125.604,00	1.447.215.275,00	1.550.234.430,00	804.106.449,00
6	FKTP Bubulan	87.449.153,00	597.606.000,00	538.511.874,00	146.543.279,00
7	FKTP Gondang	546.429.177,00	1.166.429.475,00	1.485.965.241,00	226.893.411,00
8	FKTP Temayang	440.778.156,50	1.008.348.150,00	1.021.631.326,00	427.494.980,50
9	FKTP Sugihwaras	395.217.862,00	1.719.549.600,00	1.707.311.529,00	407.455.933,00
10	FKTP Kedungadem	782.158.537,50	2.179.149.450,00	2.408.926.009,00	552.381.978,50
11	FKTP Kesongo	609.742.016,00	1.108.165.500,00	1.458.647.414,00	259.260.102,00
12	FKTP Kepohbaru	673.810.731,00	1.248.816.900,00	1.191.606.899,00	731.020.732,00
13	FKTP Nglumber	576.517.534,00	1.274.606.250,00	1.560.112.297,00	291.011.487,00
14	FKTP Baureno	352.230.552,00	1.793.186.700,00	1.895.419.628,00	249.997.624,00

No	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2017	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2018
15	FKTP Gunungsari	186.287.532,88	847.662.000,00	763.395.360,00	270.554.172,88
16	FKTP Kanor	574.154.161,00	1.870.518.000,00	2.176.095.908,00	268.576.253,00
17	FKTP Sumberrejo	260.918.891,00	1.081.607.700,00	1.048.644.831,00	293.881.760,00
18	FKTP Mejuwet	448.942.552,00	1.018.224.000,00	1.109.113.355,00	358.053.197,00
19	FKTP Balen	1.934.433.761,96	2.608.593.150,00	2.833.167.228,00	1.709.859.683,96
20	FKTP Sukosewu	626.492.386,00	1.256.490.000,00	1.732.468.888,00	150.513.498,00
21	FKTP Kapas	147.428.640,00	867.751.800,00	871.778.475,00	143.401.965,00
22	FKTP Tanjungharjo	220.364.644,00	882.390.950,00	1.028.664.003,00	74.091.591,00
23	FKTP Bojonegoro	473.665.993,00	1.243.540.500,00	1.290.553.211,00	426.653.282,00
24	FKTP Wisma Indah	143.889.107,00	759.084.325,00	796.029.396,00	106.944.036,00
25	FKTP Trucuk	82.069.805,00	1.252.081.000,00	1.219.762.223,00	114.388.582,00
26	FKTP Dander	149.320.210,00	1.321.826.250,00	1.423.375.956,00	47.770.504,00
27	FKTP Ngumpakdalem	513.714.295,00	1.280.887.200,00	1.234.526.607,00	560.074.888,00
28	FKTP Ngasem	969.676.440,44	2.122.098.900,00	2.304.202.981,00	787.572.359,44
29	FKTP Kalitidu	243.973.874,00	1.032.194.100,00	1.166.936.828,00	109.231.146,00
30	FKTP Pungpungan	134.592.304,00	766.825.800,00	786.270.656,00	115.147.448,00
31	FKTP Malo	343.073.002,00	1.205.435.600,00	1.301.283.256,00	247.225.346,00
32	FKTP Purwosari	554.089.186,00	1.364.690.500,00	1.563.122.221,00	355.657.465,00
33	FKTP Padangan	577.794.216,50	1.239.518.500,00	1.566.924.251,00	250.388.465,50
34	FKTP Kasiman	213.480.733,00	1.060.336.000,00	1.101.387.328,00	172.429.405,00
35	FKTP Kedewan	152.233.597,49	308.278.800,00	333.768.809,00	126.743.588,49
36	FKTP Gayam	475.328.040,00	965.394.650,00	965.141.082,00	475.581.608,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.772.855.787,57</b>	<b>46.179.022.600,00</b>	<b>50.537.026.481,68</b>	<b>13.414.851.905,89</b>

Pada Tahun 2018 terdapat kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp13.414.851.905,89.

**(6) Kas Lainnya (Bantuan Operasional Sekolah)**

Pada Tahun 2018 terdapat kas lainnya senilai Rp1.664.794.257,47. Kas tersebut merupakan Silpa Dana Bantuan Operasional Sekolah dari 720 Sekolah Dasar dan 55 Sekolah Menengah Pertama. Sisa tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Rincian Kas Lainnya Bantuan Operasional Sekolah disajikan pada **Lampiran B**.

**(b) Piutang**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Piutang	90.257.829.855,49	105.654.375.567,52

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	20.186.686.448,97
- Piutang Retribusi	Rp	3.758.775.450,33
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	14.028.405.780,02
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	52.274.862.176,17
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>90.257.829.855,49</b>

**(1) Piutang Pajak**

Piutang Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp20.186.686.448,97 terdiri dari:

**Tabel 55. Piutang Pajak**

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	224.564.567,00	7.416.499,00	172.515.466,00	59.465.600,00
Piutang Pajak Reklame	151.084.053,00	0,00	0,00	151.084.053,00
Piutang Bahan Galian Gol C	99.810.400,00	56.019.600,00	98.960.400,00	56.869.600,00
Piutang Pajak Restoran	120.028.541,00	109.302.917,00	222.652.000,00	6.679.458,00
Piutang Pajak Parkir	11.253.630,00	8.844.754,00	17.191.384,00	2.907.000,00
Piutang Pajak Permukaan ABT	106.003.648,00	91.914.736,60	120.787.360,60	77.131.024,00
Pajak Sarang Burung	21.195.400,00	0,00	0,00	21.195.400,00
Pajak Hiburan	72.342.927,00	559.200,00	53.452.127,00	19.450.000,00
PPJ	3.076.197.133,77	3.442.391.399,00	3.076.197.131,00	3.442.391.401,77
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.625.174.535,20	3.050.021.192,00	1.325.682.815,00	16.349.512.912,20
<b>JUMLAH</b>	<b>18.507.654.834,97</b>	<b>6.766.470.297,60</b>	<b>5.087.438.683,60</b>	<b>20.186.686.448,97</b>

Piutang pajak tersebut sudah termasuk piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama yang belum selesai diverifikasi.

**(2) Piutang Retribusi**

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.758.775.450,33 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 56. Piutang Retribusi**

Uraian	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
- Retribusi Sewa Tanah	221.465.000,33	-	2.400.000,00	219.065.000,33
- Retribusi Trayek	300.000,00	100.000,00		400.000,00
- Retribusi IMB	20.378.900,00	46.596.000,00	20.378.900,00	46.596.000,00
- Retribusi Yankes Dinas Kesehatan	1.529.454.000,00	6.022.789.350,00	4.059.528.900,00	3.492.714.450,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.771.597.900,33</b>	<b>6.069.485.350,00</b>	<b>4.082.307.800,00</b>	<b>3.758.775.450,33</b>

RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan telah menerapkan PPK BLUD, maka pada tahun 2018 Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan tidak diklasifikasikan sebagai Piutang Retribusi seperti pada tahun sebelumnya, tetapi

piutang tersebut diklasifikasikan sebagai Piutang Lainnya (piutang klaim kesehatan).

**(3) Bagian Lancar Piutang SKPD**

Jumlah Bagian Lancar PiutangSKPD per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.028.405.780,02. Jumlah tersebut terdiri dari:

**Tabel 57. Bagian Lancar Piutang SKPD**

Bagian Lancar Piutang SKPD	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>1.953.663.966,78</b>		<b>34.446.617,50</b>	<b>1.919.217.349,28</b>
<b>Pinjaman Modal Industri</b>	<b>1.145.683.565,95</b>	-	<b>32.384.950,50</b>	<b>1.113.298.615,45</b>
Pinjaman Modal IKDK 2005	17.542.000,00		-	17.542.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00		-	2.071.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	3.315.000,00		-	3.315.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	3.268.000,00		-	3.268.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	17.957.000,00		-	17.957.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	9.846.000,00		-	9.846.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	89.069.000,00		5.706.000,00	83.363.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	58.640.573,00		907.548,38	57.733.024,62
Pinjaman Modal IKDK 2013	26.640.869,13		4.114.504,79	22.526.364,34
Pinjaman Modal Cukai 2010	66.856.000,00		-	66.856.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	229.528.000,00		417.000,00	229.111.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	153.803.042,29		-	153.803.042,29
Pinjaman Modal Cukai 2013	66.268.155,71		-	66.268.155,71
Pinjaman Modal IKDK 2014	126.830.531,59		5.653.686,85	121.176.844,74
Pinjaman Modal Cukai 2014	274.048.394,23		15.586.210,48	258.462.183,75
<b>Pinjaman Tenaga Kerja</b>	<b>807.980.400,83</b>	-	<b>2.061.667,00</b>	<b>805.918.733,83</b>
Pinjaman TKI 2001	58.981.352,73		1.470.000,00	57.511.352,73
Pinjaman TKI 2002	81.700.363,64			81.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	591.514.352,46		591.667,00	590.922.685,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00			14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	61.784.332,00			61.784.332,00
<b>Dinas Pertanian</b>	<b>2.265.395.000,00</b>		<b>188.779.000,00</b>	<b>2.076.616.000,00</b>
<b>Pinjaman Modal Petani</b>	<b>208.170.000,00</b>	-	<b>21.229.000,00</b>	<b>186.941.000,00</b>
Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah 2004	47.300.000,00		5.104.000,00	42.196.000,00
Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai 2005	16.000.000,00		2.000.000,00	14.000.000,00
Pinjaman Modal Petani Kecil 2007	32.500.000,00		7.000.000,00	25.500.000,00
Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija 2007	9.000.000,00		3.000.000,00	6.000.000,00
Pinjaman Pupuk Berimbang 2008	103.370.000,00		4.125.000,00	99.245.000,00
<b>Pinjaman Usaha Tani Tembakau</b>	<b>2.057.225.000,00</b>	-	<b>167.550.000,00</b>	<b>1.889.675.000,00</b>
Tembakau ON FARM (Kelompok Tani) 2010	96.275.000,00		-	96.275.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2010	79.000.000,00		-	79.000.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2011	145.000.000,00		20.000.000,00	125.000.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2012	310.600.000,00		48.100.000,00	62.500.000,00



<b>Bagian Lancar Piutang SKPD</b>	<b>Saldo 31 Des 2017 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Des 2018 (Rp)</b>
Tembakau ON FARM (Pengusaha) 2013	40.000.000,00		-	40.000.000,00
Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2013	1.386.350.000,00		99.450.000,00	1.286.900.000,00
<b>Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</b>	<b>304.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>274.600.000,00</b>
Pinjaman Dekranasda 2004	8.000.000,00		1.000.000,00	7.000.000,00
Pinjaman Dekranasda 2005	37.000.000,00		5.000.000,00	32.000.000,00
Pinjaman Dekranasda 2006	15.000.000,00		500.000,00	14.500.000,00
Pinjaman Dekranasda 2007	10.850.000,00		5.000.000,00	5.850.000,00
Pengrajin kayu 2004	233.800.000,00		18.550.000,00	215.250.000,00
<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>	<b>396.840.000,00</b>	<b>-</b>	<b>88.750.000,00</b>	<b>308.090.000,00</b>
Pinjaman Modal Dryer 2005	112.950.000,00		60.700.000,00	52.250.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2006	71.040.000,00		3.100.000,00	67.940.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2007	167.350.000,00		22.350.000,00	145.000.000,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2008	45.500.000,00		2.600.000,00	42.900.000,00
<b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	<b>2.124.029.864,90</b>	<b>-</b>	<b>96.901.237,28</b>	<b>2.027.128.627,62</b>
Piutang Koperasi 2001	65.300.000,00		-	65.300.000,00
Piutang Koperasi 2002	27.100.000,00		-	27.100.000,00
Piutang Koperasi 2003	221.250.000,00		11.500.000,00	209.750.000,00
Piutang Koperasi 2004	34.500.000,00		-	34.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	78.500.000,00		-	78.500.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00		-	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	11.500.000,00		-	11.500.000,00
Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00		-	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	55.118.850,00		-	55.118.850,00
Piutang Koperasi 2010	60.826.850,00		-	60.826.850,00
Piutang Koperasi 2014	26.089.930,58		16.671.000,00	9.418.930,58
Piutang UKM 2004	63.500.800,00		-	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	36.160.850,00		9.436.250,00	26.724.600,00
Piutang UKM 2006	36.639.383,00		-	36.639.383,00
Piutang UKM 2007	182.625.000,00		-	182.625.000,00
Piutang UKM 2008	328.925.660,00		53.000.000,00	275.925.660,00
Piutang UKM 2009	257.097.000,00		-	257.097.000,00
Piutang UKM 2010	167.205.000,00		1.900.002,00	165.304.998,00
Piutang UKM 2014	277.275.541,32		4.393.985,28	272.881.556,04
Piutang Cukai 2011	120.000.000,00		-	120.000.000,00
<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	<b>8.241.220.723,17</b>	<b>-</b>	<b>818.466.920,05</b>	<b>7.422.753.803,12</b>
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00		-	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	48.436.050,00		-	48.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	36.040.300,00		-	36.040.300,00
Piutang Sapi Betina 2011	336.000.000,00		12.500.000,00	323.500.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	610.900.000,00		52.000.000,00	558.900.000,00
Piutang Sapi Kreman 2003	141.294.500,00		3.475.000,00	137.819.500,00
Piutang Sapi Kreman 2011	157.000.000,00		-	157.000.000,00
Piutang Sapi Kreman 2012	469.050.000,00		110.600.000,00	358.450.000,00

<b>Bagian Lancar Piutang SKPD</b>	<b>Saldo 31 Des 2017 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Des 2018 (Rp)</b>
Piutang Kambing/Domba 2011	1.520.100.000,00		141.500.000,00	1.378.600.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	1.197.150.000,00		145.690.000,00	1.051.460.000,00
Piutang Budidaya Ikan 2012	10.000.000,00			10.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	21.100.000,00		-	21.100.000,00
Piutang Sapi Kreman 2013	279.700.000,00		90.500.000,00	189.200.000,00
Piutang Sapi Betina 2013	823.600.000,00		36.900.000,00	786.700.000,00
Piutang Kambing/Domba 2013	1.268.950.000,00		79.550.000,00	1.189.400.000,00
Piutang Ikan 2013	7.700.000,00		-	7.700.000,00
Sapi Kereman 2014	373.390.320,89		53.446.145,36	319.944.175,53
Sapi Betina 2014	358.480.419,19		42.030.920,85	316.449.498,34
Kambing/domba 2014	349.094.439,11		39.224.853,84	309.869.585,27
Budidaya Ikan 2014	214.906.893,98		11.050.000,00	203.856.893,98
<b>JUMLAH</b>	<b>15.285.799.554,85</b>	<b>-</b>	<b>1.257.393.774,83</b>	<b>14.028.405.780,02</b>

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di enam SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2018 tidak ada pemberian pinjaman baru.

Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut.

**(a)) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengurangan piutang senilai Rp34.446.617,50 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2018.

**(b)) Dinas Pertanian**

Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp188.779.000,00 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2018.

**(c)) Bagian Perekonomian**

Selama Tahun 2018 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Pengurangan piutang senilai Rp30.050.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2018.

**(d)) Dinas Ketahanan Pangan**

Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan piutang senilai Rp88.750.000,00 merupakan pembayaran pinjaman selama Tahun 2018.

**(e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sedangkan pengurangan senilai Rp96.901.237,28 merupakan pembayaran selama Tahun 2018.

**(f) Dinas Peternakan dan Perikanan**

Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp818.466.920,05 merupakan pembayaran selama Tahun 2018.

**(4) Bagian Lancar Piutang TP-TGR**

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2018 sama dengan 31 Desember 2017 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi.

**(5) Piutang Lainnya**

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp52.274.862.176,17 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	185.967.835,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	41.499.868.541,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	9.864.975.800,00
- Piutang Dividen	Rp	0,00
- Piutang Lainnya	Rp	724.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>52.274.862.176,17</b>

Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 58. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
<b>Piutang Bunga</b>	<b>195.777.368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809.533,00</b>	<b>185.967.835,17</b>
- Dinas Peternakan dan Perikanan	54.858.280,00	0,00	1.726.200,00	53.132.080,00
- Dinas Ketahanan Pangan	6.650.000,00	0,00	3.850.000,00	2.800.000,00
- Dinas Koperasi dan UM	104.901.490,00	0,00	3.600.000,00	101.301.490,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29.367.598,17	0,00	633.333,00	28.734.265,17
<b>Piutang Klaim Kesehatan</b>	<b>28.887.475.281,00</b>	<b>121.165.196.215,00</b>	<b>108.552.802.955,00</b>	<b>41.499.868.541,00</b>
1. KAI	730.958,00	12.194.299,00	12.407.184,00	518.073,00
2. Inhealth	16.560.711,00	193.289.102,00	171.689.410,00	38.160.403,00
3. BPJS kesehatan	27.910.199.346,00	115.899.972.276,00	103.668.447.274,00	40.141.724.348,00
4. Jasa Raharja	750.786.551,00	4.528.619.391,00	4.207.512.756,00	1.071.893.186,00
5. Petrochina	87.240,00	3.649.179,00	3.736.419,00	-
6. Pihak Ketiga	206.789.722,00	201.350.000,00	206.789.722,00	201.350.000,00
7. BPJS Ketenagakerjaan	2.320.753,00	322.495.604,00	282.220.190,00	42.596.167,00
8. Yakes Pertamina	0,00	3.626.364,00	0,00	3.626.364,00
<b>Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak</b>	<b>27.070.445.957,00</b>	<b>9.864.975.800,00</b>	<b>27.070.445.957,00</b>	<b>9.864.975.800,00</b>
- DBH-Pajak PKB	6.531.300.000,00	0,00	6.531.300.000,00	0,00

Piutang Lainnya	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
- DBH-Pajak BBNKB	4.136.411.368,00	0,00	4.136.411.368,00	0,00
- DBH-Pajak PBBKB	7.538.962.810,00	0,00	7.538.962.810,00	0,00
- DBH-Pajak AP	50.535.495,00	0,00	50.535.495,00	0,00
- DBH-Pajak Rokok	8.813.236.284,00	9.864.975.800,00	8.813.236.284,00	9.864.975.800,00
<b>Piutang Deviden</b>	<b>13.926.524.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926.524.671,20</b>	<b>0,00</b>
- Deviden Bank Jatim	13.242.728.671,20	0,00	13.242.728.671,20	0,00
- Deviden BPR Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deviden PT GDK	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividen BPR Jatim	683.796.000,00	0,00	683.796.000,00	0,00
- Deviden PT. BBS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>724.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.050.000,00</b>
- Piutang Komitmen Fee PT. ADS	0,00	724.050.000,00	0,00	724.050.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>70.080.223.277,37</b>	<b>131.754.222.015,00</b>	<b>149.559.583.116,20</b>	<b>52.274.862.176,17</b>

**(a) Piutang Bunga**

Pengurangan piutang bunga sebesar Rp9.809.533,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp1.726.200,00, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.850.000,00, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp3.600.000,00 serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp633.333,00.

**(b) Piutang Klaim Kesehatan**

Pada Tahun 2018 RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan yang pada tahun sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi, maka mulai tahun 2018 dicatat dalam pos Piutang Lainnya sebagai Piutang Klaim Kesehatan. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan pada saldo awal 2018 dari Rp26.483.556.881,00 menjadi Rp28.887.475.281,00.

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp121.165.196.215,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, *inhealth*, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, Petrochina, Pihak Ketiga dan BPJS Ketenagakerjaan selama Tahun 2018. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp108.552.802.955,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2018.

**Tabel 59. Piutang Klaim Kesehatan**

No	Uraian	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
<b>1</b>	<b>KAI</b>	<b>730.958,00</b>	<b>12.194.299,00</b>	<b>12.407.184,00</b>	<b>518.073,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	730.958,00	12.194.299,00	12.407.184,00	518.073,00
<b>2</b>	<b>Inhealth</b>	<b>16.560.711,00</b>	<b>193.289.102,00</b>	<b>171.689.410,00</b>	<b>38.160.403,00</b>
	- RSUD	16.560.711,00	193.289.102,00	171.689.410,00	38.160.403,00

No	Uraian	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
	Sosodoro Djatikoesoemo				
<b>3</b>	<b>BPJS Kesehatan</b>	<b>27.910.199.346,00</b>	<b>115.899.972.276,00</b>	<b>103.668.447.274,00</b>	<b>40.141.724.348,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	25.506.280.946,00	106.061.161.576,00	95.144.767.902,00	36.422.674.620,00
	- RSUD Sumberrejo	804.009.200,00	667.152.200,00	804.009.200,00	667.152.200,00
	- RSUD padangan	1.599.909.200,00	9.171.658.500,00	7.719.670.172,00	3.051.897.528,00
<b>4</b>	<b>Jasa Raharja</b>	<b>750.786.551,00</b>	<b>4.528.619.391,00</b>	<b>4.207.512.756,00</b>	<b>1.071.893.186,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	750.786.551,00	4.106.110.067,00	3.810.665.056,00	1.046.231.562,00
	- RSUD Sumberrejo	0,00	25.661.624,00	0,00	25.661.624,00
	- RSUD padangan	0,00	396.847.700,00	396.847.700,00	0,00
<b>5</b>	<b>Petrochina</b>	<b>87.240,00</b>	<b>3.649.179,00</b>	<b>3.736.419,00</b>	<b>0,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	87.240,00	3.649.179,00	3.736.419,00	0,00
<b>6</b>	<b>Pihak Ketiga</b>	<b>206.789.722,00</b>	<b>201.350.000,00</b>	<b>206.789.722,00</b>	<b>201.350.000,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	206.789.722,00	201.350.000,00	206.789.722,00	201.350.000,00
<b>7</b>	<b>BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>2.320.753,00</b>	<b>322.495.604,00</b>	<b>282.220.190,00</b>	<b>42.596.167,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	2.320.753,00	322.495.604,00	282.220.190,00	42.596.167,00
<b>8</b>	<b>Yakes Pertamina</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.364,00</b>
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	0,00	3.626.364,00	0,00	3.626.364,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.887.475.281,00</b>	<b>121.165.196.215,00</b>	<b>108.552.802.955,00</b>	<b>41.499.868.541,00</b>

**(c) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak**

Penambahan senilai Rp9.864.975.800,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV TA 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/788/KPTS/013/2018.

Pengurangan senilai Rp27.070.445.957,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PKB sebesar Rp6.531.300.000,00 yang ditransfer pada tanggal 1 Pebruari 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB sebesar Rp4.136.411.368,00 yang ditransfer pada tanggal 7 Pebruari 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB sebesar Rp7.538.962.810,00 yang ditransfer pada tanggal 14 Pebruari 2018, penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar Rp50.535.495,00 yang ditransfer pada tanggal 15 Pebruari 2018. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok senilai Rp8.813.236.284,00 ditransfer pada tanggal 23 Januari 2018.

**(d) Piutang Deviden**

Pengurangan piutang deviden senilai Rp13.926.524.671,20 terdiri atas deviden Bank Jatim senilai Rp13.242.728.671,20 yang ditransfer tanggal 22 Maret 2018 dan deviden BPR Jatim senilai Rp683.796.000,00 yang ditransfer tanggal 16 April 2018.

**(e) Piutang Lainnya**

Penambahan Piutang Lainnya adalah Piutang Komitmen Fee PT. ADS senilai Rp724.050.000,00 merupakan penerimaan *signature fee* sebesar US\$50.000 dari PT. ADS selama tahun 2018. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018 (US\$1 = Rp14.481,00).

**(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(21.979.234.530,99)	(19.882.145.003,05)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2018 sebesar Rp21.979.234.530,99 terdiri dari:

**Tabel 60. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Uraian	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	6.949.184.833,44	1.482.730.859,70	48.565.967,20	8.383.349.725,94
Dinas Pertanian	2.265.395.000,00	-	188.779.000,00	2.076.616.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.575.786.019,29	192.071.629,30	9.725.548,38	1.758.132.100,21
Dinas Peternakan dan Perikanan	5.939.819.137,32	1.428.497.869,25	467.491.200,00	6.900.825.806,57
Dinas Ketahanan Pangan	403.490.000,00	-	92.600.000,00	310.890.000,00
Bagian Perekonomian Setda	304.650.000,00	-	30.050.000,00	274.600.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.077.248.618,95	-	89.968.744,64	1.987.279.874,31
Dinas Penanaman Modal & PTSP	401.894,50	232.980,00	101.894,50	532.980,00
RSUD Sosodoro	132.417.784,41	188.775.785,95	132.417.784,41	188.775.785,95
RSUD Padangan	7.999.546,00	15.259.487,64	7.999.546,00	15.259.487,64
RSUD Sumberjo	4.020.046,00	3.464.069,12	4.020.046,00	3.464.069,12
PPKD	214.084.853,14	52.945.129,00	204.984.853,14	62.045.129,00
Dinas Kesehatan	7.647.270,00	17.463.572,25	7.647.270,00	17.463.572,25
<b>JUMLAH</b>	<b>19.882.145.003,05</b>	<b>3.381.441.382,21</b>	<b>1.284.351.854,27</b>	<b>21.979.234.530,99</b>

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokan



- menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- (2) Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
    - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
    - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
    - d. Kualitas macet, jika umur piutang diatas 5 tahun.
  - (3) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
    - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
    - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
    - d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
  - (4) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
    - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
    - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan.
  - (5) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
  - (6) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
    - 10% (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
    - 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
    - 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

**Tabel 61. Rincian Penyisihan Piutang Daerah**

NO	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hotel	2009	9	15.946.000,00	0,00	100	15.946.000,00	0,00	15.946.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2012	6	43.007.600,00	0,00	100	43.007.600,00	0,00	43.007.600,00
		Piutang Pajak Hotel	2014	4	512.000,00	0,00	50	256.000,00	0,00	256.000,00

NO	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Pajak Reklame	2009	9	24.739.500,00	0,00	100	24.739.500,00	0,00	24.739.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2012	6	2.737.500,00	0,00	100	2.737.500,00	0,00	2.737.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2013	5	5.919.010,00	0,00	50	2.959.505,00	0,00	2.959.505,00
		Piutang Pajak Reklame	2016	2	117.688.043,00	0,00	10	11.768.804,30	0,00	11.768.804,30
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2009	9	850.000,00	0,00	100	850.000,00	0,00	850.000,00
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2018	0	56.019.600,00	0,00	0,5	280.098,00	0,00	280.098,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2009	9	19.650.000,00	0,00	100	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2013	5	95.400,00	0,00	50	47.700,00	0,00	47.700,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2015	3	1.450.000,00	0,00	10	145.000,00	0,00	145.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2012	6	1.800.000,00	0,00	100	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2013	5	225.000,00	0,00	50	112.500,00	0,00	112.500,00
		Piutang Pajak Restoran	2014	4	1.042.858,00	0,00	50	521.429,00	0,00	521.429,00
		Piutang Pajak Restoran	2015	3	3.611.600,00	0,00	10	361.160,00	0,00	361.160,00
		Piutang Pajak Parkir	2013	5	811.000,00	0,00	50	405.500,00	0,00	405.500,00
		Piutang Pajak Parkir	2014	4	153.000,00	0,00	50	76.500,00	0,00	76.500,00
		Piutang Pajak Parkir	2015	3	1.943.000,00	0,00	10	194.300,00	0,00	194.300,00
		Piutang Pajak ABT	2012	6	2.714.140,00	0,00	100	2.714.140,00	0,00	2.714.140,00
		Piutang Pajak ABT	2013	5	1.924.596,00	0,00	50	962.298,00	0,00	962.298,00
		Piutang Pajak ABT	2014	4	45.132.314,00	0,00	50	22.566.157,00	0,00	22.566.157,00
		Piutang Pajak ABT	2015	3	27.359.974,00	0,00	10	2.735.997,40	0,00	2.735.997,40
		PPJ	2015	3	2,77	0,00	10	0,28	0,00	0,28
		PPJ	2017	0	3.442.391.399,00	0,00	0,5	17.211.957,00	0,00	17.211.957,00
		Pajak Hiburan	2012	6	2.950.000,00	0,00	100	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
		Pajak Hiburan	2013	5	16.500.000,00	0,00	50	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
		PBB	2009≤	9	3.557.793.886,92	0,00	100	3.557.793.886,92	0,00	3.557.793.886,92
			2010	8	665.773.948,44	0,00	100	665.773.948,44	0,00	665.773.948,44
			2011	7	840.788.751,88	0,00	100	840.788.751,88	0,00	840.788.751,88
			2012	6	1.383.246.519,37	0,00	100	1.383.246.519,37	0,00	1.383.246.519,37
			2013	5	1.143.397.169,00	0,00	50	571.698.584,50	0,00	571.698.584,50
			2014	4	1.431.981.596,00	0,00	50	715.990.798,00	0,00	715.990.798,00
			2015	3	1.047.423.856,59	0,00	10	104.742.385,66	0,00	104.742.385,66
			2016	2	1.341.656.945,00	0,00	10	134.165.694,50	0,00	134.165.694,50
			2017	1	1.887.429.047,00	0,00	10	188.742.904,70	0,00	188.742.904,70
			2018	0	3.050.021.192,00	0,00	0,5	15.250.105,96	0,00	15.250.105,96
		Retribusi Sewa Tanah	2016	2	217.865.000,33	0,00	10	21.786.500,03	0,00	21.786.500,03
			2017	1	1.200.000,00	0,00	10	120.000,00	0,00	120.000,00
		<b>Sub Jumlah 1</b>			<b>20.405.751.449,30</b>	<b>0,00</b>		<b>8.383.349.725,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383.349.725,94</b>
<b>2</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>Pinjaman Modal Petani</b>			<b>186.941.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>186.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.941.000,00</b>
		Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	14	42.196.000,00	0,00	100	42.196.000,00	0,00	42.196.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	13	14.000.000,00	0,00	100	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	11	25.500.000,00	0,00	100	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	11	6.000.000,00	0,00	100	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

NO	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	10	99.245.000,00	0,00	100	99.245.000,00	0,00	99.245.000,00
		<b>Pinjaman Usaha Tani Tembakau</b>			<b>1.889.675.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.889.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.675.000,00</b>
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	8	96.275.000,00	0,00	100	96.275.000,00	0,00	96.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	8	79.000.000,00	0,00	100	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	7	125.000.000,00	0,00	100	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	6	262.500.000,00	0,00	100	262.500.000,00	0,00	262.500.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	5	40.000.000,00	0,00	100	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	5	1.286.900.000,00	0,00	100	1.286.900.000,00	0,00	1.286.900.000,00
		<b>Sub Jumlah 2</b>			<b>2.076.616.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.076.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.616.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Pinjaman Modal Industri</b>			<b>1.113.298.615,45</b>	<b>0,00</b>		<b>923.479.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>923.479.101,21</b>
		Pinjaman Modal IKDK	2005	13	17.542.000,00	0,00	100	17.542.000,00	0,00	17.542.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	12	2.071.000,00	0,00	100	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	11	3.315.000,00	0,00	100	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	10	3.268.000,00	0,00	100	3.268.000,00	0,00	3.268.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	9	17.957.000,00	0,00	100	17.957.000,00	0,00	17.957.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	8	9.846.000,00	0,00	100	9.846.000,00	0,00	9.846.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	8	66.856.000,00	0,00	100	66.856.000,00	0,00	66.856.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	7	83.363.000,00	0,00	100	83.363.000,00	0,00	83.363.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	7	229.111.000,00	0,00	100	229.111.000,00	0,00	229.111.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	6	57.733.024,62	0,00	100	57.733.024,62	0,00	57.733.024,62
		Pinjaman Modal Cukai	2012	6	153.803.042,29	0,00	100	153.803.042,29	0,00	153.803.042,29
		Pinjaman Modal IKDK	2013	5	22.526.364,34	0,00	100	22.526.364,34	0,00	22.526.364,34
		Pinjaman Modal Cukai	2013	5	66.268.155,71	0,00	100	66.268.155,71	0,00	66.268.155,71
		Pinjaman Modal IKDK	2014	4	121.176.844,74	0,00	50	60.588.422,37	0,00	60.588.422,37
		Pinjaman Modal Cukai	2014	4	258.462.183,75	0,00	50	129.231.091,88	0,00	129.231.091,88
		<b>Pinjaman Tenaga Kerja</b>			<b>805.918.733,83</b>	<b>28.734.265,17</b>		<b>805.918.733,83</b>	<b>28.734.265,17</b>	<b>834.652.999,00</b>
		Pinjaman TKI	2001	17	57.511.352,73	8.093.136,00	100	57.511.352,73	8.093.136,00	65.604.488,73
		Pinjaman TKI	2002	16	81.700.363,64	9.899.636,06	100	81.700.363,64	9.899.636,06	91.599.999,70
		Pinjaman TKI	2003	15	590.922.685,46	10.741.493,11	100	590.922.685,46	10.741.493,11	601.664.178,57
		Pinjaman TKI	2004	14	14.000.000,00	0,00	100	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	13	61.784.332,00	0,00	100	61.784.332,00	0,00	61.784.332,00
		<b>Sub Jumlah 3</b>			<b>1.919.217.349,28</b>	<b>28.734.265,17</b>		<b>1.729.397.835,04</b>	<b>28.734.265,17</b>	<b>1.758.132.100,21</b>
<b>4</b>	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	Piutang Sapi Kremnan	2003	15	137.819.500,00	8.842.580,00	100	137.819.500,00	8.842.580,00	146.662.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	14	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	13	48.436.050,00	18.000.800,00	100	48.436.050,00	18.000.800,00	66.436.850,00

NO	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Sapi Betina	2006	12	36.040.300,00	19.355.500,00	100	36.040.300,00	19.355.500,00	55.395.800,00
		Piutang Sapi Betina	2011	7	323.500.000,00	0,00	100	323.500.000,00	0,00	323.500.000,00
		Piutang Sapi Kremen	2011	7	157.000.000,00	0,00	100	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	7	1.378.600.000,00	0,00	100	1.378.600.000,00	0,00	1.378.600.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	6	558.900.000,00	0,00	100	558.900.000,00	0,00	558.900.000,00
		Piutang Sapi Kremen	2012	6	358.450.000,00	0,00	100	358.450.000,00	0,00	358.450.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	6	1.051.460.000,00	0,00	100	1.051.460.000,00	0,00	1.051.460.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	6	21.100.000,00	0,00	100	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	6	10.000.000,00	0,00	100	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		Piutang Sapi Kremen	2013	5	189.200.000,00	0,00	100	189.200.000,00	0,00	189.200.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	5	786.700.000,00	0,00	100	786.700.000,00	0,00	786.700.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	5	1.189.400.000,00	0,00	100	1.189.400.000,00	0,00	1.189.400.000,00
		Piutang Ikan	2013	5	7.700.000,00	0,00	100	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
		Sapi Kereman	2014	4	319.944.175,53	0,00	50	159.972.087,77	0,00	159.972.087,77
		Sapi Betina	2014	4	316.449.498,34	0,00	50	158.224.749,17	0,00	158.224.749,17
		Kambing/domba	2014	4	309.869.585,27	0,00	50	154.934.792,64	0,00	154.934.792,64
		Budidaya Ikan	2014	4	203.856.893,98	0,00	50	101.928.446,99	0,00	101.928.446,99
		<b>Sub Jumlah 4</b>			<b>7.422.753.803,12</b>	<b>53.132.080,00</b>		<b>6.847.693.726,57</b>	<b>53.132.080,00</b>	<b>6.900.825.806,57</b>
5	Dinas Ketahanan Pangan	Pinjaman Modal Dryer	2005	13	52.250.000,00	0,00	100	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	12	67.940.000,00	0,00	100	67.940.000,00	0,00	67.940.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	11	145.000.000,00	2.800.000,00	100	145.000.000,00	2.800.000,00	147.800.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	10	42.900.000,00	0,00	100	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00
		<b>Sub Jumlah 5</b>			<b>308.090.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>308.090.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>310.890.000,00</b>
6	Bagian Perekonomian Setda	Pinjaman Dekranasda	2004	14	7.000.000,00	0,00	100	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	13	32.000.000,00	0,00	100	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	12	14.500.000,00	0,00	100	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	11	5.850.000,00	0,00	100	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	14	215.250.000,00	0,00	100	215.250.000,00	0,00	215.250.000,00
		<b>Sub Jumlah 6</b>			<b>274.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>274.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.600.000,00</b>
7	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	17	65.300.000,00	0,00	100	65.300.000,00	0,00	65.300.000,00
		Piutang Koperasi	2002	16	27.100.000,00	0,00	100	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
		Piutang Koperasi	2003	15	209.750.000,00	0,00	100	209.750.000,00	0,00	209.750.000,00
		Piutang Koperasi	2004	14	34.500.000,00	4.500.000,00	100	34.500.000,00	4.500.000,00	39.000.000,00
		Piutang UKM	2004	14	63.500.800,00	0,00	100	63.500.800,00	0,00	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	13	19.500.000,00	700.000,00	100	19.500.000,00	700.000,00	20.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	13	59.000.000,00	5.400.000,00	100	59.000.000,00	5.400.000,00	64.400.000,00
		Piutang UKM	2005	13	26.724.600,00	0,00	100	26.724.600,00	0,00	26.724.600,00
		Piutang Koperasi	2006	12	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	12	0,00	1.200.000,00	100	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	12	36.639.383,00	0,00	100	36.639.383,00	0,00	36.639.383,00
		Piutang Koperasi	2007	11	11.500.000,00	0,00	100	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	11	138.925.000,00	0,00	100	138.925.000,00	0,00	138.925.000,00
	Piutang UKM	2007	11	43.700.000,00	0,00	100	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	
	Piutang Koperasi	2008	10	46.750.000,00	0,00	100	46.750.000,00	0,00	46.750.000,00	

NO	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang UKM	2008	10	275.925.660,00	8.424.340,00	100	275.925.660,00	8.424.340,00	284.350.000,00
		Piutang Koperasi	2009	9	55.118.850,00	17.447.150,00	100	55.118.850,00	17.447.150,00	72.566.000,00
		Piutang UKM	2009	9	257.097.000,00	35.500.000,00	100	257.097.000,00	35.500.000,00	292.597.000,00
		Piutang Koperasi	2010	8	60.826.850,00	13.200.000,00	100	60.826.850,00	13.200.000,00	74.026.850,00
		Piutang UKM	2010	8	165.304.998,00	13.030.000,00	100	165.304.998,00	13.030.000,00	178.334.998,00
		Piutang Cukai	2011	7	120.000.000,00	0,00	100	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
		Piutang Koperasi	2014	4	9.418.930,58	0,00	50	4.709.465,29	0,00	4.709.465,29
		Piutang UKM	2014	4	272.881.556,04	0,00	50	136.440.778,02	0,00	136.440.778,02
		<b>Sub Jumlah 7</b>			<b>2.027.128.627,62</b>	<b>101.301.490,00</b>		<b>1.885.978.384,31</b>	<b>101.301.490,00</b>	<b>1.987.279.874,31</b>
<b>8</b>	<b>Dinas Penanaman Modal &amp; PTSP</b>	Piutang Retribusi Trayek	2012	6	300.000,00	0,00	100	300.000,00	0,00	300.000,00
		Piutang Retribusi IMB	2018	0	46.596.000,00	0,00	0,5	232.980,00	0,00	232.980,00
		<b>Sub Jumlah 8</b>			<b>46.896.000,00</b>			<b>532.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.980,00</b>
<b>9</b>	<b>RSUD Sosodoro</b>	Klaim Kesehatan	2018	0	37.755.157.189,00	0,00	0,5	188.775.785,95	0,00	188.775.785,95
		<b>Sub Jumlah 9</b>			<b>37.755.157.189,00</b>			<b>188.775.785,95</b>	<b>0,00</b>	<b>188.775.785,95</b>
<b>10</b>	<b>RSUD Padangan</b>	Klaim Kesehatan	2018	0	3.051.897.528,00	0,00	0,5	15.259.487,64	0,00	15.259.487,64
		<b>Sub Jumlah 10</b>			<b>3.051.897.528,00</b>			<b>15.259.487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.259.487,64</b>
<b>11</b>	<b>RSUD Sumberrejo</b>	Klaim Kesehatan	2018	0	692.813.824,00	0,00	0,5	3.464.069,12	0,00	3.464.069,12
		<b>Sub Jumlah 11</b>			<b>692.813.824,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.464.069,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.069,12</b>
<b>12</b>	<b>PPKD</b>	TGR an Baidowi	2010	8	9.100.000,00	0,00	100	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
		Dividen	2018	0	0,00	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00
		DBH Pajak	2018	0	9.864.975.800,00	0,00	0,5	49.324.879,00	0,00	49.324.879,00
		Komitmen Fee PT. ADS	2018	0	724.050.000,00	0,00	0,5	3.620.250,00	0,00	3.620.250,00
		<b>Sub Jumlah 12</b>			<b>10.598.125.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.045.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045.129,00</b>
<b>13</b>	<b>Dinkes</b>	JKN non Kapitasi (BPJS)	2018	0	3.492.714.450,00	0,00	0,5	17.463.572,25	0,00	17.463.572,25
		<b>Sub Jumlah 13</b>			<b>3.492.714.450,00</b>			<b>17.463.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.463.572,25</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>90.071.762.020,32</b>	<b>185.967.835,17</b>		<b>21.793.266.695,82</b>	<b>185.967.835,17</b>	<b>21.979.234.530,99</b>

**(d) Belanja Dibayar Di Muka**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Belanja Dibayar Di Muka	29.166.666,67	99.166.666,67

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2018 senilai Rp 29.166.666,67 merupakan belanja Dinas Sosial atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien Jamkesda dan Jamkesmas yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp140.000.000,00 dengan masa kontrak 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2019 sesuai dengan surat Dinas Sosial Nomor 460/332/412.206/2017 tanggal 10 Mei 2017. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 masa sewa yang telah digunakan adalah 19 bulan yaitu Juni 2017 sampai dengan Desember 2018, sedangkan sisanya selama 5 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

**(e) Persediaan**

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Persediaan	46.095.980.106,25	65.161.636.714,71

Jumlah persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.095.980.106,25. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

**Tabel 62. Persediaan**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	650.025.914,00	914.864.946,00
2	Persediaan Alat Listrik	57.318.100,00	86.574.998,00
3	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	104.280.059,00	77.596.972,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	747.086.000,00	790.447.100,00
5	Persediaan Bibit Ternak	27.400.000,00	64.875.000,00
6	Persediaan Obat-obatan	24.377.347.265,83	27.845.219.709,31
7	Persediaan Bahan Kimia	1.189.015.480,00	967.645.315,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	2.768.984.503,25	2.520.551.246,00
9	Persediaan Alat Kebersihan	37.096.180,00	418.120.096,00
10	Persediaan Radiologi	325.252.996,00	445.541.559,60
11	Persediaan Linen	461.031.145,50	0,00
12	Persediaan Haemodialisa	404.875.365,00	408.237.853,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	87.168.860,00	2.286.500,00
14	Persediaan CSSD	156.465.783,00	111.717.431,80
15	Persediaan Alat Kesehatan	4.570.087.020,00	9.587.243.635,00
16	Persediaan Bahan Laboratorium	423.316.906,00	553.635.014,00
17	Persediaan Materai	13.890.000,00	6.198.000,00
18	Persediaan Bahan Bakar Minyak	224.265.000,00	128.244.070,00
19	Persediaan Bahan Makanan Pokok	69.595.385,00	79.294.482,00
20	Persediaan Lain-lain	8.560.938.368,67	18.583.628.188,00
21	Persediaan Reagent	840.539.775,00	1.530.085.249,00
22	Persediaan Gelang Identitas Pasien	0,00	5.589.500,00
23	Persediaan Plastik dan Karung	0,00	34.039.850,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.095.980.106,25</b>	<b>65.161.636.714,71</b>

## 1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp650.025.914,00, sedangkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp914.864.946,00, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 63. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Pendidikan	50.972.000,00	15.024.350,00
2	Dinas Kesehatan	219.582.635,00	156.379.460,00
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	181.065.071,00	463.428.136,00
4	RSUD Padangan	4.130.491,00	11.673.250,00
5	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	959.500,00	517.500,00



No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
6	Dinas PU Sumber Daya Air	6.733.300,00	14.107.175,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	2.349.500,00	703.500,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	985.000,00	1.300.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	340.000,00	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.000,00	755.000,00
11	Dinas Pemadam Kebakaran	1.805.000,00	825.000,00
12	Dinas Sosial	777.000,00	750.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	160.000,00	80.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	961.572,00	770.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	820.000,00	618.750,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.844.500,00	3.243.000,00
17	Dinas Perhubungan	1.455.000,00	1.983.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.000,00	139.400,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.221.075,00	1.349.500,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810.000,00	450.000,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.757.500,00	1.333.900,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	219.000,00	175.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.078.000,00	434.000,00
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	351.500,00	946.900,00
25	Dinas Pertanian	4.298.120,00	3.341.625,00
26	Dinas Perdagangan	825.000,00	436.500,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.679.500,00	757.500,00
28	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	8.716.500,00	4.774.000,00
29	Bagian Pemerintahan	200.000,00	160.000,00
30	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	200.000,00	591.500,00
31	Bagian Sumber Daya Alam	733.000,00	90.000,00
32	Bagian Perlengkapan	129.282.250,00	209.237.500,00
33	Bagian Pembangunan	185.000,00	160.000,00
34	Bagian Perekonomian	120.000,00	108.000,00
35	Bagian Umum dan Keuangan	140.000,00	339.000,00
36	Bagian Humas dan Protokol	-	180.000,00
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	50.000,00	90.000,00
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.710.000,00	-
39	Sekretariat DPRD	263.000,00	234.000,00
40	Inspektorat	715.000,00	2.865.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.051.700,00	2.312.000,00
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.080.000,00	385.000,00
43	Badan Pendapatan Daerah	5.453.000,00	5.302.500,00
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	982.500,00	61.000,00
45	Kec Bojonegoro	365.000,00	-

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
46	Kec. Kapas	257.500,00	127.000,00
47	Kec Balen	152.000,00	355.000,00
48	Kec Sumberrejo	278.000,00	248.500,00
49	Kec Kanor	287.000,00	170.000,00
50	Kec Baureno	275.000,00	250.000,00
51	Kec Sugihwaras	370.000,00	420.000,00
52	Kec Kepohbaru	73.000,00	57.500,00
53	Kec Kedungadem	100.000,00	145.000,00
54	Kec Sukosewu	-	221.000,00
55	Kec Trucuk	535.200,00	-
56	Kec Malo	250.000,00	125.000,00
57	Kec Kalitidu	165.000,00	210.000,00
58	Kec Dander	560.000,00	560.000,00
59	Kec Padangan	270.000,00	365.000,00
60	Kec Purwosari	429.000,00	271.000,00
61	Kec Kasiman	450.000,00	465.000,00
62	Kec Kedewan	221.000,00	-
63	Kec Ngasem	430.000,00	314.000,00
64	Kec Ngambon	220.000,00	190.000,00
65	Kec Tambakrejo	304.000,00	100.000,00
66	Kec Ngraho	200.000,00	140.000,00
67	Kec Margomulyo	450.000,00	127.000,00
68	Kec Temayang	230.000,00	567.000,00
69	Kec Bubulan	320.000,00	408.000,00
70	Kec Gondang	1.480.000,00	251.000,00
71	Kec Sekar	130.000,00	141.000,00
72	Kec Gayam	260.000,00	225.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>650.025.914,00</b>	<b>914.864.946,00</b>

## 2. Persediaan Alat Listrik

Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp57.318.100,00, sedangkan saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp86.574.998,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 64. Rincian Persediaan Alat Listrik**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	200.000,00	920.000,00
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	31.142.100,00	65.382.154,00
3	RSUD Sumberrejo	-	13.390.100,00
4	RSUD Padangan	18.017.000,00	6.288.744,00
5	Dinas PU Sumber Daya Air	2.867.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	252.000,00	
7	Dinas Pemadam Kebakaran	3.690.000,00	
8	Dinas Pertanian	1.050.000,00	594.000,00
9	Inspektorat	100.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>57.318.100,00</b>	<b>86.574.998,00</b>

## 3. Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

Persediaan suku cadang sarana mobilitas terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp104.280.059,00, sedangkan saldo persediaan suku cadang

sarana mobilitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp77.596.972,00.

4. **Persediaan Bahan/Bibit Tanaman**  
 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman terdapat pada Dinas Pertanian. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp747.086.000,00, sedangkan saldo persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp790.447.100,00.
5. **Persediaan Bibit Ternak**  
 Persediaan Bibit Ternak terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.400.000,00, sedangkan saldo persediaan Bibit Ternak per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp64.875.000,00.
6. **Persediaan Obat-obatan**  
 Saldo Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.377.347.265,83, sedangkan saldo persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.27.845.219.709,31, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 65. Rincian Persediaan Obat-obatan**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	16.125.163.508,00	15.410.188.719,00
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	4.540.446.998,00	7.439.632.991,00
3	RSUD Sumberrejo	1.041.247.918,59	818.435.957,62
4	RSUD Padangan	2.560.136.101,24	3.740.859.921,69
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	11.016.320,00	274.491.000,00
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.655.000,00	36.987.000,00
7	Dinas Pertanian	97.681.420,00	124.624.120,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.377.347.265,83</b>	<b>27.845.219.709,31</b>

Pada RSUD Padangan terdapat obat-obatan yang sudah rusak tetapi masih dicatat dalam persediaan, yaitu Colsancetine 1 gr injeksi senilai Rp1.161.600,00 dan benang operasi T-Vio 2.0 V65senilai Rp1.647.312,00. Hal ini disebabkan karena pengadaan atas Colsancetine yang sudah lama dan pengadaan benang operasi melalui e-catalog sehingga barang tidak dapat diretur. Selain itu persediaan obat-obatan dalam kondisi baik tidak ada yang expired ataupun rusak karena sebelum sampai expired, barang sudah ditukar dengan yang baru.

7. **Persediaan Bahan Kimia**  
 Persediaan Bahan Kimia terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.189.015.480,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp967.645.315,00.
8. **Persediaan Bahan Cetakan**  
 Saldo Persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.768.984.503,25, sedangkan saldo persediaan Bahan

Cetakan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.520.551.246,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 66. Rincian Persediaan Bahan Cetakan**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	35.840.500,00	363.393.100,00
2	RSUD Sumberrejo	108.647.500,00	81.551.000,00
3	RSUD Padangan	113.282.300,00	41.935.922,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	308.750,00	78.500,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.000,00	600.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	2.625.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.520.000,00	185.500,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.159.962.816,00	1.568.878.285,00
9	Dinas Perhubungan	86.025.637,25	123.841.439,00
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	166.641.000,00	232.215.000,00
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	80.000,00
12	Dinas Pertanian	4.900.000,00	2.650.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	600.000,00
14	Inspektorat	4.176.500,00	1.790.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.350.000,00	1.700.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	82.629.500,00	98.427.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.768.984.503,25</b>	<b>2.520.551.246,00</b>

9. Persediaan Alat Kebersihan

Saldo Persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.096.180,00, sedangkan saldo persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp418.120.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 67. Rincian Persediaan Alat Kebersihan**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	6.655.000,00	12.039.100,00
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	-	293.691.906,00
3	RSUD Sumberrejo	16.358.500,00	24.125.200,00
4	RSUD Padangan	12.962.180,00	87.218.890,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	73.000,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	276.000,00	97.000,00
7	Dinas Perhubungan	382.000,00	695.000,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	135.000,00	-
9	Inspektorat	108.000,00	108.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		120.000,00
11	Kec Kapas	-	25.000,00
12	Kec Purwosari	123.000,00	-
13	Kec Kedewan	23.500,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.096.180,00</b>	<b>418.120.096,00</b>

10. Persediaan Radiologi

Saldo Persediaan Radiologi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp325.252.996,00, sedangkan saldo persediaan Radiologi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp445.541.559,60, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 68. Rincian Persediaan Radiologi**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	181.727.196,00	143.191.131,60
3	RSUD Sumberrejo	74.844.000,00	45.975.600,00
4	RSUD Padangan	68.681.800,00	256.374.828,00
<b>JUMLAH</b>		<b>325.252.996,00</b>	<b>445.541.559,60</b>

11. Persediaan Linen

Persediaan Linen terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp461.031.145,50.

12. Persediaan Haemodialisa

Persediaan Haemodialisa terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp404.875.365,00, sedangkan saldo persediaan Haemodialisa per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp408.237.853,00.

13. Persediaan Alat Pelindung Diri

Persediaan Alat Pelindung Diri terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87.168.860,00, sedangkan saldo persediaan Alat Pelindung Diri per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.286.500,00.

14. Persediaan CSSD

Persediaan CSSD terdapat pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp156.465.783,00, sedangkan saldo persediaan CSSD per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp111.717.431,80.

15. Persediaan Alat Kesehatan

Saldo Persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.570.087.020,00, sedangkan saldo persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.587.243.635,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 69. Rincian Persediaan Alat Kesehatan**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	-	5.418.969.100,00
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	3.363.822.518,00	3.181.683.114,00
3	RSUD Sumberrejo	1.205.989.502,00	974.929.421,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	11.662.000,00
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	275.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4.570.087.020,00</b>	<b>9.587.243.635,00</b>

16. Persediaan Bahan Laboratorium

Saldo Persediaan Bahan Laboratorium per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp423.316.906,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Laboratorium per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp418.120.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 70. Rincian Persediaan Bahan Laboratorium**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	-	1.377.125.569,00
2	RSUD Sumberrejo	248.912.579,00	553.635.014,00
3	RSUD Padangan	174.404.327,00	152.959.680,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>423.316.906,00</b>	<b>2.083.720.263,00</b>

17. Persediaan Materai

Saldo Persediaan Materai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.890.000,00, sedangkan saldo persediaan Materai per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.198.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 71. Rincian Persediaan Materai**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	1.062.000,00	1.623.000,00
2	Dinas Pertanian	12.000.000,00	3.927.000,00
3	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	141.000,00	
4	Inspektorat	120.000,00	240.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	435.000,00	240.000,00
6	Kec Sugihwaras	-	60.000,00
7	Kec Purwosari	66.000,00	108.000,00
8	Kec Kedewan	66.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>6.198.000,00</b>

18. Persediaan Bahan Bakar Minyak

Saldo Persediaan Bahan Bakar Minyak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp224.265.000,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Bakar Minyak per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp128.244.070,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 72. Rincian Persediaan Bahan Bakar Minyak**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	RSUD Padangan	-	2.438.500,00
2	Dinas PU Sumber Daya Air	224.265.000,00	125.805.570,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>224.265.000,00</b>	<b>128.244.070,00</b>

19. Persediaan Bahan Makanan Pokok

Saldo Persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp69.595.385,00, sedangkan saldo persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp79.294.482,00, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 73. Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	RSUD Sumberrejo	19.138.200,00	4.242.980,00
2	RSUD Padangan	50.457.185,00	75.051.502,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>69.595.385,00</b>	<b>79.294.482,00</b>

## 20. Persediaan Lain-Lain

Saldo Persediaan Lain-Lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.560.938.368,67, sedangkan saldo Persediaan Lain-Lain per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.623.257.538,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 74. Rincian Persediaan Lain-Lain**

No	Nama SKPD	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Dinas Kesehatan	4.320.000,00	45.695.500,00
2	RSUD Sumberrejo	32.535.500,00	976.850,00
3	RSUD Padangan	11.363.542,00	11.444.812,00
4	Dinas PU Sumber Daya Air	242.772.670,00	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	8.265.421.656,67	18.563.890.376,00
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.225.000,00	-
7	Inspektorat	-	1.250.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.560.938.368,67</b>	<b>18.623.257.538,00</b>

Berdasarkan hasil reviu Inspektorat terdapat penambahan jumlah persediaan lain-lain pada Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp8.265.421.656,67 yang terdiri dari persediaan atas hibah barang yang belum diserahkan pada pihak ketiga tahun 2018 senilai Rp8.070.033.276,67 dan persediaan atas Bansos barang yang belum diserahkan pada pihak ketiga tahun 2018 senilai Rp195.388.380,00.

## 21. Persediaan Reagent

Persediaan Reagent terdapat pada Dinas Kesehatan. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp840.539.775,00, sedangkan saldo persediaan reagent per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.530.085.249,00

**7.E.3.a.2 Investasi Jangka Panjang**

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	395.994.740.790,35	389.544.572.889,05
<b>Jumlah</b>	<b>395.994.740.790,35</b>	<b>389.544.572.889,05</b>

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp395.994.740.790,35 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

**(a) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

**(b) Investasi Permanen**

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 sebesar Rp395.994.740.790,35 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari:

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Investasi Permanen	395.994.740.790,35	389.544.572.889,05

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

**Tabel 75. Investasi Permanen**

Investasi Permanen	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2018 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/Koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
PD BPR Bojonegoro	224.852.823.637,00	0,00	0,00	0,00	1.135.419.792,00	223.717.403.845,00
PD Apotik Sidowaras	487.948.067,99	0,00	0,00	290.363.762,46	0,00	197.584.305,53
PD Pasar Bojonegoro	26.838.432.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838.432.269,06
PDAM Bojonegoro	12.175.047.586,85	0,00	6.954.541.402,91	0,00	0,00	19.129.588.989,76
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	22.746.996.206,27	0,00	921.410.052,85	0,00	0,00	23.668.406.259,12
BPR Jatim	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
PT, GDK	7.363.167.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.167.121,88
<b>JUMLAH</b>	<b>389.544.572.889,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.951.455,76</b>	<b>290.363.762,46</b>	<b>1.135.419.792,00</b>	<b>395.994.740.790,35</b>

**(1) PD BPR Bojonegoro**

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (Informasi Teknologi). Pada Tahun 2018 ada pengurangan investasi permanen senilai Rp1.135.419.792,00 merupakan akibat dari penggunaan metode ekuitas.

## **(2) PD Apotik Sidowaras**

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014.

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014 :

(a) Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian:

Kas dan setara kas : Rp 90.057.733,57  
(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)

Persediaan barang : Rp 32.781.060,00

Uang muka pajak : Rp 89.330.138,49

(b) Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63

(c) Kewajiban kepada para pihak :

Hutang pajak : Rp 2.804.566,74

Hutang pembagian laba : Rp 22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memproses pembubaran PD Apotek Sidowaras dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, Bagian Perekonomian sedang dalam proses membuat usulan pembentukan Tim Likuidatur dan pendamping Tim Likuidatur yang akan bertugas mengurus terkait masalah aset, kewajiban dan ekuitas dari BUMD bersangkutan.

Pada Tahun 2018 terdapat pengurangan investasi permanen senilai Rp290.363.762,46 merupakan ekuitas akhir sesuai dengan hasil audit penutupan oleh Kantor Akuntan Publik per tanggal 30 September 2014.

## **(3) PD Pasar Bojonegoro**

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada

PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2018 PD Pasar dalam proses pengalihkelolaan kepada Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya mulai tanggal 1 Januari 2019 secara penuh pengelolaan pasar daerah berada dibawah tupoksi Dinas Perdagangan serta ex karyawan PD Pasar akan dipekerjakan di Dinas Perdagangan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) yang diikat dalam perjanjian kontrak.

#### **(4) PDAM Bojonegoro**

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Penambahan senilai Rp6.954.541.402,91 merupakan akibat penggunaan metode ekuitas.

#### **(5) PT Asri Dharma Sejahtera**

Penilaian investasi di PT Asri Dharma Sejahtera menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US\$50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

PT. ADS merupakan salah satu BUMD Pemkab Bojonegoro dengan bidang usaha semula dibidang kegiatan usaha minyak bumi dan gas. Pendirian tersebut selanjutnya disahkan dengan Akta Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH Nomor 484 Tahun 2002 dengan bidang usaha antara lain ekspor dan impor, perdagangan lokal, jasa angkutan, jasa pergudangan. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham antara Pemkab Bojonegoro, PT. ADS dan PT. SER tanggal 31 Maret 2009, kepemilikan saham PT. ADS dari semula dimiliki oleh Pemkab Bojonegoro dan INS menjadi dimiliki Pemkab Bojonegoro dan PT. SER. Selain Perjanjian Penempatan Saham, pada tahun 2009 tersebut juga dibuat Perjanjian Pemegang Saham antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER yang salah satu klausulnya adalah merubah anggaran dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi salah satu kesepakatan perjanjian tersebut, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. ADS.

Selain itu, PT. ADS juga membuat perubahan anggaran dasar yang telah diaktakan pada Notaris Sutjipto, SH, M.Kn dengan Akta Nomor 183 tanggal 22 Juni 2009 dan mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31870.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009. Pada saat perubahan anggaran dasar tersebut, modal saham seri A dan B telah disetorkan seluruhnya, sedangkan untuk saham seri C, dari modal dasar sebanyak 35.294 lembar, baru ditempatkan sebanyak 21.480 lembar dengan nilai nominal Rp270.825.897.360,00.

Berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn, Nomor 5 tanggal 25 Juni 2010, modal saham seri C ditambah menjadi 28.643 lembar saham dan kemudian dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn Nomor 31 tanggal 15 Pebruari 2012, ditambah lagi menjadi 30.511 lembar saham atau senilai Rp384.691.292.102,00. Kedua perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-17846 tertanggal 14 Juli 2010, Nomor AHU-AH.01.10-09096 tanggal 15 Maret 2012. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan dua akta perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT. ADS menjadi sebagai berikut:

**Tabel 76. Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009**

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT. SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT. SER	35.294	12.608.282,00	444.996.704.908,00	30.511	12.608.282,00	384.691.292.102,00
<b>Jumlah</b>		<b>275.294</b>		<b>453.004.704.908,00</b>	<b>270.511</b>		<b>392.699.292.102,00</b>

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Nomor 298 tanggal 31 Januari 2017, modal saham seri C ditambah menjadi 52.434 lembar saham dan disepakati kenaikan harga saham dari Rp12.608.282,00 menjadi Rp26.000.000,00 dengan pertimbangan agar Pemkab Bojonegoro tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT. ADS. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0086878 tanggal 24 Pebruari 2017. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT. ADS menjadi sebagai berikut:

**Tabel 77. Struktur Modal PT. ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017**

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
	PT. SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT. SER	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>292.434</b>		<b>1.371.292.000.000,00</b>	<b>292.434</b>		<b>1.371.292.000.000,00</b>

**(6) PT Bank Jatim**

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Bank Jatim berjumlah 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

**(7) PT Bojonegoro Bangun Sarana**

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. Penambahan senilai Rp6.954.541.402,91 merupakan akibat penggunaan dari metode ekuitas.

**(8) BPR Jatim**

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00.

**(9) Griya Dharma Kusuma (GDK)**

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Pengurangan senilai Rp0,00 merupakan akibat penggunaan dari metode ekuitas.

Sesuai dengan laporan keuangan PT Griya Dharma Kusuma (GDK) yang belum diaudit, total penyertaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PT Griya Dharma Kusuma (GDK) adalah Rp6.544.713.181,36. Saat ini PT Griya Dharma Kusuma masih dalam proses audit oleh KAP Erfan dan Rakhmawan.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT. ADS, PT. Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro, PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras dan PT.Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.



### 7.E.3.a.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.387.521.020.529,50 dan saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp3.533.024.083.701,08. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 78. Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2017 (Rp)	Mutasi 2018		Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	597.008.670.911,00	1.462.483.545.258,00	5.967.164.500,00	2.053.525.051.669,00
Peralatan dan Mesin	847.712.885.468,91	194.672.381.055,30	37.781.417.576,62	1.004.603.848.947,59
Gedung dan Bangunan	1.714.449.694.406,72	857.283.228.596,08	756.906.665.677,67	1.814.826.257.325,13
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.127.819.005.897,21	522.932.326.960,23	114.115.610.891,02	2.536.635.721.966,42
Aset Tetap Lainnya	67.554.199.640,79	17.647.298.856,12	4.607.292.486,00	80.594.206.010,91
Konstruksi dalam Pengerjaan	277.570.284.220,50	59.696.697.247,95	128.091.911.521,00	209.175.069.947,45
Akumulasi Penyusutan	(2.099.090.656.844,05)	0,00	212.748.478.492,95	(2.311.839.135.337,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.533.024.083.701,08</b>	<b>3.114.715.477.973,68</b>	<b>1.260.218.541.145,26</b>	<b>5.387.521.020.529,50</b>

Rincian aset tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran C1 s.d C5**.

#### (a) Tanah

	<u>31 Desember 2018 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2017 (Rp)</u>
<b>Tanah</b>	2.053.525.051.669,00	597.008.670.911,00

Jumlah aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hingga Tahun 2018 adalah sebanyak 1.730 bidang tanah yang terdiri dari 503 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 1.227 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.053.525.051.669,00 dengan uraian sebagai berikut:

<b>1 Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>597.008.670.911,00</b>	
<b>2 Penambahan TA 2018:</b>		
3 Belanja Modal	725.423.250,00	a)
4 Hibah Pihak Ketiga	1,00	b)
5 Penambahan Lain	1.458.242.922.007,00	c)
6 Mutasi antar SKPD	3.515.200.000,00	d)
<b>7 Jumlah (3 sd 6)</b>	<b>1.462.483.545.258,00</b>	
<b>8 Pengurangan TA 2018:</b>		
9 Penghapusan Aset	(191.750.000,00)	e)
10 Reklas	(2.260.214.500,00)	f)

11	Mutasi antar SKPD	(3.515.200.000,00) g)
12	<b>Jumlah (9 sd 11)</b>	<b>(5.967.164.500,00)</b>
13	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1+7+12)</b>	<b>2.053.525.051.669,00</b>

Penjelasan terinci atas penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp1.462.483.545.258,00 adalah sebagai berikut:

**Tabel 79. Penambahan Aset Tanah**

No. Ref	Uraian	Keterangan	Nilai (Rp)
a)	<b>Belanja Modal Tahun 2018</b>	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah	<b>725.423.250,00</b>
b)	<b>Hibah Pihak Ketiga</b>		<b>1,00</b>
	Hibah dari Alm SITI CHALIMAH dan keluarga	Lokasi Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro	1,00
c)	<b>Penambahan Lain</b>		<b>1.458.242.922.007,00</b>
	Penambahan atas pelepasan hak aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (tukar menukar)	Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/616/KPTS/2015	13.323.200.000,00
	Kurang catat 3 bidang Tanah di Desa Banjarsari	a) luas bidang masing-masing 214m <sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Pakai No. 10 Tahun 2017; b) Luas 244 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Pakai No. 09 Tahun 2017 c) Luas 175 m <sup>2</sup> sebidang tanah untuk masjid dengan Sertifikat Hak Pakai No. 08 Tahun 2017	3,00
	Kurang catat Tanah Kantor	Lokasi di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01 Kelurahan Ledok Wetan dengan Luas Tanah 1.332 m <sup>2</sup> (Eks Kantor PD. BPR)	250.630.000,00
	Kurang catat tanah Eks Tanah bengkok kelurahan Sumbang	Lokasi Desa Wedi Kec. Kapas Bojonegoro	1,00
	Tanah dibawah ruas jalan dan bahu jalan		1.444.669.092.000,00
	Pemberian nilai atas 3 bidang tanahyang sebelumnya @ bernilai Rp0,00	satu bidang tanah SMPN 1 Sukosewu dan 2 bidang tanah SMPN 3 Baureno	3,00
d)	<b>Mutasi Aset Antar SKPD</b>	mutasi aset dari Kec. Bojonegoro ke Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi Tanah di Desa Sukowati Kec. Kapas	<b>3.515.200.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>1.462.483.545.258,00</b>

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2018 senilai Rp5.967.164.500,00,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 80. Pengurangan Aset Tanah

No. Ref	Uraian	Keterangan	Nilai (Rp)
e)	<b>Penghapusan Aset dalam bentuk Hibah :</b>		<b>191.750.000,00</b>
	Tanah Bangunan Kantor Polsek Kedewan	Lokasi Desa/Kec. Kedewan	11.750.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Polsek Gondang	Lokasi Desa/Kec. Gondang	49.980.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Polsek Trucuk	Lokasi Desa Sumberjo Kec. Trucuk	14.580.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Polsek Sukosewu	Lokasi Desa/Kec Sukosewu	17.940.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Polsek Gayam	Lokasi Desa Gayam Kec. Ngasem	97.500.000,00.
f)	<b>Reklas Tanah SMA/SMK yang belum di serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</b>		<b>2.260.214.500,00</b>
g)	<b>Mutasi Aset Antar SKPD</b>	mutasi aset dari Kec. Bojonegoro ke Dinas Lingkungan Hidup Lokasi Tanah di Desa Sukowati Kec. Kapas	<b>3.515.200.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>5.967.164.500,00</b>

## (b) Peralatan dan Mesin

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Peralatan dan Mesin	1.004.603.848.947,59	847.712.885.468,91

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.004.603.848.947,59 dengan uraian sebagai berikut:

<b>1 Saldo per 31 Desember 2017</b>	847.712.885.468,91	
<b>2 Penambahan TA 2018:</b>		
3 Belanja Modal	142.873.891.529,80	a)
4 Kapitalisasi	2.517.980.875,00	b)
5 Hibah Pihak Ketiga	2.288.082.500,00	c)
6 Reklasifikasi	22.315.671.463,00	d)
7 Penambahan Lain	3.834.887.287,50	e)
8 Mutasi aset antar SKPD	20.841.867.400,00	f)
<b>9 Jumlah (3 s.d. 8)</b>	<b>194.672.381.055,30</b>	
<b>10 Pengurangan TA 2018:</b>		
11 Penghapusan	(835.000.000,00)	g)
12 Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(1.344.242.874,00)	h)
13 Reklasifikasi	(1.637.898.089,61)	i)
14 Pengurangan Lain	(321.279.000,03)	j)
15 Ekstrakomptabel	(12.801.130.212,98)	k)
16 Mutasi aset antar SKPD	20.841.867.400,00	l)
<b>17 Jumlah (11 s.d. 16)</b>	<b>(37.781.417.576,62)</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1+9+17)</b>	<b>1.004.603.848.947,59</b>	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2018 sebesar Rp194.672.381.055,30 adalah sebagai berikut:

**Tabel 81. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	<b>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar</b>	<b>142.873.891.529,80</b>
b)	<b>Kapitalisasi belanja PKB dan BBNKB mobil tangga built up 60 meter</b>	<b>2.517.980.875,00</b>
c)	<b>Hibah</b>	<b>2.288.082.500,00</b>
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2.288.082.500,00
d)	<b>Reklasifikasi</b>	<b>22.315.671.463,00</b>
	Reklas Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.652.614.734,00
	reklas Peralatan mesin untuk bangunan Gedung Rumah Sakit yang diserahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	8.867.686.717,00
	Belanja BLUD RSUD Sumberejo	505.540.862,00
	Reklas Belanja BLUD RSUD Padangan	51.325.000,00
	dari Gedung dan Bangunan untuk Peralatan dan mesin dari LRA Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	780.991.500,00
	Reklas dari Gedung bangunan untuk aset yang akan diatribusikan dengan aset induk	8.013.971.150,00
	Reklas Aset diknas tahun 2013-2016 yang diatribusikan ke induk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.800.000,00
	Reklas dari ATB ke Peralatan dan Mesin	220.000.000,00
	Reklas dari bangunan gedung Pusdiklat dan Pengembangan SDM Kab. Bojonegoro Prodi otomotif	2.210.941.500,00
	Reklas dari ATB untuk belanja BOS yang digunakan untuk pembelian printer dan hardisk	4.100.000,00
	Dinas Pendidikan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.700.000,00
e)	<b>Penambahan Lain</b>	<b>3.834.887.287,50</b>
	Penambahan Lainnya berupa 2 buah vacuum cleaner	4.840.000,00
	Kurang catat kendaraan dinas	466.003.000,00
	Penambahan dari Nilai aset Peralatan dan mesin yang sebelumnya bernilai Rp0,00 dan Rp1,00	700.950.785,00
	Pembulatan	2,50
	Penambahan lainnya dari Dinas Pendidikan yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah	2.254.363.500
	Komite	408.730.000,00
f)	<b>Penambahan aset dari mutasi aset antar SKPD untuk peralatan dan mesin (dapat dilihat pada tabel berikutnya)</b>	<b>20.841.867.400,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>194.672.381.055,30</b>

**Tabel 82. Penambahan Peralatan Dan Mesin Dari Mutasi Aset Antar SKPD**

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	101.881.000,00
RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	2.796.971.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	60.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	244.210.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	293.275.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	293.275.000,00

<b>Nama SKPD</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	293.275.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	343.275.000,00
Dinas Perhubungan	11.550.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	40.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.535.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	420.350.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	244.210.000,00
Dinas Perdagangan	333.359.800,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	387.082.950,00
Sekretariat Daerah	10.991.598.900,00
Sekretariat DPRD	586.550.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.300.468.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.841.867.400,00</b>

Penjelasan rinci atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2018 sebesar Rp37.781.417.576,62 adalah sebagai berikut:

**Tabel 83. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin**

<b>No. Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>g)</b>	<b>Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin berupa Toyota fortuner 25 GAT Nopol S1224AP dan S1230AP Tahun 2013</b>	<b>835.000.000,00</b>
<b>h)</b>	<b>Tidak memenuhi kriteria aset tetap</b>	<b>1.344.242.874,00</b>
	Alarm 10 unit (Dinas Kesehatan)	4.455.000,00
	Kursi rapat 100 unit (Puskesmas Tambakrejo)	35.000.000,00
	Oximeter 4 unit (Puskesmas Tambakrejo)	1.953.455,00
	Tiang Infus 6 buah (Puskesmas Baureno)	2.970.000,00
	Rak besi 33 buah (Puskesmas Sukosewu)	12.375.000,00
	Kursi pasien 10 unit (Puskesmas Wisma Indah)	4.300.000,00
	Domain web, gordena steril dangordena jendela, perlengkapan gedung kantor, honor pengadaan alat kedokteran radiologi (RSUD Sumberrejo )	159.914.800,00
	RJ (konektor) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	2.337.500,00
	4 unit mikrofon (Dinas Perhubungan)	1.964.600,00
	Stand microphon 5 unit dan pesawat telepon 2 unit (Dinas Komunikasi dan Informatika)	2.391.400,00
	60 unit kursi dan 5 unit skate mat (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)	30.030.000,00
	Mebelair dan alat peraga fisika dan Biologi (Dinas Pendidikan)	790.234.618,00
	Aset dari Bantuan Pemerintah	114.206.600,00
	Aset dari Dana BOS	182.109.901,00
<b>i)</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>1.637.898.089,61</b>
	WTP/Water Quality Analyzer System yang diterima dari BNPB chipnya bertukar dengan Kabupaten lain sehingga tidak bisa dipergunakan	49.527.500,00
	Reklas cerobong asap ke gedung dan bangunan (Dinas Lingkungan Hidup)	73.973.802,00
	Reklas aset dengan kondisi rusak berat (Dinas Lingkungan Hidup)	14.500.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas aset dengan kondisi rusak berat (Dinas Komunikasi dan Informatika )	77.124.500,00
	Reklas aset dengan kondisi rusak berat (Dinas Pendidikan)	1.166.049.433,61
	Kendaraan dinas nopol S1046AP reklas Rusak Berat (Inspektorat)	35.000.000,00
	Reklas aset tangki air timbun ke Bangunan (Dinas Perdagangan)	59.840.000,00
	Reklas penangkal petir ke jaringan (Bag. Umum dan Keuangan)	152.597.854,00
	Kursi rapat (Kecamatan Kalitidu)	2.000.000,00
	Reklas ke jaringan	7.285.000,00
<b>j)</b>	<b>Pengurangan Lain</b>	<b>321.279.000,03</b>
	Aset sudah tercatat di Tahun 2017 (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)	115.781.000,00
	koreksi catat kendaraan dinas dari nopol S1059AP	115.000.000,00
	Pembulatan	0,03
	dobel catat papan pengumuman	498.000,00
	Honda Win dengan nopol S3897CP (sebelumnya tercatat Rp.100.000.000,00)	90.000.000,00
<b>k)</b>	<b>Ekstrakomptabel</b>	<b>12.801.130.212,98</b>
<b>l)</b>	<b>Pengurangan aset dari mutasi aset antar SKPD untuk peralatan dan mesin</b>	<b>20.841.867.400,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.781.417.576,62</b>

**Tabel 84. Pengurangan Peralatan Dan Mesin dari Mutasi Aset Antar SKPD**

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	8.077.846.150,00
Satuan Polisi Pamong Praja	55.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	125.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	247.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.808.521.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.356.000,00
Sekretariat Daerah	1.753.178.000,00
Sekretariat DPRD	1.110.642.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.230.323.500,00
Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>20.841.867.400,00</b>

**(c) Gedung dan Bangunan**

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Gedung dan Bangunan	1.814.826.257.325,13	1.714.449.694.406,72

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.814.826.257.325,13 dengan uraian sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.714.449.694.406,72</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2018:</b>		
3	Belanja Modal	153.161.358.323,09	a)
4	Kapitalisasi	639.891.783,06	b)
5	Hibah dari Pihak Lain	13.152.815.000,00	c)
6	Reklasifikasi Aset	44.426.306.835,15	d)
7	Penambahan Lain	27.084.680.695,33	e)
8	Mutasi aset antar SKPD	618.846.084.359,45	f)
<b>9</b>	<b>Jumlah (3 s.d. 8)</b>	<b>857.283.228.596,08</b>	
<b>10</b>	<b>Pengurangan TA 2018:</b>		
11	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(479.544.648,00)	g)
12	Penghapusan aset	(51.601.000,00)	h)
13	Reklasifikasi Aset	(131.618.885.650,94)	i)
14	Pengurangan Lain	(5.910.550.019,28)	j)
15	Mutasi aset antar SKPD	(618.846.084.359,45)	k)
<b>16</b>	<b>Jumlah (11 s.d. 15)</b>	<b>(756.906.665.677,67)</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1+9+16)</b>	<b>1.814.826.257.325,13</b>	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2018 sebesar Rp857.283.228.596,08 adalah sebagai berikut:

**Tabel 85. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>a)</b>	<b>Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar</b>	<b>153.161.358.323,09</b>
<b>b)</b>	<b>Kapitalisasi</b>	<b>639.891.783,06</b>
	kapitalisasi aset BBI Desa Ngampal Kec. Sumberjo yang belum dicatat dalam Aset Neraca Kabupaten 2017	460.761.783,06
	Kapitalisasi perbaikan atap bangunan gedung Dinas Perdagangan	179.130.000,00
<b>c)</b>	<b>Hibah dari pihak lain</b>	<b>13.152.815.000,00</b>
	Hibah bangunan infrastruktur publik dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) berupa Puskesmas Gayam Luas bangunan 880,22m <sup>2</sup> (ketinggian 1 lantai), Ukuran bangunan 20x42m, Luas area terbangun 3.230m <sup>2</sup>	5.807.583.000,00
	Gedung Serbaguna Gayam dengan luas Bangunan 716,80m <sup>2</sup> dengan ukuran bangunan 22,4x32m, Luas area terbangun 3.817m <sup>2</sup> sebagaimana surat dari Vice President Public and Governmen Affairs ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) tanggal 28 Pebruari 2018 Perihal: Serah terima Bangunan Gedung Serbaguna Gayam, Puskesmas Gayam dan Jembatan Kecamatan Gayam-Kecamatan Purwosari	7.345.232.000,00
<b>d)</b>	<b>Reklasifikasi Aset</b>	<b>44.426.306.835,15</b>
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	1.398.775.390,00
	Reklas dari Belanja BLUD RSUD Padangan	86.431.000,00
	Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) untuk Bangunan Gedung RSUD Sumberrejo	35.901.234.100,00
	Reklas Jaringan Listrik Pedesaan yang dimanfaatkan Pihak ketiga (Pecahan Uraian dari Koreksi BPK Tahun Anggaran 2017)	6.432.780.500,00
	Reklas ke bangunan gedung dari peralatan dan mesin	73.973.802,00



No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	berupa cerobong asap pengolahan sampah yang dilekatkan pada bangunan	
	Reklas aset tangki air timbun dr peralatan dan mesin ke Bangunan pada Dinas Perdagangan	59.840.000,00
	Reklas dari peralatan dan mesin ke gedung bangunan Bagian Umum dan Keuangan	119.272.254,00
	Reklas Dinas Pendidikan dari JJI menjadi gedung bangunan	353.999.789,15
<b>e)</b>	<b>Penambahan Lain</b>	<b>27.084.680.695,33</b>
	Penambahan Aset atas Utang Belanja Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	14.079.959.804,33
	Kurang catat Bangunan Kantor yang berlokasi di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 01 Kelurahan Ledok Wetan dengan Luas Tanah 1.332 m <sup>2</sup> (Eks Kantor PD. BPR)	150.000.000,00
	Penambahan Bangunan dan Gedung dari Bantuan Pemerintah	12.826.812.491,00
	Penambahan untuk paket pekerjaan yang dendanya dipotongkan termyn 2018	27.908.400,00
<b>f)</b>	<b>Mutasi aset antar SKPD untuk Aset Gedung dan Bangunan</b>	<b>618.846.084.359,45</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>857.283.228.596,08</b>

**Tabel 86. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD**

Nama SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	236.037.026.839,01
RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	170.247.185.453,00
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	869.607.182,12
Dinas Pemadam Kebakaran	165.534.000,00
Dinas Sosial	534.649.987,50
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.032.242.499,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.258.410.836,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.272.991.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	39.012.388.716,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	425.452.200,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	197.305.000,00
Dinas Perdagangan	31.277.387.900,30
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.662.630.909,74
Sekretariat Daerah	72.775.228.140,88
Kecamatan Bojonegoro	1.725.727.595,06
Kecamatan Kanor	1.014.773.000,00
Kecamatan Sugihwaras	693.452.250,84
Kecamatan Kedungadem	49.450.000,00
Kecamatan Tambakrejo	406.845.500,00
Kecamatan Ngraho	1.853.538.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.789.169.650,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	38.545.087.200,00
<b>JUMLAH</b>	<b>618.846.084.359,45</b>

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2018 senilai Rp756.906.665.677,67 dengan rincian nilai sebagai

berikut:

**Tabel 87. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>g)</b>	<b>Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap</b>	<b>479.544.648,00</b>
	Pengecatan marka oleh Dinas Perhubungan	427.483.900,00
	Aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dari Dinas Pendidikan	52.060.748,00
<b>h)</b>	<b>Penghapusan aset yang telah dilelang</b>	<b>51.601.000,00</b>
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.601.000,00
<b>i)</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>131.618.885.650,94</b>
	Reklas ke Peralatan dan mesin dari Gedung dan Bangunan dari RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	17.702.859.973,00
	Reklas ke rusak berat Rehab Gedung Kantor Kecamatan Kalitidu yang dibongkar dan dibangun baru oleh Bag. Pemerintahan	105.819.875,00
	TPS Pasar Banjarejo sudah dibongkar karena di lokasi tersebut dibangun pasar Banjarejo	199.447.000,00
	Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk belanjamodal Gedung dan Bangunan 2018 yang belum selesai dikerjakan	46.410.403.459,70
	Reklas ke Peralatan mesin dan Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) atas aset Cipta Karya yang diperoleh dari belanja 2018	2.382.337.354,00
	Reklas Atas aset Bangunan ke Peralatan dan mesin dan JIJ untuk aset yang akan diatribusikan dengan induknya	44.363.531.141,42
	Reklas ke peralatan mesin dan JIJ untuk aset Dinas Pendidikan tahun 2013-2016 yang akan diatribusikan ke bangunan induk	1.905.537.450,15
	Renovasi pagar rumah dinas Sekretaris Daerah	267.407.000,00
	Bangunan gedung reklas ke rusak berat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243.700.000,00
	Reklas ke jaringan untuk jaringan gedung kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	58.769.657,00
	TPT GOR Panahan reklas dari bangunan gedung ke JIJ Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	61.268.002,00
	Reklas untuk sumur bor dan listrik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.558.969,90
	Reklas aset yang tidak ditemukan induknya (tindak lanjut temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017)	65.527.000,00
	Reklas aset Peralatan dan mesin bangunan gedung Pusdiklat dan Pengembangan SDM Kab. Bojonegoro Prodi otomotif Kec Dander, Peralatan mesin berupa Overhead crane 2,000kg, AC, Exhaust Fan, Hydrant, Sound System, Fire Alarm, CCTV	5.474.222.100,00
	Pendidikan reklas dari gedung bangunan ke JIJ	621.675.677,77
	reklas aset lainnya karena penurunan kondisi aset menjadi rusak berat	5.226.061.130,00
	bangunan gedung yang sudah dirobokkan namun belum dihapuskan sehingga direklas menjadi aset lainnya yaitu Gedung Bangunan SD	2.498.275.786,00
	Puskesmas Ngumpak Dalem	100.000.000,00
	Bangunan RSUD Sumberrejo	3.596.400.000,00

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Bangunan RSUD Padangan	75.000.000,00
	Bangunan Gedung Kecamatan Sukosewu	160.000.000,00
	Bangunan RSUD Padangan yang dipotongkan termyn	84.084.075,00
<b>j)</b>	<b>Pengurang Lainnya</b>	<b>5.910.550.019,28</b>
	Aset sudah tercatat di Tahun 2017 (pembayaran utang)	5.724.113.600,00
	dari Dinas Pendidikan berupa Gedung Bangunan SD Kawangan	186.436.419,27
	Pembulatan	0,01
<b>k)</b>	<b>Mutasi aset antar SKPD</b>	<b>618.846.084.359,45</b>
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	605.997.596.038,55
	Sekretariat Daerah	5.427.560.845,90
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.420.927.475,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>756.906.665.677,67</b>

**(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.536.635.721.966,42	2.127.819.005.897,21

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.536.635.721.966,42 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>2.127.819.005.897,21</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2018:</b>		
3	Belanja Modal	286.469.922.122,91	a)
4	Kapitalisasi	1.202.659.216,94	b)
5	Hibah Pihak Ketiga	5.148.989.000,00	c)
6	Reklasifikasi Aset	145.478.403.479,24	d)
7	Penambahan Lain	35.602.050.437,07	e)
8	Mutasi aset antar SKPD	49.030.302.704,07	f)
<b>9</b>	<b>Jumlah (3 s.d. 8)</b>	<b>522.932.326.960,23</b>	
<b>10</b>	<b>Pengurangan TA 2018:</b>		
11	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(7.087.300,00)	g)
12	Reklasifikasi Aset	(44.920.137.128,15)	h)
13	Pengurangan Lainnya	(20.158.083.758,80)	j)
14	Mutasi aset antar SKPD	(49.030.302.704,07)	k)
<b>15</b>	<b>Jumlah (11 s.d. 14)</b>	<b>(114.115.610.891,02)</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1 + 9 + 14)</b>	<b>2.536.635.721.966,42</b>	

Rincian penambahan aset tetap JIJ sebagai berikut:

**Tabel 88. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>a)</b>	<b>Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) TA 2018</b>	<b>286.469.922.122,91</b>
<b>b)</b>	<b>Kapitalisasi aset BBI Desa Ngampal Kec. Sumberjo yang belum dicatat dalam Aset Neraca Kabupaten</b>	<b>1.202.659.216,94</b>

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	<b>Tahun 2017</b>	
c)	<b>Hibah Pihak ketiga berasal dari hibah bangunan infrastruktur publik dari Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) berupa Jembatan penghubung wilayah Kecamatan Gayam menuju Kecamatan Purwosari, Panjang jembatan 42,7m lebar jembatan 6m</b>	<b>5.148.989.000,00</b>
d)	<b>Reklasifikasi Aset</b>	<b>145.478.403.479,24</b>
	reklas ATL Belanja BLUD RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;	542.446.000,00
	dan reklas dari gedung dan bangunan RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	8.835.173.256,00
	reklas dari KDP Tahun 2017 untuk aset yang telah selesai pengerjaannya sehingga dicatat pada aset JIJ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	91.422.754.539,00
	Reklas dari Belanja Gedung dan Bangunan ke JIJ untuk belanja LRA 2018	1.601.345.854,00
	Reklas dari Gedung bangunan untuk aset yang akan diatribusikan dengan aset induk	36.349.559.991,42
	Reklas dari KDP menjadi Aset Tetap untuk aset Pembangunan longsor Jalan Sekar - Bojonegoro Kec. Sekar dari BPBD	767.922.882,00
	Reklas jaringan dr bangunan gedung kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	58.769.657,00
	TPT GOR Panahan reklas dari bangunan gedung ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.268.002,00
	Reklas untuk sumur bor dan jaringan listrik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.558.969,90
	Reklas penangkal petir dari peralatan mesin Gedung Pemkab	33.325.600,00
	Reklas dari bangunan gedung Pusdiklat dan Pengembangan SDM Kab. Bojonegoro Prodi otomotif Kec Dander	3.263.280.600,00
	Reklas dari Gedung Bangunan dan Peralatan mesin menjadi Jaringan oleh Dinas Pendidikan;	626.260.677,77
	Reklas dr Gedung untuk Aset Dinas Pendidikan 2013-2016 yang akan diatribusikan ke bangunan induk	1.899.737.450,15
e).	<b>Penambahan Lain</b>	<b>35.602.050.437,07</b>
	Aset tetap dari Utang Belanja 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	24.495.189.854,00
	Penambahan Aset atas Utang Belanja Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.090.810.581,00
	Pembulatan	2,07
	Penambahan dari Komite	16.050.000,00
f).	<b>Mutasi Aset antar SKPD Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ)</b>	<b>49.030.302.704,07</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>522.932.326.960,23</b>

Rincian pengurangan aset tetap JIJ sebagai berikut:

**Tabel 89. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>g)</b>	<b>Tidak memenuhi kriteria aset tetap</b>	<b>7.087.300,00</b>
	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	2.405.000,00
	Dinas Pendidikan	4.682.300,00
<b>h)</b>	<b>Reklasifikasi Aset</b>	<b>44.920.137.128,15</b>
	Reklas ke KDP untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	3.675.128.030,00
	Reklas ke KDP untuk Aset JIJ yang belum selesai (dari Belanja LRA 2018)	469.487.789,00
	Reklas Jaringan Listrik Pedesaan yang dimanfaatkan Pihak ketiga	6.432.780.500,00
	Reklas dari Bangunan Gedung ke JIJ dari Dinas Pendidikan	353.999.789,15
	perencanaan pembangunan jembatan yang tidak diikuti kegiatan fisik dikarenakan aset milik desa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan	235.653.000,00
	Reklasifikasi atas Jalan, jaringan dan irigasi yang sudah dihibahkan belum ada SK pada bagian SDA	33.235.118.600,00
	Reklasifikasi atas Jalan, jaringan dan irigasi yang sudah dihibahkan belum ada SK pada DLH	517.969.420,00
<b>i)</b>	<b>Pengurangan Lainnya</b>	<b>20.158.083.758,80</b>
	Pembayaran belanja yang asetnya sudah diakui sebagai Aset Tetap 2017 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	17.153.391.457,80
	Jurnal koreksi atas perencanaan aset yang belum ada realisasi fisik (kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan maksud percepatan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan awal tahun 2019 keg. fisik sudah bisa dilaksanakan) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	618.392.000,00
	Aset sudah tercatat di Tahun 2017 (pembayaran utang) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.336.833.300,00
	Pembayaran biaya Perencanaan Rehabilitasi Trotoar untuk Disabilitas di Kawasan tertib lalu lintas Kec. Bojonegoro yang belum ada realisasi fisik	49.467.000,00
	Pembulatan	1,00
<b>j)</b>	<b>Mutasi Aset antar SKPD Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ)</b>	<b>49.030.302.704,07</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>114.115.610.891,02</b>

**(e) Aset Tetap Lainnya**

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Aset Tetap Lainnya	80.594.206.010,91	67.554.199.640,790

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp80.594.206.010,91 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>67.554.199.640,790</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2018:</b>		
3	Belanja Modal	17.368.341.855,12	a)
4	Reklasifikasi	267.407.000,00	b)
5	Penambahan Lain	11.550.001,00	c)
<b>6</b>	<b>Jumlah (3 s.d. 5)</b>	<b>17.647.298.856,12</b>	
<b>7</b>	<b>Pengurangan TA 2018:</b>		
8	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(44.375.000,00)	d)
9	Reklasifikasi Aset	(4.562.917.486,00)	e)
<b>10</b>	<b>Jumlah (8 s.d. 9)</b>	<b>(4.607.292.486,00)</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1+6+10)</b>	<b>80.594.206.010,91</b>	

Realisasi penambahan aset tetap lainnya, sebagai berikut:

**Tabel 90. Penambahan Aset Tetap Lainnya**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Realisasi dari Belanja Modal	17.368.341.855,12
b)	Reklas Aset Pagar Rumah Dinas Sekretaris Daerah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	267.407.000,00
c)	Penambahan Lain	11.550.001,00
	Aset yang sebelumnya bernilai Rp0,00 berupa Patung Ganesha (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	1,00
	Bantuan Pemerintah untuk Dinas Pendidikan	11.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.647.298.856,12</b>

Sedangkan, rincian pengurangan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 91. Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
d)	Aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dari Dinas Pendidikan	44.375.000,00
e)	Reklasifikasi	4.562.917.486,00
	Belanja BLUD ke Peralatan dan Mesin (RSUD Sosodoro Djatikoesoemo)	3.593.836.124,00
	Lisensi sismadak reklas ke ATB (RSUD Sosodoro Djatikoesoemo)	5.205.000,00
	Redesign website (RSUD Sosodoro Djatikoesoemo)	17.600.000,00
	Reklas dari Belanja BLUD (RSUD Kelas D Sumberrejo)	505.540.862,00
	Reklas dari Belanja BLUD (RSUD Kelas D Padangan)	142.756.000,00
	Tanaman perkebunan milik SMA/SMK	297.979.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.607.292.486,00</b>

**(f) Konstruksi dalam Pengerjaan**

	<b>31 Desember 2018 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan	209.175.069.947,45	277.570.284.220,50

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp209.175.069.947,45 dengan

uraian sebagai berikut.

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>277.570.284.220,50</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2018:</b>		
3	Reklasifikasi Aset	50.639.103.353,70	a)
4	Penambahan Lain	9.057.593.894,25	b)
<b>5</b>	<b>Jumlah (3 s.d 4)</b>	<b>59.696.697.247,95</b>	
<b>6</b>	<b>Pengurangan TA 2018:</b>		
7	Reklasifikasi Aset	(128.091.911.521,00)	c)
<b>8</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (1 + 5+ 7)</b>	<b>209.175.069.947,45</b>	

Rincian penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

**Tabel 92. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>a)</b>	<b>Reklasifikasi Aset</b>	<b>50.639.103.353,70</b>
	Reklas Aset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	3.675.128.030,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	46.963.975.323,70
<b>b)</b>	<b>Penambahan Lainnya (Aset tetap KDP yang berasal dari Hutang Belanja 2018)</b>	<b>9.057.593.894,25</b>
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.542.020.206,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.515.573.688,25
	<b>Jumlah</b>	<b>59.696.697.247,95</b>

Rincian pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

**Tabel 93. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>c)</b>	<b>Reklasifikasi Aset</b>	
	<b>Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>35.901.234.100,00</b>
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	35.901.234.100,00
	<b>Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>92.190.677.421,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	91.422.754.539,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	767.922.882,00.
	<b>Jumlah</b>	<b>128.091.911.521,00</b>

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 sebesar Rp209.175.069.947,45 terdiri dari:

**Tabel 94. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Gedung B Pusdiklat Prodi Akuntansi	41.781.183.700,00
2	Gedung RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo	57.683.926.999,50
3	Gedung RSUD Padangan	92.589.199.685,27
4	Pembangunan Gedung Logistik dan Aula DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro	2.952.629.849,43
5	Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo	632.152.888,27
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR DABONSIA Kab. Bojonegoro	2.133.434.967,98
7	Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Diskominfo	1.432.362.693,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 1 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro	1.555.881.931,00
9	Pembangunan Saluran Drainase Ikk Kedungadem Desa Drokilo (P-APBD)	197.148.997,00
10	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Veteran Kec. Bojonegoro	353.457.011,00
11	Pembangunan TPT Jln. Balen - Sugihwaras Ds. Mayangkawis kec. Balen	245.920.254,00
12	Pembangunan TPT Jl. Kumpulrejo - Bendo Ds. Kumpulrejo Kecamatan Kapas (P-APBD)	142.689.100,00
13	Pembangunan TPT Jln. Kedungadem - Kesongo Desa Kesongo kec. Kedungadem	159.397.581,00
14	Peningkatan Jalan Bojonegoro - Kunci Kec. Dander	759.801.687,00
15	Peningkatan Jalan Ngumpakdalem - Ngujo II Kec. Dander	1.041.687.840,00
16	Peningkatan Jalan Jono - Sugihwaras Kec. Sugihwaras	613.241.660,00
17	Pembangunan jembatan kayangan api IIA (Dander - Ngasem) Kec. Ngasem	267.137.590,00
18	Pembangunan Jembatan Bakalan II (Taji-Bakalan) Kec. Tambakrejo	204.916.110,00
19	Pembangunan Jembatan Jelu (Jelu - Gayam) Kec Ngasem	640.544.552,00
20	Pembangunan Jembatan Beji (Kedewan - Beji) Kec. Kedewan	659.107.916,00
21	Pembangunan Jembatan Betonplat Patoman (Kanor-Simorejo) Kec. Kanor	275.253.053,00
22	Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Kec. Trucuk	1.140.546.994,00
23	Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Lanjutan Kec. Trucuk (P-APBD)	195.967.756,00
24	Pembangunan Jembatan Betonplat Kesongo 3 (Kedungadem - Kesongo) Kec. Kedungadem (P-APBD)	196.501.520,00
25	Rehabilitasi Jalan Baureno - Kepohbaru	324.494.965,00
26	Rehabilitasi Jalan Kapas - Sampang Kec. Kapas (P-APBD)	70.435.915,00
27	Rehabilitasi Jalan Baureno - Simorejo Kec. Kanor (P-APBD)	118.678.289,00
28	Rehabilitasi Jalan Prayungan - Mlinjeng Kec. Sumberrejo (P-APBD)	115.992.500,00
29	Rehabilitasi Jalan Drokilo - Kepohbaru Kec. Kepohbaru dan Kedungadem (P-APBD)	119.154.826,00
30	Rehabilitasi Jalan Ngumpakdalem - Ngujo Kec. Dander (P-APBD)	393.775.117,00
31	Rehabilitasi Jembatan Beton Plat Pedang (Kepohkidul - Kedungadem) Kec. Kedungadem (P-APBD)	178.446.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>209.175.069.947,45</b>

**(g) Akumulasi Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*Straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Aset Tetap berikut yang tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Terhadap aset tetap lainnya tersebut diterapkan penghapusan untuk aset yang sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan pencatatan aset tetap, yaitu telah dilakukan atribusi atas pekerjaan rehabilitasi/renovasi pada aset induk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sebelumnya dicatat sebagai aset induk tersendiri. Terhadap atribusi

aset-aset tersebut berdampak pada perubahan masa manfaat aset dan perhitungan akumulasi penyusutan.

Pengecualian atas penyusutan buku perpustakaan berbeda dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro No.49 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi tanggal 16 Mei 2016.

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan	(2.311.839.135.337,00)	(2.099.090.656.844,05)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.311.839.135.337,00.

#### **7.E.3.a.4 Aset Lainnya**

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp401.423.080.806,57, terdiri atas:

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	6.023.163.365,00	5.305.291.365,00
Aset Lain-lain	958.122.102.413,94	909.877.574.019,33
Akumulasi penyusutan	(557.775.880.744,37)	0,00
Amortisasi	(4.949.494.228,00)	(4.145.762.221,40)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>401.423.080.806,57</b>	<b>911.040.293.162,93</b>

#### **(a) Tuntutan Ganti Rugi**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan TGR An. Rusman.

Terdapat perbedaan antara jumlah yang disajikan pada laporan keuangan dengan rekapitulasi hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah. Hal ini dikarenakan:

1. Sudah lunas tapi belum terhapus karena belum dilengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tapi sudah ada penetapan oleh Majelis TP-TGR;
2. Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum tetapi belum dihapuskan dari daftar temuan;
3. Sudah lunas tapi belum melalui proses mekanisme TP-TGR sehingga belum bisa diselesaikan;
4. Belum dilakukan pelunasan.

**(b) Aset Tak Berwujud**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tak Berwujud	6.023.163.365,00	5.305.291.365,00

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.023.163.365,00.

<b>1 Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>5.305.291.365,00</b>	
<b>2 Penambahan TA 2018:</b>		
3 Belanja Modal	739.110.000,00	a)
4 Reklasifikasi Aset	27.805.000,00	b)
5 Penambahan Lain	175.257.000	c)
<b>6 Jumlah (3 s.d 5)</b>	<b>942.172.000,00</b>	
<b>7 Pengurangan TA 2018:</b>		
8 Reklasifikasi Aset	(224.100.000,00)	d)
9 Pengurangan Lain	(200.000,00)	e)
<b>10 Jumlah ( 8 s.d 9)</b>	<b>(224.300.000,00)</b>	
<b>11 Saldo per 31 Desember 2018</b> <b>(1+6+10)</b>	<b>6.023.163.365,00</b>	

Keterangan :

- a) Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2018 Rp739.110.000,00
- b) Penambahan reklasifikasi dari aset tak berwujud berasal dari Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo untuk redesign Website RSUD Sosodoro, [www.rssosodoro.com](http://www.rssosodoro.com) Rp17.600.000,00 dan Lisensi Aplikasi Sismadak Rp5.205.000,00; dari Belanja BLUD RSUD Padangan untuk Lisensi Aplikasi Sismadak Rp5.000.000,00.
- c) Penambahan lain merupakan penambahan aset database jalan dari utang belanja 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Rp175.257.000.
- d) Pengurangan reklasifikasi aset Rp220.000.000,00 merupakan software firewall yang diklasifikasikan menjadi peralatan dan mesin yang menyatu pada peralatan Firewall, senilai Rp4.100.000,00 yang diperoleh dari Belanja BOS Dinas Pendidikan direklas menjadi peralatan dan mesin yaitu pembelian hard disk dan printer.
- e) Pengurangan lain Rp200.000,00 belanja ATB Tahun 2017 yang diperoleh dari Dana BOS dianggap tidak memenuhi kriteria.

(c) Aset Lain-lain

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Lain-lain	958.122.102.413,94	909.877.574.019,33

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp958.122.102.413,94 dengan uraian sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>909.877.574.019,33</b>
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2018:</b>	
3	Reklasifikasi Aset	50.161.367.244,61 a)
4	Penambahan Lainnya	14.178.000,00 b)
5	Mutasi antar SKPD	60.000.000,00 c)
<b>6</b>	<b>Jumlah (3 s.d 5)</b>	<b>50.235.545.244,61</b>
<b>7</b>	<b>Pengurangan TA 2018:</b>	
8	Penghapusan	(1.931.016.850,00) d)
9	Mutasi antar SKPD	(60.000.000,00) e)
<b>10</b>	<b>Jumlah (8+9)</b>	<b>(1.991.016.850,00)</b>
<b>11</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (6+10)</b>	<b>958.122.102.413,9</b>

Rincian penambahan aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 95. Penambahan Aset Lainnya

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>a)</b>	<b>Reklasifikasi Aset</b>	<b>50.161.367.244,61</b>
	Reklas penurunan kondisi Rusak Berat	804.795.875,00
	Aset SMA/SMK yang belum diserahkan ke Provinsi	8.938.154.563,61
	Bangunan yang sudah dirobokkan masih dalam proses penghapusan	6.429.675.786,00
	Perencanaan pembangunan jembatan yang tidak diikuti kegiatan fisik	235.653.000,00
	Reklasifikasi atas Jalan, jaringan dan irigasi yang sudah dihibahkan belum ada SK	33.753.088.020,00
<b>b)</b>	<b>Penambahan Lainnya dari Nilai aset Peralatan dan mesin yang sebelumnya bernilai Rp0,00 dan Rp1,00</b>	<b>14.178.000,00</b>
<b>c)</b>	<b>Mutasi antar SKPD merupakan mutasi kendaraan dinas nopol S1174AP dari Bagian Humas ke BPKAD Rp.60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.235.545.244,61</b>

Rincian penambahan aset lainnya dari reklasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Tabel 96. Penambahan dari Reklasifikasi Aset

No	Uraian	Nilai
<b>1</b>	<b>Reklas penurunan kondisi Rusak Berat :</b>	<b>804.795.875,00</b>
	Reklas aset yang tidak ditemukan induknya	65.527.000,00
	Penurunan kondisi aset rusak berat	727.118.875,00
	Perencanaan gedung SMPN 1 Baureno yang rubah kondisi ke rusak berat	12.150.000,00
<b>2</b>	<b>Aset SMA/SMK yang belum diserahkan ke Provinsi :</b>	<b>8.938.154.563,61</b>
	Aset SMA/SMK yang belum diserahkan ke Provinsi turun ke	1.166.049.433,61

No	Uraian	Nilai
	aset lainnya	
	Perkebunan milik SMA/SMK yang masih tercatat	297.979.500,00
	Bangunan gedung SMA/SMK yang belum diserahkan ke Provinsi	5.213.911.130,00
	Tanah SMA/SMK yg belum diserahkan ke Provinsi	2.260.214.500,00
<b>3</b>	<b>Bangunan yang sudah dirobokkan masih dalam proses penghapusan</b>	<b>6.429.675.786,00</b>
	Bangunan Gedung SD	2.498.275.786,00
	Puskesmas Ngumpak Dalem	100.000.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	3.596.400.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	75.000.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Sukosewu	160.000.000,00
<b>4</b>	<b>Perencanaan pembangunan jembatan yang tidak diikuti kegiatan fisik</b>	<b>235.653.000,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	235.653.000,00
<b>5</b>	<b>Reklasifikasi atas Jalan, jaringan dan irigasi yang sudah dihibahkan belum ada SK</b>	<b>33.753.088.020,00</b>
	Bagian Sumber Daya Alam	33.235.118.600,00
	Dinas Lingkungan Hidup	517.969.420,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.161.367.244,61</b>

Sedangkan, rincian penghapusan adalah sebagai berikut

**Tabel 97. Pengurangan Aset Lainnya**

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
<b>d)</b>	<b>Penghapusan (aset yang sudah dilelang)</b>	<b>1.931.016.850,00</b>
	BPKAD	1.791.016.850,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.000.000,00
<b>e)</b>	<b>Mutasi antar SKPD Mutasi antar SKPD merupakan mutasi kendaraan dinas nopol S1174AP dari Bagian Humas ke BPKAD Rp.60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.991.016.850,00</b>

**(d) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(557.775.880.744,37)	0,00

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa aset disajikan sesuai dengan nilai netto, maka pada tahun ini dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset lainnya sehingga diharapkan aset lainnya dapat disajikan dengan benar.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp557.775.880.744,37 terdiri dari koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain 2017 yang belum disajikan sebesar Rp545.394.240.349,32 ditambah koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain yang berasal dari penambahan aset lain lain sebesar Rp12.381.640.395,05.

(e) Amortisasi

	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>
Amortisasi	(4.949.494.228,00)	(4.145.762.221,40)

Penambahan nilai amortisasi senilai Rp803.732.006,60 merupakan penambahan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2018. Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

**7.E.3.b Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp106.002.499.299,35 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

**7.E.3.b.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp106.002.499.299,35 yang terdiri dari:

	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
Utang Perhit.Pihak Ketiga	0,00	26.094.800,00
Pendapatan diterima Dimuka	1.408.332.318,67	1.047.099.885,00
Utang Jk Pendek Lainnya	104.594.166.980,68	62.713.073.904,76
<b>Jumlah</b>	<b>106.002.499.299,35</b>	<b>63.786.268.589,76</b>

Jumlah tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

**Tabel 98. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek**

<b>Kewajiban</b>	<b>Saldo 31 Des 2017 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Des 2018 (Rp)</b>
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>26.094.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>1.047.099.885,00</b>	<b>1.408.332.318,67</b>	<b>1.047.099.885,00</b>	<b>1.408.332.318,67</b>
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>62.713.073.904,76</b>	<b>104.584.166.980,68</b>	<b>62.703.073.904,76</b>	<b>104.594.166.980,68</b>
- Utang Pegawai	2.458.846.939,00	2.190.523.715,00	2.458.846.939,00	2.190.523.715,00
- Utang Jasa Pelayanan	13.985.393.122,69	23.455.581.333,02	13.985.393.122,69	23.455.581.333,02
- Utang Usaha	20.742.278.066,00	19.479.563.801,08	20.742.278.066,00	19.479.563.801,08
- Utang Belanja Modal	25.516.555.777,07	59.458.498.131,58	25.516.555.777,07	59.458.498.131,58
- Utang Pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>63.786.268.589,76</b>	<b>105.992.499.299,35</b>	<b>63.776.268.589,76</b>	<b>106.002.499.299,35</b>

**(a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Pengurangan utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp26.094.800,00 merupakan koreksi kesalahan penjurnalan atas utang pada pihak ketiga terkait pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang

larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011.

**(b) Pendapatan Diterima di Muka**

Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.408.332.318,67 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame senilai Rp966.491.925,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp1.791.666,67,00, Retribusi Sewa Tanah senilai Rp28.936.152,00, Retribusi Uji Kendaraan Bermotor senilai Rp304.445.075,00, Sewa Tanah dan Bangunandi Jalan Panglima Polim senilai Rp10.976.000,00 dan Sewa Ruang Milik Jalan Kecamatan Bojonegoro senilai Rp95.691.500,00.

Pengurangan pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.047.099.885,00 merupakan pendapatan diterima di muka tahun 2017 yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame senilai Rp890.309.410,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp5.491.667,00, Retribusi Sewa Tanah senilai Rp26.268.308,00, Sewa Bangunan Gedung Dinas Kominfo senilai Rp4.376.000,00 dan Sewa Rumija senilai Rp120.654.500,00. Sehingga saldo pendapatan diterima di muka tahun 2018 adalah sebesar Rp1.408.332.318,67.

**Tabel 99. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka**

<b>Kewajiban</b>	<b>Saldo 31 Des 2017</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Des 2018</b>
Pajak Reklame	890.309.410,00	966.491.925,00	890.309.410,00	966.491.925,00
Retribusi Izin Trayek	5.491.667,00	1.791.666,67	5.491.667,00	1.791.666,67
Retribusi Sewa Tanah	26.268.308,00	28.936.152,00	26.268.308,00	28.936.152,00
Retribusi Uji Kendaraan Bermotor	0,00	304.445.075,00	0,00	304.445.075,00
Sewa Bangunan Gedung Dinas Kominfo	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	0,00
Sewa Ruang Milik Jalan	120.654.500,00	95.691.500,00	120.654.500,00	95.691.500,00
Sewa Tanah dan Bangunan di Jalan Panglima Polim	0,00	10.976.000,00	0,00	10.976.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.047.099.885,00</b>	<b>1.408.332.318,67</b>	<b>1.047.099.885,00</b>	<b>1.408.332.318,67</b>

**(c) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp104.594.166.980,68 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai

Penambahan Utang Belanja Pegawai merupakan utang dari kekurangan gaji pegawai, biaya insentif PBB dan insentif retribusi tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp2.190.523.715,00, sedangkan pengurangan senilai Rp2.458.846.939,00 merupakan pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Belanja Pegawai tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 100. Rincian Utang Belanja Pegawai**

Nama SKPD	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
RSUD Sosodoro Djatikusumo	35.572.049,00			36.418.938,00
Dinas Lingkungan Hidup	672.294,00	0,00	672.294,00	0,00
DinasPertanian	9.996.600,00	0,00	9.996.600,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	418.200,00	0,00	418.200,00
Bappeda	1.328.600,00	2.274.300,00	1.328.600,00	2.274.300,00
BPKAD	0,00	370.800,00	0,00	370.800,00
Bapenda	2.411.277.396,00	2.151.041.477,00	2.411.277.396,00	2.151.041.477,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.458.846.939,00</b>	<b>2.190.523.715,00</b>	<b>2.458.846.939,00</b>	<b>2.190.523.715,00</b>

## 2. Utang Jasa Pelayanan

Utang Jasa Pelayanan tahun 2018 terdiri atas penambahan Utang Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan 3 (tiga) RSUD senilai Rp23.455.581.333,02. Sedangkan pengurangan sebesar Rp13.985.393.122,69 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Jasa Pelayanan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 101. Rincian Utang Jasa Pelayanan**

Nama SKPD	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
Dinas Kesehatan	2.774.831.749,00	7.566.246.197,02	2.774.831.749,00	7.566.246.197,02
RSUD Sosodoro Djatikusumo	8.522.523.843,69	12.800.086.007,00	8.522.523.843,69	12.800.086.007,00
RSUD Sumberrejo	1.353.131.203,00	1.631.020.354,00	1.353.131.203,00	1.631.020.354,00
RSUD Padangan	1.334.906.327,00	1.458.228.775,00	1.334.906.327,00	1.458.228.775,00
<b>JUMLAH</b>	<b>13.985.393.122,69</b>	<b>23.455.581.333,02</b>	<b>13.985.393.122,69</b>	<b>23.455.581.333,02</b>

## 3. Utang Usaha

Penambahan Utang Usaha senilai Rp19.479.563.801,08 terdiri dari utang listrik, air, telepon, surat kabar pada semua SKPD, utang kepada pihak ketiga (PMI), obat, bahan medis habis pakai, jasa uji laborat, reagen laboratorium, sampah medis dan non medis pada RSUD dan Dinas Kesehatan, serta utang kepada rekanan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan tapi belum terbayar. Sedangkan pengurangan sebesar Rp20.742.278.066,00 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Usaha tahun 2017.

**Tabel 102. Rincian Utang Usaha**

Nama SKPD	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
Dinas Pendidikan	0,00	56.904.177,00	0,00	56.904.177,00
Dinas Kesehatan	608.092.637,00	291.454.073,00	608.092.637,00	291.454.073,00
RSUD Sosodoro Djatikusumo	8.261.044.039,00	8.925.792.048,00	8.261.044.039,00	8.925.792.048,00
RSUD Sumberrejo	52.821.420,00	30.072.900,00	52.821.420,00	30.072.900,00
RSUD Padangan	103.781.590,00	188.815.193,00	103.781.590,00	188.815.193,00
Dinas PU Bina Marga	28.171.672,00	0,00	28.171.672,00	0,00
Dinas PU Sumber Daya Air	0,00	8.795.255,00	0,00	8.795.255,00

Nama SKPD	Saldo 31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
Dinas PKP & Cipta Karya	11.568.848.566,00	9.715.069.353,08	11.568.848.566,00	9.715.069.353,08
BaKesbang PoL	2.684.955,00	2.932.531,00	2.684.955,00	2.932.531,00
Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	3.909.021,00	5.821.902,00	3.909.021,00	5.821.902,00
Dinas Sosial	287.000,00	655.450,00	287.000,00	655.450,00
Dinas P3AKB	4.462.780,00	0,00	4.462.780,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	421.500,00	352.700,00	421.500,00	352.700,00
Dinas Catatan Sipil	10.246.283,00	10.515.941,00	10.246.283,00	10.515.941,00
Dinas PMD	7.686.806,00	1.587.800,00	7.686.806,00	1.587.800,00
Dinas Kominfo	8.783.655,00	12.615.572,00	8.783.655,00	12.615.572,00
Dinkop dan UM	2.916.302,00	3.487.784,00	2.916.302,00	3.487.784,00
Dinas Kepemudaan & Olah Raga	22.135.663,00	17.425.333,00	22.135.663,00	17.425.333,00
Dinas Pariwisata	17.366.440,00	1.535.000,00	17.366.440,00	1.535.000,00
Dinas Peternakan & Perikanan	9.484.517,00	2.042.450,00	9.484.517,00	2.042.450,00
Dinas Pertanian	0,00	7.883.382,00	0,00	7.883.382,00
Dinas Perdagangan	2.939.196,00	155.179.152,00	2.939.196,00	155.179.152,00
Dinas Perinaker	12.745.450,00	11.502.346,00	12.745.450,00	11.502.346,00
Bagian Umum & Keuangan	0,00	1.329.050,00	0,00	1.329.050,00
Sekretariat DPRD	0,00	6.875.714,00	0,00	6.875.714,00
Kec Sumberrejo	2.279.820,00	2.218.870,00	2.279.820,00	2.218.870,00
Kec Sugihwaras	31.000,00	82.500,00	31.000,00	82.500,00
Kec Malo	0,00	501.600,00	0,00	501.600,00
Kec Kalitidu	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00
Kec Dander	0,00	4.820.200,00	0,00	4.820.200,00
Kec Padangan	135.000,00	455.750,00	135.000,00	455.750,00
Kec Kasiman	407.818,00	846.955,00	407.818,00	846.955,00
Kec Ngambon	1.210.348,00	1.710.348,00	1.210.348,00	1.710.348,00
Kec Ngraho	2.206.294,00	1.902.888,00	2.206.294,00	1.902.888,00
Kec Temayang	0,00	189.724,00	0,00	189.724,00
Inspektorat	6.421.144,00	6.939.860,00	6.421.144,00	6.939.860,00
BPKAD	63.150,00	815.000,00	63.150,00	815.000,00
BKPP	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>20.742.278.066,00</b>	<b>19.479.563.801,08</b>	<b>20.742.278.066,00</b>	<b>19.479.563.801,08</b>

4. Utang Pengembalian jasa giro BLUD

Saldo utang pengembalian jasa giro BLUD tahun 2018 sama dengan saldo tahun 2017 yaitu senilai Rp10.000.000,00 yang merupakan utang atas kurang setor jasa giro RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang terlanjur disetor ke kas daerah.

5. Utang Belanja Modal

Penambahan utang belanja modal sebesar Rp59.458.498.131,58 merupakan utang atas kegiatan tahun anggaran 2018 yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Sedangkan pengurangannya sebesar Rp25.516.555.777,07 merupakan pembayaran atas utang belanja modal tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 103. Rincian Utang Belanja Modal**

<b>Nama SKPD</b>	<b>Saldo 31 Des 2017 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Des 2018 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan	186.436.419,27	0,00	186.436.419,27	0,00
Dinas PU Bina Marga	17.153.391.457,80	29.605.119.058,00	17.153.391.457,80	29.605.119.058,00
Dinas PKP & Cipta Karya	8.176.727.900,00	29.853.379.073,58	8.176.727.900,00	29.853.379.073,58
<b>JUMLAH</b>	<b>25.516.555.777,07</b>	<b>59.458.498.131,58</b>	<b>25.516.555.777,07</b>	<b>59.458.498.131,58</b>

Lampiran utang jangka pendek masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran D**.

Rincian utang jangka pendek Dinas PU Bina Marga disajikan pada **Lampiran E**.

Rincian utang jangka pendek Dinas PKP & Cipta Karya disajikan pada **Lampiran F1 dan F2**.

**7.E.3.b.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah nihil.

	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Lainnya		

**7.E.3.c Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.210.742.208.604,64.

	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
Ekuitas	8.210.742.208.604,64	5.198.673.674.300,09

Termasuk dalam komponen ekuitas tersebut adalah SILPA senilai Rp2.017.402.123.680,15 yang terdiri atas:

- <b>Kas di Bendahara Umum Daerah</b>	<b>Rp 1.960.162.109.889,91</b>
- <b>Kas di BLUD</b>	<b>Rp 41.658.898.631,88</b>
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 38.855.925.720,26
Rek. Kas Akbid No.0081016500	Rp 141.790,35
Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	Rp 1.498.739.996,78
Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	Rp 1.304.091.124,49
- <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp 26.437.552,00</b>
- <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp 475.031.443,00</b>
- <b>Kas di Bendahara JKN / FKTP</b>	<b>Rp 13.414.851.905,89</b>
- <b>Kas Lainnya (BOS)</b>	<b>Rp 1.664.794.257,47</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.017.402.123.680,15</b>

**7.E.4 LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a) Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang ;
- d) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.

#### 7.E.4.a Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah Rp4.535.281.287.138,09 terdiri atas:

**Tabel 104. Pendapatan LO**

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>434.159.560.769,91</b>	<b>457.641.345.750,39</b>
Pendapatan Pajak Daerah-LO	96.196.244.379,00	90.617.324.032,45
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	21.528.472.373,33	56.413.041.521,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	10.935.810.627,51	13.014.266.755,03
Lain-lain PAD yang sah-LO	305.499.033.390,07	297.596.713.441,61
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.974.298.454.303,00</b>	<b>2.243.134.545.610,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>3.534.890.699.313,00</b>	<b>1.840.662.906.127,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	251.636.029.601,00	153.491.992.086,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	2.281.171.868.831,00	623.083.786.839,00
Dana Alokasi Umum-LO	932.357.598.649,00	932.445.113.000,00
Dana Alokasi Khusus-LO	69.725.202.232,00	131.642.014.202,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>297.020.101.249,00</b>	<b>239.152.200.068,00</b>
Dana Otonomi Khusus-LO	0,00	0,00
Dana Penyesuaian-LO	17.250.000.000,00	191.914.796.537,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	279.770.101.249,00	47.237.403.531,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>142.387.653.741,00</b>	<b>163.319.439.415,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO	130.228.753.741,00	151.614.252.915,00
Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan)-LO	12.158.900.000,00	11.705.186.500,00
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>126.823.272.065,18</b>	<b>40.318.335.859,49</b>
Pendapatan Hibah-LO	111.305.766.074,18	40.318.335.859,49
Pendapatan Lainnya - LO	15.517.505.991,00	0,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.535.281.287.138,09</b>	<b>2.741.094.227.219,88</b>

##### (1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO berasal dari semua pendapatan pajak LRA selama tahun 2018 yaitu Rp94.593.395.280,00 dikurangi pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya senilai Rp5.087.438.683,60 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2018 senilai Rp6.766.470.297,60 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2017 senilai Rp890.309.410,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2018 senilai Rp966.491.925,00. Sehingga total pendapatan pajak daerah LO

tahun 2018 adalah sebesar Rp96.196.244.379,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 105. Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	3.592.330.953,00	2.207.258.241,00
2	Pajak Restoran-LO	6.724.839.332,00	5.960.564.405,00
3	Pajak Hiburan-LO	531.962.626,00	459.138.783,00
4	Pajak Reklame-LO	2.312.041.987,00	2.178.662.309,25
5	PPJU-LO	38.869.204.525,00	35.119.635.247,00
6	Pajak Golongan C-LO	1.382.701.169,00	1.916.191.783,00
7	Pajak Parkir-LO	354.183.992,00	377.407.552,00
8	Pajak ABT-LO	654.988.801,00	471.208.235,00
9	Pajak Sarang Burung-LO	25.142.000,00	23.375.000,00
10	PBB-LO	28.249.180.479,00	27.280.003.585,20
11	BPHTB-LO	13.499.668.515,00	14.623.878.892,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>96.196.244.379,00</b>	<b>90.617.324.032,45</b>

(2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO berasal dari semua pendapatan LRA tahun 2018 senilai Rp19.844.707.742,00 dikurangi piutang retribusi tahun sebelumnya yang terbayar selama tahun 2018 senilai Rp4.082.307.800,00 ditambah piutang retribusi yang timbul selama tahun 2018 senilai Rp6.069.485.350,00 ditambah dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2017 senilai Rp31.759.975,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2018 senilai Rp335.172.893,67. Sehingga total pendapatan retribusi daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp21.528.472.373,33 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 106. Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>	<b>17.212.994.494,00</b>	<b>52.767.875.201,63</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	6.839.379.850,00	42.426.704.814,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	273.705.500,00	229.995.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO	8.007.792.000,00	7.511.091.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	89.840.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.092.474.925,00	1.537.687.500,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	852.967.719,00	860.083.387,63
	Retribusi pelayanan tera dan tera ulang-LO	146.674.500,00	112.473.500,00
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>	<b>3.562.816.509,00</b>	<b>2.114.629.137,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.201.663.509,00	694.021.137,00
	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah-LO	43.850.000,00	14.500.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO	91.300.000,00	129.800.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi-LO	1.033.313.000,00	1.117.643.500,00

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga-LO	67.715.000,00	38.614.500,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	124.975.000,00	120.050.000,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO</b>	<b>752.661.370,33</b>	<b>1.530.537.182,67</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	728.075.370,00	624.176.375,00
	Retribusi Izin Gangguan/Keamanan-LO	0,00	901.310.808,00
	Retribusi Pemberian Izin Trayek-LO	8.200.000,33	5.049.999,67
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	16.386.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.528.472.373,33</b>	<b>56.413.041.521,30</b>

- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO  
 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO senilai Rp10.935.810.627,51 berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp18.121.803.634,95 dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya senilai Rp13.926.524.671,20 ditambah dengan pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas dari PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai Rp921.410.052,85 dan PDAM senilai Rp6.954.541.402,91, serta dikurangi rugi dari PD BPR senilai Rp1.135.419.792,00.

**Tabel 107. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	BPD Jawa Timur	0,00	13.242.728.671,20
2	PD BPR Kabupaten Bojonegoro	2.198.668.039,00	4.402.370.203,00
3	PD Pasar Bojonegoro	740.628.858,75	1.344.709.200,00
4	PT Asri Dharma Sejahtera	0,00	0,00
5	PT Bojonegoro Bangun Sarana	1.041.972.326,85	91.629.637,83
6	BPR Jatim	0,00	683.796.000,00
7	Griya Dharma Kusuma	0,00	(926.211.369,44)
8	PDAM	6.954.541.402,91	(5.824.755.587,56)
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.935.810.627,51</b>	<b>13.014.266.755,03</b>

- (4) Lain-lain PAD yang Sah -LO  
 Lain-lain PAD yang sah -LO berasal dari penerimaan atas jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, FKTP serta pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp292.608.063.774,07 ditambah dengan penambahan piutang klaim kesehatan selama tahun 2018 dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp110.903.876.191,00, RSUD Sumberrejo senilai Rp692.813.824,00, dan RSUD Padangan senilai Rp9.568.506.200,00. Ditambah pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung dan rumija tahun 2017 Rp125.030.500,00. Dikurangi



piutang klaim kesehatan tahun sebelumnya dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp99.632.275.883,00, RSUD Sumberrejo senilai Rp804.009.200,00, dan RSUD Padangan senilai Rp8.116.517.872,00. Dikurangi piutang bunga tahun sebelumnya senilai Rp9.809.533,00 yang berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan Rp1.726.200,00, Dinas Ketahanan Pangan Rp3.850.000,00, Dinas Koperasi dan UKM Rp3.600.000,00, serta Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp633.333,00. Dikurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung dan rumija tahun 2018 senilai Rp106.667.500,00. Dikurangi reklasifikasi hasil penjualan aset lainnya yang dianggap penjualan barang bekas Rp160.989.111,00. Sehingga total lain-lain PAD yang sah tahun 2018 adalah senilai Rp305.499.033.390,07, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 108. Lain-lain PAD yang Sah-LO**

<b>Uraian</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2017 (Rp)</b>
Penerimaan Jasa Giro	11.500.112.519,46	6.374.463.508,77
Penerimaan Bunga Deposito	9.434.353.549,75	1.118.282.788,64
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.610.571.902,78	2.115.832.320,49
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.119.425.670,60	1.732.353.416,01
Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.325.784,00
Pendapatan Dari Pengembalian	2.324.675.576,83	329.110.410,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	130.066.200,00
Pendapatan BLUD	220.967.828.114,38	149.329.308.957,02
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.363.043.456,27	12.296.298,54
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	32.059.328,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	46.179.022.600,00	44.852.656.096,00
Pendapatan Dana BOS	0,00	91.568.958.334,14
<b>JUMLAH</b>	<b>305.499.033.390,07</b>	<b>297.596.713.441,61</b>

- (5) Dana Bagi Hasil Pajak –LO  
 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO selama tahun 2018 adalah sebesar Rp251.636.029.601,00. Jumlah tersebut sama dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp251.636.029.601,00 dikurangi dengan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil PBB selama tahun 2017 yaitu Rp0,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan piutang selama Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- (6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO  
 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO selama Tahun 2018 senilai Rp2.281.171.868.831,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2017 dan Tahun 2018.
- (7) Dana Alokasi Umum –LO  
 Realisasi Dana Alokasi Umum–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp932.357.598.649,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2017 maupun 2018.



- (8) Dana Alokasi Khusus –LO  
Realisasi Dana Alokasi Khusus–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Rp69.725.202.232,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2017 maupun 2018.
- (9) Dana Penyesuaian –LO  
Realisasi Dana Penyesuaian–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Penyesuaian LRA yaitu Dana Insentif Daerah sebesar Rp17.250.000.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2017 maupun 2018.
- (10) Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO  
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik -LO adalah sama dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA yaitu sebesar Rp279.770.101.249,00. Tidak ada piutang baik di Tahun 2017 maupun 2018. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Tunjangan Khusus Guru.
- (11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya –LO  
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya–LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2017. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA adalah Rp147.434.223.898,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2017 sebesar Rp27.070.445.957,00. Ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2018 senilai Rp9.864.975.800,00, sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya LO adalah Rp130.228.753.741,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 109. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO**

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	29.997.787.032,00	34.035.647.798,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.521.745.810,00	25.014.307.957,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.812.740.550,00	38.113.043.472,00
4	PPABT	174.686.874,00	212.733.242,00
5	Pajak Rokok	50.721.793.475,00	54.238.520.446,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>130.228.753.741,00</b>	<b>151.614.252.915,00</b>

- (12) Bantuan Keuangan Provinsi–LO  
Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi- LO adalah sama dengan Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp12.158.900.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2017 maupun di Tahun 2018.
- (13) Pendapatan Hibah –LO  
Realisasi Pendapatan Hibah –LO sama dengan realisasi pendapatan hibah LRA ditambah pendapatan hibah aset pihak ketiga (Exxon Mobile, dll). Pada tahun 2018 pendapatan hibah LO senilai Rp111.305.766.074,18 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS senilai Rp90.432.360.000,00, pendapatan bunga BOS senilai Rp283.519.573,18 dan hibah aset pihak ketiga senilai Rp20.589.886.501,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pendapatan Hibah Dana BOS</b>	<b>90.432.360.000,00</b>
2	<b>Pendapatan bunga BOS</b>	<b>283.519.573,18</b>
3	<b>Hibah aset pihak ketiga:</b>	<b>20.589.886.501,00</b>
	- Gedung Serbaguna Gayam dari Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL)	7.345.232.000,00
	- Puskesmas Gayam dari Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL)	5.807.583.000,00
	- Jembatan penghubung wilayah Kec Gayam menuju Kec Purwosari dari Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL)	5.148.989.000,00
	- Peralatan dan Mesin Satpol PP dari BNPB Pusat	2.288.082.500,00
	- Hibah tanah dari alm SITI CHALIMAH	1,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>111.305.766.074,18</b>

(14) Pendapatan Lainnya – LO

Realisasi Pendapatan Lainnya –LO senilai Rp15.517.505.991,00 merupakan pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah dan komite yang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp2.663.093.500,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.826.812.491,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.050.000,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp11.550.000,00.

**7.E.4.b Beban LO**

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah Rp2.740.787.132.721,74 yang terdiri dari:

**Tabel 110. Beban LO**

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>2.394.219.574.340,74</b>	<b>1.967.551.691.413,93</b>
Beban Pegawai	1.017.265.010.808,98	959.941.065.455,00
Beban Persediaan	97.990.421.538,24	158.459.934.698,40
Beban Jasa	438.189.961.480,95	361.032.833.817,49
Beban Pemeliharaan	18.461.748.572,00	17.377.164.400,00
Beban Perjalanan Dinas	53.880.436.358,63	43.987.056.947,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	75.600.000,00	156.800.000,00
Beban Hibah	183.669.107.085,97	76.903.266.568,00
Beban Bantuan Sosial	37.821.060.373,00	1.708.500.000,00
Beban Penyusutan	543.965.406.588,43	343.676.105.545,69
Beban Amortisasi	803.732.006,60	789.561.146,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.097.089.527,94	3.519.402.835,75
<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>346.567.558.381,00</b>	<b>267.447.115.484,43</b>
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.379.745.270,00	15.255.132.285,05
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	334.187.813.111,00	252.191.983.199,38
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>2.740.787.132.721,74</b>	<b>2.234.998.806.898,36</b>

## (1) Beban Pegawai-LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Pegawai	1.017.265.010.808,98	1.017.533.334.032,98	268.323.224,00

Nilai beban pegawai dalam laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.017.265.010.808,98, sedangkan nilai realisasi belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.017.533.334.032,98. Selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA adalah sebesar Rp268.323.224,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

<b>Belanja Pegawai-LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.017.533.334.032,98</b>
<b>Penambahan</b>		
a. Utang belanja gaji tahun 2018	Rp	39.482.238,00
b. Utang belanja insentif PBB P2 tribulan III & IV 2018 pada Bapenda	Rp	734.001.803,00
c. Utang belanja insentif pajak daerah 2018 pada Bapenda	Rp	1.195.613.174,00
d. Utang belanja Biaya insentif retribusi daerah 2018 pada Bapenda	Rp	221.426.500,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.190.523.715,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
a. Pembayaran utang gaji tahun 2017	Rp	47.569.543,00
b. Pembayaran utang belanja insentif PBB P2 tribulan IV 2017 pada Bapenda	Rp	342.946.418,00
c. Pembayaran utang insentif pajak daerah 2017 pada Bapenda	Rp	1.088.172.913,00
d. Pembayaran utang belanja retribusi daerah 2017 pada Bapenda	Rp	980.158.065,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.458.846.939,00</b>
<b>Beban Pegawai-LO</b>	<b>Rp</b>	<b>1.017.265.010.808,98</b>

Tabel 111. Beban Pegawai - LO

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2017 (Rp)	Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Beban Pegawai 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	608.415.149.263,00	-	608.415.149.263,00
2	Dinas Kesehatan	-	84.730.777.661,98	-	84.730.777.661,98
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	35.572.049,00	88.938.942.351,00	36.418.938,00	88.939.789.240,00
4	RSUD Sumberrejo	-	5.480.873.693,00	-	5.480.873.693,00
5	RSUD Padangan	-	5.429.689.102,00	-	5.429.689.102,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	6.227.208.819,00	-	6.227.208.819,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	-	4.455.754.318,00	-	4.455.754.318,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	7.325.452.600,00	-	7.325.452.600,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2.516.860.665,00	-	2.516.860.665,00
10	Satpol PP	-	3.456.724.234,00	-	3.456.724.234,00
11	BPBD	-	982.118.345,00	-	982.118.345,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	-	2.388.384.290,00	-	2.388.384.290,00
13	Dinas Sosial	-	2.823.450.698,00	-	2.823.450.698,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	3.641.042.461,00	-	3.641.042.461,00

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2017 (Rp)	Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Beban Pegawai 2018 (Rp)
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	2.331.233.402,00	-	2.331.233.402,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	672.294,00	10.615.802.378,00	-	10.615.130.084,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.811.693.341,00	-	2.811.693.341,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	2.834.294.733,00	-	2.834.294.733,00
19	Dinas Perhubungan	-	6.733.896.097,00	-	6.733.896.097,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.149.044.105,00	-	3.149.044.105,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	2.277.894.731,00	-	2.277.894.731,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2.172.668.476,00	-	2.172.668.476,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	2.412.441.050,00	-	2.412.441.050,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	3.789.396.882,00	-	3.789.396.882,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2.482.883.113,00	-	2.482.883.113,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	7.283.009.414,00	-	7.283.009.414,00
27	Dinas Pertanian	9.996.600,00	9.738.783.182,00	-	9.728.786.582,00
28	Dinas Perdagangan	-	2.314.842.333,00	418.200,00	2.315.260.533,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	3.284.567.989,00	-	3.284.567.989,00
30	KDH WKDH	-	570.845.800,00	-	570.845.800,00
31	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	-	48.173.000,00	-	48.173.000,00
32	Bagian Pemerintahan	-	103.000.000,00	-	103.000.000,00
33	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-	251.971.000,00	-	251.971.000,00
34	Bagian Pembangunan	-	35.822.000,00	-	35.822.000,00
35	Bagian Perekonomian	-	37.891.000,00	-	37.891.000,00
36	Bagian Umum dan Keuangan	-	14.535.915.702,00	-	14.535.915.702,00
37	Bagian Humas dan Protokol	-	123.529.000,00	-	123.529.000,00
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	89.132.000,00	-	89.132.000,00
39	Sekretariat DPRD	-	29.023.338.995,00	-	29.023.338.995,00
40	Kecamatan Bojonegoro	-	7.680.530.564,00	-	7.680.530.564,00
41	Kecamatan Kapas	-	2.292.235.985,00	-	2.292.235.985,00
42	Kecamatan Balen	-	2.328.218.786,00	-	2.328.218.786,00
43	Kecamatan Sumberrejo	-	2.474.897.337,00	-	2.474.897.337,00
44	Kecamatan Kanor	-	1.996.855.626,00	-	1.996.855.626,00
45	Kecamatan Baureno	-	2.252.045.553,00	-	2.252.045.553,00
46	Kecamatan Sugihwaras	-	1.795.175.755,00	-	1.795.175.755,00
47	Kecamatan Kepohbaru	-	2.020.685.669,00	-	2.020.685.669,00
48	Kecamatan Kedungadem	-	2.353.953.553,00	-	2.353.953.553,00
49	Kecamatan Sukosewu	-	1.808.439.898,00	-	1.808.439.898,00
50	Kecamatan Trucuk	-	1.687.998.581,00	-	1.687.998.581,00
51	Kecamatan Malo	-	1.758.604.879,00	-	1.758.604.879,00
52	Kecamatan Kalitidu	-	1.712.991.551,00	-	1.712.991.551,00
53	Kecamatan Dander	-	1.862.571.927,00	-	1.862.571.927,00
54	Kecamatan Padangan	-	1.799.309.642,00	-	1.799.309.642,00
55	Kecamatan Purwosari	-	1.895.916.365,00	-	1.895.916.365,00
56	Kecamatan Kasiman	-	1.713.608.809,00	-	1.713.608.809,00

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai 2017 (Rp)	Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Utang Belanja Pegawai 2018 (Rp)	Beban Pegawai 2018 (Rp)
57	Kecamatan Kedewan	-	1.369.174.506,00	-	1.369.174.506,00
58	Kecamatan Ngasem	-	1.675.357.208,00	-	1.675.357.208,00
59	Kecamatan Ngambon	-	1.376.630.255,00	-	1.376.630.255,00
60	Kecamatan Tambakrejo	-	1.756.548.487,00	-	1.756.548.487,00
61	Kecamatan Ngraho	-	1.853.854.036,00	-	1.853.854.036,00
62	Kecamatan Margomulyo	-	1.486.701.183,00	-	1.486.701.183,00
63	Kecamatan Temayang	-	1.669.946.864,00	-	1.669.946.864,00
64	Kecamatan Bubulan	-	1.167.838.516,00	-	1.167.838.516,00
65	Kecamatan Gondang	-	1.443.096.016,00	-	1.443.096.016,00
66	Kecamatan Sekar	-	1.434.762.314,00	-	1.434.762.314,00
67	Kecamatan Gayam	-	1.594.405.415,00	-	1.594.405.415,00
68	Inspektorat	-	4.902.519.681,00	-	4.902.519.681,00
69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.328.600,00	3.672.883.490,00	2.274.300,00	3.673.829.190,00
70	BPKAD	-	4.298.860.484,00	370.800,00	4.299.231.284,00
71	Badan Pendapatan Daerah	2.411.277.396,00	8.608.647.297,00	2.151.041.477,00	8.348.411.378,00
72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	3.923.569.577,00	-	3.923.569.577,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.458.846.939,00</b>	<b>1.017.533.334.032,98</b>	<b>2.190.523.715,00</b>	<b>1.017.265.010.808,98</b>

(2) Beban Persediaan-LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Persediaan	97.990.421.538,24	88.377.680.649,11	9.612.740.889,13

Nilai beban persediaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp97.990.421.538,24, sedangkan nilai realisasi belanja persediaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp88.377.680.649,11. Selisih antara beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA adalah sebesar Rp9.612.740.889,13. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Saldo awal persediaan	Rp 47.443.299.338,71
<b>Penambahan</b>	
a. Belanja Bahan Pakai Habis 2018	Rp 33.411.016.769,94
b. Belanja Bahan Material 2018	Rp 33.341.229.967,77
c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2018	Rp 21.625.433.911,40
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp 88.377.680.649,11</b>
<b>Pengurangan</b>	
a. Saldo akhir persediaan	Rp 37.830.558.449,58
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 37.830.558.449,58</b>
<b>Beban Persediaan - LO</b>	<b>Rp 97.990.421.538,24</b>

Tabel 112. Beban Persediaan - LO

No	SKPD	Persediaan 2017 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2018 (Rp)	Beban Persediaan 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	15.024.350,00	15.028.982.674,94	4.912.557.132,69	12.346.844.696,40	50.972.000,00	32.252.436.854,03
2	Dinas Kesehatan	22.786.333.548,00	4.550.999.181,00	11.708.682.631,08	3.075.741.508,00	17.233.363.418,00	24.888.393.450,08
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	13.076.896.532,40	-	-	-	10.596.760.516,50	2.480.136.015,90
4	RSUD Sumberrejo	2.517.262.122,62	-	803.564.288,00	-	2.747.673.699,59	573.152.711,03

No	SKPD	Persediaan 2017 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2018 (Rp)	Beban Persediaan 2018 (Rp)
5	RSUD Padangan	4.386.246.049,69	108.754.769,00	1.282.467.336,00	12.270.000,00	3.013.434.926,24	2.776.303.228,45
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	517.500,00	451.425.500,00	8.299.122.000,00	47.501.500,00	959.500,00	8.797.607.000,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	217.509.717,00	2.194.071.398,00	241.632.000,00	24.747.900,00	580.918.029,00	2.097.042.986,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	846.335.000,00	1.967.997.050,00	1.641.257.000,00	36.718.100,00	2.658.250,00	4.489.648.900,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.300.000,00	117.099.900,00	-	151.544.250,00	985.000,00	268.959.150,00
10	Satpol PP	-	274.042.079,00	4.072.000,00	186.834.700,00	665.000,00	464.283.779,00
11	BPBD	1.355.000,00	187.917.100,00	406.370.000,00	67.575.200,00	1.375.000,00	661.842.300,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	3.450.000,00	320.601.450,00	19.175.000,00	27.631.800,00	6.495.000,00	364.363.250,00
13	Dinas Sosial	750.000,00	43.936.400,00	170.506.500,00	23.352.500,00	777.000,00	237.768.400,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	286.418.500,00	177.458.807,00	76.393.750,00	86.130.200,00	12.696.320,00	613.704.937,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	770.000,00	9.725.040,00	125.549.500,00	16.759.850,00	961.572,00	151.842.818,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	618.750,00	1.244.064.950,00	980.317.215,00	105.276.400,00	820.000,00	2.329.457.315,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.568.878.285,00	110.002.160,00	-	1.011.921.388,00	2.159.962.816,00	530.839.017,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.340.000,00	173.078.800,00	10.339.000,00	121.422.200,00	2.120.500,00	306.059.500,00
19	Dinas Perhubungan	126.519.439,00	331.448.900,00	-	752.077.550,00	87.862.637,25	1.122.183.251,75
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	139.400,00	134.536.413,00	-	21.226.900,00	227.000,00	155.675.713,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.349.500,00	57.339.700,00	60.954.965,00	12.763.750,00	2.221.075,00	130.186.840,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450.000,00	116.415.476,00	-	159.951.358,00	810.000,00	276.006.834,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.333.900,00	82.473.682,00	-	27.046.800,00	2.757.500,00	108.096.882,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	232.390.000,00	355.450.845,00	176.620.000,00	348.311.150,00	166.995.000,00	945.776.995,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	434.000,00	36.898.500,00	30.080.000,00	39.496.050,00	1.078.000,00	105.830.550,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	102.888.900,00	345.312.550,00	564.451.000,00	282.702.000,00	33.906.500,00	1.261.447.950,00
27	Dinas Pertanian	925.583.845,00	165.083.330,00	475.880.400,00	78.405.500,00	867.015.540,00	777.937.535,00
28	Dinas Perdagangan	436.500,00	107.611.432,00	6.500.000,00	29.897.400,00	825.000,00	143.620.332,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.357.500,00	143.183.309,00	592.416.250,00	117.681.400,00	1.679.500,00	852.958.959,00
30	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	4.774.000,00	59.194.600,00	7.300.000,00	45.115.600,00	8.716.500,00	107.667.700,00
31	Bagian Pemerintahan	160.000,00	67.236.194,00	-	14.296.750,00	200.000,00	81.492.944,00
32	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	591.500,00	86.092.000,00	-	105.629.200,00	200.000,00	192.112.700,00
33	Bagian Sumberdaya Alam	90.000,00	47.544.950,00	-	7.450.000,00	733.000,00	54.351.950,00
34	Bagian Perlengkapan	209.237.500,00	283.484.280,00	-	562.525.500,00	129.282.250,00	925.965.030,00
35	Bagian Pembangunan	160.000,00	19.080.000,00	-	41.017.300,00	185.000,00	60.072.300,00
36	Bagian Perekonomian	108.000,00	27.059.464,00	-	29.452.600,00	120.000,00	56.500.064,00
37	Bagian Umum dan Keuangan	339.000,00	1.521.827.570,00	520.754.200,00	99.601.600,00	140.000,00	2.142.382.370,00
38	Bagian Humas dan Protokol	180.000,00	42.151.750,00	-	14.414.600,00	-	56.746.350,00
39	Bagian Kesejahteraan Rakyat	90.000,00	128.637.458,00	-	18.487.100,00	50.000,00	147.164.558,00
40	Bagian Layanan	-	38.742.050,00	-	27.567.700,00	1.851.000,00	64.458.750,00



No	SKPD	Persediaan 2017 (Rp)	Belanja Bahan Pakai Habis (Rp)	Belanja Bahan Material (Rp)	Belanja Cetak dan Penggandaan (Rp)	Persediaan 2018 (Rp)	Beban Persediaan 2018 (Rp)
	Pengadaan Barang dan Jasa						
41	Sekretariat DPRD	234.000,00	450.703.350,00	-	255.303.700,00	263.000,00	705.978.050,00
42	Kecamatan Bojonegoro	-	148.978.586,00	-	14.680.200,00	365.000,00	163.293.786,00
43	Kecamatan Kapas	152.000,00	23.599.400,00	-	3.419.500,00	257.500,00	26.913.400,00
44	Kecamatan Balen	355.000,00	39.002.187,00	25.900.000,00	6.561.000,00	152.000,00	71.666.187,00
45	Kecamatan Sumberrejo	248.500,00	28.198.810,00	-	7.625.250,00	278.000,00	35.794.560,00
46	Kecamatan Kanor	170.000,00	21.093.000,00	-	5.327.000,00	287.000,00	26.303.000,00
47	Kecamatan Baureno	250.000,00	45.719.500,00	9.232.950,00	12.395.000,00	275.000,00	67.322.450,00
48	Kecamatan Sugihwaras	480.000,00	30.313.190,00	-	10.615.000,00	370.000,00	41.038.190,00
49	Kecamatan Kepohbaru	57.500,00	38.061.218,00	22.900.000,00	15.317.500,00	73.000,00	76.263.218,00
50	Kecamatan Kedungadem	145.000,00	42.508.393,00	2.700.000,00	6.050.760,00	100.000,00	51.304.153,00
51	Kecamatan Sukosewu	221.000,00	35.630.000,00	-	2.630.000,00	-	38.481.000,00
52	Kecamatan Trucuk	-	44.699.078,00	15.000.000,00	4.051.000,00	535.200,00	63.214.878,00
53	Kecamatan Malo	125.000,00	27.725.600,00	14.318.000,00	6.283.100,00	250.000,00	48.201.700,00
54	Kecamatan Kalitidu	210.000,00	44.753.100,00	7.045.000,00	13.694.720,00	165.000,00	65.537.820,00
55	Kecamatan Dander	560.000,00	19.305.000,00	8.600.000,00	2.628.500,00	560.000,00	30.533.500,00
56	Kecamatan Padangan	365.000,00	30.807.446,00	8.397.250,00	1.096.000,00	270.000,00	40.395.696,00
57	Kecamatan Purwosari	379.000,00	32.780.000,00	10.000.000,00	10.480.000,00	618.000,00	53.021.000,00
58	Kecamatan Kasiman	465.000,00	28.255.975,00	49.500.000,00	5.169.000,00	450.000,00	82.939.975,00
59	Kecamatan Kedewan	-	24.823.153,00	-	7.225.000,00	310.500,00	31.737.653,00
60	Kecamatan Ngasem	314.000,00	28.294.000,00	-	9.645.000,00	430.000,00	37.823.000,00
61	Kecamatan Ngambon	190.000,00	38.987.601,00	-	7.364.850,00	220.000,00	46.322.451,00
62	Kecamatan Tambakrejo	100.000,00	39.053.000,00	-	4.635.750,00	304.000,00	43.484.750,00
63	Kecamatan Ngraho	140.000,00	43.655.379,00	23.000.000,00	5.990.000,00	200.000,00	72.585.379,00
64	Kecamatan Margomulyo	127.000,00	22.290.735,00	-	3.775.800,00	450.000,00	25.743.535,00
65	Kecamatan Temayang	567.000,00	25.718.263,00	14.963.000,00	9.915.341,00	230.000,00	50.933.604,00
66	Kecamatan Bubulan	408.000,00	36.037.000,00	-	2.600.000,00	320.000,00	38.725.000,00
67	Kecamatan Gondang	251.000,00	19.354.100,00	540.000,00	6.775.700,00	1.480.000,00	25.440.800,00
68	Kecamatan Sekar	141.000,00	48.340.000,00	-	5.378.000,00	130.000,00	53.729.000,00
69	Kecamatan Gayam	225.000,00	35.468.350,00	8.050.000,00	1.941.850,00	260.000,00	45.425.200,00
70	Inspektorat	6.253.000,00	94.059.990,00	-	13.726.450,00	5.219.500,00	108.819.940,00
71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.312.000,00	137.943.750,00	-	201.531.900,00	1.051.700,00	340.735.950,00
72	BPKAD	2.445.000,00	164.427.491,00	-	437.013.600,00	5.165.000,00	598.721.091,00
73	Badan Pendapatan Daerah	103.730.000,00	222.142.446,00	-	251.668.590,00	88.082.500,00	489.458.536,00
74	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	61.000,00	141.325.967,00	4.121.600,00	95.528.850,00	982.500,00	240.054.917,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.443.299.338,71</b>	<b>33.411.016.769,94</b>	<b>33.341.229.967,77</b>	<b>21.625.433.911,40</b>	<b>37.830.558.449,58</b>	<b>97.990.421.538,24</b>

(3) Beban Jasa-LO

	LO	LRA	Selisih
Beban/BelanjaJasa	438.189.961.480,95	511.042.686.792,83	72.852.725.311,88

Nilai beban jasa dalam laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp438.510.216.685,89, sedangkan nilai realisasi belanja jasa dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp511.042.686.792,83. Selisih antara beban jasa-LO dan belanja jasa-



LRA adalah sebesar Rp72.852.725.311,88. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Jasa Tahun 2018	Rp	511.042.686.792,83
<b>Penambahan</b>		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2018	Rp	23.455.581.333,02
b. Utang Usaha Tahun 2018	Rp	19.479.563.801,08
c. Beban Sewa Tahun 2018	Rp	70.000.000,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>43.005.145.134,10</b>
<b>Pengurangan</b>		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2017	Rp	13.985.393.122,69
b. Utang Usaha Tahun 2017	Rp	20.742.278.066,00
c. Koreksi Beban Jasa ke Beban Hibah	Rp	47.111.250.504,29
d. Koreksi Beban Jasa ke Beban Bantuan Sosial	Rp	34.018.948.753,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>115.857.870.445,98</b>
<b>Beban Jasa - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>438.189.961.480,95</b>

**Tabel 113. Beban Jasa - LO**

No	SKPD	Utang Jaspel 2017 (Rp)	Utang Usaha 2017 (Rp)	Belanja Jasa 2018 (Rp)	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2017) (Rp)	Beban Jasa 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	-	72.181.906.621,06	-	56.904.177,00	(260.756.800,00)	-	-	71.978.053.998,06
2	Dinas Kesehatan	2.774.831.749,00	608.092.637,00	98.407.908.175,00	7.566.246.197,02	291.454.073,00	-	-	-	102.882.684.059,02
3	RSUD DR. R. Sosodoro Jatikusumo	8.522.523.843,69	8.261.044.039,00	84.053.596.330,00	13.120.341.211,94	8.925.792.048,00	(320.255.204,94)	-	-	88.995.906.502,31
4	RSUD Sumberrejo	1.353.131.203,00	52.821.420,00	18.203.414.691,00	1.631.020.354,00	30.072.900,00	-	-	-	18.458.555.322,00
5	RSUD Padangan	1.334.906.327,00	103.781.590,00	16.551.792.798,00	1.458.228.775,00	188.815.193,00	-	-	-	16.760.148.849,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	-	28.171.672,00	9.833.217.693,00	-	-	-	-	-	9.805.046.021,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	-	-	2.790.000.224,00	-	8.795.255,00	-	-	-	2.798.795.479,00
8	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	11.568.848.566,00	94.010.337.265,77	-	9.715.069.353,08	(82.438.666.959,29)	-	16.895.812.576,00	26.613.703.669,56
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2.684.955,00	1.330.087.796,00	-	2.932.531,00	-	-	-	1.330.335.372,00
10	Satpol PP	-	-	6.788.769.421,00	-	-	-	-	-	6.788.769.421,00
11	BPBD	-	3.909.021,00	1.791.102.720,00	-	5.821.902,00	(295.468.000,00)	-	-	1.497.547.601,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	4.041.771.358,00	-	-	-	-	-	4.041.771.358,00
13	Dinas Sosial	-	287.000,00	2.553.870.181,00	-	655.450,00	(686.446.400,00)	70.000.000,00	-	1.937.792.231,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	4.462.780,00	9.309.589.683,00	-	-	-	-	-	9.305.126.903,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	195.000,00	624.474.100,00	-	195.000,00	(170.449.950,00)	-	-	454.024.150,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	421.500,00	5.527.807.830,00	-	352.700,00	(236.118.974,00)	-	-	5.291.620.056,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2017 (Rp)	Utang Usaha 2017 (Rp)	Belanja Jasa 2018 (Rp)	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2017) (Rp)	Beban Jasa 2018 (Rp)
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	10.246.283,00	1.975.330.055,00	-	10.515.941,00	-	-	-	1.975.599.713,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	7.686.806,00	2.017.932.824,00	-	1.587.800,00	-	-	-	2.011.833.818,00
19	Dinas Perhubungan	-	-	4.122.909.861,00	-	-	-	-	-	4.122.909.861,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	8.783.655,00	3.064.861.530,00	-	12.615.572,00	-	-	-	3.068.693.447,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	2.916.302,00	611.358.365,00	-	3.487.784,00	-	-	-	611.929.847,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	827.541.300,00	-	-	-	-	-	827.541.300,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	22.135.663,00	3.010.695.431,00	-	17.425.333,00	-	-	-	3.005.985.101,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	17.366.440,00	7.238.490.291,00	-	1.535.000,00	-	-	-	7.222.658.851,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	414.614.880,00	-	-	-	-	-	414.614.880,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	9.484.517,00	2.195.636.328,00	-	2.042.450,00	(16.867.500,00)	-	-	2.171.326.761,00
27	Dinas Pertanian	-	-	16.334.832.543,00	-	7.883.382,00	(13.843.508.000,00)	-	-	2.499.207.925,00
28	Dinas Perdagangan	-	2.939.196,00	758.895.262,00	-	155.179.152,00	-	-	-	911.135.218,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	12.745.450,00	2.581.619.503,00	-	11.502.346,00	(47.883.000,00)	-	-	2.532.493.399,00
30	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	-	-	478.562.300,00	-	-	-	-	-	478.562.300,00
31	Bagian Pemerintahan	-	-	354.104.000,00	-	-	-	-	-	354.104.000,00
32	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	257.838.000,00	-	-	-	-	-	257.838.000,00
33	Bagian Sumberdaya	-	-	986.826.500,00	-	-	-	-	-	986.826.500,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2017 (Rp)	Utang Usaha 2017 (Rp)	Belanja Jasa 2018 (Rp)	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2017) (Rp)	Beban Jasa 2018 (Rp)
	Alam									
34	Bagian Perlengkapan	-	-	1.567.574.440,00	-	-	-	-	-	1.567.574.440,00
35	Bagian Pembangunan	-	-	188.107.400,00	-	-	-	-	-	188.107.400,00
36	Bagian Perekonomian	-	-	385.175.000,00	-	-	-	-	-	385.175.000,00
37	Bagian Umum dan Keuangan	-	-	7.553.042.867,00	-	1.329.050,00	-	-	-	7.554.371.917,00
38	Bagian Humas dan Protokol	-	-	1.563.453.553,00	-	-	-	-	-	1.563.453.553,00
39	Kesejahteraan Rakyat	-	-	1.029.016.150,00	-	-	(29.846.250,00)	-	-	999.169.900,00
40	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	206.805.000,00	-	-	-	-	-	206.805.000,00
41	Sekretariat DPRD	-	-	4.500.167.157,00	-	6.875.714,00	-	-	-	4.507.042.871,00
42	Kec Bojonegoro	-	-	1.721.452.755,00	-	-	-	-	-	1.721.452.755,00
43	Kec Kapas	-	-	226.422.450,00	-	-	-	-	-	226.422.450,00
44	Kec Balen	-	-	206.102.379,00	-	-	-	-	-	206.102.379,00
45	Kec Sumberrejo	-	2.279.820,00	186.629.034,00	-	2.218.870,00	-	-	-	186.568.084,00
46	Kec Kanor	-	-	147.955.344,00	-	-	-	-	-	147.955.344,00
47	Kec Baureno	-	-	185.779.630,00	-	-	-	-	-	185.779.630,00
48	Kec Sugihwaras	-	31.000,00	179.835.800,00	-	82.500,00	-	-	-	179.887.300,00
49	Kec Kepohbaru	-	-	211.238.865,00	-	-	-	-	-	211.238.865,00
50	Kec Kedungadem	-	-	160.264.588,00	-	-	-	-	-	160.264.588,00
51	Kec Sukosewu	-	-	120.035.320,00	-	-	-	-	-	120.035.320,00
52	Kec Trucuk	-	-	191.749.000,00	-	-	-	-	-	191.749.000,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2017 (Rp)	Utang Usaha 2017 (Rp)	Belanja Jasa 2018 (Rp)	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2017) (Rp)	Beban Jasa 2018 (Rp)
53	Kec Malo	-	-	216.573.050,00	-	501.600,00	-	-	-	217.074.650,00
54	Kec Kalitidu	-	499.000,00	186.415.500,00	-	-	-	-	-	185.916.500,00
55	Kec Dander	-	-	168.247.209,00	-	4.820.200,00	-	-	-	173.067.409,00
56	Kec Padangan	-	135.000,00	147.873.425,00	-	455.750,00	-	-	-	148.194.175,00
57	Kec Purwosari	-	-	146.272.121,00	-	-	-	-	-	146.272.121,00
58	Kec Kasiman	-	407.818,00	168.625.295,00	-	846.955,00	-	-	-	169.064.432,00
59	Kec Kedewan	-	-	180.114.100,00	-	-	-	-	-	180.114.100,00
60	Kec Ngasem	-	-	239.134.000,00	-	-	-	-	-	239.134.000,00
61	Kec Ngambon	-	1.210.348,00	168.755.213,00	-	1.710.348,00	-	-	-	169.255.213,00
62	Kec Tambakrejo	-	-	136.522.200,00	-	-	-	-	-	136.522.200,00
63	Kec Ngraho	-	2.206.294,00	151.535.581,00	-	1.902.888,00	-	-	-	151.232.175,00
64	Kec Margomulyo	-	-	79.701.501,00	-	-	-	-	-	79.701.501,00
65	Kec Temayang	-	-	140.235.824,00	-	189.724,00	-	-	-	140.425.548,00
66	Kec Bubulan	-	-	158.216.194,00	-	-	-	-	-	158.216.194,00
67	Kec Gondang	-	-	134.779.664,00	-	-	-	-	-	134.779.664,00
68	Kec Sekar	-	-	108.002.500,00	-	-	-	-	-	108.002.500,00
69	Kec Gayam	-	-	198.781.350,00	-	-	-	-	-	198.781.350,00
70	Inspektorat	-	6.421.144,00	474.170.094,00	-	6.939.860,00	-	-	-	474.688.810,00
71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	3.153.356.100,00	-	-	-	-	-	3.153.356.100,00
72	BPKAD	-	63.150,00	4.762.892.163,00	-	815.000,00	-	-	-	4.763.644.013,00
73	Badan Pendapatan Daerah	-	-	1.172.072.040,00	-	-	-	-	-	1.172.072.040,00

No	SKPD	Utang Jaspel 2017 (Rp)	Utang Usaha 2017 (Rp)	Belanja Jasa 2018 (Rp)	Utang Jaspel 2018 (Rp)	Utang Usaha 2018 (Rp)	Koreksi (Rp)	Beban Sewa (Rp)	Persediaan yang blm diserahkan pihak ketiga (tahun 2017) (Rp)	Beban Jasa 2018 (Rp)
74	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	2.987.909.077,00	-	240.000,00	-	-	-	2.988.149.077,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.985.393.122,69</b>	<b>20.742.278.066,00</b>	<b>511.042.686.792,83</b>	<b>23.775.836.537,96</b>	<b>19.479.563.801,08</b>	<b>(98.026.011.833,29)</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>16.895.812.576,00</b>	<b>438.189.961.480,95</b>

## (4) Beban Pemeliharaan –LO

	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban/Belanja Pemeliharaan	18.461.748.572,00	18.461.748.572,00	0,00

Beban Pemeliharaan – LO merupakan semua beban pemeliharaan yang terjadi di tahun 2018 besarnya sama dengan jumlah realisasi belanja pemeliharaan LRA dan realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor LRA, yaitu Rp18.461.748.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114. Beban Pemeliharaan - LO

No	SKPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	463.530.095,42	185.708.400,00	649.238.495,42
2	Dinas Kesehatan	1.340.369.295,00	254.949.621,00	1.595.318.916,00
3	RSUD Sumberrejo	525.800.257,00	-	525.800.257,00
4	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	346.539.000,00	176.596.600,00	523.135.600,00
5	Dinas PU Sumber Daya Air	-	1.160.521.869,00	1.160.521.869,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.324.485.200,00	169.164.100,00	1.493.649.300,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.637.000,00	26.749.000,00	73.386.000,00
8	Satpol PP	2.150.000,00	99.619.000,00	101.769.000,00
9	BPBD	277.484.000,00	190.629.800,00	468.113.800,00
10	Dinas Pemadam Kebakaran	333.257.900,00	2.814.486.575,00	3.147.744.475,00
11	Dinas Sosial	131.409.000,00	96.377.950,00	227.786.950,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	158.720.000,00	139.008.200,00	297.728.200,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	62.729.870,00	62.729.870,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.023.979.904,00	542.778.850,00	1.566.758.754,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	21.047.699,00	21.047.699,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	54.214.800,00	54.214.800,00
17	Dinas Perhubungan	711.962.500,00	134.739.500,00	846.702.000,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	144.096.340,00	32.181.000,00	176.277.340,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	23.927.100,00	23.927.100,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	36.291.775,00	36.291.775,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	19.324.100,00	19.324.100,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	436.565.500,00	71.749.000,00	508.314.500,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00	34.096.663,00	49.096.663,00
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	32.491.000,00	59.032.100,00	91.523.100,00
25	Dinas Pertanian	192.804.587,58	132.789.400,00	325.593.987,58
26	Dinas Perdagangan	363.636.000,00	55.324.800,00	418.960.800,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	137.982.150,00	31.434.600,00	169.416.750,00
28	Bagian Organisasi dan	-	30.885.095,00	30.885.095,00



No	SKPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
	Tata Laksana			
29	Bagian Pemerintahan	-	29.150.050,00	29.150.050,00
30	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	-	16.300.000,00	16.300.000,00
31	Bagian Sumberdaya Alam	3.100.000,00	20.927.000,00	24.027.000,00
32	Bagian Perlengkapan	-	40.471.000,00	40.471.000,00
33	Bagian Pembangunan	-	34.465.296,00	34.465.296,00
34	Bagian Perekonomian	-	6.500.000,00	6.500.000,00
35	Bagian Umum dan Keuangan	791.162.431,00	582.978.800,00	1.374.141.231,00
36	Bagian Humas dan Protokol	3.770.200,00	27.029.900,00	30.800.100,00
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	26.815.000,00	26.815.000,00
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	32.664.988,00	32.664.988,00
39	Sekretariat DPRD	389.729.700,00	548.160.000,00	937.889.700,00
40	Kecamatan Bojonegoro	63.006.950,00	33.540.900,00	96.547.850,00
41	Kecamatan Kapas	7.500.000,00	5.959.000,00	13.459.000,00
42	Kecamatan Balen	-	14.082.625,00	14.082.625,00
43	Kecamatan Sumberrejo	6.315.000,00	29.117.500,00	35.432.500,00
44	Kecamatan Kanor	3.500.000,00	9.451.500,00	12.951.500,00
45	Kecamatan Baureno	-	2.300.000,00	2.300.000,00
46	Kecamatan Sugihwaras	-	76.397.500,00	76.397.500,00
47	Kecamatan Kepohbaru	9.675.000,00	14.479.500,00	24.154.500,00
48	Kecamatan Kedungadem	-	9.298.500,00	9.298.500,00
49	Kecamatan Sukosewu	-	23.326.500,00	23.326.500,00
50	Kecamatan Trucuk	17.596.000,00	20.500.500,00	38.096.500,00
51	Kecamatan Malo	-	27.305.500,00	27.305.500,00
52	Kecamatan Kalitidu	3.450.000,00	26.270.500,00	29.720.500,00
53	Kecamatan Dander	-	15.459.000,00	15.459.000,00
54	Kecamatan Padangan	-	6.857.000,00	6.857.000,00
55	Kecamatan Purwosari	6.775.000,00	8.463.500,00	15.238.500,00
56	Kecamatan Kasiman	2.924.000,00	12.644.500,00	15.568.500,00
57	Kecamatan Kedewan	6.400.000,00	13.592.500,00	19.992.500,00
58	Kecamatan Ngasem	-	20.989.000,00	20.989.000,00
59	Kecamatan Ngambon	2.946.000,00	16.179.900,00	19.125.900,00
60	Kecamatan Tambakrejo	7.879.700,00	5.204.000,00	13.083.700,00
61	Kecamatan Ngraho	-	9.048.500,00	9.048.500,00
62	Kecamatan Margomulyo	563.000,00	10.537.000,00	11.100.000,00
63	Kecamatan Temayang	1.140.000,00	14.296.000,00	15.436.000,00
64	Kecamatan Bubulan	17.720.000,00	11.227.000,00	28.947.000,00
65	Kecamatan Gondang	5.124.000,00	32.233.085,00	37.357.085,00
66	Kecamatan Sekar	-	20.179.500,00	20.179.500,00
67	Kecamatan Gayam	975.000,00	9.221.700,00	10.196.700,00
68	Inspektorat	40.537.000,00	62.962.805,00	103.499.805,00
69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	23.046.300,00	23.046.300,00
70	BPKAD	18.988.000,00	212.933.570,00	231.921.570,00
71	Badan Pendapatan Daerah	48.760.000,00	39.875.850,00	88.635.850,00
72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	93.466.183,00	41.045.443,00	134.511.626,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.561.902.893,00</b>	<b>8.899.845.679,00</b>	<b>18.461.748.572,00</b>

## (5) Beban Perjalanan Dinas –LO

	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	53.880.436.358,63	53.880.436.358,63	0,00

Beban Perjalanan Dinas–LO merupakan semua beban perjalanan dinas yang terjadi di tahun 2018 besarnya sama dengan realisasi belanja perjalanan dinas LRA yaitu senilai Rp53.880.436.358,63, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 115. Beban Perjalanan Dinas - LO**

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3.043.456.728,63
2	Dinas Kesehatan	9.907.773.016,00
3	RSUD Padangan	13.382.400,00
4	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	484.726.867,00
5	Dinas PU Sumber Daya Air	765.596.069,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	330.341.433,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	248.194.000,00
8	Satpol PP	775.654.909,00
9	BPBD	307.294.700,00
10	Dinas Pemadam Kebakaran	427.954.994,00
11	Dinas Sosial	214.175.375,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	557.775.736,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	305.415.736,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	951.328.147,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	616.456.386,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	981.183.316,00
17	Dinas Perhubungan	353.814.740,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	679.016.269,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	438.838.168,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	340.049.644,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	228.572.765,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	778.409.575,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.381.922,00
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	775.985.564,00
25	Dinas Pertanian	487.023.920,00
26	Dinas Perdagangan	524.409.767,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	592.102.400,00
28	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	313.034.912,00
29	Bagian Pemerintahan	285.838.157,00
30	Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	305.850.400,00
31	Bagian Sumberdaya Alam	442.095.447,00
32	Bagian Perlengkapan	138.172.586,00
33	Bagian Pembangunan	272.165.751,00
34	Bagian Perekonomian	260.301.145,00
35	Bagian Umum dan Keuangan	1.446.484.268,00
36	Bagian Humas dan Protokol	2.228.507.925,00
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	186.636.900,00
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	281.127.622,00
39	Sekretariat DPRD	14.854.033.100,00
40	Kecamatan Bojonegoro	8.125.500,00
41	Kecamatan Kapas	118.395.000,00
42	Kecamatan Balen	120.920.070,00
43	Kecamatan Sumberrejo	140.412.750,00
44	Kecamatan Kanor	83.479.000,00
45	Kecamatan Baureno	127.005.500,00

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas (Rp)
46	Kecamatan Sugihwaras	130.597.000,00
47	Kecamatan Kepohbaru	83.235.000,00
48	Kecamatan Kedungadem	125.420.000,00
49	Kecamatan Sukosewu	139.425.000,00
50	Kecamatan Trucuk	97.500.200,00
51	Kecamatan Malo	109.292.750,00
52	Kecamatan Kalitidu	149.245.000,00
53	Kecamatan Dander	103.976.149,00
54	Kecamatan Padangan	97.608.000,00
55	Kecamatan Purwosari	112.975.000,00
56	Kecamatan Kasiman	55.685.000,00
57	Kecamatan Kedewan	79.077.750,00
58	Kecamatan Ngasem	95.680.500,00
59	Kecamatan Ngambon	63.599.298,00
60	Kecamatan Tambakrejo	79.380.000,00
61	Kecamatan Ngraho	92.672.750,00
62	Kecamatan Margomulyo	57.450.000,00
63	Kecamatan Temayang	86.360.900,00
64	Kecamatan Bubulan	72.280.000,00
65	Kecamatan Gondang	98.396.499,00
66	Kecamatan Sekar	83.650.000,00
67	Kecamatan Gayam	123.100.000,00
68	Inspektorat	683.121.573,00
69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.188.797.910,00
70	BPKAD	1.523.440.080,00
71	Badan Pendapatan Daerah	805.263.242,00
72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	722.306.178,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>53.880.436.358,63</b>

(6) Beban Subsidi –LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Subsidi	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00

Nilai Beban Subsidi – LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu Rp75.600.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

(7) Beban Hibah –LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Hibah	183.669.107.085,97	127.732.077.282,35	55.937.029.803,62

Nilai beban Hibah dalam laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp183.669.107.085,97, sedangkan nilai realisasi belanja Hibah dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp127.732.077.282,35. Selisih antara beban Hibah-LO dan belanja Hibah-LRA adalah sebesar Rp55.937.029.803,62. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Hibah Tahun 2018 Rp 127.732.077.282,35

**Penambahan**

Persediaan tahun 2017 yang belum diserahkan kepada pihak ketiga Rp 16.895.812.576

Belanja Hibah Barang Tahun 2018	Rp	46.985.674.674,29
Koreksi atas belanja karena denda yang dipotongkan langsung dari termyn	Rp	125.575.830,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>64.007.063.080,29</b>
<b>Pengurangan</b>		
Hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga	Rp	8.070.033.276,67
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>8.070.033.276,67</b>
<b>Beban Hibah -LO</b>	<b>Rp</b>	<b>183.669.107.085,97</b>

Tabel 116. Beban Hibah - LO

No	SKPD	Belanja Hibah (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	260.756.800,00	260.756.800,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	41.193.155.529,62	41.193.155.529,62
3	BPBD	-	95.468.000,00	95.468.000,00
4	Dinas Sosial	-	243.272.000,00	243.272.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	-	236.118.974,00	236.118.974,00
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	16.867.500,00	16.867.500,00
7	Dinas Pertanian	-	13.843.508.000,00	13.843.508.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	47.883.000,00	47.883.000,00
9	PPKD	127.732.077.282,35	-	127.732.077.282,35
	<b>JUMLAH</b>	<b>127.732.077.282,35</b>	<b>55.937.029.803,62</b>	<b>183.669.107.085,97</b>

(8) Beban Bantuan Sosial –LO

	<u>LO</u>	<u>LRA</u>	<u>Selisih</u>
Beban/Belanja Bantuan Sosial	37.821.060.373,00	3.997.500.000,00	33.823.560.373,00

Nilai beban Bantuan Sosial dalam laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.821.060.373,00, sedangkan nilai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.997.500.000,00. Selisih antara beban Bantuan Sosial-LO dan belanja Bantuan Sosial-LRA adalah sebesar Rp33.823.560.373,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Bansos Tahun 2018	Rp	3.997.500.000,00
<b>Penambahan</b>		
Belanja Bansos Barang	Rp	34.013.024.303,00
Koreksi atas belanja karena denda yang dipotongkan langsung dari termyn	Rp	5.924.450,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>34.018.948.753,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
Bansos Yang Belum Diserahkan Pada Pihak Ketiga	Rp	195.388.380,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>195.388.380,00</b>
<b>Beban Bantuan Sosial - LO</b>	<b>Rp</b>	<b>37.821.060.373,00</b>

**Tabel 117. Beban Bantuan Sosial - LO**

No	SKPD	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	32.980.089.773,00	32.980.089.773,00
2	BPBD	-	200.000.000,00	200.000.000,00
3	Dinas Sosial	-	443.174.400,00	443.174.400,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	-	170.449.950,00	170.449.950,00
5	Kesejahteraan Rakyat	-	29.846.250,00	29.846.250,00
6	PPKD	3.997.500.000,00	-	3.997.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.997.500.000,00</b>	<b>33.823.560.373,00</b>	<b>37.821.060.373,00</b>

(9) Beban Penyusutan –LO

Beban penyusutan – LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman tidak disusutkan. Beban penyusutan hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyusutan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp543.965.406.588,43.

**Tabel 118. Beban Penyusutan– LO**

No.	SKPD	Beban Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	539.581.553,97
2	BAPPEDA	73.402.950,00
3	Inspektorat	68.085.032,80
4	BPKAD	288.541.063,17
5	BKPP	2.658.674.207,19
6	Bakesbangpol	103.658.259,17
7	Badan Pendapatan Daerah	483.270.285,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	567.805.460,40
9	Dinas Sosial	145.417.003,20
10	Dinas Pemadam Kebakaran	4.390.059.199,33
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.283.560.879,93
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	221.453.914,98
13	Dinas Perhubungan	5.139.512.166,79
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	492.542.851,00
15	Dinas PMPTSP	283.390.440,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	196.219.181,66
17	Dinas Ketahanan Pangan	93.180.500,20
18	Dinas Perindustrian dan Naker	725.584.731,94
19	Satpol PP	227.655.050,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	157.163.316,08
21	BPBD	2.518.753.047,10
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.172.590.529,88
23	Dinas P3A dan KB	1.896.794.889,28
24	Dinas PU Bina Marga dan PR	181.678.444.141,40
25	Dinas PU Sumber Daya Air	7.732.749.413,90
26	Dinas PKP dan Cipta Karya	22.564.222.948,25
27	Dinas Pertanian	4.638.428.432,18
28	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.338.754.091,10

No.	SKPD	Beban Penyusutan
29	Kecamatan Bojonegoro	416.430.356,50
30	Kecamatan Kapas	196.256.613,00
31	Kecamatan Balen	311.920.945,00
32	Kecamatan Sumberrejo	172.909.259,57
33	Kecamatan Kanor	169.276.029,80
34	Kecamatan Baureno	371.618.106,89
35	Kecamatan Kedungadem	197.339.605,00
36	Kecamatan Kepohbaru	23.605.500,00
37	Kecamatan Sugihwaras	192.818.275,52
38	Kecamatan Sukosewu	190.185.177,00
39	Kecamatan Temayang	102.327.275,00
40	Kecamatan Gondang	88.761.719,00
41	Kecamatan Sekar	92.935.717,40
42	Kecamatan Bubulan	95.315.725,00
43	Kecamatan Dander	144.186.105,00
44	Kecamatan Ngasem	191.348.285,00
45	Kecamatan Tambakrejo	131.993.109,33
46	Kecamatan Ngraho	271.073.426,76
47	Kecamatan Margomulyo	108.985.759,00
48	Kecamatan Kedewan	101.857.045,00
49	Kecamatan Kasiman	102.236.463,00
50	Kecamatan Padangan	135.902.095,00
51	Kecamatan Purwosari	115.469.155,00
52	Kecamatan Kalitidu	134.758.640,00
53	Kecamatan Gayam	332.346.691,00
54	Kecamatan Trucuk	136.832.994,00
55	Kecamatan Malo	127.485.245,00
56	Kecamatan Ngambon	67.054.461,00
57	Bagian Umum dan Keuangan	13.536.665.708,66
58	Bagian Humas dan Protokol	130.383.617,70
59	Bagian Pemerintahan	79.315.240,00
60	Bagian Perlengkapan	3.460.136.245,30
61	Bagian Kesejahteraan Rakyat	91.897.865,00
62	Bagian Perekonomian	81.678.425,00
63	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	19.097.885,00
64	Bagian Hukum dan Per UU	39.663.065,00
65	Bagian Sumber Daya Alam	139.539.480,00
66	Bagian Pembangunan	73.335.580,00
67	Bagian Layanan Pengadaan Barang	194.865.380,00
68	Dinas Perdagangan	3.396.418.953,84
69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	172.457.479,45
70	Dinas Pendidikan	56.216.948.595,56
71	Dinas Kesehatan	23.691.997.237,43
72	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	142.415.465.331,31
73	RSUD Sumberrejo	21.639.771.894,82
74	RSUD Padangan	28.183.043.285,69
	<b>Jumlah</b>	<b>543.965.406.588,43</b>

(10) Beban Amortisasi –LO

Beban Amortisasi-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban

Amortisasi hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2018 adalah Rp803.732.006,60.

**Tabel 119. Beban Amortisasi - LO**

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi 2017	Akumulasi Amortisasi 2018	Beban Amortisasi 2018
1	Dinas Kesehatan	53.800.000,00	53.800.000,00	-
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	349.879.400,00	356.504.400,00	6.625.000,00
3	RSUD Sumberrejo	305.335.246,40	356.298.000,00	50.962.753,60
4	RSUD Padangan	137.506.000,00	138.506.000,00	1.000.000,00
5	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	480.268.000,00	680.012.800,00	199.744.800,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	233.830.200,00	294.720.600,00	60.890.400,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.260.000,00	142.225.000,00	17.965.000,00
8	Dinas Perhubungan	60.335.000,00	66.334.400,00	5.999.400,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.188.891.875,00	1.450.662.568,00	261.770.693,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	257.350.000,00	262.350.000,00	5.000.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
12	Dinas Pertanian	39.699.200,00	48.124.000,00	8.424.800,00
13	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	170.150.000,00	202.950.000,00	32.800.000,00
14	Bagian Umum dan Keuangan	69.640.000,00	69.640.000,00	-
15	Bagian Humas dan Protokol	5.000.000,00	5.000.000,00	-
16	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113.090.800,00	164.427.960,00	51.337.160,00
18	BPKAD	87.140.000,00	149.205.000,00	62.065.000,00
19	Badan Pendapatan Daerah	331.435.000,00	354.675.000,00	23.240.000,00
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11.814.000,00	17.721.000,00	5.907.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.145.762.221,40</b>	<b>4.949.494.228,00</b>	<b>803.732.006,60</b>

(11) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih –LO

Beban penyisihan piutang tak tertagih–LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tak tertagih hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih 2018 adalah Rp2.097.089.527,94.

**Tabel 120. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO**

No	SKPD	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2017 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2018 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2018 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	7.647.270,00	17.463.572,25	9.816.302,25
2	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikusumo	132.417.784,41	188.775.785,95	56.358.001,54
3	RSUD Sumberrejo	4.020.046,00	3.464.069,12	(555.976,88)
4	RSUD Padangan	7.999.546,00	15.259.487,64	7.259.941,64



No	SKPD	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2017 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2018 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2018 (Rp)
5	Dinas Ketahanan Pangan	403.490.000,00	310.890.000,00	(92.600.000,00)
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.077.248.618,95	1.987.279.874,31	(89.968.744,64)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	401.894,50	532.980,00	131.085,50
8	Dinas Peternakan dan Perikanan	5.939.819.137,32	6.900.825.806,57	961.006.669,25
9	Dinas Pertanian	2.265.395.000,00	2.076.616.000,00	(188.779.000,00)
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.575.786.019,29	1.758.132.100,21	182.346.080,92
11	Bagian Perekonomian	304.650.000,00	274.600.000,00	(30.050.000,00)
12	PPKD	214.084.853,14	62.045.129,00	(152.039.724,14)
13	Badan Pendapatan Daerah	6.949.184.833,44	8.383.349.725,94	1.434.164.892,50
<b>JUMLAH</b>		<b>19.882.145.003,05</b>	<b>21.979.234.530,99</b>	<b>2.097.089.527,94</b>

(12) Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  
Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya sama dengan belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2018 adalah Rp12.379.745.270,00.

(13) Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp650.552.280.111,00 dikurangi dengan beban dana desa senilai Rp316.364.467.000,00 sehingga nilainya menjadi Rp334.187.813.111,00.

#### 7.E.3.d Surplus dari Operasi

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2018 adalah Rp1.794.494.154.416,35.

(1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 adalah Rp454.027.111,00 yang terdiri atas penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek dan hasil perikanan.

(2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 adalah Rp2.782.438.210,00 berasal dari penghapusan aset yang telah dilelang senilai Rp1.959.913.410,00 dan Rp822.524.800,00 merupakan belanja modal tahun 2017 yang dihibahkan pada tahun 2018 oleh Dinas PKP dan Cipta Karya.

#### 7.E.4.e Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (2) Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
- (3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2018 sebesar (Rp54.334.600,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2018 senilai Rp(54.334.600,00).

#### 7.E.4.f Surplus Defisit LO

Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Defisit LO per 31 Desember 2018 adalah Rp1.792.111.408.717,35.

### 7.E.5.LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

#### 7.E.5.a Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2018 adalah Rp2.339.210.790.684,30. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp4.823.298.214.353,20 dikurangi dengan arus kas keluar Rp2.484.087.423.668,90.

	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	4.823.298.214.353,20	3.024.088.829.377,43
Arus Kas Keluar	2.484.087.423.668,90	2.254.448.041.848,63
<b>Arus Kas Bersih dari</b> <b>Aktivitas Operasi</b>	<b>2.339.210.790.684,30</b>	<b>769.640.787.528,80</b>

Arus Kas Masuk sebesar Rp4.823.298.214.353,20 terdiri dari :

**Tabel 121. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Pajak Daerah	94.593.395.280,00	87.889.266.165,20
2	Retribusi Daerah	19.844.707.742,00	54.288.552.381,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.121.803.634,95	18.231.016.223,48
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	292.154.036.663,07	287.667.708.079,12
5	Dana Bagi Hasil Pajak	251.636.029.601,00	153.491.992.086,00

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.281.171.868.831,00	623.083.786.839,00
7	Dana Alokasi Umum	932.357.598.649,00	932.445.113.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	349.495.303.481,00	178.879.417.733,00
9	Dana Otonomi Khusus	0,00	332.980.300.000,00
10	Dana Penyesuaian	17.250.000.000,00	191.914.796.537,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.434.223.898,00	151.511.693.833,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Pendapatan Hibah	90.715.879.573,18	0,00
14	Pendapatan Lainnya	328.523.367.000,00	11.705.186.500,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>4.823.298.214.353,20</b>	<b>3.024.088.829.377,43</b>

Untuk tahun ini realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan dan Akademi Kebidanan Bojonegoro serta FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro .

Arus Kas Keluar sebesar Rp2.484.087.423.668,90 terdiri dari :

**Tabel 122. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.017.533.334.032,98	995.662.927.381,00
2	Belanja Barang Jasa	671.762.552.372,57	574.061.177.467,20
3	Belanja Bunga	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	75.600.000,00	156.800.000,00
5	Belanja Hibah	127.732.077.282,35	76.903.266.568,00
6	Belanja Bantuan Sosial	3.997.500.000,00	1.708.500.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.379.745.270,00	15.255.132.285,05
8	Belanja Bantuan Keuangan	650.552.280.111,00	585.172.283.199,38
9	Belanja Tidak Terduga	54.334.600,00	5.527.954.948,00
<b>Jumlah Arus Kas</b>		<b>2.484.087.423.668,90</b>	<b>2.254.448.041.848,63</b>

#### 7.E.5.b Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2018 adalah (Rp600.884.019.969,92). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	454.027.111,00	111.595.876,00
Arus Kas Keluar	601.338.047.080,92	573.456.669.153,80
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(600.884.019.969,92)</b>	<b>(573.345.073.277,80)</b>

Arus Kas Masuk sebesar Rp454.027.111,00 merupakan penjualan peralatan kantor dan barang bekas proyek yang tidak terpakai serta penjualan hasil perikanan.

**Tabel 123. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Penjualan Peralatan Kantor Tidak Terpakai	259.700.000,00	0,00
2	Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	11.288.000,00	86.595.876,00
3	Penjualan hasil perikanan	22.050.000,00	25.000.000,00
4	Penjualan Aset Tetap	160.989.111,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>454.027.111,00</b>	<b>111.595.876,00</b>

Arus Kas Keluar sebesar Rp601.338.047.080,92 terdiri dari :

**Tabel 124. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Belanja Tanah	725.423.250,00	21.317.897.550,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	142.873.891.529,80	86.729.210.037,80
3	Belanja Bangunan dan Gedung	153.161.358.323,09	148.631.056.352,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	286.469.922.122,91	290.463.504.465,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.368.341.855,12	26.284.800.749,00
6	Belanja Aset Lainnya	739.110.000,00	30.200.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>601.338.047.080,92</b>	<b>573.456.669.153,80</b>

#### 7.E.5.c Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah Rp1.257.393.774,83. Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp1.257.393.774,83 dikurangi Arus kas keluar Rp0,00.

	<b>Tahun 2018</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2017</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	1.257.393.774,83	2.437.597.284,16
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.257.393.774,83</b>	<b>2.437.597.284,16</b>

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.257.393.774,83 terdiri dari :

**Tabel 125. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	2018 (Rp)	2016 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	1.257.393.774,83	2.437.597.284,16
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.257.393.774,83</b>	<b>2.437.597.284,16</b>

Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00 terdiri dari :

**Tabel 126. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.E.5.d Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada TA 2018, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar (Rp26.340.832,00). Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp153.278.046.130,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp153.304.386.962,00.

	<b>Tahun 2018 (Rp)</b>	<b>Tahun 2017 (Rp)</b>
Arus Kas Masuk	153.278.046.130,00	153.919.809.151,00
Arus Kas Keluar	153.304.386.962,00	153.919.834.171,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(26.340.832,00)</b>	<b>(25.020,00)</b>

Aktivitas Transitoris Tahun 2018 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2018 serta sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2018 dan Tahun 2017.

Perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 127. Rincian Pajak Belanja**

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Taperum	866.521.000,00	866.521.000,00
2	Askes	13.448.119.953,00	13.448.119.953,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	34.376.542.216,00	34.376.542.216,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.886.260.234,00	1.886.260.234,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	301.318.427,00	301.318.427,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	7.734.706.728,00	7.734.706.728,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	45.522.846.029,00	45.522.846.029,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	977.019.434,00	977.019.434,00
9	Iuran Jaminan Kematian	3.820.588.212,00	3.820.588.212,00
10	IWP 2%	8.883.094.356,00	8.883.094.356,00

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
11	IWP 8%	35.460.682.681,00	35.460.682.681,00
<b>Jumlah</b>		<b>153.277.699.270,00</b>	<b>153.277.699.270,00</b>

Penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran merupakan arus masuk dan keluar kas berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan selama tahun 2018. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas sebesar Rp26.340.832,00,00 terinci sebagai berikut :

**Tabel 128. Rincian Selisih Penerimaan dan Pengeluaran UP Bendahara Pengeluaran**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Sisa UP Bendahara Pengeluaran Tahun lalu	346.860,00
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akhir Tahun 2018	26.437.552,00
3	Koreksi SiLPA	250.140,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.340.832,00</b>

#### 7.E.5.e Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

	31 Des2018 (Rp)	31 Des2017 (Rp)
<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>	1.739.557.823.657,21	198.733.286.515,16

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2018 sebesar Rp1.739.557.823.657,21. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

**Tabel 129. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	2.339.210.790.684,30	769.640.787.528,80
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(600.884.019.969,92)	(573.345.073.277,80)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.257.393.774,83	2.437.597.284,16
4.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	(26.340.832,00)	(25.020,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.739.557.823.657,21</b>	<b>198.733.286.515,16</b>

#### 7.E.5.f Saldo Awal Kas di BUD

	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	277.817.862.470,94	79.084.575.955,78

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp277.817.862.470,94 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017, terinci sebagai berikut :

**Tabel 130. Perhitungan Saldo Awal Kas**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas awal di BUD	230.367.729.074,83	-
2	Kas awal di Bendahara Penerimaan	21.204.652,00	-
3	Kas awal di BLUD	26.981.203.206,89	Saldo Kas BLUD di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan Akbid
4	Kas awal lainnya	20.447.725.537,22	Saldo Kas JKN di 36 FKTP dan Saldo Kas Bos
	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>277.817.862.470,94</b>	

Kas awal di BUD sebesar Rp230.367.729.074,83 sudah termasuk kas awal di bendahara pengeluaran sebesar Rp346.860,00 dan kesalahan pencatatan utang PFK pada Tahun 2015 yang tidak diketahui pemiliknya senilai Rp250.140,00.

#### 7.E.5.g Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar Rp2.017.402.123.680,15 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tanggal 31 Desember 2018. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

**Tabel 131. Perhitungan Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	1.739.557.823.657,21	198.733.286.515,16
2	Saldo awal kas di BUD	277.817.862.470,94	79.084.575.955,78
3	Saldo kas di bendahara pengeluaran	26.437.552,00	346.860,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>2.017.402.123.680,15</b>	<b>277.818.209.330,94</b>

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas senilai Rp2.017.402.123.680,15, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 132. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Kas akhir di BUD	1.960.162.109.889,91	-
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	475.031.443,00	-
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	26.437.552,00	-
4	Kas akhir di BLUD	41.658.898.631,88	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD dan Akbid
5	Saldo Akhir Kas di FKTP	13.414.851.905,89	Saldo Akhir Kas JKN di 36 FKTP
6	Saldo Akhir Kas Bos	1.664.794.257,47	-
7	Saldo Akhir Setara Kas	0,00	-
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>2.017.402.123.680,15</b>	-

#### 7.E.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

##### 7.E.6.a Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp5.198.673.674.300,09



#### **7.E.6.b Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1.792.111.408.717,35. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

#### **7.E.6.c Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2018 adalah Rp1.219.957.125.587,20 terdiri atas:

- (1) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp4.360.531.875,00 yang terdiri dari kapitalisasi PKB dan BBNKB Dinas Pemadam Kebakaran senilai Rp2.517.980.875,00, BBI Ngampal Dinas Peternakan dan Perikanan senilai Rp1.663.421.000,00 dan perbaikan atas gedung Dinas Perdagangan senilai Rp179.130.000,00;
- (2) Penambahan aset selain yang berasal dari utang senilai Rp13.634.986.010,57;
- (3) Penghapusan aset senilai (Rp1.026.750.000);
- (4) Tidak memenuhi kriteria aset tetap senilai (Rp687.780.655,00);
- (5) Pengurangan lain merupakan perencanaan yang tidak diikuti fisik senilai (Rp783.357.000,00);
- (6) Penambahan aset lain yang saldo awalnya 0 dan 1 senilai Rp693.937.686,00;
- (7) Aset tetap di reklas di extracomptable senilai (Rp31.681.636.211,53);
- (8) Pembulatan (Rp1,34);
- (9) Penambahan aset tanah dibawah jalan senilai Rp1.093.222.416.000,00.
- (10) Koreksi tambah aset tetap tanah yang sudah dapat rekomendasi senilai Rp351.446.676.000,00;
- (11) Koreksi atas kesalahan Pemjurnalan 2011 atas piutang pada Pihak Ketiga senilai Rp26.094.800,00;
- (12) Koreksi kesalahan pencatatan aset tetap peralatan mesin-Sepeda Motor Kades Kalirejo Kec Bojonegoro senilai (Rp90.000.000,00);
- (13) Koreksi kurang atas pencatatan utang Belanja modal Cipta Karya senilai Rp0,30;
- (14) Koreksi tambah aset tetap yang semula diklasifikasikan menjadi extracomptable senilai Rp16.056.779.835,55;
- (15) Koreksi tambah 3 bidang aset tanah diknas yang masih bernilai Rp1,00 senilai Rp3,00;
- (16) Koreksi kurang atas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria senilai (Rp1.187.669.167,00);
- (17) Koreksi tambah atas aset yang semula bernilai nol senilai Rp10.286.100,00
- (18) Koreksi tambah atas aset rusak berat yang semula bernilai nol senilai Rp10.905.000,00;
- (19) Koreksi atas penyertaan modal pada apotek Sidowaras senilai (Rp290.363.762,46);
- (20) Koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain 2017 yang belum disajikan senilai (Rp545.394.240.349,32);
- (21) Koreksi atas akumulasi penyusutan aset lain-lain yang berasal dari penambahan aset lain lain dikurangi tanah senilai (Rp12.381.640.395,05);
- (22) Koreksi tambah atas aset rusak berat yang semula diklasifikasikan menjadi extracomptable senilai Rp2.823.726.163,00;

- (23) koreksi perhitungan dampak kumulatif atas kesalahan perhitungan penyusutan senilai Rp331.216.928.095,48;
- (24) Koreksi akumulasi penyusutan yang sudah termasuk dalam jumlah global senilai Rp22.704.440,00.

#### **7.E.6.d Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp8.210.742.208.604,64.

## **F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

### **1) Kondisi Geografis**

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km<sup>2</sup>, yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

### **2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro**

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah).

### **3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan**

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

### **4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 4 (empat) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan ketiga RSUD tersebut memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009,

sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada Tahun 2019 mendatang, berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 974/KPT/I/2018 tanggal 8 Nopember 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kabupaten Bojonegoro, maka Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro tidak lagi menjadi BLUD dikarenakan pengelolaannya berpindah ke Kementerian Kesehatan.

Untuk RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan pada tahun 2018 juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/225/KEP/412.013/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada RSUD Kelas D Padangan dan Nomor 188/226/KEP/412.013/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada RSUD Kelas D Sumberrejo.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- a) Bidang Perbankan:  
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
- b) Bidang Konstruksi:  
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
- c) Bidang Jasa lainnya:
  - (1) PDAM Kab. Bojonegoro;
  - (2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;
  - (3) PT. Griya Dharma Kusuma
- d) Bidang Farmasi:  
PD Apotik Sidowaras
- e) Bidang Pertambangan:  
PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

#### **5) Data Terkait Kompensasi PPh Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdapat kelebihan pajak mulai bulan Januari sampai September 2015 sebesar Rp4.644.788.866,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdapat kelebihan pajak mulai bulan Januari sampai Agustus 2016 sebesar Rp3.214.297.473,00. Sehingga jumlah kelebihan Pembayaran Pajak akibat Penyesuaian PTKP pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp7.859.076.339,00

Kelebihan pembayaran tersebut telah dikompensasikan mulai bulan Juni Tahun 2016. Adapun Realisasi Kompensasi kelebihan pembayaran pajak akibat penyesuaian PTKP pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 133. Rincian Kompensasi Pajak**

<b>Nama SKPD</b>	<b>2016 (Rp)</b>	<b>2017 (Rp)</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Dinas Pendidikan	803.176.275,00	404.309.486,00	1.944.125.270,00	3.151.611.031,00
Dinas Kesehatan	49.804.071,00	13.394.477,00	97.765.146,00	160.963.694,00
RSUD Kelas B Sosodoro Djatikoesoemo	34.076.726,00	16.844.565,00	56.114.966,00	107.036.257,00
RSUD Kelas D Sumberrejo	4.086.570,00	291.120,00	4.995.881,00	9.373.571,00
RSUD Kelas D Padangan	2.888.030,00	501.758,00	3.643.721,00	7.033.509,00
Dinas Pekerjaan Umum	6.060.740,00	1.052.374,00	5.756.943,00	12.870.057,00
Dinas Pengairan	4.313.499,00	1.264.992,00	4.417.442,00	9.995.933,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.714.172,00	1.660.613,00	5.787.499,00	11.162.284,00
Dinas Perhubungan	4.496.962,00	2.161.972,00	8.468.001,00	15.126.935,00
Badan Lingkungan Hidup	4.541.990,00	2.253.941,00	10.307.970,00	17.103.901,00
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	3.512.074,00	-	-	3.512.074,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.506.959,00	2.352.033,00	7.205.394,00	13.064.386,00
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	24.887.663,00	10.143.494,00	12.593.344,00	47.624.501,00
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial	5.388.519,00	2.640.995,00	10.064.985,00	18.094.499,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.764.343,00	2.497.853,00	7.413.801,00	15.675.997,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4.399.080,00	1.377.512,00	6.581.774,00	12.358.366,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan	4.227.860,00	2.347.247,00	7.979.925,00	14.555.032,00
Satuan Polisi Pamong Praja	968.967,00	416.815,00	3.263.725,00	4.649.507,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.107.243,00	-	1.496.450,00	2.603.693,00
Sekretariat Daerah	12.511.332,00	6.662.212,00	21.694.280,00	40.867.824,00
Sekretariat DPRD	5.506.029,00	2.553.166,00	9.107.915,00	17.167.110,00
BPKAD	4.499.953,00	1.693.388,00	7.482.955,00	13.676.296,00
Badan Kepegawaian Daerah	3.503.377,00	1.537.670,00	7.164.393,00	12.205.440,00
Inspektorat	3.791.757,00	1.603.822,00	3.372.052,00	8.767.631,00
Badan Perijinan	2.785.296,00	2.069.066,00	5.366.125,00	10.220.487,00
Kecamatan Bojonegoro	9.357.930,00	1.024.048,00	7.536.260,00	17.918.238,00
Kecamatan Kapas	1.458.026,00	480.082,00	1.616.000,00	3.554.108,00
Kecamatan Balen	1.689.809,00	45.906,00	1.521.542,00	3.257.257,00
Kecamatan Sumberrejo	1.485.504,00	503.883,00	2.278.894,00	4.268.281,00
Kecamatan Kanor	1.655.552,00	966.921,00	3.212.228,00	5.834.701,00
Kecamatan Baureno	2.098.160,00	126.091,00	2.272.781,00	4.497.032,00
Kecamatan Sugihwaras	1.782.248,00	81.081,00	2.421.903,00	4.285.232,00
Kecamatan Kepohbaru	1.366.780,00	382.428,00	2.079.261,00	3.828.469,00
Kecamatan Kedungadem	1.623.576,00	674.139,00	3.361.706,00	5.659.421,00
Kecamatan Sukosewu	1.862.443,00	367.182,00	2.533.513,00	4.763.138,00
Kecamatan Trucuk	2.069.679,00	870.259,00	2.652.329,00	5.592.267,00
Kecamatan Malo	1.213.294,00	537.682,00	1.652.755,00	3.403.731,00
Kecamatan Kalitidu	1.963.561,00	829.361,00	3.766.066,00	6.558.988,00
Kecamatan Dander	2.077.542,00	803.460,00	4.181.473,00	7.062.475,00
Kecamatan Padangan	2.353.087,00	952.440,00	4.053.818,00	7.359.345,00
Kecamatan Purwosari	1.604.749,00	-	831.800,00	2.436.549,00

Nama SKPD	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecamatan Kasiman	1.445.539,00	171.383,00	2.896.815,00	4.513.737,00
Kecamatan Kedewan	1.771.689,00	386.224,00	1.857.818,00	4.015.731,00
Kecamatan Ngasem	1.141.699,00	-	545.000,00	1.686.699,00
Kecamatan Ngambon	1.485.342,00	190.485,00	1.440.019,00	3.115.846,00
Kecamatan Tambakrejo	1.660.624,00	63.575,00	1.929.022,00	3.653.221,00
Kecamatan Ngraho	1.747.951,00	95.600,00	2.178.050,00	4.021.601,00
Kecamatan Margomulyo	1.464.043,00	64.960,00	1.245.650,00	2.774.653,00
Kecamatan Temayang	1.348.046,00	4.346,00	936.050,00	2.288.442,00
Kecamatan Bubulan	1.907.169,00	351.678,00	1.281.900,00	3.540.747,00
Kecamatan Gondang	1.406.880,00	110.240,00	2.124.351,00	3.641.471,00
Kecamatan Sekar	1.181.869,00	-	2.269.861,00	3.451.730,00
Kecamatan Gayam	1.819.401,00	590.133,00	5.439.326,00	7.848.860,00
Dinas Pendapatan Daerah	4.076.525,00	1.901.221,00	6.014.831,00	11.992.577,00
Kantor Ketahanan Pangan	1.215.872,00	1.924.936,00	5.308.399,00	8.449.207,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	4.169.643,00	1.545.793,00	3.832.344,00	9.547.780,00
Kantor Arsip Dan Perpustakaan	1.800.616,00	2.455.824,00	5.502.989,00	9.759.429,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.916.159,00	2.682.435,00	8.773.823,00	17.372.417,00
Dinas Pertanian	26.902.594,00	16.431.279,00	41.016.191,00	84.350.064,00
Dinas Perhutanan dan Perkebunan	7.248.164,00	-	-	7.248.164,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	8.072.919,00	3.664.750,00	10.839.816,00	22.577.485,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.114.360,00	1.979.123,00	3.173.079,00	10.266.562,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.822.879,00	-	-	2.822.879,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	683.847,00	259.305,00	515.145,00	1.458.297,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.125.585.257,00</b>	<b>525.148.824,00</b>	<b>2.407.262.765,00</b>	<b>4.057.996.846,00</b>

Jumlah kelebihan pajak yang telah dikompensasikan sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp4.057.996.846,00. Sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang belum dikompensasikan sebesar Rp3.801.079.493,00.

**Tabel 134. Rincian Kompensasi Gaji Sampai Dengan Tahun 2018**

No	Nama SKPD	Pajak Kompensasi (Rp)	Kompensasi s/d 2018 (Rp)	Jumlah Masih Bisa Kompensasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.614.979.227,00	3.151.611.031,00	2.463.368.196,00
2	Dinas Kesehatan	515.399.055,00	160.963.694,00	354.435.361,00
3	RSUD Kelas B Sosodoro Djatikoesoemo	228.658.823,00	107.036.257,00	121.622.566,00
4	RSUD Kelas D Sumberrejo	33.032.097,00	9.373.571,00	23.658.526,00
5	RSUD Kelas D Padangan	24.620.495,00	7.033.509,00	17.586.986,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	54.057.887,00	12.870.057,00	41.187.830,00
7	Dinas Pengairan	36.261.581,00	9.995.933,00	26.265.648,00
8	Bappeda	23.378.592,00	11.162.284,00	12.216.308,00
9	Dinas Perhubungan	36.187.745,00	15.126.935,00	21.060.810,00
10	Badan Lingkungan Hidup	23.704.564,00	17.103.901,00	6.600.663,00
11	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	37.960.038,00	3.512.074,00	34.447.964,00
12	Dinas Kependudukan Dan Capil	22.990.232,00	13.064.386,00	9.925.846,00

No	Nama SKPD	Pajak Kompensasi (Rp)	Kompensasi s/d 2018 (Rp)	Jumlah Masih Bisa Kompensasi (Rp)
13	BPPKB	118.864.270,00	47.624.501,00	71.239.769,00
14	Dinas Tenaga Kerja, Transsos	31.865.072,00	18.094.499,00	13.770.573,00
15	Dinas Koperasi dan UKM	27.087.818,00	15.675.997,00	11.411.821,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.575.386,00	12.358.366,00	13.217.020,00
17	Badan Kesatuan Bangsa, Pollinmas	23.094.420,00	14.555.032,00	8.539.388,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	11.446.288,00	4.649.507,00	6.796.781,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.578.153,00	2.603.693,00	7.974.460,00
20	Sekretariat Daerah	90.473.260,00	40.867.824,00	49.605.436,00
21	Sekretariat DPRD	28.579.592,00	17.167.110,00	11.412.482,00
22	BPKKD	25.982.413,00	13.676.296,00	12.306.117,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	21.075.560,00	12.205.440,00	8.870.120,00
24	Inspektorat	23.216.819,00	8.767.631,00	14.449.188,00
25	Badan Perijinan	14.024.467,00	10.220.487,00	3.803.980,00
26	Kecamatan Bojonegoro	66.937.216,00	17.918.238,00	49.018.978,00
27	Kecamatan Kapas	15.590.811,00	3.554.108,00	12.036.703,00
28	Kecamatan Balen	17.000.676,00	3.257.257,00	13.743.419,00
29	Kecamatan Sumberrejo	14.498.735,00	4.268.281,00	10.230.454,00
30	Kecamatan Kanor	15.028.078,00	5.834.701,00	9.193.377,00
31	Kecamatan Baureno	17.144.957,00	4.497.032,00	12.647.925,00
32	Kecamatan Sugihwaras	14.476.832,00	4.285.232,00	10.191.600,00
33	Kecamatan Kepohbaru	14.293.054,00	3.828.469,00	10.464.585,00
34	Kecamatan Kedungadem	16.620.354,00	5.659.421,00	10.960.933,00
35	Kecamatan Sukosewu	13.162.899,00	4.763.138,00	8.399.761,00
36	Kecamatan Trucuk	13.771.647,00	5.592.267,00	8.179.380,00
37	Kecamatan Malo	12.944.258,00	3.403.731,00	9.540.527,00
38	Kecamatan Kalitidu	13.880.450,00	6.558.988,00	7.321.462,00
39	Kecamatan Dander	16.161.327,00	7.062.475,00	9.098.852,00
40	Kecamatan Padangan	13.868.793,00	7.359.345,00	6.509.448,00
41	Kecamatan Purwosari	12.491.425,00	2.436.549,00	10.054.876,00
42	Kecamatan Kasiman	13.098.256,00	4.513.737,00	8.584.519,00
43	Kecamatan Kedewan	10.170.036,00	4.015.731,00	6.154.305,00
44	Kecamatan Ngasem	11.023.721,00	1.686.699,00	9.337.022,00
45	Kecamatan Ngambon	10.737.195,00	3.115.846,00	7.621.349,00
46	Kecamatan Tambakrejo	11.276.206,00	3.653.221,00	7.622.985,00
47	Kecamatan Ngraho	15.227.507,00	4.021.601,00	11.205.906,00
48	Kecamatan Margomulyo	10.426.280,00	2.774.653,00	7.651.627,00
49	Kecamatan Temayang	12.558.518,00	2.288.442,00	10.270.076,00
50	Kecamatan Bubulan	12.616.826,00	3.540.747,00	9.076.079,00
51	Kecamatan Gondang	11.375.390,00	3.641.471,00	7.733.919,00
52	Kecamatan Sekar	8.963.867,00	3.451.730,00	5.512.137,00
53	Kecamatan Gayam	11.457.568,00	7.848.860,00	3.608.708,00
54	Dinas Pendapatan Daerah	23.025.473,00	11.992.577,00	11.032.896,00
55	Kantor Ketahanan Pangan	8.720.379,00	8.449.207,00	271.172,00
56	BPMPD	22.158.643,00	9.547.780,00	12.610.863,00
57	Kantor Arsip dan Perpustakaan	10.820.817,00	9.759.429,00	1.061.388,00
58	Dinas Komunikasi dan Informatika	29.484.634,00	17.372.417,00	12.112.217,00
59	Dinas Pertanian	100.812.621,00	84.350.064,00	16.462.557,00



No	Nama SKPD	Pajak Kompensasi (Rp)	Kompensasi s/d 2018 (Rp)	Jumlah Masih Bisa Kompensasi (Rp)
60	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	38.309.976,00	7.248.164,00	31.061.812,00
61	Dinas Peternakan Dan Perikanan	54.013.688,00	22.577.485,00	31.436.203,00
62	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	25.118.151,00	10.266.562,00	14.851.589,00
63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.295.508,00	2.822.879,00	11.472.629,00
64	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.419.713,00	1.458.297,00	961.416,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.859.076.339,00</b>	<b>4.057.996.846,00</b>	<b>3.801.079.493,00</b>

## 6) Lain-Lain

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

- a) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b) Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
- c) Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
- e) Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
- f) Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
- g) Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

- a) Sekretariat Daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas



paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.

- b) Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
- c) Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
- d) Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang. Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

Dinas terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air (sebelumnya Dinas Pengairan)
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
6. Dinas sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (sebelumnya bagian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial)
7. Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran (sebelumnya bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
8. Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

12. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga (sebelumnya bagian dari Dinas Pendidikan).
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (sebelumnya Badan Perijinan)
17. Dinas Ketahanan Pangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan (sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan)
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan (sebelumnya Kantor Arsip dan Perpustakaan)
19. Dinas lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
20. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (gabungan dari sebagian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata
22. Dinas Perdagangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan (sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
23. Dinas Pertanian bertipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
24. Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
  - (a) Bidang pertanian, terdiri dari
    - (1) sub urusan sarana pertanian dengan fungsi / layanan :
      - (a) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
      - (b) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
      - (c) pengawasan obat hewan ditingkat pengecer
      - (d) pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
      - (e) penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
    - (2) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan :

- (a)) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak
      - (b)) pengembangan lahan penggembalaan umum
    - (3)) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
    - (4)) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi / layanan
      - (a)) penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
      - (b)) penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
  - (b) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya
- e) Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.
- Badan terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah)
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
  4. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah)
- f) Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.
- Kecamatan terdiri dari:
- (1) Kecamatan Bojonegoro bertipe A
  - (2) Kecamatan Kapas bertipe A
  - (3) Kecamatan Balen bertipe A
  - (4) Kecamatan Sumberrejo bertipe A
  - (5) Kecamatan Kanor bertipe A
  - (6) Kecamatan Baureno bertipe A
  - (7) Kecamatan Sugihwaras bertipe A
  - (8) Kecamatan Kepohbaru bertipe A
  - (9) Kecamatan Kedungadem bertipe A
  - (10) Kecamatan Sukosewu bertipe A
  - (11) Kecamatan Trucuk bertipe A
  - (12) Kecamatan Malo bertipe A
  - (13) Kecamatan Kalitidu bertipe A
  - (14) Kecamatan Dander bertipe A
  - (15) Kecamatan Padangan bertipe A
  - (16) Kecamatan Purwosari bertipe A
  - (17) Kecamatan Kasiman bertipe A
  - (18) Kecamatan Kedewan bertipe A
  - (19) Kecamatan Ngasem bertipe A

- (20) Kecamatan Ngambon bertipe A
- (21) Kecamatan Tambakrejo bertipe A
- (22) Kecamatan Ngraho bertipe A
- (23) Kecamatan Margomulyo bertipe A
- (24) Kecamatan Temayang bertipe A
- (25) Kecamatan Bubulan bertipe A
- (26) Kecamatan Gondang bertipe A
- (27) Kecamatan Sekar bertipe A
- (28) Kecamatan Gayam bertipe A

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Bupati/ Wali Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kabupaten Bojonegoro Tercantum dalam **Lampiran G**.

## G. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun Anggaran 2018. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematis penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematis penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yaang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
**BUPATI BOJONEGORO**  
  
**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DAFTAR OUTSTANDING SP2D**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NO SP2D	PENERIMA	SKPD	NILAI (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
1	7281/LS-BJ/2018	CV. UNTUNG RAYA (M. AHSANUN NI'AM)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	186.846.000,00	02 Januari 2018
2	7501/LS-BJ/2018	CV. TRI WIBOWO (EDI TRI WIBOWO)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	272.997.725,00	02 Januari 2018
3	7506/LS-BJ/2018	CV. ARMAYA RAYA (YUNI ASTUTI, SE)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	184.982.000,00	02 Januari 2018
4	7629/LS-BJ/2018	CV. KINARYA FAJAR (ACHMAD FAISHAL, ST)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	24.250.000,00	02 Januari 2018
5	7704/LS-BJ/2018	CV. MANDALIKA (NOVI ARI CHRISTANTY, S.Hut)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	30.330.000,00	02 Januari 2018
6	7712/LS-BJ/2018	CV. BANGUN JAYA ABADI (SUGIHARTO, SS)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	182.928.500,00	02 Januari 2018
7	7716/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT (MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	33.658.000,00	02 Januari 2018
8	7719/LS-BJ/2018	CV. ANDI UTAMA (ANARIYAH)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	198.200.000,00	02 Januari 2018
9	7721/LS-BJ/2018	CV. BANGUN JAYA ABADI (SUGIHARTO, SS)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	192.557.000,00	02 Januari 2018
10	7723/LS-BJ/2018	CV. BANGUN JAYA ABADI (SUGIHARTO, SS)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	187.057.000,00	02 Januari 2018
11	7726/LS-BJ/2018	CV. SHINTA MAKMUR (SUMALI)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	185.284.500,00	02 Januari 2018
12	7728/LS-BJ/2018	CV. KENCANA PUTRA (MUHAMMAD YUSUF ARIFUDDIN)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	186.598.000,00	02 Januari 2018
13	7732/LS-BJ/2018	CV. GUNA KARYA (MUJIANTO)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	130.814.900,00	02 Januari 2018
14	7733/LS-BJ/2018	CV. GUNA KARYA (MUJIANTO)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	130.820.000,00	02 Januari 2018
15	7741/LS-BJ/2018	CV. WIJAYA (ROY WIJAYA, ST)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	17.225.000,00	02 Januari 2018
16	7760/LS-BJ/2018	CV. SHINTA MAKMUR (SUMALI)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	186.849.000,00	02 Januari 2018
17	7815/LS-BJ/2018	CV. PUTRA PANDAN WANGI (YANUAR DIDIK PRIHADI)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	180.637.000,00	02 Januari 2018
18	7816/LS-BJ/2018	CV. ANUGRAH JAYA (AROFIN)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	203.219.062,00	02 Januari 2018
19	7817/LS-BJ/2018	CV. ANUGRAH JAYA (AROFIN)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	291.492.201,00	02 Januari 2018



NO	NO SP2D	PENERIMA	SKPD	NILAI (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
20	7829/LS-BJ/2018	CV. KURNIA JAYA (DIKI HARIYANTO)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.603.117.456,00	02 Januari 2018
<b>JUMLAH</b>				<b>4.609.863.344,00</b>	
21	7291/LS-BJ/2018	CV. ASAHI KARYA SENTOSA (SUNARDI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	190.200.000,00	02 Januari 2018
22	7528/LS-BJ/2018	CV. SUGIH ARTA (TOTOK SUGIARTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	197.384.000,00	02 Januari 2018
23	7536/LS-BJ/2018	CV. DALI ANGKASA (WISNU WARDANA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	84.482.000,00	02 Januari 2018
24	7542/LS-BJ/2018	CV. ALZI PUTRA (MOCH.NASIHIN)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	190.332.000,00	02 Januari 2018
25	7578/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	39.985.000,00	02 Januari 2018
26	7637/LS-BJ/2018	CV. CAHAYA NUSANTARA ( AGUS TRIONO )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	192.587.900,00	02 Januari 2018
27	7668/LS-BJ/2018	CV. CAHYA GEMILANG (AGUS ERMAWAN)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	199.197.000,00	02 Januari 2018
28	7670/LS-BJ/2018	CV. KURNIA JAYA (DIKI HARIYANTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	41.402.700,00	02 Januari 2018
29	7679/LS-BJ/2018	CV. JAYA KARYA (AGUSETYA KURNIAWAN)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	154.152.000,00	02 Januari 2018
30	7684/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	48.884.000,00	02 Januari 2018
31	7764/LS-BJ/2018	CV. OSAN JAYA (ADJI SUSANTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	173.999.300,00	02 Januari 2018
32	7765/LS-BJ/2018	CV. JAYA BERSAMA BERSAUDARA (MOCHAMAD MASKUR)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	266.839.813,16	02 Januari 2018
33	7766/LS-BJ/2018	CV. HASTA KARYA (M. MIFTA HARIS SIHABBUDIN)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	190.404.000,00	02 Januari 2018
34	7767/LS-BJ/2018	CV. SEMBILAN BINTANG (SUHARTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	199.250.000,00	02 Januari 2018
35	7768/LS-BJ/2018	CV. MARGO UTOMO (YULIANTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	192.710.000,00	02 Januari 2018
36	7770/LS-BJ/2018	CV. JASA KARYA ENGINEERING (SANDA PRAJA RIDUWAN, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	73.618.000,00	02 Januari 2018
37	7771/LS-BJ/2018	CV. DALI ANGKASA (WISNU WARDANA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	190.210.000,00	02 Januari 2018
38	7773/LS-BJ/2018	CV. WIDAYA KARYA (KASTADJI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	194.066.600,00	02 Januari 2018

<b>NO</b>	<b>NO SP2D</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>SKPD</b>	<b>NILAI (Rp)</b>	<b>TANGGAL PENCAIRAN</b>
39	7779/LS-BJ/2018	CV. KITA DESAIN (HARTANTO KURNIAWAN, A.Md)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	13.255.000,00	02 Januari 2018
40	7780/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.127.000,00	02 Januari 2018
41	7782/LS-BJ/2018	CV. BINA DUTA PERMATA (VENTY WIDYA N, Spd.)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9.465.400,00	02 Januari 2018
42	7783/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.318.400,00	02 Januari 2018
43	7784/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT (MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.636.400,00	02 Januari 2018
44	7785/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT ( MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	20.845.000,00	02 Januari 2018
45	7786/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT (MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16.307.000,00	02 Januari 2018
46	7787/LS-BJ/2018	CV. ALVIN CONSULTANT (LELI DARMA YANTI, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	52.316.000,00	02 Januari 2018
47	7789/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.830.000,00	02 Januari 2018
48	7791/LS-BJ/2018	CV. LIBA PERSADA (MOCHAMAD ISNAINI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	89.003.000,00	02 Januari 2018
49	7792/LS-BJ/2018	CV. WAHANA MULIA (PRASTIO AGUS UTOMO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	192.009.000,00	02 Januari 2018
50	7794/LS-BJ/2018	CV. DICKY NAJWA PUTRA (MOCHAMMAD ROMLI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	138.436.000,00	02 Januari 2018
51	7795/LS-BJ/2018	CV. IDEA KARYA NUSA ( ABDUL MAJID)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	17.545.000,00	02 Januari 2018
52	7796/LS-BJ/2018	CV. IDEA KARYA NUSA (ABDUL MAJID., A.Md.)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9.746.000,00	02 Januari 2018
53	7797/LS-BJ/2018	CV. BINA DUTA PERMATA (VENTY WIDYA N, Spd.)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	7.639.400,00	02 Januari 2018
54	7798/LS-BJ/2018	CV. AZINDA JAYA (DJOKO WARDONO, BE)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	48.922.000,00	02 Januari 2018
55	7799/LS-BJ/2018	CV. CAHAYA NUSANTARA ( AGUS TRIONO )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	185.734.000,00	02 Januari 2018
56	7802/LS-BJ/2018	CV. SHAKTI KARYA CONSULTANT (KARYANTO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.487.000,00	02 Januari 2018
57	7803/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	17.325.000,00	02 Januari 2018

NO	NO SP2D	PENERIMA	SKPD	NILAI (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
58	7804/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	10.670.000,00	02 Januari 2018
59	7805/LS-BJ/2018	CV. EKA KARYA CONSULTANT (EKO SISWARSITO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.127.000,00	02 Januari 2018
60	7806/LS-BJ/2018	CV. ANRIFAH ENGINEERING (ANSORI, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	25.795.000,00	02 Januari 2018
61	7808/LS-BJ/2018	CV. ALFA GELORA SEJAHTERA (AGUS WAHYUDI, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	450.155.917,23	02 Januari 2018
62	7809/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT ( MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	66.000.000,00	02 Januari 2018
63	7810/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT ( MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	8.250.000,00	02 Januari 2018
64	7811/LS-BJ/2018	CV. JASA KARYA ENGINEERING (SANDA PRAJA RIDUWAN, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	15.675.000,00	02 Januari 2018
65	7813/LS-BJ/2018	CV. KAWA PERTAMA (EKO GUNDOYO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	153.950.600,00	02 Januari 2018
66	7814/LS-BJ/2018	CV. LIBA PERSADA (MOCHAMAD ISNAINI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	195.417.000,00	02 Januari 2018
67	7820/LS-BJ/2018	CV. RENDRA JAYA (RENDRA SYIROJUL AULA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	241.893.700,00	02 Januari 2018
68	7821/LS-BJ/2018	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.198.400,00	02 Januari 2018
69	7822/LS-BJ/2018	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT (MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.843.400,00	02 Januari 2018
70	7823/LS-BJ/2018	CV. ALFA GELORA SEJAHTERA (AGUS WAHYUDI, ST)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	169.599.000,00	02 Januari 2018
71	7824/LS-BJ/2018	CV. KEMBAR JAYA (FARID CANDRA ZULIANTO)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	199.323.000,00	02 Januari 2018
72	7826/LS-BJ/2018	CV.AULA KARYA MANDIRI (SODIQ MUSTOFA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	189.087.000,00	02 Januari 2018
73	7827/LS-BJ/2018	CV.AULA KARYA MANDIRI (SODIQ MUSTOFA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	173.344.000,00	02 Januari 2018
<b>JUMLAH</b>				<b>5.577.979.930,39</b>	
74	7331/LS-BJ/2018	CV. TJOKRO MURNI / GUNTUR PAMBUDI SUSETYO,ST	Dinas Pendidikan	72.135.000,00	02 Januari 2018
75	7658/LS-BJ/2018	CV. ALZI PUTRA / MOCH. NASIHIN	Dinas Pendidikan	142.188.000,00	02 Januari 2018
76	7659/LS-BJ/2018	CV. ALZI PUTRA / MOCH. NASIHIN	Dinas Pendidikan	141.135.000,00	02 Januari 2018

NO	NO SP2D	PENERIMA	SKPD	NILAI (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
<b>JUMLAH</b>				<b>355.458.000,00</b>	
77	7224/LS-BJ/2018	CV. TJOKRO MURNI (GUNTUR BUDI PRAYOGO, ST)	Dinas Perdagangan	258.586.329,00	02 Januari 2018
<b>JUMLAH</b>				<b>258.586.329,00</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>10.801.887.603,39</b>	

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
**BUPATI BOJONEGORO**  
  
**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**RINCIAN KAS LAINNYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD NEGERI GENENG I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	171.417,05	480.000,00	48.800.000,00	48171000	3389,3	1283806,35
2	SD NEGERI GENENG II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	24.740.379,58	-	109.600.000,00	133647000	87554,41	780933,99
3	SD NEGERI KALANGAN I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	672.790,64	-	72.320.000,00	72670600	5815,01	328005,65
4	SD NEGERI KALANGAN II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	104.645,31	-	48.000.000,00	48104000	3184,45	3829,76
5	SD NEGERI KALANGAN III MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	97.403,55	-	48.000.000,00	48097000	2985,01	3388,56
6	SD NEGERI MARGOMULYO I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	2.368.350,43	-	209.440.000,00	210760250	19792,2	1067892,63
7	SD NEGERI MARGOMULYO II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	375.250,86	-	71.040.000,00	71415000	5992,66	6243,52
8	SD NEGERI MARGOMULYO IV MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	378.370,54	-	69.920.000,00	69978000	5921,47	326292,01
9	SD NEGERI MEDURI I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	354.061,73	-	65.280.000,00	65630000	5447,03	9508,76
10	SD NEGERI MEDURI II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	355.777,89	-	101.760.000,00	102115600	8477,3	8655,19
11	SD NEGERI MEDURI III MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	7.143.349,07	-	136.480.000,00	142550000	21006,84	1094355,91
12	SD NEGERI MEDURI IV MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	382.397,67	-	62.880.000,00	63260000	7750,27	10147,94
13	SD NEGERI MEDURI V MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	3.750.239,06	-	48.000.000,00	51750000	6972,86	7211,92
14	SD NEGERI NGELO I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	49.584,54	-	48.000.000,00	48049500	3425,56	3510,1
15	SD NEGERI NGELO II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	2.547.117,52	-	48.000.000,00	50547000	4974,71	5092,23
16	SD NEGERI NGELO III MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	300.897,39	-	48.000.000,00	48299715	3043,63	4226,02
17	SD NEGERI SUMBERJO I MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	76.301,72	-	139.680.000,00	139760000	21598,44	17900,16
18	SD NEGERI SUMBERJO II MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	1.371.572,20	-	90.080.000,00	91451450	8539,59	8661,79
19	SD NEGERI SUMBERJO III MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	1.639.088,38	-	112.800.000,00	114439000	9756,37	9844,75
20	SD NEGERI SUMBERJO IV MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	191.470,95	-	48.000.000,00	48191400	4138,62	4209,57
21	SD NEGERI BANCER I NGRAHO	Kec. Ngraho	369.044,49	-	112.800.000,00	112902200	17197,51	284042
22	SD NEGERI BLIMBINGGEDE I NGRAHO	Kec. Ngraho	953.392,34	-	95.360.000,00	95360000	9440,27	962832,61
23	SD NEGERI JUMOK I NGRAHO	Kec. Ngraho	2.801.727,32	-	101.920.000,00	101895796	18494,07	2844425,39
24	SD NEGERI JUMOK II NGRAHO	Kec. Ngraho	1.768.562,76	47.400,00	105.920.000,00	105920000	10415,22	1826377,98
25	SD NEGERI JUMOK III NGRAHO	Kec. Ngraho	4.307.708,80	-	78.400.000,00	82500000	12370,1	220078,9
26	SD NEGERI KALIREJO I NGRAHO	Kec. Ngraho	2.497.520,05	-	194.240.000,00	195503009,1	20130,71	1254641,71
27	SD NEGERI KALIREJO II NGRAHO	Kec. Ngraho	845.591,12	-	72.800.000,00	72800000	6658,06	852249,183
28	SD NEGERI KALIREJO III NGRAHO	Kec. Ngraho	201.159,23	754.810,00	48.000.000,00	48000000	7824,38	963793,61
29	SD NEGERI KLEMPUN NGRAHO	Kec. Ngraho	1.936.025,71	-	100.160.000,00	102060000	10663,12	46688,83
30	SD NEGERI LUWIHAJI I NGRAHO	Kec. Ngraho	183.199,16	-	48.000.000,00	48000000	4724,13	187923,29
31	SD NEGERI LUWIHAJI II NGRAHO	Kec. Ngraho	11.086.563,35	-	98.080.000,00	104680000	35862,18	4522425,53
32	SD NEGERI LUWIHAJI III NGRAHO	Kec. Ngraho	1.267.560,71	-	48.000.000,00	49200000	4903,83	72464,54
33	SD NEGERI MOJOREJO I NGRAHO	Kec. Ngraho	1.521.971,02	-	71.200.000,00	72700000	7314,89	29285,91
34	SD NEGERI MOJOREJO II NGRAHO	Kec. Ngraho	788.432,45	-	49.120.000,00	49120000	4480,96	792913,41
35	SD NEGERI NGANTI I NGRAHO	Kec. Ngraho	453.350,59	40.000,00	84.960.000,00	81282983,59	7810,14	4178177,14
36	SD NEGERI NGANTI II NGRAHO	Kec. Ngraho	672.083,57	-	75.360.000,00	76000000	7916,51	40000,08
37	SD NEGERI NGANTI III NGRAHO	Kec. Ngraho	940.435,89	-	89.120.000,00	89540000	15024,8	535460,69
38	SD NEGERI NGANTI IV NGRAHO	Kec. Ngraho	424.356,15	-	48.000.000,00	48000000	4648,64	470004,70

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
41	SD NEGERI PANDAN II NGRAHO	Kec. Ngraho	1.449.290,71	-	64.640.000,00	65120000	7796,3	977087,01
42	SD NEGERI PAYAMAN I NGRAHO	Kec. Ngraho	604.880,31	-	69.600.000,00	69400000	10235,03	815115,34
43	SD NEGERI PAYAMAN II NGRAHO	Kec. Ngraho	2.503.025,94	-	83.520.000,00	85370000	8171,95	661197,89
44	SD NEGERI SUGIHWARAS I NGRAHO	Kec. Ngraho	2.329.058,88	-	100.800.000,00	102800000	10895,14	339954,02
45	SD NEGERI SUGIHWARAS III NGRAHO	Kec. Ngraho	85.655,08	85.655,08	48.000.000,00	48085655,08	3376,16	89031,24
46	SD NEGERI SUMBERAGUNG I NGRAHO	Kec. Ngraho	277.163,34	-	69.440.000,00	69397163,34	6685,75	326685,75
47	SD NEGERI SUMBERAGUNG II NGRAHO	Kec. Ngraho	2.231.343,40	-	48.480.000,00	50540000	7220,58	178563,98
48	SD NEGERI SUMBERARUM I NGRAHO	Kec. Ngraho	271.580,66	-	85.920.000,00	85920000	12785,84	284366,5
49	SD NEGERI SUMBERARUM II NGRAHO	Kec. Ngraho	482.277,45	160.000,00	53.280.000,00	53280000	4076,34	646353,79
50	SD NEGERI SUMBERARUM III NGRAHO	Kec. Ngraho	354.069,99	-	64.960.000,00	64960000	19886,98	373956,97
51	SD NEGERI TANGGUNGAN I NGRAHO	Kec. Ngraho	339.638,94	-	74.560.000,00	74560000	7019,18	346658,12
52	SD NEGERI TANGGUNGAN II NGRAHO	Kec. Ngraho	759.864,86	-	79.360.000,00	79219975	14756,75	914646,61
53	SD NEGERI TAPELAN I NGRAHO	Kec. Ngraho	2.342.096,43	-	99.360.000,00	99360000	10185,74	2352282,17
54	SD NEGERI TAPELAN III NGRAHO	Kec. Ngraho	51.102,79	-	48.000.000,00	48050000	3493,97	4596,76
55	SD NEGERI BAKALAN I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	4.058.764,04	-	80.640.000,00	84490000	6785,82	215549,86
56	SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	441,07	-	48.000.000,00	48000000	3274,5	3715,57
57	SD NEGERI DOLOKGEDE TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	511.980,24	-	104.800.000,00	104800000	10726,7	522706,94
58	SD NEGERI GADING I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	721.665,93	-	108.480.000,00	107921665,9	9278,97	1289278,97

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
59	SD NEGERI GAMONGAN I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.307.356,78	-	113.440.000,00	113440000	3964,7	1311321,48
60	SD NEGERI GAMONGAN II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	7.924.769,68	-	118.080.000,00	125373000	22036,38	653806,06
61	SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	690.675,17	-	186.720.000,00	186720000	18292,23	708967,4
62	SD NEGERI JATIMULYO III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	495.405,60	-	48.000.000,00	48400000	3331,59	98737,19
63	SD NEGERI JAWIK TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.156.057,02	-	92.320.000,00	92320000	8490,51	1164547,53
64	SD NEGERI KALISUMBER I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.422.560,71	-	64.960.000,00	66382560,71	4893,24	4893,24
65	SD NEGERI KALISUMBER II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	189.448,11	-	125.120.000,00	125120000	11289,49	200737,6
66	SD NEGERI KALISUMBER III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	441,07	-	48.000.000,00	48000000	2953,89	3394,96
67	SD NEGERI MALINGMATI II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	935.573,96	-	236.320.000,00	236.935.550,00	22413,04	342437
68	SD NEGERI MALINGMATI III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	100.505,45	-	48.000.000,00	48000000	3955,84	104461,29
69	SD NEGERI MULYOOREJO I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.663.819,90	-	48.000.000,00	49663819,9	3452,53	3452,53
70	SD NEGERI MULYOOREJO II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	6.545.896,46	-	159.200.000,00	164785296,5	21936,02	982536,02
71	SD NEGERI MULYOOREJO III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	131.491,44	-	48.000.000,00	48000000	3521,11	135012,55
72	SD NEGERI NAPIS I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	104.803,41	-	98.240.000,00	98290000	9061,34	63864,75
73	SD NEGERI NAPIS II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	764.012,22	-	147.680.000,00	130844012,2	14373,71	17614373,71
74	SD NEGERI NAPIS III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	50.553,28	-	50.880.000,00	50880000	3612,29	54165,57
75	SD NEGERI NAPIS IV TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	50.447,96	-	48.000.000,00	48000000	2993,64	53441,6
76	SD NEGERI NAPIS V TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	131.556,96	-	87.360.000,00	87360000	7044,93	138601,89
77	SD NEGERI NAPIS VI TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	559.663,46	-	54.880.000,00	54880000	4527,56	564191,02
78	SD NEGERI NGRANCANG I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.291.627,44	-	89.920.000,00	90800000	8047,1	419674,54
79	SD NEGERI NGRANCANG III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	184.335,69	-	48.000.000,00	48184335,69	2927,36	2927,36
80	SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	28.785,94	50.000,00	48.000.000,00	48000000	5867,92	84653,86
81	SD NEGERI PENGKOL TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	94.673,40	-	48.000.000,00	48000000	2858,81	97532,21
82	SD NEGERI SENDANGREJO TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.268.661,73	-	69.120.000,00	69120000	8688,44	1277350,17
83	SD NEGERI SUKOREJO I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	426.525,94	-	171.360.000,00	171310000	18026,61	494552,55
84	SD NEGERI SUKOREJO II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.007.300,99	-	88.480.000,00	89490000	7563,41	4864,4
85	SD NEGERI SUKOREJO III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	897.122,75	-	65.280.000,00	65280000	5166,47	902289,22
86	SD NEGERI TAMBAKREJO I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	964.600,00	602.031,78	139.040.000,00	140004600	15067,14	617098,92
87	SD NEGERI TAMBAKREJO II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	3.987.678,04	-	88.960.000,00	88960000	9142,63	3996820,67
88	SD NEGERI TANJUNG TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	2.746.798,31	50.000,00	48.000.000,00	50700000	3824,91	100623,22
89	SD NEGERI TURI I TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	3.833.246,78	-	127.840.000,00	131639160	11218,66	45305,44
90	SD NEGERI TURI II TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	127.586,75	-	48.000.000,00	48000000	4169,14	131755,89
91	SD NEGERI TURI III TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	1.020.538,93	-	48.000.000,00	48000000	3240,21	1023779,14



No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
92	SD NEGERI TURI IV TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	610.499,59	-	48.000.000,00	48000000	3791,25	614290,84
93	SD NEGERI BONDOL I NGAMBON	Kec. Ngambon	251.590,67	-	70.240.000,00	70240000	8896,72	260487,39
94	SD NEGERI BONDOL II NGAMBON	Kec. Ngambon	169.391,98	-	48.480.000,00	48000000	2948,7	652340,68
95	SD NEGERI KARANGMANGU I NGAMBON	Kec. Ngambon	443.997,78	-	83.360.000,00	83407600	11655,86	408053,64
96	SD NEGERI KARANGMANGU II NGAMBON	Kec. Ngambon	64.383,34	-	48.000.000,00	48000000	3232,4	67615,74
97	SD NEGERI NGAMBON I NGAMBON	Kec. Ngambon	1.739.982,32	-	160.640.000,00	161262859	25328,3	1142451,62
98	SD NEGERI NGLAMPIN I NGAMBON	Kec. Ngambon	796.541,04	-	64.000.000,00	63196000	7827,21	1608368,25
99	SD NEGERI NGLAMPIN II NGAMBON	Kec. Ngambon	127.384,42	-	48.000.000,00	48050000	5100,21	82484,63
100	SD NEGERI NGLAMPIN III NGAMBON	Kec. Ngambon	121.549,73	-	48.000.000,00	48000000	5003,03	126552,76
101	SD NEGERI NGLAMPIN V NGAMBON	Kec. Ngambon	122.388,08	-	48.000.000,00	48000000	4682,24	127070,32
102	SD NEGERI SENGON I NGAMBON	Kec. Ngambon	1.268.991,08	-	119.040.000,00	119040000	18955,07	1287946,15
103	SD NEGERI SENGON II NGAMBON	Kec. Ngambon	1.383.499,93	-	61.440.000,00	61440000	7558,97	1391058,9
104	SD NEGERI BUBULAN I BUBULAN	Kec. Bubulan	3.950.648,00	591.477,74	175.360.000,00	174710000	18050,33	5210176,07
105	SD NEGERI BUBULAN II BUBULAN	Kec. Bubulan	-	750.708,55	69.280.000,00	69240000	6358,94	797067,49
106	SD NEGERI CANCUNG I BUBULAN	Kec. Bubulan	320.000,00	694.513,65	69.920.000,00	69920000	6233,63	1020747,28
107	SD NEGERI CANCUNG II BUBULAN	Kec. Bubulan	762.620,00	401.318,82	93.440.000,00	93325030	8351,95	1287260,77
108	SD NEGERI CLEBUNG I BUBULAN	Kec. Bubulan	100.000,00	98.684,68	48.000.000,00	48000000	3315,01	201999,69
109	SD NEGERI CLEBUNG II BUBULAN	Kec. Bubulan	67.733,27	924.171,06	65.280.000,00	64000000	5435,31	2277339,64
110	SD NEGERI CLEBUNG III BUBULAN	Kec. Bubulan	-	51.662,27	48.000.000,00	48000000	4836,97	56499,24
111	SD NEGERI CLEBUNG IV BUBULAN	Kec. Bubulan	-	55.460,52	48.000.000,00	48000000	3149,15	58609,67
112	SD NEGERI NGOROGUNUNG II BUBULAN	Kec. Bubulan	960.000,00	84.539,71	105.920.000,00	104960000	10296,95	2014836,66
113	SD NEGERI SUMBERBENDO I BUBULAN	Kec. Bubulan	800.000,00	270.600,39	50.240.000,00	50240000	7740,79	1078341,18
114	SD NEGERI SUMBERBENDO II BUBULAN	Kec. Bubulan	1.600.000,00	154.977,48	77.920.000,00	79200000	6785,34	481762,82
115	SD NEGERI BAKULAN I TEMAYANG	Kec. Temayang	120.117,79	50.000,00	48.000.000,00	48000000	5957,79	176075,58
116	SD NEGERI BAKULAN II TEMAYANG	Kec. Temayang	356.073,59	95.200,00	69.120.000,00	67500000	6771,47	2078045,06
117	SD NEGERI BAKULAN III TEMAYANG	Kec. Temayang	1.235.544,18	-	51.840.000,00	51840000	9122,47	1244666,65
118	SD NEGERI BELUN TEMAYANG	Kec. Temayang	1.218.257,15	-	134.880.000,00	134880000	12562,24	1230819,39
119	SD NEGERI BUNTALAN I TEMAYANG	Kec. Temayang	266.157,19	-	56.960.000,00	56960000	6030,49	272187,68
120	SD NEGERI BUNTALAN II TEMAYANG	Kec. Temayang	250.718,18	-	48.000.000,00	48000000	4390,67	255108,85
121	SD NEGERI JONO I TEMAYANG	Kec. Temayang	965.038,32	-	118.880.000,00	118545000	16205,82	1316244,14
122	SD NEGERI JONO II TEMAYANG	Kec. Temayang	3.519.031,04	-	111.680.000,00	115184000	10792,8	25823,84
123	SD NEGERI JONO III TEMAYANG	Kec. Temayang	420.481,39	-	48.000.000,00	48420000	4091,1	4572,49
124	SD NEGERI KEDUNGSARI TEMAYANG	Kec. Temayang	1.521.635,04	-	101.920.000,00	101841000	18611,25	1619246,29

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
125	SD NEGERI KEDUNGSUMBER I TEMAYANG	Kec. Temayang	374.209,18	-	85.760.000,00	85139409	12751,76	1007551,94
126	SD NEGERI KEDUNGSUMBER II TEMAYANG	Kec. Temayang	457.267,76	-	55.200.000,00	55600000	6711,62	63979,38
127	SD NEGERI KEDUNGSUMBER III TEMAYANG	Kec. Temayang	115.754,94	-	48.000.000,00	48000000	4483,77	120238,71
128	SD NEGERI NGUJUNG TEMAYANG	Kec. Temayang	400.986,32	-	62.880.000,00	62880000	6756,03	407742,35
129	SD NEGERI PANCUR I TEMAYANG	Kec. Temayang	860.837,73	-	80.000.000,00	80000000	5647,69	866485,42
130	SD NEGERI PANDANTOYO TEMAYANG	Kec. Temayang	296.469,49	-	48.000.000,00	48000000	3472,74	299942,23
131	SD NEGERI PAPRINGAN I TEMAYANG	Kec. Temayang	126.925,98	-	112.960.000,00	112960000	9548,84	136474,82
132	SD NEGERI PAPRINGAN II TEMAYANG	Kec. Temayang	340.609,03	-	48.000.000,00	48000000	4971,02	345580,05
133	SD NEGERI PAPRINGAN III TEMAYANG	Kec. Temayang	63.766,57	-	48.000.000,00	48000000	5022,05	68788,62
134	SD NEGERI SOKO I TEMAYANG	Kec. Temayang	446.324,40	-	72.800.000,00	72800000	7401,1	453725,5
135	SD NEGERI SOKO II TEMAYANG	Kec. Temayang	25.576,36	50.000,00	48.000.000,00	48000000	5358,54	80934,9
136	SD NEGERI SOKO III TEMAYANG	Kec. Temayang	99.704,08	-	48.000.000,00	47999373,34	4472,56	104803,3
137	SD NEGERI SOKO IV TEMAYANG	Kec. Temayang	213.747,08	-	48.000.000,00	48000000	4368,74	218115,82
138	SD NEGERI TEMAYANG I TEMAYANG	Kec. Temayang	3.239.908,88	33.900,00	140.640.000,00	140640000	19933,9	3293742,78
139	SD NEGERI TEMAYANG II TEMAYANG	Kec. Temayang	139.389,52	-	48.000.000,00	38400000	4757,27	9744146,79
140	SD NEGERI ALASGUNG I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	3.302.612,68	-	92.800.000,00	95781373,75	7112,86	328351,79
141	SD NEGERI ALASGUNG II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	1.504.494,98	993,44	77.920.000,00	78884994,98	5641,07	546134,51
142	SD NEGERI BALONGREJO I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	10.845.765,92	-	158.560.000,00	168757064	26765,4	675467,33
143	SD NEGERI BALONGREJO II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	1.506.142,93	1.668,52	102.240.000,00	103746142,9	8484,4	10152,92
144	SD NEGERI BARENG I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	763,28	59.520.000,00	59520000	4529,53	5292,81
145	SD NEGERI BARENG II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	2.880.000,00	441,07	48.960.000,00	51840000	3424,66	3865,73
146	SD NEGERI BARENG III SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	441,07	48.000.000,00	48000000	2359,42	2800,49
147	SD NEGERI BULU SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	1.120.000,00	1.293,12	85.280.000,00	86400000	7180,53	8473,65
148	SD NEGERI DRENGES SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	680.836,56	640,57	59.680.000,00	58443876,56	2832,47	1920433,04
149	SD NEGERI GENJOR SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	1.994,56	112.480.000,00	112049284	9473,62	442184,18
150	SD NEGERI GLAGAHAN SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	625,24	55.360.000,00	54400000	5476,87	966102,11
151	SD NEGERI GLAGAHWANGI I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	320.000,00	907,36	68.800.000,00	66560000	6970,61	2567877,97
152	SD NEGERI GLAGAHWANGI II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	180.539,96	1.714,00	94.880.000,00	93820539,96	5094,03	1246808,03
153	SD NEGERI JATITENGAH SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	1.600.000,00	1.100,82	83.520.000,00	84701500	5869,62	425470,44
154	SD NEGERI KEDUNGOWO SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	441,07	48.000.000,00	46187600	3085,43	1815926,5
155	SD NEGERI NGLAJANG SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	1.117,84	71.520.000,00	71520000	4987,46	6105,3
156	SD NEGERI PANEMON SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	355.416,39	503.575,99	51.040.000,00	50775416,39	2907,96	1126483,95
157	SD NEGERI PANUNGGALAN I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	320.000,00	517,79	51.840.000,00	52160000	3692,66	4210,45

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
158	SD NEGERI PANUNGGALAN II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	2.203.341,49	-	110.560.000,00	110923341,5	9506,2	1849506,2
159	SD NEGERI SIWALAN I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	1.703.572,00	1.603,85	103.520.000,00	105220372	8263,45	13067,3
160	SD NEGERI SIWALAN II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	84.200,00	441,07	48.000.000,00	48000000	2995,22	87636,29
161	SD NEGERI SIWALAN III SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	338.282,35	-	51.360.000,00	51697718,5	2813,16	3377,01
162	SD NEGERI SUGIHWARAS I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	3.221.518,27	-	67.360.000,00	70550339,63	5895,54	37074,18
163	SD NEGERI SUGIHWARAS II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	17.830.000,00	3.782,43	191.840.000,00	209350000	67075,52	390857,95
164	SD NEGERI SUGIHWARAS III SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	20.000,00	1.377,54	99.040.000,00	99040000	7919,19	29296,73
165	SD NEGERI TRATE SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	160.000,00	872,32	66.080.000,00	66080000	4892,35	165764,67
166	SD NEGERI WEDORO I SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	2.240.000,00	655,90	60.960.000,00	62600000	5618,95	606274,85
167	SD NEGERI WEDORO II SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	-	1.284,92	88.000.000,00	88000000	6567,53	7852,45
168	SD NEGERI BABAD II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	2.725.154,45	1.730,97	96.160.000,00	94775214	7650,27	4119321,69
169	SD NEGERI BABAD III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	3.840.000,00	374.136,59	87.360.000,00	91200000	8210,53	382347,12
170	SD NEGERI BABAD IV KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	857.985,90	-	48.000.000,00	48857985,9	4207,4	4207,4
171	SD NEGERI BALONGCABE KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	418.319,41	74.720.000,00	74720000	5994,87	424314,28
172	SD NEGERI DAYUKIDUL I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	320.000,00	655,90	62.560.000,00	60320000	4342,74	2564998,64
173	SD NEGERI DAYUKIDUL II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	148.621,32	48.000.000,00	48000000	3006,7	151628,02
174	SD NEGERI DROKILO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	973.667,13	116.960.000,00	116960000	9898,93	983566,06
175	SD NEGERI DROKILO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	2.470.563,00	216.051,96	67.680.000,00	70150563	7598,16	223650,12
176	SD NEGERI DUWEL KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	305.322,48	82.560.000,00	82560000	6832,8	312155,28
177	SD NEGERI GEGER KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	59.082,80	48.000.000,00	48000000	2640,25	61723,05
178	SD NEGERI JAMBEREJO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	480.000,00	1.212.984,55	102.400.000,00	102880000	16879,27	1229863,82
179	SD NEGERI JAMBEREJO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	374.648,32	62.880.000,00	62880000	4854,7	379503,02
180	SD NEGERI JAMBEREJO III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	268.786,33	88.000.000,00	87680000	10800,88	599587,21
181	SD NEGERI KEDUNGADEM I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	1.214.866,68	193.920.000,00	193920000	20043,45	1234910,13
182	SD NEGERI KEDUNGADEM III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.600.000,00	424.507,81	125.920.000,00	127520000	11788,68	436296,49
183	SD NEGERI KEDUNGREJO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	386.028,58	74.560.000,00	74560000	6141,94	392170,52
184	SD NEGERI KEDUNGREJO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	216.919,38	48.000.000,00	48000000	3623,8	220543,18
185	SD NEGERI KENDUNG I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	778,61	65.600.000,00	65600000	5291,86	6070,47
186	SD NEGERI KENDUNG II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	2.400.000,00	452.245,00	142.720.000,00	145120000	14546,91	466791,91
187	SD NEGERI KENDUNG III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.695.520,88	5.552,75	56.480.000,00	56625520,88	4681,71	1560234,46
188	SD NEGERI KEPOHKIDUL I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	146.509,91	48.000.000,00	48000000	0	146509,91
189	SD NEGERI KEPOHKIDUL II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	660.293,86	83.360.000,00	82400000	7312,26	1627606,12
190	SD NEGERI KESONGO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	551.717,54	-	121.760.000,00	122311717	13212,62	13213,16

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
191	SD NEGERI KESONGO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	60.800,00	250.670,89	48.000.000,00	48060800	3661,21	254332,1
192	SD NEGERI MEGALE I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.120.000,00	171.042,17	53.760.000,00	54880000	4250,58	175292,75
193	SD NEGERI MEGALE II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	738.317,58	556,72	50.240.000,00	50240000	3633,95	742508,25
194	SD NEGERI MEGALE III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.053.753,72	513.569,70	56.000.000,00	57053753	4468,04	518038,46
195	SD NEGERI MLIDEG KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	2.720.000,00	1.024,10	87.520.000,00	87680000	7387,16	2568411,26
196	SD NEGERI MOJOREJO KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	160.000,00	521.548,80	95.360.000,00	95520000	16792,61	538341,41
197	SD NEGERI NGRANDU I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	930.922,01	750,78	72.160.000,00	72680000	6000,94	417673,73
198	SD NEGERI NGRANDU II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	234.716,54	48.000.000,00	48000000	3037,38	237753,92
199	SD NEGERI PANJANG I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	266.443,53	359.982,51	63.040.000,00	63066000	5351,33	605777,37
200	SD NEGERI PANJANG II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	52.095,80	48.000.000,00	48000000	2908,51	55004,31
201	SD NEGERI PANJANG III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.760.000,00	317.784,48	78.720.000,00	80480000	6758,34	324542,82
202	SD NEGERI PEJOK I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	960.000,00	504,08	49.440.000,00	50400000	3820,63	4324,71
203	SD NEGERI PEJOK II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	3.520.000,00	305.343,19	114.720.000,00	118240000	10872,81	316216
204	SD NEGERI SIDOMULYO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	389.872,14	51.368,80	84.320.000,00	84709872,14	8650,96	60019,76
205	SD NEGERI SIDOMULYO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	2.880.000,00	486.743,73	77.120.000,00	79680000	7460,04	814203,77
206	SD NEGERI SIDOREJO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	9.614.875,44	51.351,07	114.720.000,00	123934875,4	17503,46	468854,53
207	SD NEGERI SIDOREJO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	1.280.000,00	463.842,34	104.000.000,00	105280000	8263,04	472105,38
208	SD NEGERI TLOGOAGUNG I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	4.160.000,00	441,07	56.160.000,00	60290000	5752,36	36193,43
209	SD NEGERI TLOGOAGUNG II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	179.121,52	2.776,52	48.000.000,00	48179121,52	3062,4	5838,92
210	SD NEGERI TONDONMULO I KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	288.999,70	252.999,41	123.680.000,00	123968999,7	11437,24	264436,65
211	SD NEGERI TONDONMULO II KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	308.908,10	113.120.000,00	113120000	10176,26	319084,36
212	SD NEGERI TONDONMULO III KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	60.574,56	48.000.000,00	48000000	3561,44	64136
213	SD NEGERI TONDONMULO IV KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	504,08	48.000.000,00	38400000	3732,22	9604236,3
214	SD NEGERI TUMBRASANOM KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	-	307.360,31	87.360.000,00	87360000	14855,99	322216,3
215	SD NEGERI BALONGDOWO KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	97.525,17	48.000.000,00	47999980	4796,68	102341,85
216	SD NEGERI BAYEMGEDE II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	2.466,31	151.040.000,00	150660000	31522,05	413988,36
217	SD NEGERI BETET KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	104.876,90	63.289,46	48.000.000,00	48000000	4778,98	172945,34
218	SD NEGERI BRANGKAL I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.506.460,00	-	86.240.000,00	88520000	11171,58	237631,58
219	SD NEGERI BRANGKAL II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.328.383,25	131.134,73	48.000.000,00	48000000	4558,54	2464076,52
220	SD NEGERI BUMIREJO KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.130.320,00	545.861,66	48.000.000,00	48000000	4972,27	2681153,93
221	SD NEGERI CENGKIR I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	397.159,58	144.160.000,00	144160001	12870,71	410029,29
222	SD NEGERI JIPO I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	200.000,00	105.612,25	48.000.000,00	48200000	4673,3	110285,55
223	SD NEGERI KARANGAN KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	477.946,91	127.840.000,00	126300972	16329,77	2033304,68

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
224	SD NEGERI KEPOH I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	521.808,64	75.840.000,00	75839980	10068,13	531896,77
225	SD NEGERI KEPOH II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	3.200.000,00	-	57.760.000,00	58400000	6086,81	2566086,81
226	SD NEGERI KRANGKONG I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	523.658,12	61.120.000,00	61120000	7693,06	531351,18
227	SD NEGERI KRANGKONG II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	6.604.000,00	234.522,29	73.120.000,00	77469000	5497,97	2495020,26
228	SD NEGERI MOJOSARI KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	1.047.888,37	-	64.000.000,00	63918900	8287,55	1137275,92
229	SD NEGERI NGLUMBER I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	472.876,63	65.120.000,00	65120000	8239,35	481115,98
230	SD NEGERI NGLUMBER II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.430.081,00	55.583,82	56.480.000,00	56480000	5620,27	2491285,09
231	SD NEGERI PEJOK I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.890.500,00	-	53.280.000,00	53119900	13661,4	3064261,4
232	SD NEGERI PEJOK II KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	733,14	70.880.000,00	69170000	5437,05	1716170,19
233	SD NEGERI PEJOK III KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	728.952,54	118.720.000,00	115760496	16333,39	3704789,93
234	SD NEGERI POHWATES I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.266.987,73	-	64.800.000,00	66715959	4394,13	355422,86
235	SD NEGERI SIDUMUKTI I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	1.536.750,00	52.777,82	84.320.000,00	81798800	10302,88	4121030,7
236	SD NEGERI SIDUMUKTI III KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	112.500,00	540.121,81	91.040.000,00	91040000	12266,25	664888,06
237	SD NEGERI SIMOREJO I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	370.534,90	117.440.000,00	117440000	16685,74	387220,64
238	SD NEGERI SUGIHWARAS I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	1.498.412,00	760.346,31	189.920.000,00	188919862	28127,89	3287024,2
239	SD NEGERI SUMBERAGUNG KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	280.000,00	560.773,36	61.760.000,00	61184000	8262,52	1425035,88
240	SD NEGERI SUMBERGEDE KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	193.563,85	112.480.000,00	112480000	15808,52	209372,37
241	SD NEGERI SUMBEROTO KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	400.737,00	75.040.000,00	74720000	6043,19	726780,19
242	SD NEGERI TLOGOREJO KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	197.071,67	55.840.000,00	55840000	6359,98	203431,65
243	SD NEGERI TURIGEDE I KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	272.532,02	76.000.000,00	75040000	9463,37	1241995,39
244	SD NEGERI WORO KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	183.267,45	48.000.000,00	48000000	4592,7	187860,15
245	SD NEGERI BANJARAN BAURENO	Kec. Baureno	1.604.668,00	2.078.993,89	150.720.000,00	149176068	27855,22	5255449,11
246	SD NEGERI BANJARANYAR I BAURENO	Kec. Baureno	1.158.005,00	1.047.686,66	63.360.000,00	63746505	8281,5	1827468,16
247	SD NEGERI BANJARANYAR II BAURENO	Kec. Baureno	140.000,00	95.981,05	55.360.000,00	55100000	6247,02	502228,07
248	SD NEGERI BAURENO I BAURENO	Kec. Baureno	3.254.105,39	538.954,08	338.560.000,00	338560000	63319,46	3856378,93
249	SD NEGERI BAURENO III BAURENO	Kec. Baureno	2.411.328,26	103.036,83	100.480.000,00	100480000	15771,28	2530136,37
250	SD NEGERI BLONGSONG I BAURENO	Kec. Baureno	-	55.854,28	59.520.000,00	58397845	6869,11	1184878,39
251	SD NEGERI BLONGSONG II BAURENO	Kec. Baureno	28.500,00	686.542,00	48.000.000,00	48028500	4923,83	691465,83
252	SD NEGERI BUMIAYU BAURENO	Kec. Baureno	82.615,99	-	48.000.000,00	48000000	4697,67	87313,66
253	SD NEGERI DRAJAT BAURENO	Kec. Baureno	-	292.846,95	48.000.000,00	48000000	4933,19	297780,14
254	SD NEGERI GAJAH I BAURENO	Kec. Baureno	1.120.000,00	146.639,24	58.560.000,00	57320000	6697,5	2513336,74
255	SD NEGERI GAJAH II BAURENO	Kec. Baureno	6.979.519,00	412.878,82	51.040.000,00	57379519	16397,08	1069275,9
256	SD NEGERI GUNUNGSARI I BAURENO	Kec. Baureno	6.233.168,00	-	61.120.000,00	54393168	13084,81	12973084,81

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
257	SD NEGERI GUNUNGSARI II BAURENO	Kec. Baureno	11.222.315,00	2.946.205,63	91.520.000,00	91236397	47588,53	14499712,16
258	SD NEGERI KADUNGREJO I BAURENO	Kec. Baureno	326.200,00	233.967,06	48.000.000,00	48326200	7552,23	241519,29
259	SD NEGERI KADUNGREJO II BAURENO	Kec. Baureno	10.000,00	1.640.939,16	56.640.000,00	52800000	6933	5497872,16
260	SD NEGERI KALISARI BAURENO	Kec. Baureno	1.781.500,00	-	70.240.000,00	68804500	10373,14	3227373,14
261	SD NEGERI KARANGDAYU I BAURENO	Kec. Baureno	-	356.630,57	54.880.000,00	54080000	5971,61	1162602,18
262	SD NEGERI KARANGDAYU II BAURENO	Kec. Baureno	-	452.484,47	48.000.000,00	47460000	4931,48	997415,95
263	SD NEGERI KAUMAN I BAURENO	Kec. Baureno	29.000,00	977.618,44	160.480.000,00	155709000	23281,3	5800899,74
264	SD NEGERI KAUMAN II BAURENO	Kec. Baureno	-	26.370,88	48.000.000,00	48000000	4552,9	30923,78
265	SD NEGERI LEBAKSARI BAURENO	Kec. Baureno	-	47.020,61	48.000.000,00	48000000	5578,82	52599,43
266	SD NEGERI NGEMPLAK I BAURENO	Kec. Baureno	197.420,00	942.306,30	103.360.000,00	100912360	15803,25	3603169,55
267	SD NEGERI NGEMPLAK II BAURENO	Kec. Baureno	779.505,00	826.798,52	86.720.000,00	86720000	18246,75	1624550,27
268	SD NEGERI PASINAN BAURENO	Kec. Baureno	1.153.654,00	129.100,70	48.000.000,00	47988410,45	5655,75	1300000
269	SD NEGERI POMAHAN I BAURENO	Kec. Baureno	3.381.260,00	288.747,76	63.040.000,00	66421260	8753,29	297501,05
270	SD NEGERI POMAHAN III BAURENO	Kec. Baureno	-	200.865,90	48.000.000,00	48000000	5064,99	205930,89
271	SD NEGERI PUCANGARUM I BAURENO	Kec. Baureno	-	115.161,49	59.520.000,00	56940000	9540,3	2704701,79
272	SD NEGERI PUCANGARUM II BAURENO	Kec. Baureno	-	665.450,79	58.080.000,00	57690000	10162,32	1065613,11
273	SD NEGERI SEMBUNGLOR BAURENO	Kec. Baureno	7.310.000,00	436.945,77	100.160.000,00	106830000	28455,55	1105401,32
274	SD NEGERI SRATUREJO I BAURENO	Kec. Baureno	520.000,00	9.759,59	131.040.000,00	131040000	19935,32	549694,91
275	SD NEGERI SRATUREJO II BAURENO	Kec. Baureno	600.257,43	1.332.966,07	49.280.000,00	49280000	7040,18	1940263,68
276	SD NEGERI SUMURAGUNG I BAURENO	Kec. Baureno	-	377.122,02	50.720.000,00	50720000	5987,09	383109,11
277	SD NEGERI SUMURAGUNG II BAURENO	Kec. Baureno	-	38.417,06	48.000.000,00	48000000	4902,99	43320,05
278	SD NEGERI TANGGUNGAN BAURENO	Kec. Baureno	-	155.779,73	48.000.000,00	46269200	4444,42	1891024,15
279	SD NEGERI TLOGOAGUNG I BAURENO	Kec. Baureno	1.681.255,42	306.505,47	52.800.000,00	51770000	6022,08	3023782,97
280	SD NEGERI TLOGOAGUNG II BAURENO	Kec. Baureno	-	1.007.772,53	75.520.000,00	75200000	11372,01	1339144,54
281	SD NEGERI TROJALU BAURENO	Kec. Baureno	241.084,00	1.030.051,37	84.160.000,00	80561000	12362,12	4882497,49
282	SD NEGERI TULUNGAGUNG I BAURENO	Kec. Baureno	-	581.425,80	72.000.000,00	70717000	9182,18	1873607,98
283	SD NEGERI BAKUNG KANOR	Kec. Kanor	801.047,68	-	58.880.000,00	58880000	4558,81	805606,49
284	SD NEGERI BUNGUR I KANOR	Kec. Kanor	230.897,52	-	60.640.000,00	60640000	4990,4	235887,92
285	SD NEGERI BUNGUR II KANOR	Kec. Kanor	70.932,64	-	67.200.000,00	67270932,64	5523,55	5523,55
286	SD NEGERI CANGAKAN KANOR	Kec. Kanor	120.517,28	-	48.000.000,00	48000000	3125,97	123643,25
287	SD NEGERI CARUBAN KANOR	Kec. Kanor	111.142,91	-	69.600.000,00	69680000	4045,71	35188,62
288	SD NEGERI GEDONGARUM KANOR	Kec. Kanor	394.720,26	-	84.640.000,00	84336000	7192,74	705913
289	SD NEGERI KABALAN KANOR	Kec. Kanor	772,57	-	48.000.000,00	48000000	2960,85	3733,42

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
290	SD NEGERI KANOR I KANOR	Kec. Kanor	2.598.171,75	-	83.680.000,00	83585700	6465,86	2698937,61
291	SD NEGERI KANOR II KANOR	Kec. Kanor	2.077.145,16	-	61.920.000,00	61920000	4578,18	2081723,34
292	SD NEGERI KEDUNGPRIMPEN KANOR	Kec. Kanor	183.457,55	-	77.440.000,00	76343457,55	6661,18	1286661,18
293	SD NEGERI NGLARANGAN I KANOR	Kec. Kanor	173.810,88	-	48.000.000,00	48000000	2976,06	176786,94
294	SD NEGERI NGLARANGAN II KANOR	Kec. Kanor	1.361.249,28	-	84.160.000,00	85521249,28	7804,75	7804,75
295	SD NEGERI PALEMBON KANOR	Kec. Kanor	320.574,24	-	49.280.000,00	48245574,24	3840,79	1358840,79
296	SD NEGERI PESEN KANOR	Kec. Kanor	250.393,68	-	49.440.000,00	49440000	2814,8	253208,48
297	SD NEGERI PILANG KANOR	Kec. Kanor	2.309.174,24	-	57.120.000,00	58895374,24	3811,55	537611,55
298	SD NEGERI PIYAK KANOR	Kec. Kanor	104.073,30	-	48.000.000,00	47993600	3635,54	114108,84
299	SD NEGERI PRIGI I KANOR	Kec. Kanor	6.709.828,80	7,00	101.760.000,00	104873700	15951,48	3612087,28
300	SD NEGERI PRIGI II KANOR	Kec. Kanor	1.301.461,44	-	57.280.000,00	57280000	3044,18	1304505,62
301	SD NEGERI SAMBERAN KANOR	Kec. Kanor	225.639,88	-	96.000.000,00	96000000	8636,45	234276,33
302	SD NEGERI SEDENG I KANOR	Kec. Kanor	230.817,10	-	72.320.000,00	72005000	5746,37	551563,47
303	SD NEGERI SEDENG II KANOR	Kec. Kanor	118.774,56	581.800,00	48.160.000,00	48118774,56	3993,88	745793,88
304	SD NEGERI SEDENG III KANOR	Kec. Kanor	50.567,09	-	48.000.000,00	48000000	3146,86	53713,95
305	SD NEGERI SEMAMBUNG I KANOR	Kec. Kanor	109.114,00	-	48.000.000,00	48000000	2926,78	112040,78
306	SD NEGERI SEMAMBUNG II	Kec. Kanor	3.509.861,54	-	57.120.000,00	59029861,54	5319,2	1605319,2
307	SD NEGERI SIMBATAN KANOR	Kec. Kanor	539,20	-	48.960.000,00	48960000	3225,79	3764,99
308	SD NEGERI SIMOREJO KANOR	Kec. Kanor	4.731.673,01	-	107.040.000,00	111771673	10427,9	10427,9
309	SD NEGERI SROYO KANOR	Kec. Kanor	1.450.092,94	-	149.600.000,00	148997000	14155,25	2067248,19
310	SD NEGERI SUMBERWANGI I KANOR	Kec. Kanor	428.556,26	-	53.120.000,00	53047150	4213,98	505620,24
311	SD NEGERI SUMBERWANGI II KANOR	Kec. Kanor	1.345.070,96	8.529,00	52.480.000,00	52480000	4230,99	1357830,95
312	SD NEGERI TAMBAHREJO II KANOR	Kec. Kanor	1.917.568,72	-	48.000.000,00	49917568,72	3822,93	3822,93
313	SD NEGERI TAMBAHREJO I KANOR	Kec. Kanor	4.554.542,82	-	87.840.000,00	91392100	9003,49	1011446,31
314	SD NEGERI TEJO KANOR	Kec. Kanor	768.891,99	-	60.160.000,00	56855400	4509,54	4078001,53
315	SD NEGERI TEMU I KANOR	Kec. Kanor	311.108,35	-	59.840.000,00	59840000	4624,54	315732,89
316	SD NEGERI TEMU II KANOR	Kec. Kanor	6.541.380,92	887,46	76.160.000,00	82055344,92	12632,95	659556,41
317	SD NEGERI BANJARJO SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	5.745.151,15	-	74.080.000,00	79642607,21	7744,6	190288,54
318	SD NEGERI BOGANGIN SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.440.510,16	55.000,00	48.960.000,00	50400000	3427,46	58937,62
319	SD NEGERI BUTOH SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	8.227.222,35	-	48.000.000,00	56160000	3496,31	70718,66
320	SD NEGERI DERU SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.835.621,92	-	56.320.000,00	58880000	4478,74	280100,66
321	SD NEGERI JATIGEDE SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.636.054,00	-	58.560.000,00	58560000	4617,39	1640671,39
322	SD NEGERI KARANGDINOYO I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	404.029,47	-	52.960.000,00	53360000	4041,3	8070,77



No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
323	SD NEGERI KARANGDINOYO II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.441.579,96	100.000,00	64.800.000,00	66240000	5954,8	107534,76
324	SD NEGERI KARANGDOWO SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.165.844,34	-	70.240.000,00	70125800	5300,11	1285344,45
325	SD NEGERI KAYU LEMAH SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	3.199.575,58	101.043,36	48.000.000,00	51199575,58	3496,56	104539,92
326	SD NEGERI KEDUNGREJO SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	3.260.240,39	1.142,85	51.360.000,00	53340000	4195,85	1285579,09
327	SD NEGERI MARGOAGUNG I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.747.446,55	-	67.520.000,00	69220000	5701,46	53148,01
328	SD NEGERI MARGOAGUNG II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.556.757,80	-	70.080.000,00	71341100	5562,63	1301220,43
329	SD NEGERI MEJUWET I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	301.038,00	-	52.480.000,00	52480000	4065,92	305103,92
330	SD NEGERI MEJUWET II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	4.336.434,78	-	79.200.000,00	83400000	7140,48	143575,26
331	SD NEGERI MLINJENG SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	714.889,75	-	80.800.000,00	81514889,75	5861,67	5861,67
332	SD NEGERI NGAMPAL I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.392.408,22	-	86.400.000,00	85992408,22	7853,64	2807853,64
333	SD NEGERI NGAMPAL II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.241.383,98	-	48.000.000,00	49000000	0	241383,98
334	SD NEGERI PEJAMBON I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	3.102.015,20	-	48.000.000,00	51100000	5009,83	7025,03
335	SD NEGERI PEKUWON I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.818.778,25	-	48.000.000,00	50600000	4525,45	223303,7
336	SD NEGERI PEKUWON II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.490.514,00	-	48.000.000,00	50400000	3246,03	93760,03
337	SD NEGERI PEKUWON III SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	497.990,95	150.000,00	48.000.000,00	48400000	3068,17	251059,12
338	SD NEGERI PRAYUNGAN I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	410.833,28	-	55.200.000,00	55200000	10395,82	421229,1
339	SD NEGERI PRAYUNGAN II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	4.085.468,44	-	48.000.000,00	51800000	3943,25	289411,69
340	SD NEGERI SAMBONGREJO I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	118.575,12	-	54.880.000,00	54880000	4535,91	123111,03
341	SD NEGERI SAMBONGREJO II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.467.678,65	50.000,00	64.160.000,00	64656000	5304,37	1026983,02
342	SD NEGERI SENDANGAGUNG SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	4.150.506,32	-	48.000.000,00	52130000	3214,26	23720,58
343	SD NEGERI SUMBERHARJO I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	1.960.594,51	-	57.760.000,00	59570094,51	4019,26	154519,26
344	SD NEGERI SUMBERHARJO II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.901.361,64	-	91.840.000,00	94740000	6992,34	8353,98
345	SD NEGERI SUMBERREJO I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	3.922.625,39	-	348.800.000,00	352442561	83836,19	363900,58
346	SD NEGERI SUMBERREJO II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.744.512,47	-	48.000.000,00	50000000	3511,91	748024,38
347	SD NEGERI SUMBERREJO III SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.792.959,77	-	48.000.000,00	50705750	4816,95	92026,72
348	SD NEGERI SUMURAGUNG I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	573.790,79	-	52.320.000,00	52480000	4836,72	418627,51
349	SD NEGERI SUMURAGUNG II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	640.609,28	-	56.160.000,00	55840609	4151,46	964151,74
350	SD NEGERI TELENG SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	6.300.567,09	-	48.000.000,00	54300000	3521,3	4088,39
351	SD NEGERI TLOGOHAJI I SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.548.631,64	-	61.760.000,00	64260000	5825,48	54457,12
352	SD NEGERI TLOGOHAJI II SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	4.136.161,68	65.000,00	78.880.000,00	82880000	7807,44	208969,12
353	SD NEGERI TULUNGREJO SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	2.018.045,65	-	148.480.000,00	147106050	13610,13	3405605,78
354	SD NEGERI WOTAN SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	688.340,77	-	83.360.000,00	83960000	6780,44	95121,21
355	SD NEGERI BALENREJO BALEN	Kec. Balen	202.420,00	-	49.280.000,00	49420000	3402,32	65822,32

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
356	SD NEGERI BULAKLO BALEN	Kec. Balen	190.393,72	-	48.000.000,00	48000000	3546,89	193940,61
357	SD NEGERI BULU I BALEN	Kec. Balen	50.445,90	-	48.000.000,00	48000000	3230,63	53676,53
358	SD NEGERI BULU II BALEN	Kec. Balen	181.528,07	-	48.000.000,00	48180000	3346,43	4874,5
359	SD NEGERI KABUNAN BALEN	Kec. Balen	636.655,86	-	77.120.000,00	77770000	13766,38	422,24
360	SD NEGERI KEDUNGBONDO II BALEN	Kec. Balen	1.931.253,75	-	75.680.000,00	75371000	7532,2	2247785,95
361	SD NEGERI KEDUNGBONDO III BALEN	Kec. Balen	79.808,22	7.500,00	49.760.000,00	49760000	3642,89	90951,11
362	SD NEGERI KEDUNGDOWO II BALEN	Kec. Balen	345.132,84	-	65.600.000,00	65945000	5969	6101,84
363	SD NEGERI KEMAMANG BALEN	Kec. Balen	1.916.036,86	-	113.600.000,00	115500000	11096,3	27133,16
364	SD NEGERI KENEP II BALEN	Kec. Balen	50.445,90	-	48.000.000,00	48000000	3318,69	53764,59
365	SD NEGERI LENGKONG BALEN	Kec. Balen	83.740,70	101.511,26	63.200.000,00	62880000	5662,4	510914,36
366	SD NEGERI MARGOMULYO I BALEN	Kec. Balen	3.277.422,54	-	87.360.000,00	90640000	8156,18	5578,72
367	SD NEGERI MARGOMULYO II BALEN	Kec. Balen	3.099.943,86	-	73.440.000,00	76528000	7320,03	19263,89
368	SD NEGERI MAYANGKAWIS I BALEN	Kec. Balen	138.885,96	-	55.680.000,00	53200000	3710,5	2622596,46
369	SD NEGERI MAYANGKAWIS II BALEN	Kec. Balen	1.270.298,46	-	96.320.000,00	96320000	8910,31	1279208,77
370	SD NEGERI MULYOAGUNG BALEN	Kec. Balen	694.503,52	-	90.880.000,00	91570000	8281,96	12785,48
371	SD NEGERI MULYOREJO I BALEN	Kec. Balen	385.369,93	-	48.000.000,00	48350000	3427,53	38797,46
372	SD NEGERI MULYOREJO II BALEN	Kec. Balen	1.815.668,47	-	76.480.000,00	77015668,47	6573,57	1286573,57
373	SD NEGERI NGADILUHUR I BALEN	Kec. Balen	341.809,05	-	111.840.000,00	111840000	10718,51	352527,56
374	SD NEGERI NGADILUHUR II BALEN	Kec. Balen	424.114,78	-	60.800.000,00	60896000	5324,14	333438,92
375	SD NEGERI PENGANTEN I BALEN	Kec. Balen	437.277,73	-	48.000.000,00	48437000	3310	3587,73
376	SD NEGERI PENGANTEN II BALEN	Kec. Balen	186.292,19	-	48.000.000,00	48000000	3348,72	189640,91
377	SD NEGERI PENGANTEN III BALEN	Kec. Balen	104.483,46	-	48.000.000,00	48000000	3380,32	107863,78
378	SD NEGERI PILANGGEDE BALEN	Kec. Balen	28.463,86	100.000,00	48.000.000,00	48000000	3131,02	131594,88
379	SD NEGERI POHBOGO II BALEN	Kec. Balen	241.032,15	-	76.000.000,00	76160000	5708,91	86741,06
380	SD NEGERI PRAMBATAN I BALEN	Kec. Balen	1.865.336,79	-	127.520.000,00	129360000	14584,25	39921,04
381	SD NEGERI SARIREJO BALEN	Kec. Balen	397.216,56	-	48.000.000,00	48000000	3432,25	400648,81
382	SD NEGERI SEKARAN BALEN	Kec. Balen	150.713,89	-	48.000.000,00	48000000	7505,29	158219,18
383	SD NEGERI SIDOBANDUNG I BALEN	Kec. Balen	1.088.316,01	-	88.000.000,00	88328316,01	17070,09	777070,09
384	SD NEGERI SIDOBANDUNG II BALEN	Kec. Balen	1.599.201,30	-	116.160.000,00	117770000	11515,76	717,06
385	SD NEGERI SOBONTORO I BALEN	Kec. Balen	2.076.687,31	-	135.840.000,00	137232600	14544,01	698631,32
386	SD NEGERI SOBONTORO II BALEN	Kec. Balen	299.269,52	-	56.320.000,00	56296000	4270,09	327539,61
387	SD NEGERI SUWALOH BALEN	Kec. Balen	1.872.291,65	-	124.800.000,00	124800000	13164,52	1885456,17
388	SD NEGERI DUYUNGAN I SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	-	429.290,60	75.200.000,00	75083283	8802,7	554810,3

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
389	SD NEGERI DUYUNGAN II SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	2.080.000,00	78.988,40	70.400.000,00	72465161	8780,72	102608,12
390	SD NEGERI JUMPOT SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	-	12.931,26	48.000.000,00	48000000	4801,93	17733,19
391	SD NEGERI KALICILIK SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	4.231.348,65	191.264,73	125.760.000,00	125120000	22234,77	5084848,15
392	SD NEGERI KLEPEK SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	-	348.709,40	82.240.000,00	82240000	12630,16	361339,56
393	SD NEGERI PACING I SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	1.560.000,00	67.693,72	49.120.000,00	50485917	5945,46	267722,18
394	SD NEGERI PACING II SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	1.000.000,00	151.484,96	93.120.000,00	94120000	12579	164063,96
395	SD NEGERI PURWOASRI I SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	1.061.616,09	1.519.319,83	49.440.000,00	50500000	4901,95	1525837,87
396	SD NEGERI PURWOASRI II SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	4.480.000,00	1.068.531,22	122.400.000,00	126354703	21528,02	1615356,24
397	SD NEGERI SEMAWOT SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	640.000,00	394.202,21	78.720.000,00	78720000	16098,9	1050301,11
398	SD NEGERI SEMENKIDUL SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	2.427.981,52	-	69.920.000,00	69120448	11349,63	3238883,15
399	SD NEGERI SIDODADI I SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	880.000,00	262.141,21	75.680.000,00	75354887	10208,62	1477462,83
400	SD NEGERI SIDODADI II SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	3.035.952,12	5.210,02	132.160.000,00	135110000	19082,65	110244,79
401	SD NEGERI SIDOREJO SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	8.659.017,33	-	98.720.000,00	107378767,2	4649	4899,17
402	SD NEGERI SITIAJI SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	542.000,00	709.903,60	102.240.000,00	102782000	9116,85	719020,45
403	SD NEGERI SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	249.079,85	111.932,77	70.880.000,00	70880000	6179,94	367192,56
404	SD NEGERI SUMBERJOKIDUL SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	80.000,00	389.443,74	50.720.000,00	50719873	5848,5	475419,24
405	SD NEGERI TEGALKODO I SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	2.000.184,68	-	73.440.000,00	75440184,68	9593,2	9593,2
406	SD NEGERI BAKALAN I KAPAS	Kec. Kapas	520.285,68	-	78.080.000,00	77259260	7725,16	1348750,84
407	SD NEGERI BAKALAN II KAPAS	Kec. Kapas	1.212.536,53	-	70.560.000,00	70351697	5897,09	1426736,62
408	SD NEGERI BANGILAN KAPAS	Kec. Kapas	1.992.895,43	-	69.600.000,00	71579995,43	8941,18	21841,18
409	SD NEGERI BENDO KAPAS	Kec. Kapas	1.403.039,07	-	80.640.000,00	79672708	15224,23	2385555,3
410	SD NEGERI BOGO KAPAS	Kec. Kapas	1.638.824,41	-	119.520.000,00	119238824,4	13276,94	1933276,94
411	SD NEGERI KALIANYAR KAPAS	Kec. Kapas	1.471.962,08	-	72.320.000,00	73482648,08	2117,78	311431,78
412	SD NEGERI KAPAS I KAPAS	Kec. Kapas	12.463.209,82	80,00	151.680.000,00	159482560	0	4660729,82
413	SD NEGERI KAPAS II KAPAS	Kec. Kapas	51.044,52	-	77.120.000,00	77120000	7402,27	58446,79
414	SD NEGERI KEDATON II KAPAS	Kec. Kapas	2.095.103,78	-	95.680.000,00	90154604	12582,27	7633082,05
415	SD NEGERI KUMPULREJO KAPAS	Kec. Kapas	1.335.477,45	-	61.600.000,00	62930000	5686,31	11163,76
416	SD NEGERI MOJODESO II KAPAS	Kec. Kapas	5.601.236,67	99,12	109.440.000,00	115040626,7	5358,82	6067,94
417	SD NEGERI NGAMPEL KAPAS	Kec. Kapas	1.609.320,96	940,35	98.880.000,00	99849000	0	641261,31
418	SD NEGERI PADANGMENTOYO KAPAS	Kec. Kapas	366.490,15	-	61.600.000,00	61489466	7456,74	484480,89
419	SD NEGERI PLESUNGAN KAPAS	Kec. Kapas	3.939.777,48	-	66.880.000,00	67164283	6443,61	3661938,09
420	SD NEGERI SAMBIROTO I KAPAS	Kec. Kapas	393.130,22	-	93.760.000,00	93760000	12428,54	405558,76
421	SD NEGERI SAMBIROTO II KAPAS	Kec. Kapas	1.297.142,96	-	71.200.000,00	70366075	7264,64	2138332,6

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
422	SD NEGERI SEMBUNG KAPAS	Kec. Kapas	1.586.102,64	-	77.600.000,00	78590940	10038,84	605201,48
423	SD NEGERI SEMENPINGGIR KAPAS	Kec. Kapas	454.862,02	-	80.640.000,00	80984821	7344,21	117385,23
424	SD NEGERI SUKOWATI KAPAS	Kec. Kapas	9.767.337,65	-	162.720.000,00	157095897,7	7156,39	15398596,39
425	SD NEGERI TANJUNGHARJO I KAPAS	Kec. Kapas	1.979.509,84	-	119.520.000,00	115209244	10716,23	6300982,07
426	SD NEGERI TANJUNGHARJO IV KAPAS	Kec. Kapas	1.255.873,32	-	126.720.000,00	127717233	13155,22	271795,54
427	SD NEGERI TAPELAN KAPAS	Kec. Kapas	540.947,42	-	90.720.000,00	91249637,42	7776,84	19086,84
428	SD NEGERI TIKUSAN KAPAS	Kec. Kapas	845.180,61	-	61.120.000,00	61005000	1464,67	961645,28
429	SD NEGERI WEDI KAPAS	Kec. Kapas	4.180.831,73	-	190.880.000,00	185119295	18319,9	9959856,63
430	SD NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO	Kec. Kapas	4.982.035,76	-	154.720.000,00	159701980	24809,9	24865,66
431	SD NEGERI CAMPUREJO I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	7.153.103,30	-	219.840.000,00	226825953,3	41875,58	209025,58
432	SD NEGERI CAMPUREJO II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	437.967,67	-	153.600.000,00	152128137,7	20400,03	1930230,03
433	SD NEGERI KADIPATEN I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	12.697.601,84	-	428.000.000,00	433760094	108217,3	7045725,14
434	SD NEGERI KADIPATEN II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.316.794,40	-	377.760.000,00	373600000	43455,12	5520249,52
435	SD NEGERI KADIPATEN III BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	949.359,81	2.000,00	68.000.000,00	66634609,81	6677,45	2323427,45
436	SD NEGERI KALIREJO BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	8.320.169,72	-	103.040.000,00	107451800	28392,29	3936762,01
437	SD NEGERI KARANGPACAR BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.794.038,25	-	79.360.000,00	81154038,25	9862,01	9862,01
438	SD NEGERI KAUMAN I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	6.609.493,88	-	424.960.000,00	429249493,9	74787,02	2394787,02
439	SD NEGERI KAUMAN II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.591.690,43	-	311.040.000,00	311040000	45570,3	1637260,73
440	SD NEGERI BANJARJO III BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.437.288,10	-	57.920.000,00	59306800	7268,41	57756,51
441	SD NEGERI BANJARJO II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	2.829.745,12	-	110.080.000,00	110080000	13236,01	2842981,13
442	SD NEGERI BANJARJO I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	3.882.471,47	-	238.400.000,00	242294117	11646,26	0,729999999
443	SD NEGERI PACUL III BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	2.624.036,36	-	129.600.000,00	127854594	32898,55	4402340,91
444	SD NEGERI SEMANDING BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	168.636,79	-	62.720.000,00	62720000	7011,81	175648,6
445	SD NEGERI SUKOREJO I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.154.509,84	-	272.960.000,00	272314450	46388,45	1846448,29
446	SD NEGERI SUKOREJO III BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	814.025,26	1,00	95.360.000,00	91694000	10311,49	4490337,75
447	SD NEGERI SUMBANG I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	131.036,56	-	70.720.000,00	68337036,56	5143,73	2519143,73
448	SD NEGERI PACUL I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	393.489,06	-	176.960.000,00	176799400	25587,62	579676,68
449	SD NEGERI NGROWO II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	4.822.580,30	-	100.160.000,00	104668602,3	12662,62	326640,62
450	SD NEGERI KEPATIHAN BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	16.851.919,50	-	439.040.000,00	424074921	12628,39	31829626,89
451	SD NEGERI KLANGON I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	10.059.372,48	-	65.600.000,00	75659372,18	17095,02	17095,32
452	SD NEGERI LEDOKKULON I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.290.348,60	-	160.160.000,00	160160000	22543,69	1312892,29
453	SD NEGERI LEDOKKULON III BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	7.323.288,92	-	91.840.000,00	91840000	23024,56	7346313,48
454	SD NEGERI LEDOKWETAN I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	514.873,95	-	79.200.000,00	74823873,95	8564,13	4899564,13

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
455	SD NEGERI MOJOKAMPUNG BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	-	434.109,39	84.320.000,00	84320000	10025,92	444135,31
456	SD NEGERI MULYOAGUNG I BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	2.814.723,47	-	112.640.000,00	112222323,5	14369,07	3246769,07
457	SD NEGERI MULYOAGUNG II BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	1.221.420,91	-	95.360.000,00	96581225,91	11871,89	12066,89
458	SD NEGERI BANJARSARI I TRUCUK	Kec. Trucuk	2.002.462,50	-	317.600.000,00	312622462,5	38671,21	7018671,21
459	SD NEGERI BANJARSARI III TRUCUK	Kec. Trucuk	887.013,38	715.980,02	141.280.000,00	141280000	38123,46	1641116,86
460	SD NEGERI GUYANGAN TRUCUK	Kec. Trucuk	1.173.744,53	-	53.600.000,00	54638600	3919,06	139063,59
461	SD NEGERI KANDANGAN I TRUCUK	Kec. Trucuk	414.781,91	-	92.960.000,00	92960000	8061,31	422843,22
462	SD NEGERI KANTEN I TRUCUK	Kec. Trucuk	1.977.870,03	-	78.080.000,00	80050183	7213,95	14900,98
463	SD NEGERI MORI I TRUCUK	Kec. Trucuk	2.767.578,92	-	108.480.000,00	108367578,9	9803,78	2889803,78
464	SD NEGERI MORI II TRUCUK	Kec. Trucuk	4.883.570,16	-	159.360.000,00	164270522,2	27826,28	874,28
465	SD NEGERI PADANG I TRUCUK	Kec. Trucuk	11.019.412,18	50.048,20	137.440.000,00	141733412,2	36047,36	6812095,56
466	SD NEGERI PADANG II TRUCUK	Kec. Trucuk	4.115.721,12	-	130.400.000,00	132245272,1	11978,47	2282427,47
467	SD NEGERI PAGERWESI I TRUCUK	Kec. Trucuk	574.440,48	-	63.360.000,00	63294440,48	4961,7	644961,7
468	SD NEGERI SRANAK TRUCUK	Kec. Trucuk	1.729.660,83	-	65.120.000,00	66640910,83	5308,77	214058,77
469	SD NEGERI SUMBANGTMUN TRUCUK	Kec. Trucuk	828.352,76	-	51.200.000,00	51200000	5006,18	833358,94
470	SD NEGERI SUMBERJO TRUCUK	Kec. Trucuk	4.702.425,65	20,00	96.000.000,00	98490000	19823,68	2232269,33
471	SD NEGERI TRUCUK I TRUCUK	Kec. Trucuk	4.058.955,01	-	117.600.000,00	121649955	11449,33	20449,33
472	SD NEGERI TRUCUK II TRUCUK	Kec. Trucuk	1.718.335,44	-	121.280.000,00	122249700	25127,16	773762,6
473	SD NEGERI TULUNGREJO I TRUCUK	Kec. Trucuk	1.506.033,05	-	143.200.000,00	143200000	26590,87	1532623,92
474	SD NEGERI DANDER I DANDER	Kec. Dander	32.247.871,57	6.899.022,00	283.520.000,00	303862317	85118,12	18889694,69
475	SD NEGERI DANDER II DANDER	Kec. Dander	894.462,26	-	189.440.000,00	189440000	28856,24	923318,5
476	SD NEGERI DANDER III DANDER	Kec. Dander	219.525,03	26.161,00	104.640.000,00	104640000	26020,54	271706,57
477	SD NEGERI DANDER IV DANDER	Kec. Dander	15.164.435,28	-	172.000.000,00	186684000	78502,7	558937,98
478	SD NEGERI GROWOK I DANDER	Kec. Dander	7.720.277,85	-	102.880.000,00	110530000	26582,41	96860,26
479	SD NEGERI GROWOK II DANDER	Kec. Dander	119.334,44	-	48.000.000,00	48000000	5226,49	124560,93
480	SD NEGERI JATIBLIMBING I DANDER	Kec. Dander	1.130.342,46	-	74.560.000,00	74101542	0	1588800,46
481	SD NEGERI JATIBLIMBING II DANDER	Kec. Dander	9.211.098,51	3.484.789,00	114.400.000,00	125497274,5	35703,37	1634316,37
482	SD NEGERI JATIBLIMBING III DANDER	Kec. Dander	2.710.881,87	-	75.520.000,00	75030000	10140,28	3211022,15
483	SD NEGERI KARANGSONO I DANDER	Kec. Dander	5.255.976,80	-	91.680.000,00	93295500	14196,23	3654673,03
484	SD NEGERI KARANGSONO II DANDER	Kec. Dander	183.845,36	-	50.400.000,00	50400000	4971,21	188816,57
485	SD NEGERI KUNCI I DANDER	Kec. Dander	34.609,93	-	125.120.000,00	125120000	16384,01	50993,94
486	SD NEGERI KUNCI III DANDER	Kec. Dander	1.727.948,06	397.919,40	132.000.000,00	132780820	20826,65	1365874,11
487	SD NEGERI MOJORANU I DANDER	Kec. Dander	45.201,52	-	79.360.000,00	76831248	7670,34	2581623,86

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
488	SD NEGERI MOJORANU II DANDER	Kec. Dander	8.688.947,42	-	129.280.000,00	137968947	35599,46	35599,88
489	SD NEGERI NGABLAK I DANDER	Kec. Dander	7.265.519,69	3.464,00	156.000.000,00	162624720	35769,25	680032,94
490	SD NEGERI NGABLAK II DANDER	Kec. Dander	1.612.998,24	-	50.720.000,00	52220000	6173,47	119171,71
491	SD NEGERI NGRASEH DANDER	Kec. Dander	4.870.991,51	-	82.880.000,00	87188500	12583,39	575074,9
492	SD NEGERI NGULANAN I DANDER	Kec. Dander	904.535,17	-	75.520.000,00	75624000	7782,24	808317,41
493	SD NEGERI NGULANAN II DANDER	Kec. Dander	930.754,60	-	113.440.000,00	113440000	3955,72	934710,32
494	SD NEGERI NGUMPAKDALEM I DANDER	Kec. Dander	4.313.914,23	4.798.830,00	238.880.000,00	238879745,2	79892,45	9192891,45
495	SD NEGERI NGUMPAKDALEM II DANDER	Kec. Dander	1.214.932,52	468.329,00	141.120.000,00	135808600	17185,39	7011846,91
496	SD NEGERI NGUMPAKDALEM IV DANDER	Kec. Dander	233.452,90	264.228,23	50.880.000,00	50890000	3746,43	491427,56
497	SD NEGERI NGUNUT I DANDER	Kec. Dander	2.124.006,97	-	138.400.000,00	140390961	20502,72	153548,72
498	SD NEGERI NGUNUT II DANDER	Kec. Dander	-	932,05	69.920.000,00	69919632	7329	8629,05
499	SD NEGERI SENDANGREJO I DANDER	Kec. Dander	4.118.333,38	-	106.560.000,00	106072620	16211,07	4621924,45
500	SD NEGERI SENDANGREJO II DANDER	Kec. Dander	6.803.290,39	-	74.720.000,00	76403000	17699	5137989,39
501	SD NEGERI SUMBERAGUNG I DANDER	Kec. Dander	2.632.569,77	-	64.800.000,00	64369100	6246,57	3069716,34
502	SD NEGERI SUMBERAGUNG II DANDER	Kec. Dander	527.333,46	-	48.000.000,00	48000000	6497,21	533830,67
503	SD NEGERI SUMBERAGUNG III DANDER	Kec. Dander	713.515,21	191.768,68	87.520.000,00	82638930	10479,13	5796833,02
504	SD NEGERI SUMBERARUM I DANDER	Kec. Dander	4.412.123,40	-	170.720.000,00	170720000	18368,97	4430492,37
505	SD NEGERI SUMBERARUM II DANDER	Kec. Dander	2.099.691,35	-	70.400.000,00	70400000	6733,51	2106424,86
506	SD NEGERI SUMBERARUM III DANDER	Kec. Dander	2.403.656,41	-	60.960.000,00	60960000	8303,53	2411959,94
507	SD NEGERI SUMBERARUM IV DANDER	Kec. Dander	2.368.644,11	-	50.080.000,00	50080000	4153,79	2372797,9
508	SD NEGERI SUMBERTLASEH I DANDER	Kec. Dander	1.687.944,22	-	75.520.000,00	75520000	2414,84	1690359,06
509	SD NEGERI SUMBERTLASEH II DANDER	Kec. Dander	4.196.852,07	-	79.200.000,00	79200000	0	4196852,07
510	SD NEGERI SUMODIKARAN I DANDER	Kec. Dander	3.365.816,09	-	176.000.000,00	179119300	23564,29	270080,38
511	SD NEGERI SUMODIKARAN II DANDER	Kec. Dander	3.425.629,21	-	92.160.000,00	94714819,21	13202,26	884012,26
512	SD NEGERI BANDUNGREJO I NGASEM	Kec. Ngasem	1.826.153,07	-	115.680.000,00	116546153,1	18022,4	978022,4
513	SD NEGERI BANDUNGREJO II NGASEM	Kec. Ngasem	800.000,00	350.658,77	60.000.000,00	59520000	9661,92	1640320,69
514	SD NEGERI BARENG I NGASEM	Kec. Ngasem	4.346.800,00	1.489,05	104.160.000,00	104346800	13971,31	4175460,36
515	SD NEGERI BARENG II NGASEM	Kec. Ngasem	1.506.327,20	-	96.000.000,00	93806757,2	12901,04	3712471,04
516	SD NEGERI BUTOH I NGASEM	Kec. Ngasem	480.000,00	161.450,96	84.480.000,00	84960000	10674,54	172125,5
517	SD NEGERI BUTOH II NGASEM	Kec. Ngasem	-	312.785,10	60.000.000,00	60000000	6942,44	319727,54
518	SD NEGERI DUKO HKIDUL NGASEM	Kec. Ngasem	554.495,37	-	50.400.000,00	50954495,37	5378,81	5378,81
519	SD NEGERI JAMPET I NGASEM	Kec. Ngasem	1.351.199,59	-	71.200.000,00	72551199,59	10600,51	10600,51
520	SD NEGERI JELU I NGASEM	Kec. Ngasem	139.797,16	-	55.200.000,00	55339797,16	3447,15	3447,15

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
521	SD NEGERI JELU II NGASEM	Kec. Ngasem	4.273.096,20	-	73.600.000,00	75680000	16680,67	2209776,87
522	SD NEGERI KOLONG I NGASEM	Kec. Ngasem	3.246.043,39	-	113.440.000,00	116686043,4	17261,49	17261,49
523	SD NEGERI KOLONG II NGASEM	Kec. Ngasem	538.353,60	-	73.280.000,00	73170800	8573,69	656127,29
524	SD NEGERI MEDIYUNAN I NGASEM	Kec. Ngasem	1.836.576,12	-	113.760.000,00	115596576,1	17185,92	17185,92
525	SD NEGERI MEDIYUNAN II NGASEM	Kec. Ngasem	651.117,13	-	73.600.000,00	74202117,13	9655,23	58655,23
526	SD NEGERI NGADILUWIH NGASEM	Kec. Ngasem	-	272.526,52	67.040.000,00	67040000	7934,41	280460,93
527	SD NEGERI NGANTRU NGASEM	Kec. Ngasem	1.974.706,47	-	139.840.000,00	141729212,5	22333,75	107827,75
528	SD NEGERI NGASEM I NGASEM	Kec. Ngasem	-	439.716,64	58.400.000,00	58400000	6738,88	446455,52
529	SD NEGERI NGASEM III NGASEM	Kec. Ngasem	1.280.000,00	269.217,62	80.640.000,00	81920000	24217,68	293435,3
530	SD NEGERI NGASEM IV NGASEM	Kec. Ngasem	1.187.788,60	116.606,00	48.000.000,00	49187788,6	8081,63	124687,63
531	SD NEGERI SENDANGHARJO NGASEM	Kec. Ngasem	3.520.826,29	-	102.240.000,00	105760826,3	14209,05	14209,05
532	SD NEGERI SETREN I NGASEM	Kec. Ngasem	892.861,30	-	99.840.000,00	100732800	18403,75	18465,05
533	SD NEGERI SETREN II NGASEM	Kec. Ngasem	605.678,88	-	48.000.000,00	48605678,88	4640	4640
534	SD NEGERI SETREN III NGASEM	Kec. Ngasem	2.740.144,20	-	48.000.000,00	50273850	13393,65	479687,85
535	SD NEGERI SETREN IV NGASEM	Kec. Ngasem	386.409,80	18,50	48.000.000,00	48000000	5131,25	391559,55
536	SD NEGERI TENGGER NGASEM	Kec. Ngasem	187.432,90	-	48.000.000,00	48187432,9	3230,29	3230,29
537	SD NEGERI TRENGGULUNAN I NGASEM	Kec. Ngasem	14.678.063,28	-	111.520.000,00	126198063,3	52096,18	52096,18
538	SD NEGERI TRENGGULUNAN II NGASEM	Kec. Ngasem	-	933.993,48	102.080.000,00	102080000	13330,54	947324,02
539	SD NEGERI WADANG I NGASEM	Kec. Ngasem	557.686,88	-	59.360.000,00	59917686,88	8072,16	8072,16
540	SD NEGERI WADANG II NGASEM	Kec. Ngasem	1.277.878,66	-	50.240.000,00	49997878,66	8156,87	1528156,87
541	SD NEGERI WADANG III NGASEM	Kec. Ngasem	1.120.000,00	302.304,55	48.960.000,00	50080000	6161,6	308466,15
542	SD NEGERI BRENGGOLO KALITIDU	Kec. Kalitidu	8.303.329,51	-	71.680.000,00	79981200	12825,56	14955,07
543	SD NEGERI GREBEGAN KALITIDU	Kec. Kalitidu	760.546,24	-	121.760.000,00	121560000	15773,78	976320,02
544	SD NEGERI KALITIDU I KALITIDU	Kec. Kalitidu	7.069.227,00	0,51	229.920.000,00	236268377	48605,47	769455,98
545	SD NEGERI KALITIDU II KALITIDU	Kec. Kalitidu	611.512,21	-	92.640.000,00	93251000	16744,03	17256,24
546	SD NEGERI LERAN I KALITIDU	Kec. Kalitidu	244.585,60	200,00	84.960.000,00	84959883	11401,34	256303,94
547	SD NEGERI LERAN II KALITIDU	Kec. Kalitidu	151.131,94	-	72.640.000,00	72780000	9318,22	20450,16
548	SD NEGERI LERAN IV KALITIDU	Kec. Kalitidu	212.998,41	723.503,80	69.120.000,00	69586100	14104,21	484506,42
549	SD NEGERI MAYANGREJO I KALITIDU	Kec. Kalitidu	245.024,24	-	48.000.000,00	48237390	4971,55	12605,79
550	SD NEGERI MAYANGREJO II KALITIDU	Kec. Kalitidu	2.957.061,26	-	49.280.000,00	52197900	4714,52	43875,78
551	SD NEGERI MLATEN I KALITIDU	Kec. Kalitidu	886.385,14	-	50.400.000,00	49600000	7376,49	1693761,63
552	SD NEGERI MLATEN II KALITIDU	Kec. Kalitidu	10.435.195,88	-	68.800.000,00	79230000	38491,18	43687,06
553	SD NEGERI MOJO KALITIDU	Kec. Kalitidu	2.568.126,25	-	79.840.000,00	82400000	15319,81	23446,06



No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
554	SD NEGERI MOJOSARI KALITIDU	Kec. Kalitidu	1.789.676,43	-	59.840.000,00	61620000	20807,99	30484,42
555	SD NEGERI NGRINGINREJO II KALITIDU	Kec. Kalitidu	3.326.918,30	-	80.320.000,00	83520000	12479,19	139397,49
556	SD NEGERI NGUJO I KALITIDU	Kec. Kalitidu	4.177.791,50	-	106.720.000,00	110906206	29977,09	21562,59
557	SD NEGERI PANJUNAN II KALITIDU	Kec. Kalitidu	2.118.108,87	-	190.720.000,00	190297050	17487,23	2558546,1
558	SD NEGERI PILANGSARI I KALITIDU	Kec. Kalitidu	622.288,99	-	68.480.000,00	69100000	8297,85	10586,84
559	SD NEGERI PILANGSARI II KALITIDU	Kec. Kalitidu	3.124.582,24	-	67.360.000,00	69520000	9357,99	973940,23
560	SD NEGERI PUNGPUNGAN I KALITIDU	Kec. Kalitidu	3.146.641,64	-	56.960.000,00	59466365	7894,09	648170,73
561	SD NEGERI PUNGPUNGAN II KALITIDU	Kec. Kalitidu	1.293.773,24	576.600,00	111.680.000,00	113543000	29980,53	37353,77
562	SD NEGERI SUKOHARJO KALITIDU	Kec. Kalitidu	1.817.422,22	-	54.080.000,00	55890000	7748,42	15170,64
563	SD NEGERI SUMENGKO I KALITIDU	Kec. Kalitidu	547.828,26	-	113.120.000,00	113120000	32174,29	580002,55
564	SD NEGERI SUMENGKO II KALITIDU	Kec. Kalitidu	7.133.279,75	50.755,65	87.680.000,00	94234405	26536,88	656167,28
565	SD NEGERI TALOK KALITIDU	Kec. Kalitidu	654.574,84	-	108.480.000,00	109130000	15622,72	20197,56
566	SD NEGERI WOTANNGARE I KALITIDU	Kec. Kalitidu	839.999,70	-	61.440.000,00	60679000	6037,5	1607037,2
567	SD NEGERI WOTANNGARE II KALITIDU	Kec. Kalitidu	401.617,52	-	91.360.000,00	89075000	17585,53	2704203,05
568	SD NEGERI BANARAN MALO	Kec. Malo	-	586.750,70	48.000.000,00	48000000	4351,41	591102,11
569	SD NEGERI DUKOHLOR MALO	Kec. Malo	89.441,00	365.839,54	52.640.000,00	52454110	3267,26	644437,8
570	SD NEGERI KACANGAN I MALO	Kec. Malo	-	529.118,46	87.040.000,00	86719850	9458,69	858727,15
571	SD NEGERI KACANGAN II MALO	Kec. Malo	2.822.000,00	520.348,25	81.440.000,00	84793843	11847,32	352,57
572	SD NEGERI KEDUNGREJO MALO	Kec. Malo	506.225,00	316.494,36	48.000.000,00	48506225	4548,81	321043,17
573	SD NEGERI KEMIRI I MALO	Kec. Malo	268.996,00	563.476,30	115.520.000,00	111640656	14744,4	4726560,7
574	SD NEGERI KETILENG I MALO	Kec. Malo	-	617.410,73	106.400.000,00	106400000	15090,33	632501,06
575	SD NEGERI KLITEH MALO	Kec. Malo	-	260.246,97	69.920.000,00	69920000	8241,28	268488,25
576	SD NEGERI MALO II MALO	Kec. Malo	3.799.385,71	-	91.360.000,00	94398000	13137,19	774522,9
577	SD NEGERI NGUJUNG I MALO	Kec. Malo	320.000,00	244.834,38	76.800.000,00	76800000	9880,89	574715,27
578	SD NEGERI NGUJUNG II MALO	Kec. Malo	-	69.680,91	48.000.000,00	48000000	4572,61	74253,52
579	SD NEGERI PETAK MALO	Kec. Malo	720.200,00	758.202,77	63.520.000,00	63520000	7990,9	1486393,67
580	SD NEGERI RENDENG MALO	Kec. Malo	-	179.754,77	48.000.000,00	48000000	5058,49	184813,26
581	SD NEGERI SEMLARAN MALO	Kec. Malo	666.581,17	-	66.560.000,00	67050600	7625,33	183606,5
582	SD NEGERI SUDAH MALO	Kec. Malo	-	77.974,44	48.000.000,00	48000000	4440,79	82415,23
583	SD NEGERI SUKOREJO MALO	Kec. Malo	121.268,00	65.476,37	74.880.000,00	73721250	4316,77	1349811,14
584	SD NEGERI SUMBERJO II MALO	Kec. Malo	477.640,00	1.871.271,63	69.600.000,00	70077640	9191,53	1880463,16
585	SD NEGERI SUMBERJO III MALO	Kec. Malo	-	271.423,59	48.480.000,00	48480000	3922,63	275346,22
586	SD NEGERI TAMBAKROMO II MALO	Kec. Malo	2.240.000,00	-	69.120.000,00	71106219	3801,07	257582,07

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
587	SD NEGERI TAMBAKROMO III MALO	Kec. Malo	-	279.803,94	61.280.000,00	61280000	7236,52	287040,46
588	SD NEGERI TANGGIR I MALO	Kec. Malo	-	296.113,77	73.920.000,00	73920000	8541,18	304654,95
589	SD NEGERI TINAWUN I MALO	Kec. Malo	959.394,52	-	92.800.000,00	92555000	12170,89	1216565,41
590	SD NEGERI TREMBES MALO	Kec. Malo	-	770.433,81	71.520.000,00	70879996	8846,29	1419284,1
591	SD NEGERI TULUNGAGUNG MALO	Kec. Malo	488.357,00	478.078,54	98.560.000,00	98408357	12319,15	1130397,69
592	SD NEGERI DONAN II PURWOSARI	Kec. Purwosari	1.074.814,00	-	98.400.000,00	99474000	12585,84	13399,84
593	SD NEGERI DONAN III PURWOSARI	Kec. Purwosari	202.035,91	-	48.000.000,00	47997000	4539,39	209575,3
594	SD NEGERI GAPLUK PURWOSARI	Kec. Purwosari	3.043.363,52	-	93.760.000,00	94881000	19529,29	1941892,81
595	SD NEGERI KALIOMBO I PURWOSARI	Kec. Purwosari	1.475.766,40	-	59.840.000,00	60755000	13112,56	573878,96
596	SD NEGERI KALIOMBO II PURWOSARI	Kec. Purwosari	229.818,74	-	96.320.000,00	94949000	11620,6	1612439,34
597	SD NEGERI KALIOMBO IV PURWOSARI	Kec. Purwosari	4.396.161,12	-	76.960.000,00	81340000	11439,06	27600,18
598	SD NEGERI KUNIRAN I PURWOSARI	Kec. Purwosari	324.106,00	-	99.040.000,00	97442400	11784,98	1933490,98
599	SD NEGERI KUNIRAN II PURWOSARI	Kec. Purwosari	1.048.676,88	-	91.040.000,00	91040000	9440,76	1058117,64
600	SD NEGERI NGREJENG PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.903.558,00	-	107.200.000,00	110101500	15154,18	17212,18
601	SD NEGERI PELEM I PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.736.459,24	-	77.120.000,00	75374800	9935,98	4491595,22
602	SD NEGERI PELEM II PURWOSARI	Kec. Purwosari	3.359.306,46	-	105.280.000,00	105280000	13435,33	3372741,79
603	SD NEGERI POJOK PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.647.944,66	-	73.440.000,00	76080000	10124,75	18069,41
604	SD NEGERI PUNGGUR PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.339.912,91	-	82.720.000,00	84720000	23761,26	363674,17
605	SD NEGERI PURWOSARI I PURWOSARI	Kec. Purwosari	6.188.547,45	160.000,00	315.360.000,00	321160000	62416,52	610963,97
606	SD NEGERI PURWOSARI III PURWOSARI	Kec. Purwosari	913.155,04	-	153.920.000,00	153920000	27919,87	941074,91
607	SD NEGERI SEDAHKIDUL PURWOSARI	Kec. Purwosari	116.180,67	-	72.160.000,00	72160000	7873,3	124053,97
608	SD NEGERI TINUMPUK PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.091.347,29	-	92.320.000,00	94091000	23974,21	344321,5
609	SD NEGERI TLATAH PURWOSARI	Kec. Purwosari	557.756,28	-	106.720.000,00	107040000	17208,43	254964,71
610	SD NEGERI BANJARJO I PADANGAN	Kec. Padangan	6.492.278,67	-	155.040.000,00	161554375	22096,36	0,029999987
611	SD NEGERI BANJARJO III PADANGAN	Kec. Padangan	684.826,27	-	48.000.000,00	47521223	3843,06	1167446,33
612	SD NEGERI CENDONO PADANGAN	Kec. Padangan	980.269,48	-	144.160.000,00	144394398,5	20015,4	765886,4
613	SD NEGERI DENGOK II PADANGAN	Kec. Padangan	4.563.922,72	-	185.760.000,00	189732575,7	17566,4	608913,4
614	SD NEGERI KEBONAGUNG PADANGAN	Kec. Padangan	2.817.600,66	200.014,37	48.000.000,00	50633700	5797,44	389712,47
615	SD NEGERI KENDUNG PADANGAN	Kec. Padangan	14.490.924,41	-	82.560.000,00	94730924,41	45755,82	2365755,82
616	SD NEGERI KUNCEN II PADANGAN	Kec. Padangan	3.918.364,84	-	82.720.000,00	86269060	11353,55	380658,39
617	SD NEGERI NGASINAN PADANGAN	Kec. Padangan	3.279.067,03	545.969,95	140.160.000,00	142112836,1	21330,16	1893531,08
618	SD NEGERI NGEPER I PADANGAN	Kec. Padangan	1.185.924,88	-	68.800.000,00	68981924,88	10435,06	1014435,06
619	SD NEGERI NGEPER II PADANGAN	Kec. Padangan	463.128,20	-	100.640.000,00	99460312	10949,96	1653766,16

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
620	SD NEGERI NGRADIN I PADANGAN	Kec. Padangan	123.320,63	-	48.000.000,00	48000000	4357,16	127677,79
621	SD NEGERI NGRADIN II PADANGAN	Kec. Padangan	170.820,80	-	60.960.000,00	60960000	5847,09	176667,89
622	SD NEGERI NGUKEN PADANGAN	Kec. Padangan	6.945.835,75	-	128.800.000,00	127128785	21283,37	8638334,12
623	SD NEGERI PADANGAN I PADANGAN	Kec. Padangan	829.711,76	438.727,00	67.680.000,00	67678600	7089,92	1276928,68
624	SD NEGERI PADANGAN II PADANGAN	Kec. Padangan	31.040.169,10	4.565.264,00	340.320.000,00	359110200	187689,11	17002922,21
625	SD NEGERI PADANGAN III PADANGAN	Kec. Padangan	628.157,83	-	78.240.000,00	76975600	10130,41	1902688,24
626	SD NEGERI PRANGI PADANGAN	Kec. Padangan	3.977.800,40	-	109.280.000,00	111678842	19161,64	1598120,04
627	SD NEGERI PURWOREJO I PADANGAN	Kec. Padangan	584.422,23	86.555,00	71.040.000,00	69804452,23	7943,18	1914468,18
628	SD NEGERI PURWOREJO II PADANGAN	Kec. Padangan	5.125.772,96	-	106.560.000,00	109525723	26358,6	2186408,6
629	SD NEGERI SIDOREJO I PADANGAN	Kec. Padangan	905.377,99	-	67.040.000,00	63789586	10642,94	4166434,93
630	SD NEGERI SIDOREJO II PADANGAN	Kec. Padangan	5.317.188,08	-	51.360.000,00	51475988,08	11563,02	5212763,02
631	SD NEGERI SONOREJO I PADANGAN	Kec. Padangan	202.589,41	-	48.000.000,00	47419029	4406,47	787966,88
632	SD NEGERI SONOREJO II PADANGAN	Kec. Padangan	202.861,20	1.760.000,00	75.360.000,00	74400000	11080,34	2933941,54
633	SD NEGERI TEBON PADANGAN	Kec. Padangan	6.327.588,00	102.261,67	80.000.000,00	85999988	10259,12	440120,79
634	SD NEGERI BATOKAN I KASIMAN	Kec. Kasiman	3.540.570,00	375.502,33	127.200.000,00	129492025	23846,35	1647893,68
635	SD NEGERI BATOKAN V KASIMAN	Kec. Kasiman	865.122,00	51.248,93	75.200.000,00	72798622	8170,53	3325919,46
636	SD NEGERI BESAH I KASIMAN	Kec. Kasiman	488.730,30	-	59.520.000,00	59519802	7952,07	496880,37
637	SD NEGERI BESAH II KASIMAN	Kec. Kasiman	835.082,00	579.984,62	84.000.000,00	83186645	12253,49	2240675,11
638	SD NEGERI BETET KASIMAN	Kec. Kasiman	-	227.821,77	104.320.000,00	101440000	16970,19	3124791,96
639	SD NEGERI KASIMAN I KASIMAN	Kec. Kasiman	508.186,00	52.017,52	112.800.000,00	113306120	15716,65	69800,17
640	SD NEGERI KASIMAN II KASIMAN	Kec. Kasiman	443.240,00	176.354,30	62.720.000,00	62719940	8381,4	628035,7
641	SD NEGERI KASIMAN III KASIMAN	Kec. Kasiman	3.119.009,81	-	72.800.000,00	74505402	10343,39	1423951,2
642	SD NEGERI NGAGLIK I KASIMAN	Kec. Kasiman	1.979.753,00	1.065.054,54	158.720.000,00	157366872	31519,92	4429455,47
643	SD NEGERI SAMBENG I KASIMAN	Kec. Kasiman	5.867.588,00	214.533,56	258.080.000,00	263947000	52126,02	267247,58
644	SD NEGERI SEKARAN I KASIMAN	Kec. Kasiman	374.521,01	-	53.440.000,00	53440000	6201,85	380722,86
645	SD NEGERI SEKARAN II KASIMAN	Kec. Kasiman	5.936.720,00	140.413,60	102.720.000,00	106669874	20325,38	2147584,98
646	SD NEGERI SEKARAN III KASIMAN	Kec. Kasiman	545.272,00	88.284,28	88.960.000,00	87567248	14527,25	2040835,53
647	SD NEGERI SIDOMUKTI I KASIMAN	Kec. Kasiman	4.162.980,11	-	52.800.000,00	56271970	17654,53	708664,64
648	SD NEGERI SIDOMUKTI II KASIMAN	Kec. Kasiman	55.512,00	104.996,52	48.000.000,00	48055350	5351,52	110510,04
649	SD NEGERI TAMBAKMERAK II KASIMAN	Kec. Kasiman	383.390,73	1.125.653,43	69.440.000,00	70948014	9787,13	10817,29
650	SD NEGERI TAMBAKMERAK III KASIMAN	Kec. Kasiman	160.315,00	279.042,64	86.240.000,00	85760315	11924,64	930967,28
651	SD NEGERI TEMBELING I KASIMAN	Kec. Kasiman	870.240,00	42.430,36	147.520.000,00	148349885	22061,84	104847,2
652	SD NEGERI BEJI II KEDEWAN	Kec. Kedewan	106.516,22	-	100.640.000,00	100639850	19336,33	126002,55

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
653	SD NEGERI BEJI III KEDEWAN	Kec. Kedewan	958.362,32	-	55.040.000,00	55020000	9303,03	987665,35
654	SD NEGERI BEJI IV KEDEWAN	Kec. Kedewan	2.413.736,81	-	48.000.000,00	50200000	5188,95	218925,76
655	SD NEGERI HARGOMULYO I KEDEWAN	Kec. Kedewan	4.935.480,35	-	153.280.000,00	152877000	35587,77	5374068,12
656	SD NEGERI HARGOMULYO II KEDEWAN	Kec. Kedewan	625.081,30	-	120.640.000,00	120586798	24420,1	702703,4
657	SD NEGERI HARGOMULYO IV KEDEWAN	Kec. Kedewan	591.895,19	-	61.440.000,00	58188400	8841,32	3852336,51
658	SD NEGERI KAWENGAN KEDEWAN	Kec. Kedewan	100.515,04	-	48.000.000,00	47991279,04	6539,06	115775,06
659	SD NEGERI KEDEWAN I KEDEWAN	Kec. Kedewan	1.475.760,46	-	175.680.000,00	174275760,5	38434,47	2918434,47
660	SD NEGERI KEDEWAN III KEDEWAN	Kec. Kedewan	1.060.911,45	-	66.560.000,00	66560000	12189,76	1073101,21
661	SD NEGERI WONOCOLO I KEDEWAN	Kec. Kedewan	5.294.055,64	-	109.600.000,00	111464000	25618,21	3455673,85
662	SD NEGERI WONOCOLO II KEDEWAN	Kec. Kedewan	114.753,39	-	57.280.000,00	56960000	7826,15	442579,54
663	SD NEGERI GONDANG I GONDANG	Kec. Gondang	3.769.020,00	383.469,52	114.080.000,00	116840000	29792,4	1422281,92
664	SD NEGERI GONDANG II GONDANG	Kec. Gondang	439.982,00	1.680.531,82	54.720.000,00	56347807	7422,1	500128,92
665	SD NEGERI GONDANG III GONDANG	Kec. Gondang	1.357.990,51	-	48.000.000,00	48730800	6366,15	633556,66
666	SD NEGERI JARI I GONDANG	Kec. Gondang	-	335.083,32	64.480.000,00	64480000	10188,22	345271,54
667	SD NEGERI JARI II GONDANG	Kec. Gondang	2.120.000,00	181.773,48	84.000.000,00	86076514	15639,78	240899,26
668	SD NEGERI KRONDONAN I GONDANG	Kec. Gondang	2.939.024,00	1.624.320,94	48.480.000,00	50491000	9070,36	2561415,3
669	SD NEGERI KRONDONAN II GONDANG	Kec. Gondang	2.500.140,00	910.511,06	81.920.000,00	83460140	17441,4	1887952,46
670	SD NEGERI KRONDONAN III GONDANG	Kec. Gondang	-	63.250,19	48.000.000,00	48000000	5661,15	68911,34
671	SD NEGERI KRONDONAN IV GONDANG	Kec. Gondang	994.287,00	663.446,39	48.000.000,00	45163106	5751,02	4500378,41
672	SD NEGERI PAJENG I GONDANG	Kec. Gondang	2.080.000,00	568.994,96	110.240.000,00	112320000	26275,05	595270,01
673	SD NEGERI PAJENG II GONDANG	Kec. Gondang	-	538.070,76	55.840.000,00	55840000	7581,41	545652,17
674	SD NEGERI PAJENG III GONDANG	Kec. Gondang	1.332.597,00	417.988,57	48.000.000,00	49332597	7842,31	425830,88
675	SD NEGERI PRAGELAN I GONDANG	Kec. Gondang	7.688.000,00	164.753,62	48.000.000,00	55500000	19335,03	372088,65
676	SD NEGERI PRAGELAN II GONDANG	Kec. Gondang	3.589.184,84	166.379,81	64.960.000,00	68159184,84	11583,54	567963,35
677	SD NEGERI PRAGELAN III GONDANG	Kec. Gondang	8.524.770,00	142.070,43	48.000.000,00	56515270	9991,06	161561,49
678	SD NEGERI SAMBONGREJO I GONDANG	Kec. Gondang	343.887,00	88.591,26	104.480.000,00	101141414	16807,63	3787871,89
679	SD NEGERI SAMBONGREJO II GONDANG	Kec. Gondang	3.889.166,00	717.988,63	172.000.000,00	175872800	44271,54	778626,17
680	SD NEGERI SAMBONGREJO III GONDANG	Kec. Gondang	2.618.241,26	-	51.200.000,00	53189300	9131,51	638072,77
681	SD NEGERI SENGANTEN II GONDANG	Kec. Gondang	4.723.724,00	463.955,65	159.680.000,00	161313500	42890,65	3597070,3
682	SD NEGERI BARENG I SEKAR	Kec. Sekar	830.469,15	-	127.680.000,00	126033965	11387,43	2487891,58
683	SD NEGERI BARENG II SEKAR	Kec. Sekar	192.522,76	-	150.880.000,00	150240000	13909,65	846432,41
684	SD NEGERI BARENG III SEKAR	Kec. Sekar	742.312,13	878,16	48.000.000,00	48000700	2692,09	745182,38
685	SD NEGERI BOBOL I SEKAR	Kec. Sekar	4.107.973,91	-	87.040.000,00	90820000	12378,5	340352,41

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
686	SD NEGERI BOBOL II SEKAR	Kec. Sekar	1.189.906,57	-	66.720.000,00	66460000	5926,26	1455832,83
687	SD NEGERI BOBOL III SEKAR	Kec. Sekar	1.616.185,20	1.018.500,00	48.480.000,00	50030600	3472,74	1087557,94
688	SD NEGERI BOBOL IV SEKAR	Kec. Sekar	994.015,42	-	71.680.000,00	70114015,42	9582,6	2569582,6
689	SD NEGERI BOBOL V SEKAR	Kec. Sekar	482.471,14	-	88.960.000,00	88480000	7950,12	970421,26
690	SD NEGERI BOBOL VI SEKAR	Kec. Sekar	35.599,30	49.998,00	48.000.000,00	48019600	2521,54	68518,84
691	SD NEGERI DELING I SEKAR	Kec. Sekar	4.243.442,37	-	144.480.000,00	142640000	15447,99	6098890,36
692	SD NEGERI DELING II SEKAR	Kec. Sekar	374.650,91	-	55.040.000,00	54660547,79	5364,12	759467,24
693	SD NEGERI DELING IV SEKAR	Kec. Sekar	2.294.044,71	-	48.000.000,00	50049350	2546,33	247241,04
694	SD NEGERI DELING V SEKAR	Kec. Sekar	34.064,86	50.000,00	48.000.000,00	48000000	2612,65	86677,51
695	SD NEGERI KLINO I SEKAR	Kec. Sekar	1.863.595,90	-	214.080.000,00	210940900	18989,73	5021685,63
696	SD NEGERI KLINO III SEKAR	Kec. Sekar	410.097,57	-	48.000.000,00	48000000	2573,76	412671,33
697	SD NEGERI KLINO IV SEKAR	Kec. Sekar	324.356,51	-	48.000.000,00	48324350	2610,62	2617,13
698	SD NEGERI KLINO V SEKAR	Kec. Sekar	65.120,41	-	48.000.000,00	48000000	4710,58	69830,99
699	SD NEGERI MIYONO I SEKAR	Kec. Sekar	153.232,03	-	113.600.000,00	113600000	17127,13	170359,16
700	SD NEGERI MIYONO II SEKAR	Kec. Sekar	165.870,21	-	61.920.000,00	61707340	4231,36	382761,57
701	SD NEGERI MIYONO III SEKAR	Kec. Sekar	335.577,02	-	48.000.000,00	48297600	2682,53	40659,55
702	SD NEGERI SEKAR I SEKAR	Kec. Sekar	140.209,70	-	74.560.000,00	74560000	5408,22	145617,92
703	SD NEGERI SEKAR II SEKAR	Kec. Sekar	686.661,79	-	77.280.000,00	77006000	5283,19	965944,98
704	SD NEGERI SEKAR III SEKAR	Kec. Sekar	40.027,40	80.819,00	75.520.000,00	73640027,4	5067,43	2005886,43
705	SD NEGERI BEGADON GAYAM	Kec. Gayam	1.443.831,96	-	92.000.000,00	92000000	21606,25	1465438,21
706	SD NEGERI BEGED GAYAM	Kec. Gayam	462.660,14	-	81.280.000,00	78857700	20193,57	2905153,71
707	SD NEGERI BONOREJO GAYAM	Kec. Gayam	3.255.236,47	-	95.840.000,00	98135000	24170,52	984406,99
708	SD NEGERI BRABOWAN GAYAM	Kec. Gayam	5.420.425,03	-	145.120.000,00	149735025	35500,91	840900,94
709	SD NEGERI CENGUNGKLUNG GAYAM	Kec. Gayam	4.633.373,00	4.653.373,00	103.200.000,00	105325800	35686,33	7196632,33
710	SD NEGERI GAYAM I GAYAM	Kec. Gayam	3.637.841,75	-	123.040.000,00	122703250	30132,36	4004724,11
711	SD NEGERI GAYAM II GAYAM	Kec. Gayam	2.572.935,44	-	137.280.000,00	139800000	34053,33	86988,77
712	SD NEGERI GAYAM III GAYAM	Kec. Gayam	2.728.748,72	-	67.520.000,00	69928748,72	14669,12	334669,12
713	SD NEGERI KATUR I GAYAM	Kec. Gayam	220.500,48	-	77.440.000,00	77272400	16480,76	404581,24
714	SD NEGERI KATUR II GAYAM	Kec. Gayam	2.087.540,54	-	48.000.000,00	49050000	10073,67	1047614,21
715	SD NEGERI MANUKAN GAYAM	Kec. Gayam	920.022,56	-	164.800.000,00	163724000	45473,04	2041495,6
716	SD NEGERI MOJODELIK I GAYAM	Kec. Gayam	3.816.826,60	-	139.040.000,00	85314100	33752,34	57576478,94
717	SD NEGERI MOJODELIK II GAYAM	Kec. Gayam	5.631.079,51	-	95.520.000,00	95199900	29473,19	5980652,7
718	SD NEGERI NGRAHO I GAYAM	Kec. Gayam	13.820.941,12	-	145.440.000,00	86032000	0	73228941,12

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
719	SD NEGERI SUDU I GAYAM	Kec. Gayam	4.064.819,34	-	106.400.000,00	110368600	23854,64	120073,98
720	SD NEGERI SUDU II GAYAM	Kec. Gayam	800.837,28	-	59.200.000,00	58720400	11383,69	1291820,97
721	SMP NEGERI 1 BALEN	Kec. Balen	122.260.971,97	560.861,98	761.000.000,00	881600000	957331,74	3179165,69
722	SMP NEGERI 2 BALEN	Kec. Balen	890.395,00	737.070,00	627.400.000,00	628194554,9	171478,4	1004388,47
723	SMP NEGERI 3 BAURENO	Kec. Baureno	13.324.900,00	784.853,17	437.400.000,00	438563600	90784,56	13036937,73
724	SMP NEGERI 1 BAURENO	Kec. Baureno	2.761.182,42	7.982.428,19	920.600.000,00	923350000	227442,99	8221053,6
725	SMP NEGERI 2 BAURENO	Kec. Baureno	10.600.000,00	3.056.848,21	249.400.000,00	260000000	59157,14	3116005,35
726	SMP NEGERI 2 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	74.049.974,91	10.799.741,82	766.600.000,00	840600000	510997,58	11360714,31
727	SMP NEGERI 1 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	296.535.823,99	31.055.770,26	953.400.000,00	1176390587	2651118,01	107252125,3
728	SMP NEGERI 4 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	57.447.540,00	874.432,91	701.400.000,00	750693050	394942,21	9423865,12
729	SMP NEGERI 5 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	178.996.790,69	1.430.210,71	949.600.000,00	932661707	1683296,82	199048591,2
730	SMP NEGERI 6 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	6.517.100,00	5.727.842,34	634.200.000,00	636279200	149572,95	10315315,29
731	SMP NEGERI 7 BOJONEGORO	Kec. Bojonegoro	25.114.495,00	4.179.372,85	632.200.000,00	656577265	281102	5197704,85
732	SMP NEGERI 1 BUBULAN	Kec. Bubulan	12.173.545,23	140.325,86	359.200.000,00	367373545	82457,64	4222783,73
733	SMP NEGERI SATU ATAP CLEBUNG BUBULAN	Kec. Bubulan	-	109.852,48	60.000.000,00	60000000	5820,93	115673,41
734	SMP NEGERI 1 DANDER	Kec. Dander	55.610.400,00	1.502.345,88	623.000.000,00	678599900	373781,16	1886627,04
735	SMP NEGERI 3 BOJONEGORO	Kec. Dander	28.692.000,00	3.014.843,70	757.200.000,00	782868188	513152,15	6551807,85
736	SMP NEGERI 1 GAYAM	Kec. Gayam	7.447.995,16	-	310.600.000,00	317850995	59572,55	256572,71
737	SMP NEGERI 1 GONDANG	Kec. Gondang	45.368.506,36	274.435,09	523.200.000,00	558039742,4	291577,58	11094776,67
738	SMP NEGERI 2 GONDANG	Kec. Gondang	3.425.808,99	21.224,73	179.000.000,00	180820284	23716,66	1650466,38
739	SMP NEGERI 2 KALITIDU	Kec. Kalitidu	17.887.570,25	361.942,99	457.200.000,00	471486961	234796,18	4197348,42
740	SMP NEGERI 1 KALITIDU	Kec. Kalitidu	6.007.789,50	503.046,39	854.400.000,00	854400000	188402,96	6699238,85
741	SMP NEGERI 1 KANOR	Kec. Kanor	9.095.314,99	397.455,79	839.600.000,00	839600000	168438,37	9661209,15
742	SMP NEGERI 1 KAPAS	Kec. Kapas	19.007.615,00	2.373.594,56	532.600.000,00	551463996	110582,75	2627796,31
743	SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO	Kec. Kapas	48.990.966,99	987.715,11	443.400.000,00	491429831	306868,89	2255719,99
744	SMP NEGERI 1 KASIMAN	Kec. Kasiman	-	8.246.345,96	715.400.000,00	708184787	147520,93	15609079,89
745	SMP NEGERI 1 KEDEWAN	Kec. Kedewan	9.643.660,00	489.662,10	354.400.000,00	362800000	93879,66	1827201,76
746	SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	725.000,00	1.905.431,80	812.600.000,00	811296500	187740,55	4121672,35
747	SMP NEGERI 2 KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	9.227.040,00	2.476.316,57	184.800.000,00	191227040	37411,57	5313728,14
748	SMP NEGERI 3 KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	132.500,00	1.924.242,80	151.600.000,00	150132500	17772,67	3542015,47
749	SMP NEGERI SATU ATAP KESONGO KEDUNGADEM	Kec. Kedungadem	258.300,00	72.105,60	60.000.000,00	59972500	5113,28	363018,88
750	SMP NEGERI 1 KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	-	2.497.414,48	369.000.000,00	369000000	51285,87	2548700,35
751	SMP NEGERI 2 KEPOHBARU	Kec. Kepohbaru	2.895.787,62	50.391,46	276.400.000,00	279295000	45921,66	97100,74

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SILPA 2017	SALDO BELUM TERCATAT	PENDAPATAN	BELANJA	PENDAPATAN BUNGA	TOTAL
752	SMP NEGERI 1 MALO	Kec. Malo	18.930.525,00	4.453.476,73	464.600.000,00	486723230	166955,49	1427727,22
753	SMP NEGERI 1 MARGOMULYO	Kec. Margomulyo	4.200.000,00	2.496.177,47	524.000.000,00	517000000	151298,26	13847475,73
754	SMP NEGERI 1 NGAMBON	Kec. Ngambon	653.800,00	5.480.169,77	733.600.000,00	734065307	173662,82	5842325,59
755	SMP NEGERI 1 NGASEM	Kec. Ngasem	9.348.004,57	380.879,93	756.800.000,00	766032182	235131,27	731833,77
756	SMP NEGERI 1 NGRAHO	Kec. Ngraho	55.903.500,00	2.554.829,90	739.000.000,00	794103500	398642,95	3753472,85
757	SMP NEGERI SATU ATAP SUGIHWARAS 3 NGRAHO	Kec. Ngraho	-	263.346,94	60.000.000,00	60000000	5170,51	268517,45
758	SMP NEGERI 1 PADANGAN	Kec. Padangan	14.839.500,00	1.769.517,50	956.200.000,00	963860500	272188,36	9220705,86
759	SMP NEGERI 2 PADANGAN	Kec. Padangan	32.797.265,95	333.671,61	431.400.000,00	442154469	102037,18	22478505,74
760	SMP NEGERI 1 PURWOSARI	Kec. Purwosari	2.391.867,00	3.274.604,33	859.600.000,00	853550147	221295,07	11937619,36
761	SMP NEGERI 2 PURWOSARI	Kec. Purwosari	400.000,00	827.606,05	196.400.000,00	192000000	31042,11	5658648,16
762	SMP NEGERI 1 SEKAR	Kec. Sekar	10.333.375,00	2.850.442,78	591.400.000,00	601280059	130028,44	3433787,22
763	SMP NEGERI SATU ATAP BOBOL SEKAR	Kec. Sekar	-	411.749,23	60.000.000,00	60000000	3984,41	415733,64
764	SMP NEGERI 1 SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	38.258.050,00	4.870.901,04	805.000.000,00	819089850	360321,1	29399422,14
765	SMP NEGERI 2 SUGIHWARAS	Kec. Sugihwaras	371.317,09	40.515,02	214.000.000,00	212620000	20326,3	1812158,41
766	SMP NEGERI 1 SUKOSEWU	Kec. Sukosewu	5.994.500,00	5.338.435,06	424.800.000,00	423594500	82338,51	12620773,57
767	SMP NEGERI 1 SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	5.576.226,00	1.063.624,61	846.800.000,00	839970000	208352,72	13678203,33
768	SMP NEGERI 2 SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	9.162.700,00	3.270.542,79	430.600.000,00	439256950	102762,73	3879055,52
769	SMP NEGERI 3 SUMBERREJO	Kec. Sumberrejo	22.027.464,56	854.701,30	151.200.000,00	173502600	87923,38	667489,24
770	SMP NEGERI 1 TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	2.157.627,00	5.998.846,59	735.000.000,00	737150000	157595,6	6164069,19
771	SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	7.000.000,00	3.288.729,92	188.600.000,00	188000000	45122,54	10933852,46
772	SMP NEGERI SATU ATAP TURI TAMBAKREJO	Kec. Tambakrejo	-	2.514.150,50	60.000.000,00	60000000	18328,38	2532478,88
773	SMP NEGERI 1 TEMAYANG	Kec. Temayang	-	375.688,76	677.200.000,00	677200000	77255,19	452943,95
774	SMP NEGERI SATU ATAP SOKO TEMAYANG	Kec. Temayang	600.000,00	424.395,10	63.000.000,00	63600000	5279,86	429674,96
775	SMP NEGERI 1 TRUCUK	Kec. Trucuk	14.045.977,69	-	559.000.000,00	563962807,7	98668,4	9181838,4
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.674.869.749,65</b>	<b>261.618.979,62</b>	<b>90.432.360.000,00</b>	<b>91.725.955.065,36</b>	<b>21.900.593,56</b>	<b>1.664.794.257,47</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019

BUPATI BOJONEGORO

DR. HJ. ANNA MU'AWANAH



## Lampiran C1 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**REKAPITULASI SALDO ASET TETAP TANAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	107.586.418.624,00	3,00	2.260.214.500,00	105.326.204.127,00
2	Dinas Kesehatan	29.436.482.551,00	-	-	29.436.482.551,00
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	2.445.000.000,00	-	-	2.445.000.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	3.644.000.000,00	1.444.669.092.000,00	-	1.448.313.092.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber	65.602.158.100,00	-	-	65.602.158.100,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	843.500.000,00	-	-	843.500.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	780.500.000,00	-	-	780.500.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana	590.700.000,00	-	-	590.700.000,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	980.000.000,00	-	-	980.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	668.250.000,00	-	-	668.250.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	15.995.889.000,00	3.515.200.000,00	-	19.511.089.000,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
19	Dinas Perhubungan	6.295.000.000,00	-	-	6.295.000.000,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22.950.000,00	-	-	22.950.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	580.000.000,00	-	-	580.000.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.992.446.250,00	-	-	20.992.446.250,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	100.295.012,00	-	-	100.295.012,00
27	Dinas Pertanian	39.131.830.000,00	-	-	39.131.830.000,00
28	Dinas Perdagangan	1.429.000.000,00	-	-	1.429.000.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga	380.000.000,00	-	-	380.000.000,00
30	Sekretariat Daerah	79.980.640.411,00	725.423.250,00	-	80.706.063.661,00
31	Sekretariat DPRD	556.400.000,00	-	-	556.400.000,00
32	Kecamatan Bojonegoro	111.204.352.074,00	1,00	3.515.200.000,00	107.689.152.075,00
33	Kecamatan Kapas	375.296.000,00	-	-	375.296.000,00
34	Kecamatan Balen	361.620.000,00	-	-	361.620.000,00
35	Kecamatan Sumberrejo	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00
36	Kecamatan Kanor	209.140.000,00	-	-	209.140.000,00
37	Kecamatan Baureno	699.800.000,00	-	-	699.800.000,00
38	Kecamatan Sugihwaras	31.428.000,00	-	-	31.428.000,00
39	Kecamatan Kepohbaru	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
40	Kecamatan Kedungadem	224.300.000,00	-	-	224.300.000,00

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
41	Kecamatan Sukosewu	25.680.000,00	-	-	25.680.000,00
42	Kecamatan Trucuk	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
43	Kecamatan Malo	107.500.000,00	-	-	107.500.000,00
44	Kecamatan Kalitidu	1.378.758.000,00	-	-	1.378.758.000,00
45	Kecamatan Dander	50.500.000,00	-	-	50.500.000,00
46	Kecamatan Padangan	1.214.750.000,00	-	-	1.214.750.000,00
47	Kecamatan Purwosari	410.000.000,00	-	-	410.000.000,00
48	Kecamatan Kasiman	229.219.550,00	-	-	229.219.550,00
49	Kecamatan Kedewan	61.953.000,00	-	11.750.000,00	50.203.000,00
50	Kecamatan Ngasem	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
51	Kecamatan Ngambon	-	-	-	-
52	Kecamatan Tambakrejo	77.250.000,00	-	-	77.250.000,00
53	Kecamatan Ngraho	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
54	Kecamatan Margomulyo	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
55	Kecamatan Temayang	-	-	-	-
56	Kecamatan Bubulan	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
57	Kecamatan Gondang	360.200.000,00	-	49.980.000,00	310.220.000,00
58	Kecamatan Sekar	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
59	Kecamatan Gayam	2.872.000.000,00	-	-	2.872.000.000,00
60	Inspektorat	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
61	Badan Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-
62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.208.464.339,00	13.573.830.004,00	130.020.000,00	107.652.274.343,00
63	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
64	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
	<b>JUMLAH ASET TANAH</b>	<b>597.008.670.911,00</b>	<b>1.462.483.545.258,00</b>	<b>5.967.164.500,00</b>	<b>2.053.525.051.669,00</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

## Lampiran C2 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH


Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**REKAPITULASI SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	124.878.000.536,02	19.336.556.431,10	8.909.509.959,40	<b>135.305.047.007,72</b>
2	Dinas Kesehatan	86.236.977.935,80	21.457.870.395,70	2.092.729.693,50	<b>105.602.118.638,00</b>
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	184.491.134.400,00	42.355.362.434,00	429.140.157,00	<b>226.417.356.677,00</b>
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	50.825.034.863,86	19.278.387.619,00	364.737.850,00	<b>69.738.684.632,86</b>
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	60.484.538.765,00	26.569.418.431,00	98.444.310,00	<b>86.955.512.886,00</b>
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	33.675.626.950,03	1.509.907.000,00	101.961.700,03	<b>35.083.572.250,00</b>
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	30.127.323.950,00	257.159.500,00	96.160.000,00	<b>30.288.323.450,00</b>
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.761.930.245,00	10.575.361.550,00	8.552.158.150,00	<b>8.785.133.645,00</b>
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.643.800,00	31.750.000,00	6.275.000,00	<b>2.276.118.800,00</b>
10	Satuan Polisi Pamong Praja	3.724.112.570,00	415.625.000,00	119.073.400,00	<b>4.020.664.170,00</b>
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.140.971.298,00	2.833.964.900,00	99.539.003,00	<b>6.875.397.195,00</b>
12	Dinas Pemadam Kebakaran	36.397.045.600,00	3.497.919.875,00	396.000,00	<b>39.894.569.475,00</b>
13	Dinas Sosial	1.938.798.466,00	81.100.000,00	33.115.000,00	<b>1.986.783.466,00</b>
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.779.850.280,00	980.600.000,00	416.014.550,00	<b>9.344.435.730,00</b>
15	Dinas Ketahanan Pangan	1.356.905.161,00	-	7.330.000,00	<b>1.349.575.161,00</b>
16	Dinas Lingkungan Hidup	16.561.663.896,00	941.328.802,00	237.812.802,00	<b>17.265.179.896,00</b>
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.871.323.150,00	536.514.822,00	68.067.200,00	<b>6.339.770.772,00</b>
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.141.677.505,00	439.290.795,00	379.830.000,00	<b>2.201.138.300,00</b>
19	Dinas Perhubungan	7.294.125.940,00	1.236.688.400,00	53.858.550,00	<b>8.476.955.790,00</b>
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.023.825.733,00	1.527.056.500,00	2.978.224.450,00	<b>14.572.657.783,00</b>
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.263.131.355,00	149.142.181,00	33.852.000,00	<b>1.378.421.536,00</b>
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.734.734.472,00	272.310.000,00	9.988.000,00	<b>1.997.056.472,00</b>
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	776.402.985,00	679.412.800,00	16.268.700,00	<b>1.439.547.085,00</b>
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.266.739.347,00	826.684.000,00	74.980.000,00	<b>3.018.443.347,00</b>
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.877.660.717,00	380.485.000,00	265.449.803,00	<b>1.992.695.914,00</b>
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	5.243.847.383,00	575.227.300,00	113.631.000,00	<b>5.705.443.683,00</b>
27	Dinas Pertanian	26.979.161.954,00	101.369.809,00	160.520.957,00	<b>26.920.010.806,00</b>
28	Dinas Perdagangan	5.638.971.013,00	1.221.346.297,00	103.895.000,00	<b>6.756.422.310,00</b>

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.264.048.312,00	767.407.950,00	33.846.000,00	2.997.610.262,00
30	Sekretariat Daerah	38.690.335.277,00	27.296.559.415,00	3.160.057.230,00	62.826.837.462,00
31	Sekretariat DPRD	7.183.474.619,20	907.972.600,00	1.203.884.250,20	6.887.562.969,00
32	Kecamatan Bojonegoro	3.218.320.180,00	58.380.153,00	198.152.000,00	3.078.548.333,00
33	Kecamatan Kapas	1.795.198.800,00	31.500.000,00	15.590.000,00	1.811.108.800,00
34	Kecamatan Balen	1.866.748.100,00	47.700.000,00	26.861.500,00	1.887.586.600,00
35	Kecamatan Sumberrejo	1.870.246.855,00	-	11.357.025,00	1.858.889.830,00
36	Kecamatan Kanor	1.942.629.880,00	-	18.447.000,00	1.924.182.880,00
37	Kecamatan Baureno	1.840.722.080,00	74.850.000,00	3.466.500,00	1.912.105.580,00
38	Kecamatan Sugihwaras	1.542.552.080,00	6.245.000,00	12.201.500,00	1.536.595.580,00
39	Kecamatan Kepohbaru	2.053.967.300,00	30.870.000,00	17.431.500,00	2.067.405.800,00
40	Kecamatan Kedungadem	1.905.244.205,00	76.900.000,00	34.246.500,00	1.947.897.705,00
41	Kecamatan Sukosewu	1.619.864.140,00	35.500.000,50	40.540.346,50	1.614.823.794,00
42	Kecamatan Trucuk	1.361.787.837,00	9.400.000,00	20.615.000,00	1.350.572.837,00
43	Kecamatan Malo	1.545.732.350,00	-	18.546.500,00	1.527.185.850,00
44	Kecamatan Kalitidu	1.551.818.100,00	7.350.000,00	8.601.500,00	1.550.566.600,00
45	Kecamatan Dander	1.428.378.080,00	5.900.000,00	4.409.500,00	1.429.868.580,00
46	Kecamatan Padangan	1.531.076.680,00	9.000.000,00	15.970.000,00	1.524.106.680,00
47	Kecamatan Purwosari	1.395.994.500,00	-	7.631.500,00	1.388.363.000,00
48	Kecamatan Kasiman	1.290.646.500,00	10.000.000,00	18.457.000,00	1.282.189.500,00
49	Kecamatan Kedewan	1.173.923.211,00	-	9.508.000,00	1.164.415.211,00
50	Kecamatan Ngasem	1.568.979.080,00	54.453.000,00	1.401.500,00	1.622.030.580,00
51	Kecamatan Ngambon	912.138.280,00	-	17.335.500,00	894.802.780,00
52	Kecamatan Tambakrejo	1.423.424.600,00	-	13.686.500,00	1.409.738.100,00
53	Kecamatan Ngraho	1.547.962.100,00	-	47.906.500,00	1.500.055.600,00
54	Kecamatan Margomulyo	1.109.860.450,00	7.350.000,00	12.731.500,00	1.104.478.950,00
55	Kecamatan Temayang	1.229.719.380,00	-	9.335.000,00	1.220.384.380,00
56	Kecamatan Bubulan	911.398.900,00	12.000.000,00	7.730.000,00	915.668.900,00
57	Kecamatan Gondang	1.114.668.600,00	32.152.520,00	10.317.100,00	1.136.504.020,00
58	Kecamatan Sekar	1.031.022.005,00	2.150.000,00	20.640.000,00	1.012.532.005,00
59	Kecamatan Gayam	1.469.917.340,00	13.100.000,00	2.810.000,00	1.480.207.340,00
60	Inspektorat	3.541.328.339,00	9.400.000,00	55.241.400,00	3.495.486.939,00
61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.642.354.950,00	49.472.500,00	207.650.000,00	2.484.177.450,00
62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.138.626.570,00	4.283.370.750,00	6.550.859.140,00	10.871.138.180,00
63	Badan Pendapatan Daerah	5.646.399.305,00	381.540.000,00	74.870.600,00	5.953.068.705,00
64	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.610.216.213,00	2.384.017.325,00	46.119.250,00	3.948.114.288,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>847.712.885.468,91</b>	<b>194.672.381.055,30</b>	<b>37.781.417.576,63</b>	<b>1.004.603.848.947,58</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

## Lampiran C3 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH


Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**REKAPITULASI SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	620.908.609.804,72	264.318.879.009,43	8.584.509.761,04	<b>876.642.979.053,11</b>
2	Dinas Kesehatan	152.485.222.560,00	20.169.966.988,39	100.000.000,00	<b>172.555.189.548,39</b>
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	18.684.988.348,00	176.238.413.092,00	17.702.859.973,00	<b>177.220.541.467,00</b>
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	10.670.776.150,00	-	3.596.400.000,00	<b>7.074.376.150,00</b>
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	14.544.446.682,00	86.431.000,00	75.000.000,00	<b>14.555.877.682,00</b>
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.291.763.125,00	-	-	<b>4.291.763.125,00</b>
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	2.402.306.000,00	1.575.213.182,12	-	<b>3.977.519.182,12</b>
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	673.728.233.049,00	161.417.719.000,39	707.440.276.993,83	<b>127.705.675.055,56</b>
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	576.060.000,00	-	-	<b>576.060.000,00</b>
10	Satuan Polisi Pamong Praja	139.602.000,00	-	-	<b>139.602.000,00</b>
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00	-	-	<b>300.000.000,00</b>
12	Dinas Pemadam Kebakaran	5.573.312.000,00	165.534.000,00	-	<b>5.738.846.000,00</b>
13	Dinas Sosial	1.178.553.000,00	534.649.987,50	-	<b>1.713.202.987,50</b>
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.845.792.159,00	2.032.242.499,00	-	<b>9.878.034.658,00</b>
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	<b>-</b>
16	Dinas Lingkungan Hidup	14.380.472.654,00	646.133.344,00	-	<b>15.026.605.998,00</b>
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.152.706.100,00	-	-	<b>2.152.706.100,00</b>
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	279.694.000,00	2.258.410.836,00	243.700.000,00	<b>2.294.404.836,00</b>
19	Dinas Perhubungan	17.736.840.040,00	1.238.251.207,00	427.483.900,00	<b>18.547.607.347,00</b>
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	341.543.500,00	-	-	<b>341.543.500,00</b>
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	728.512.125,00	2.347.941.000,00	58.769.657,00	<b>3.017.683.468,00</b>
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	<b>-</b>
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	647.313.875,00	39.663.592.716,00	61.268.002,00	<b>40.249.638.589,00</b>
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.525.422.256,00	4.649.194.465,47	-	<b>22.174.616.721,47</b>
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	596.246.423,00	-	-	<b>596.246.423,00</b>
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.243.846.150,00	839.471.783,06	-	<b>10.083.317.933,06</b>
27	Dinas Pertanian	30.311.675.737,00	437.743.400,00	-	<b>30.749.419.137,00</b>
28	Dinas Perdagangan	46.402.587.293,00	35.501.184.239,30	-	<b>81.903.771.532,30</b>
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.888.416.600,00	14.024.859.909,74	16.558.969,90	<b>15.896.717.539,84</b>

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
31	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
32	Sekretariat Daerah	4.044.009.000,00	74.436.871.240,78	5.427.560.845,90	<b>73.053.319.394,88</b>
33	Sekretariat DPRD	2.074.105.500,00	-	-	<b>2.074.105.500,00</b>
34	Kecamatan Bojonegoro	5.350.636.600,00	1.725.727.595,06	-	<b>7.076.364.195,06</b>
35	Kecamatan Kapas	2.228.508.400,00	-	-	<b>2.228.508.400,00</b>
36	Kecamatan Balen	1.079.834.000,00	26.000.000,00	-	<b>1.105.834.000,00</b>
37	Kecamatan Sumberrejo	2.169.301.000,00	56.250.000,00	-	<b>2.225.551.000,00</b>
38	Kecamatan Kanor	629.767.540,00	1.014.773.000,00	-	<b>1.644.540.540,00</b>
39	Kecamatan Baureno	561.599.000,00	-	-	<b>561.599.000,00</b>
40	Kecamatan Sugihwaras	1.389.684.000,00	693.452.250,84	-	<b>2.083.136.250,84</b>
41	Kecamatan Kepohbaru	1.982.437.360,00	-	-	<b>1.982.437.360,00</b>
42	Kecamatan Kedungadem	1.142.413.500,00	49.450.000,00	-	<b>1.191.863.500,00</b>
43	Kecamatan Sukosewu	2.537.252.000,00	-	160.000.000,00	<b>2.377.252.000,00</b>
44	Kecamatan Trucuk	943.220.880,00	-	-	<b>943.220.880,00</b>
45	Kecamatan Malo	455.500.000,00	-	-	<b>455.500.000,00</b>
46	Kecamatan Kalitidu	1.807.055.700,00	-	-	<b>1.807.055.700,00</b>
47	Kecamatan Dander	995.475.500,00	45.000.000,00	-	<b>1.040.475.500,00</b>
48	Kecamatan Padangan	391.501.500,00	-	-	<b>391.501.500,00</b>
49	Kecamatan Purwosari	1.297.078.000,00	-	-	<b>1.297.078.000,00</b>
50	Kecamatan Kasiman	329.188.000,00	-	-	<b>329.188.000,00</b>
51	Kecamatan Kedewan	376.000.000,00	-	-	<b>376.000.000,00</b>
52	Kecamatan Ngasem	2.132.501.000,00	-	-	<b>2.132.501.000,00</b>
53	Kecamatan Ngambon	1.016.880.000,00	-	-	<b>1.016.880.000,00</b>
54	Kecamatan Tambakrejo	356.907.000,00	406.845.500,00	-	<b>763.752.500,00</b>
55	Kecamatan Ngraho	570.577.000,00	1.853.538.500,00	-	<b>2.424.115.500,00</b>
56	Kecamatan Margomulyo	397.069.000,00	-	-	<b>397.069.000,00</b>
57	Kecamatan Temayang	321.679.000,00	-	-	<b>321.679.000,00</b>
58	Kecamatan Bubulan	578.779.000,00	-	-	<b>578.779.000,00</b>
59	Kecamatan Gondang	362.485.000,00	-	-	<b>362.485.000,00</b>
60	Kecamatan Sekar	285.730.120,00	-	-	<b>285.730.120,00</b>
61	Kecamatan Gayam	2.413.638.500,00	7.345.232.000,00	-	<b>9.758.870.500,00</b>
62	Inspektorat	601.977.000,00	-	-	<b>601.977.000,00</b>
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.327.126.426,00	2.939.169.650,00	7.538.055.475,00	<b>11.728.240.601,00</b>
65	Badan Pendapatan Daerah	213.350.000,00	-	-	<b>213.350.000,00</b>
66	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.521.486.250,00	38.545.087.200,00	5.474.222.100,00	<b>34.592.351.350,00</b>
	<b>JUMLAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1.714.449.694.406,72</b>	<b>857.283.228.596,08</b>	<b>756.906.665.677,67</b>	<b>1.814.826.257.325,13</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**REKAPITULASI SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.580.875.827,00	3.429.334.879,92	358.682.089,15	5.651.528.617,77
2	Dinas Kesehatan	8.306.490.034,00	237.766.656,00	-	8.544.256.690,00
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	6.097.333.816,00	20.163.805.256,00	2.405.000,00	26.258.734.072,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	1.770.308.743,00	-	-	1.770.308.743,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	1.693.291.559,00	-	-	1.693.291.559,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.661.750.040.958,00	349.907.838.260,83	21.064.172.487,80	1.990.593.706.731,03
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	98.581.067.558,00	10.235.811.773,03	618.392.000,00	108.198.487.331,03
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	293.239.569.617,21	95.062.943.134,57	58.324.052.031,57	329.978.460.720,21
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.252.850,00	-	-	29.252.850,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.452.402.218,00	1.725.292.082,00	-	11.177.694.300,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	2.850.000,00	99.825.000,00	-	102.675.000,00
13	Dinas Sosial	106.427.740,00	-	5.180.737,50	101.247.002,50
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	155.663.000,00	60.890.626,00	-	216.553.626,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	4.224.025.617,00	79.228.492,00	517.969.420,00	3.785.284.689,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.279.600,00	-	-	138.279.600,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.338.600,00	89.197.649,00	-	99.536.249,00
19	Dinas Perhubungan	611.694.020,00	69.582.500,00	-	681.276.520,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	330.362.400,00	-	-	330.362.400,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	13.858.200,00	58.769.657,00	-	72.627.857,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	222.605.000,00	192.696.878,96	-	415.301.878,96
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.021.443.000,00	1.147.147.971,00	-	2.168.590.971,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.212.875.565,00	1.788.938.216,94	-	4.001.813.781,94
27	Dinas Pertanian	704.087.795,00	-	-	704.087.795,00
28	Dinas Perdagangan	35.220.000,00	2.014.199.999,70	-	2.049.419.999,70
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.115.280,00	693.322.735,16	-	738.438.015,16
30	Sekretariat Daerah	33.572.632.260,00	32.511.027.242,12	33.235.118.600,00	32.848.540.902,12
31	Sekretariat DPRD	101.542.900,00	-	-	101.542.900,00
32	Kecamatan Bojonegoro	20.935.800,00	2.970.000,00	-	23.905.800,00



No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
33	Kecamatan Kapas	1.712.600,00	-	-	1.712.600,00
34	Kecamatan Balen	58.050.000,00	10.000.000,00	-	68.050.000,00
35	Kecamatan Sumberrejo	62.871.350,00	-	-	62.871.350,00
36	Kecamatan Kanor	10.395.100,00	-	-	10.395.100,00
37	Kecamatan Baureno	40.678.600,00	1.809.000,00	-	42.487.600,00
38	Kecamatan Sugihwaras	5.770.350,00	-	-	5.770.350,00
39	Kecamatan Kepohbaru	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
40	Kecamatan Kedungadem	19.807.500,00	-	-	19.807.500,00
41	Kecamatan Sukosewu	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00
42	Kecamatan Trucuk	17.234.500,00	-	-	17.234.500,00
43	Kecamatan Malo	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
44	Kecamatan Kalitidu	10.460.500,00	-	-	10.460.500,00
45	Kecamatan Dander	48.972.600,00	-	-	48.972.600,00
46	Kecamatan Padangan	9.050.000,00	-	-	9.050.000,00
47	Kecamatan Purwosari	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00
48	Kecamatan Kasiman	5.024.050,00	-	-	5.024.050,00
49	Kecamatan Kedewan	10.542.600,00	-	-	10.542.600,00
50	Kecamatan Ngasem	15.875.000,00	-	-	15.875.000,00
51	Kecamatan Ngambon	2.371.350,00	-	-	2.371.350,00
52	Kecamatan Tambakrejo	25.190.000,00	-	-	25.190.000,00
53	Kecamatan Ngraho	13.670.500,00	-	-	13.670.500,00
54	Kecamatan Margomulyo	3.712.600,00	-	-	3.712.600,00
55	Kecamatan Temayang	7.112.600,00	-	-	7.112.600,00
56	Kecamatan Bubulan	6.022.600,00	-	-	6.022.600,00
57	Kecamatan Gondang	8.550.000,00	-	-	8.550.000,00
58	Kecamatan Sekar	2.521.000,00	-	-	2.521.000,00
59	Kecamatan Gayam	62.700.000,00	-	-	62.700.000,00
60	Inspektorat	2.450.000,00	-	-	2.450.000,00
61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	266.322.040,00	86.648.350,00	-	352.970.390,00
62	Badan Pendapatan Daerah	47.723.500,00	-	-	47.723.500,00
63	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	3.263.280.600,00	-	3.263.280.600,00
	<b>JUMLAH ASET JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>2.127.819.005.897,21</b>	<b>522.932.326.960,23</b>	<b>114.115.610.891,02</b>	<b>2.536.635.721.966,42</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019

BUPATI BOJONEGORO

  
DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**REKAPITULASI SALDO ASET TETAP LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SOPD	Saldo awal (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	62.450.279.655,99	12.420.991.505,12	342.354.500,00	<b>74.528.916.661,11</b>
2	Dinas Kesehatan	387.096.317,00	-	-	<b>387.096.317,00</b>
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	73.408.930,00	3.630.090.124,00	3.616.641.124,00	<b>86.857.930,00</b>
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo	1.198.500,00	505.540.862,00	505.540.862,00	<b>1.198.500,00</b>
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan	1.672.025,00	142.756.000,00	142.756.000,00	<b>1.672.025,00</b>
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karva	1.064.317.800,00	267.407.000,00	-	<b>1.331.724.800,00</b>
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.715.500,00	-	-	<b>12.715.500,00</b>
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.300.000,00	-	-	<b>187.300.000,00</b>
9	Dinas Lingkungan Hidup	610.923.969,80	-	-	<b>610.923.969,80</b>
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.785.000,00	-	-	<b>14.785.000,00</b>
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	289.975.000,00	-	<b>289.975.000,00</b>
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	588.458.000,00	260.676.365,00	-	<b>849.134.365,00</b>
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.879.710.143,00	129.862.000,00	-	<b>2.009.572.143,00</b>
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	7.000.000,00	-	-	<b>7.000.000,00</b>
15	Sekretariat Daerah	193.599.900,00	-	-	<b>193.599.900,00</b>
16	Sekretariat DPRD	65.126.200,00	-	-	<b>65.126.200,00</b>
17	Kecamatan Padangan	4.000.000,00	-	-	<b>4.000.000,00</b>
18	Kecamatan Temayang	4.000.000,00	-	-	<b>4.000.000,00</b>
19	Inspektorat	7.982.700,00	-	-	<b>7.982.700,00</b>
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	625.000,00	-	-	<b>625.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>67.554.199.640,79</b>	<b>17.647.298.856,12</b>	<b>4.607.292.486,00</b>	<b>80.594.206.010,91</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019

BUPATI BOJONEGORO



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Lampiran D : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DAFTAR UTANG JANGKA PENDEK TAHUN 2018**

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Jasa Pelayanan (Rp)	Utang Usaha (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	-	56.904.177,00	-	56.904.177,00	-	56.904.177,00
2	Dinas Kesehatan	-	7.566.246.197,02	291.454.073,00	-	7.857.700.270,02	-	7.857.700.270,02
3	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	36.418.938,00	12.800.086.007,00	8.925.792.048,00	-	21.762.296.993,00	-	21.762.296.993,00
4	RSUD Kelas D Sumberrejo	-	1.631.020.354,00	30.072.900,00	-	1.661.093.254,00	-	1.661.093.254,00
5	RSUD Kelas D Padangan	-	1.458.228.775,00	188.815.193,00	-	1.647.043.968,00	-	1.647.043.968,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-	-	29.605.119.058,00	29.605.119.058,00	-	29.605.119.058,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	-	-	8.795.255,00	-	8.795.255,00	-	8.795.255,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	-	-	9.715.069.353,08	29.853.379.073,58	39.568.448.426,66	-	39.568.448.426,66
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2.932.531,00	-	2.932.531,00	-	2.932.531,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	5.821.902,00	-	5.821.902,00	-	5.821.902,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Jasa Pelayanan (Rp)	Utang Usaha (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	TOTAL (Rp)
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	352.700,00	-	352.700,00	-	352.700,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	10.515.941,00	-	10.515.941,00	-	10.515.941,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1.587.800,00	-	1.587.800,00	-	1.587.800,00
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	304.445.075,00	304.445.075,00
20	Dinas Komunikasi dan	-	-	12.615.572,00	-	12.615.572,00	-	12.615.572,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha	-	-	3.487.784,00	-	3.487.784,00	-	3.487.784,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	1.791.666,67	1.791.666,67
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	17.425.333,00	-	17.425.333,00	-	17.425.333,00
24	Dinas Kebudayaan dan	-	-	1.535.000,00	-	1.535.000,00	-	1.535.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	2.042.450,00	-	2.042.450,00	-	2.042.450,00
27	Dinas Pertanian	-	-	7.883.382,00	-	7.883.382,00	-	7.883.382,00
28	Dinas Perdagangan	418.200,00	-	155.179.152,00	-	155.597.352,00	-	155.597.352,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	-	11.502.346,00	-	11.502.346,00	-	11.502.346,00
30	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
31	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-
32	Sekretariat Daerah	-	-	1.329.050,00	-	1.329.050,00	-	1.329.050,00
33	Sekretariat DPRD	-	-	6.875.714,00	-	6.875.714,00	-	6.875.714,00

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Jasa Pelayanan (Rp)	Utang Usaha (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	TOTAL (Rp)
38	Kecamatan Kanor	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Baureno	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Sugihwaras	-	-	82.500,00	-	82.500,00	-	82.500,00
41	Kecamatan Kepohbaru	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Kedungadem	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Sukosewu	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Trucuk	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Malo	-	-	501.600,00	-	501.600,00	-	501.600,00
46	Kecamatan Kalitidu	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Dander	-	-	4.820.200,00	-	4.820.200,00	-	4.820.200,00
48	Kecamatan Padangan	-	-	455.750,00	-	455.750,00	-	455.750,00
49	Kecamatan Purwosari	-	-	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Kasiman	-	-	846.955,00	-	846.955,00	-	846.955,00
51	Kecamatan Kedewan	-	-	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Ngasem	-	-	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Ngambon	-	-	1.710.348,00	-	1.710.348,00	-	1.710.348,00
54	Kecamatan Tambakrejo	-	-	-	-	-	-	-
55	Kecamatan Ngraho	-	-	1.902.888,00	-	1.902.888,00	-	1.902.888,00
56	Kecamatan Margomulyo	-	-	-	-	-	-	-
57	Kecamatan Temayang	-	-	189.724,00	-	189.724,00	-	189.724,00
58	Kecamatan Bubulan	-	-	-	-	-	-	-
59	Kecamatan Gondang	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Jasa Pelayanan (Rp)	Utang Usaha (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	TOTAL (Rp)
64	BPKAD	370.800,00	-	815.000,00	-	1.185.800,00	106.667.500,00	107.853.300,00
65	PPKD	-	-	-	-	-	-	-
66	Badan Pendapatan Daerah	2.151.041.477,00	-	-	-	2.151.041.477,00	995.428.077,00	3.146.469.554,00
67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	240.000,00	-	240.000,00	-	240.000,00
	<b>JUMLAH</b>	2.190.523.715,00	23.455.581.333,02	19.479.563.801,08	59.458.498.131,58	104.584.166.980,68	1.408.332.318,67	105.992.499.299,35

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DAFTAR PAKET PEKERJAAN HUTANG BELANJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG</b>								
<b>16.03</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong</b>	<b>4.536.479.562,00</b>					<b>112.388.700,00</b>	<b>4.386.627.961,00</b>	
<b>5.2.3.67.03</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
	1 Pembangunan Drainase Jalan Baureno - Kepohbaru Ds. Baureno Kecamatan Baureno (P-APBD)	198.430.000,00	CV. GRAHANATA CIPTA BOJONEGORO	Jl. KH. Rosyid No.78 Ngumpakdalem, Dander	HERI CAHYONO PUTRA, ST	100,00	-	198.430.000,00	
	2 Pembangunan Saluran Drainase Jln Sumberrejo - Kanor Ds Sumuragung RT. 03 RW. 02 Kecamatan Sumberrejo (P-APBD)	194.492.000,00	CV. PUTRA MANDIRI	Ds. Panjang RT. 09 RW. 04 Kec. Kedungadem, Bojonegoro	ABDUL MOHAMMAD SIDIG	100,00	-	194.492.000,00	
	3 Pembangunan Drainase Jalan Balen - Sugihwaras Ds. Mayangkawis Kecamatan Balen (P-APBD)	199.417.000,00	CV. HAN'S KARYA PERSADA	Ds. Duyungan RT. 04 RW. 03 Kec. Sukosewu, Bojonegoro	PURHANTO	100,00	-	199.417.000,00	
	4 Pembangunan Saluran Drainase Jln Selogabus - Malo Ds Pagerwesi II Kecamatan Trucuk (P-APBD)	184.497.000,00	CV. KIRUN TANGGUH	Ds. Tejo RT. 06 RW. 02 Kec. Kanor, Bojonegoro	YUNICA CRISNADEWI ASHARY, S.Pd	100,00	-	184.497.000,00	
	5 Pembangunan Drainase Jalan Balen -Sugihwaras Ds. Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras (P-APBD)	186.638.000,00	CV. FAMILY	Mindi RT. 015 RW. 003 Ds. Sugihwaras, Bojonegoro	M. YASIN, S.Sos	100,00	-	186.638.000,00	
	6 Pembangunan Saluran Drainase Jln Jono - Sugihwaras Ds Panemon Kecamatan Sugihwaras (P-APBD)	184.824.000,00	CV. MERDEKA	Dsn. Krajan RT. 02 RW. 01 Ds. Sugihwaras, Bojonegoro	M. ARIS WAHYUDI	100,00	-	184.824.000,00	
	7 Pembangunan Saluran Drainase Jln Sugihwaras - Kedungadem Ds Trate Kecamatan Sugihwaras (P-APBD)	184.326.000,00	CV. MULYA UTAMA	Ds. Wedoro RT. 04 RW. 01 Kec. Sugihwaras, Bojonegoro	HERMAN SUSANTO	100,00	-	184.326.000,00	
	8 Pembangunan Saluran Drainase Jln Kalitidu - Ngasem Ds Jelu Kecamatan Ngasem (P-APBD)	176.820.800,00	CV. NUSANTARA UTAMA	Ds. Jipo RT. 06 RW. 02 Kec. Kepohbaru Bojonegoro	AMROZI, SH	100,00	-	176.820.800,00	
	9 Pembangunan Saluran Drainase Jln Kumpulrejo - Bendo Ds Kumpulrejo Kecamatan Kapas (P-APBD)	188.417.000,00	CV. DUTA AMONG WIRA	Jl. Brigjend Sutoyo No. 17 Bojonegoro	AFRI LINENDRA NURICHO, ST	100,00	-	188.417.000,00	
	10 Pembangunan Saluran Drainase Jln Kalianyar - Ngumpakdalem Ds Kalianyar II Kecamatan Kapas (P-APBD)	185.302.000,00	CV. KENCANA PUTRA	Ds. Tulungagung RT. 08 RW. 01 Kec. Baureno, Bojonegoro	MUHAMMAD YUSUF ARIFUDDIN	100,00	-	185.302.000,00	
	11 Pembangunan Saluran Drainase Jln. Nglingga - Kedungadem Ds. Sidorejo Kecamatan Kedungadem (P-APBD)	180.764.100,00	CV. KARYA MANDIRI	Jalan Letda Suraji No. 120 Bojonegoro	MUHADI	100,00	-	180.764.100,00	
	12 Pembangunan Saluran Drainase Jln. Nglingga - Kedungadem Ds. Mlideg Kecamatan Kedungadem (P-APBD) *	187.364.000,00	CV. SIDOREJO MAKMUR	Ds. Kedungadem RT. 05 RW. 01 Kec. Kedungadem, Bojonegoro	GUNTUR WIBOWO	100,00	-	187.364.000,00	
	13 Pembangunan Saluran Drainase Jln Kedungadem - Kesongo Ds Kesongo Kecamatan Kedungadem (P-APBD)	149.438.000,00	CV. SIDOREJO MAKMUR	Ds. Kedungadem RT. 05 RW. 01 Kec. Kedungadem, Bojonegoro	GUNTUR WIBOWO	100,00	-	149.438.000,00	
	14 Pembangunan Saluran Drainase Jln Kedungadem - Kesongo Ds Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem (P-APBD)	188.831.000,00	CV. SIDOREJO MAKMUR	Ds. Kedungadem RT. 05 RW. 01 Kec. Kedungadem, Bojonegoro	GUNTUR WIBOWO	100,00	-	188.831.000,00	
	15 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Veteran Kec. Bojonegoro	374.629.012,00	CV. PAMOR RIZKI	Jl. Kapten Sumitro Gg. Andong Sari No. 124, Bojonegoro	MURTIAH	90,00	112.388.700,00	224.777.411,00	
	16 Pembangunan Saluran Drainase Jln. Kapas - Sampang Ds. Sukosewu Kecamatan Sukosewu (P-APBD)	184.298.000,00	CV. LANGGENG PERKASA	Jl. Dr. Wahidin Gg. Srinayan Lr. IV No. 59 Bojonegoro	SHINTA APRILLIA PUTRI PRASETYA	100,00	-	184.298.000,00	



KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17 Pembangunan Saluran Drainase Jln Purwosari - Glagah Ds Dolokgede Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	188.596.000,00	CV. ANUGERAH MARGA SENTOSA	Jalan PUK Sunan Kalijogo 07 Sumberejo, Bojonegoro	HARUN SUPANJI, ST.	100,00	-	188.596.000,00	
	18 Pembangunan Saluran Drainase Jln Turi - Malingmati Ds Malingmati Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	192.519.000,00	CV. DICKY NAJWA PUTRA	Ds. Sukosewu RT. 05 RW. 01 Kec. Sukosewu, Bojonegoro	MOCHAMMAD ROMLI	100,00	-	192.519.000,00	
	19 Pembangunan Saluran Drainase Jln Taji - Napis Ds Napis Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	180.552.000,00	CV. DICKY NAJWA PUTRA	Ds. Sukosewu RT. 05 RW. 01 Kec. Sukosewu, Bojonegoro	MOCHAMMAD ROMLI	100,00	-	180.552.000,00	
	20 Pembangunan Saluran Drainase Jln Glagah - Ngambon Ds Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	176.607.000,00	CV. YALA BANGUN TEHNIKA	JL. Basuki Rahmad No.52	SUNARTO	100,00	-	176.607.000,00	
	21 Pembangunan Saluran Drainase Jln Bakalan - Malingmati Ds Tambakrejo I Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	177.248.000,00	CV. YALA BANGUN TEHNIKA	JL. Basuki Rahmad No.52	SUNARTO	100,00	-	177.248.000,00	
	22 Pembangunan Saluran Drainase Jln Bakalan - Malingmati Ds Tambakrejo II Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	186.462.000,00	CV. DICKY NAJWA PUTRA	Ds. Sukosewu RT. 05 RW. 01 Kec. Sukosewu, Bojonegoro	MOCHAMMAD ROMLI	100,00	-	186.462.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>								
	23 Perencanaan Drainase Wilayah Timur VII (P-APBD)	38.789.900,00	CV. RIZA ENGINEERING	Pperum Graha Aisyah No. 22 Ds. Kalianyar RT. 01 RE. 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	RIZA RIFA'I, ST	100,00	-	38.789.900,00	
	24 Perencanaan Drainase Wilayah Barat II (P-APBD)	43.741.500,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Gang Sibat No. 25 RT. 01 Ds. Wedi Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	43.741.500,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
	25 Pengawasan Saluran Drainase Timur	43.280.000,00	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT	Ds. Sumberagung RT. 09 RW. 02 Kec. Kepohbaru, Bojonegoro	MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST	100,00	-	43.280.000,00	
	26 Pengawasan Saluran Drainase Wilayah Timur III (P-APBD)	39.578.000,00	CV. SURYA CONSULTAN	Ds. Mojodeso RT. 009 RW. 002 Kec. Kapas, Bojonegoro	H. SOETIKNO, SP.	100,00	-	39.578.000,00	
	27 Pengawasan Drainase Wilayah Timur V (P-APBD)	43.122.700,00	CV. IDEA KARYA NUSA	Jl. Wiyung II No. 10 Surabaya	ABDUL MAJID, A.Md	100,00	-	43.122.700,00	
	28 Pengawasan Drainase Wilayah Timur VI (P-APBD)	38.995.550,00	CV. IDEA KARYA NUSA	Jl. Wiyung II No. 10 Surabaya	ABDUL MAJID, A.Md	100,00	-	38.995.550,00	
	29 Pengawasan Drainase Wilayah Barat III (P-APBD)	38.500.000,00	CV. RIZA ENGINEERING	Pperum Graha Aisyah No. 22 Ds. Kalianyar RT. 01 RE. 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	RIZA RIFA'I, ST	100,00	-	38.500.000,00	
<b>17.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG</b>								
<b>17.03</b>	<b>PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG</b>	<b>4.676.933.594,57</b>					<b>808.799.813,00</b>	<b>3.696.702.735,00</b>	
<b>5.2.3.64.05</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
	1 Pembangunan TPT Jln. Purwosari - Malingmati Kec. Tambakrejo	317.951.166,50	CV. ANUGRAH MARGA SENTOSA	Jalan PUK Sunan Kalijogo 07 Sumberejo, Bojonegoro	HARUN SUPANJI, ST.	100,00	95.385.300,00	222.565.867,00	
	2 Pembangunan TPT Jl. Glagah - Ngambon I Kecamatan Tambakrejo (P-APBD)	189.677.000,00	CV. TEKAD	RT. 12 RW. 01 Ds. Kedungdowo Kec. Balen, Bojonegoro	M. BUKHORI	100,00	-	189.677.000,00	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Pembangunan TPT Jl. Malo - Tambakromo I Kecamatan Malo (P-APBD)	182.617.000,00	CV. ALIN JAVA BERSINAR JAYA	Ds. Sidokumpul RT. 25 RW. 07 Kec. Kalitidu Bojonegoro	M. ALFIN BUDHI PRASETYO, SH	100,00	-	182.617.000,00	
	4 Pembangunan TPT Jln. Tambakromo - Kawengan kec. Kedewan	304.405.937,00	CV. BERSAMA	Ds. Suwaloh RT. 10 RW. 01 Balen Bojonegoro	EUIS NAWANGSIH	100,00	-	304.405.937,00	
	5 Pembangunan TPT Jl. Dander - Bubulan Kecamatan Bubulan (P-APBD)	183.168.000,00	CV. DINA JAYA	Ds. Ngablak RT. 1 RW. 01 Kec. Dander Bojonegoro	BAMBAN4G WARJITO	100,00	-	183.168.000,00	
	6 Pembangunan TPT Jln. Trenggulunan - Bubulan kec. Ngasem	307.855.719,46	CV. INSAN JAYA	Jl. Basuki Rachmad Gg. Muin No. 01, Bojonegoro	Drs. SAIFUL ZUHRI	100,00	92.356.715,00	215.499.004,00	
	7 Pembangunan TPT Jl. Kalitidu - Ngasem Desa Jelu Kecamatan Ngasem (P-APBD)	189.626.000,00	CV. NUSANTARA UTAMA	Ds. Jipo RT. 06 RW. 02 Kec. Kepohbaru Bojonegoro	AMROZI, SH	100,00	-	189.626.000,00	
	8 Pembangunan TPT Jln. Sumberrejo - Kepohkidul Desa Ngampal Kec. Sumberejo	269.000.083,99	CV. RAPI TEKNIKA	Jl. Kyai Syakur No. 203 Banjarsari Kec. Trucuk, Bojonegoro	RIZKI IKA NOVIYANTI, S.TP.	100,00	80.388.000,00	188.612.083,00	
	9 Pembangunan TPT Jl. Taji - Tinggang Kecamatan Ngraho (P-APBD)	189.711.000,00	CV. IDOSONEN	Jl. Raya Ngasem No. 172 Jampet-Ngasem, Bojonegoro	FAIQ AULIA RODHI	100,00	-	189.711.000,00	
	10 Pembangunan TPT Jln. Banjarjo - Bakalan kec. Padangan	249.848.566,08	CV. PANCA WARNA	Ds. Mojoranu RT. 01 RW. 01 Kec. Dander Bojonegoro	SUMINI	100,00	-	249.848.566,00	
	11 Pembangunan TPT Jl. Baureno - Kepohbaru Kecamatan Kepohbaru (P-APBD)	183.023.000,00	CV. ERSa INDOGEMILAN G	Dsn. Krajan RT. 03 RW. 01 Ds. Sugihwaras, Bojonegoro	A. IRSYADUL IBAD ZR	100,00	-	183.023.000,00	
	12 Pembangunan TPT Jln. Bobol - Karangjati kec. Sekar	265.000.000,00	CV. PENGKUH WIJAYA KUSUMA	Dusun Teras RT. 005 RW. 003 Desa Tambakagung Kec. Puri Kab. Mojokerto	NOVI EVI INDRASWATI	100,00	79.500.000,00	185.500.000,00	
	13 Pembangunan TPT Jln. Klino - Sekar kec. Sekar	201.224.079,00	CV. LANGGENG JAYA KONSTRUKSI	Desa Balongrejo RT. 06 RW. 02 Kec. Sugihwaras, Bojonegoro	BETA PUTRA GUMILANG	100,00	60.367.223,00	140.856.856,00	
	14 Pembangunan TPT Jln Bobol - Sekar Kec. Sekar	323.000.063,10	CV. DUTA CIPTA	Ds. Penganten RT. 12 RW. 03 Kec. Balen, Bojonegoro	PURWANTO	100,00	96.900.000,00	226.100.063,00	
	15 Pembangunan TPT Jln. Kapas - Sampang Ds. Buntalan kec. Temayang	286.888.399,60	CV. SIVA INDO GEMILANG	Ds. Sumberrejo RT. 30 RW. 09 Kec. Sumberrejo, Bojonegoro	MOCH. ZAENAL ARIFIN	100,00	86.066.500,00	200.821.899,00	
	1. Pembangunan TPT Jln. Balen - Sugihwaras Ds. Mayangkawis kec. Balen	295.056.584,26	CV. INSAN JAYA	Jl. Basuki Rachmad Gg. Muin No. 01, Bojonegoro	Drs. SAIFUL ZUHRI	73,79	88.516.975,00	129.205.279,00	
	2. Pembangunan TPT Jl. Kumpulrejo - Bendo Ds. Kumpulrejo Kecamatan Kapas (P-APBD)	185.750.000,00	CV. ABDI JAYA	Ds. Temayang RT. 12 RW. 05 Kec. Temayang, Bojonegoro	ARIFIN	74,62	129.319.100,00	9.287.550,00	
	3. Pembangunan TPT Jln. Kedungadem - Kesongo Desa Kesongo kec. Kedungadem	189.633.945,58	CV. INSAN JAYA	Jl. Basuki Rachmad Gg. Muin No. 01, Bojonegoro	Drs. SAIFUL ZUHRI	75,24	-	142.680.581,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>								
	16 Perencanaan TPT Kec. Kasiman-Kedewan	27.192.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Gang Sibat No. 25 RT. 01 Ds. Wedi Kec. Kapas, Bojonegoro	Sanda Praja Ridwan, ST	100,00	-	27.192.000,00	
	17 Perencanaan TPT Wilayah Timur II (P-APBD)	39.655.000,00	CV. CAKRA KONSULTAN	Jl. Mastrip Gg. Madzen No. 48 RT. 002 RW. 002, Kel. Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	PUJI PRIBOWO	100,00	-	39.655.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
	18 Pengawasan TPT Kec. Kedungadem-Kanor	31.446.000,00	CV. CAHAYA AKBAR CONSULTAN	Ds. Sumberagung RT. 09 RW. 02 Kec. Kepohbaru, Bojonegoro	MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST	100,00	-	31.446.000,00	
	19 Pengawasan TPT Kec. Ngasem-Kalitidu-Purwosari	37.220.000,00	CV. WIJAYA	Manukan Mukti XI H/13 Surabaya	ROY WIJAYA, ST	100,00	-	37.220.000,00	
	20 Pengawasan TPT Kec. Tambakrejo	42.000.000,00	CV. SURYA CONSULTAN	Ds. Mojodeso RT. 009 RW. 002 Kec. Kapas, Bojonegoro	H. SOETIKNO, SP.	100,00	-	42.000.000,00	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21 Pengawasan TPT Kec. Trucuk-Malo-Padangan-Kasiman	44.434.500,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Gang Sibat No. 25 RT. 01 Ds. Wedi Kec. Kapas, Bojonegoro	Sanda Praja Ridwan, ST	100,00	-	44.434.500,00	
	22 Pengawasan TPT Wilayah Timur I (P-APBD)	39.864.000,00	CV. MANDALIKA	Jl. Meliwis Putih No. 21 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Biojonegoro	NOVI ARI CHRISTIANTY, S.Hut	100,00	-	39.864.000,00	
	23 Pengawasan TPT Wilayah Timur II (P-APBD)	33.737.550,00	CV. SURYA CONSULTAN	Ds. Mojodeso RT. 009 RW. 002 Kec. Kapas, Bojonegoro	H. SOETIKNO, SP.	100,00	-	33.737.550,00	
	24 Pengawasan TPT Wilayah Barat I (P-APBD)	39.751.000,00	CV. RIZA ENGINEERING	Pperum Graha Aisyah No. 22 Ds. Kalianyar RT. 01 RE. 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	RIZA RIFA'I, ST	100,00	-	39.751.000,00	
	25 Pengawasan TPT Wilayah Barat II (P-APBD)	28.197.000,00	CV. AZKA ENGINEERING	Jl. Pahlawan No. 224 Temayang - Bojonegoro	YULIA INDRIANI, ST	100,00	-	28.197.000,00	
	<b>22. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan</b>								
	<b>22..01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan</b>	<b>175.257.000,00</b>					-	<b>175.257.000,00</b>	
<b>5 . 2 . 3 . 91 . 02</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Aplikasi</b>								
	1. Penyusunan Sistem Informasi / Data base Jalan II	175.257.000,00	CV. REUSSIE	Jalan Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62, Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST.	100,00	-	175.257.000,00	
	<b>30. Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>								
	<b>30.02. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</b>	<b>810.727.569,00</b>					<b>228.112.622,00</b>	<b>582.614.947,00</b>	
<b>5 . 2 . 3 . 59 . 03</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
	1 Pembangunan Jalan Poros Desa Gayam - Jelu I Kec. Gayam	363.068.111,00	CV. ANUGRAH JAYA	Ds. Sumberarum RT. 07 RW. 03 Kec. Ngraho Bojonegor	AROFIN	100,00	108.815.400,00	254.252.711,00	
	2 Pembangunan Jalan Poros Desa Jelu - Gayam I Kec. Ngasem	397.664.458,00	CV, MUBAROK	Jalan Gajah Mada No. 02, Bojonegoro	HM. AGUS SALIM, SE.	100,00	119.297.222,00	278.367.236,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>								
	3 Perencanaan Pembangunan Jalan Kecamatan Kapas dan Ngasem (P-APBD)	42.625.000,00	CV. ABDI RAMA	Ds. Ngablak RT. 02 RW. 01 Kec. Dander Bojonegoro	NURUL QULUH, ST	100,00	-	42.625.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
	4 Pengawasan Wilayah Gondang	7.370.000,00	CV. CAHAYA MULIA KONSULTAN	Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro	NOVRI HENDRA PERDANA , ST.	100,00	-	7.370.000,00	
	<b>37 PROGRAM PENINGKATAN JALAN</b>								
	<b>37.01 Kegiatan Peningkatan Jalan</b>	<b>8.462.484.577,00</b>					<b>2.399.712.560,00</b>	<b>3.832.120.322,00</b>	
<b>5.2.3.59.03</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
	1 Peningkatan Jalan Balen - Sugihwaras Kec. Balen	1.777.777.766,00	CV. FERRY SAPUTRA	Ds. Mayangkawis RT.12 RW.02 Kec.Balen	SUJARWO	100,00	533.333.300,00	1.244.444.466,00	
	2 Peningkatan Jalan Sumberrejo - Kepohkidul Kec. Sumberrejo	1.612.314.929,00	CV. MULTI KARYA	Ds. Ngablak Gg. 02 Kec. Dander Kab. Bojonegoro	MUSTAIN	100,00	483.621.600,00	1.128.693.329,00	
	3 Peningkatan Jalan Bojonegoro - Kunci Kec. Dander	1.617.223.424,00	CV. SANDRIYA MAKMUR	Desa Ngraseh RT. 03 RW. 01 Dander, Bojonegoro	TEDY FERY SANDRIYA, SE.	43,23	485.167.000,00	213.958.687,00	
	4 Peningkatan Jalan Ngumpakdalem - Nguju II Kec. Dander	1.070.321.733,00	CV. KARYA NUGRAHA	Jl. Raya Bojonegoro-Cepu, Gg. Gudang Kapuk 127	SUKIJAN	95,06	321.043.000,00	696.404.840,00	
	5 Peningkatan Jalan Jono - Sugihwaras Kec. Sugihwaras	1.799.542.725,00	CV.DIMI PUTRA	Ds. Kadungrejo Kec. Baureno Kab. Bojonegoro	MAT SHOLKAN	28,03	539.862.660,00	-	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>								
6	Perencanaan Peningkatan Jalan Sugihwaras - Kepohkidul	14.905.000,00	CV. ABDI RAHMA	Desa Ngablak RT 02 RW 01 Kec. Dander, Bojonegoro	NURUL QULUH, ST	100,00	-	14.905.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
7	Pengawasan Peningkatan Jalan Sumberrejo - Kepohkidul	34.845.000,00	CV. REUSSIE	Jl. Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62 Mojokampung Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST	100,00	-	34.845.000,00	
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Sumberrejo - Kanor	32.590.000,00	CV. MANDALIKA	Jl. Mliwis Putih No. 21 Bojonegoro	NOVI ARI CHRISTANTY, S.Hut	100,00	-	32.590.000,00	
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Kedungadem - Nglingga dan Jalan Kedungadem - Kesongo	49.937.000,00	MYC'S CONSULTANT	Jl. Kusnandar No 38 Kab. Bojonegoro	CANDRA ARIWIBOWO, ST	100,00	-	49.937.000,00	
10	Pengawasan Peningkatan Jalan Jono - Sugihwaras	34.845.000,00	CV. SUBWAY CONSULTANT	Ds. Kedungbondo RT 25 RW 03 Kec. Balen, Bojonegoro	ICHWAN HADI SAPUTRA, ST	100,00	-	34.845.000,00	
11	Pengawasan Peningkatan Jalan Sugihwaras -Kepohkidul	14.377.000,00	CV. WIJAYA	Jl. Manukan Mukti XI H-13 Kec. Tandes Surabaya	ROY WIJAYA, ST.	100,00	-	14.377.000,00	
12	Pengawasan Peningkatan Jalan Banjarjo - Bakalan	33.580.000,00	CV. PROGRESS CONSULTANT	Jl. Letnan Sudibyo H IV No. 3 Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk	M.NURHADI, ST	100,00	-	33.580.000,00	
13	Pengawasan Peningkatan Jalan Taji - Tinggang	32.370.000,00	CV. ABDI RAMA	Desa Ngablak RT 02 RW 01 Kec. Dander, Bojonegoro	NURUL QULUH, ST	100,00	-	32.370.000,00	
14	Pengawasan Peningkatan Jalan Wonocolo - Kawengan	23.633.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Ds. Wedi No 25 RT 02 RW 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	23.633.000,00	
15	Pengawasan Peningkatan Jalan Trenggulunan - Ngambon	31.930.000,00	CV. WIJAYA	Jl. Manukan Mukti XI H-13 Kec. Tandes Surabaya	ROY WIJAYA, ST.	100,00	-	31.930.000,00	
16	Pengawasan Peningkatan Jalan Trenggulunan - Bubulan	49.937.000,00	CV. ABDI RAMA	Desa Ngablak RT 02 RW 01 Kec. Dander, Bojonegoro	NURUL QULUH, ST	100,00	-	49.937.000,00	
17	Pengawasan Peningkatan Jalan Sambeng Tambakromo dan Jalan Tambakromo-Kawengan	23.690.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Ds. Wedi No 25 RT 02 RW 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	23.690.000,00	
18	Pengawasan Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji	23.700.000,00	CV. SURYA CONSULTANT	Desa Mojodeso RT.09 RW. 02 Kec. Kapas, Bojonegoro	H.SOETIKNO, SP.	100,00	-	23.700.000,00	
19	Pengawasan Peningkatan Jalan Purwosari - Glagah (DAK)	184.965.000,00	CV. ABYAKTA CONSULTANT	Jl. MT. Haryono No. 10 Bojonegoro	RACHMAWAN WAHYU PUTRA ,ST	100,00	36.685.000,00	148.280.000,00	
<b>47</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>								
<b>47.01</b>	<b>REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>	<b>392.652.000,00</b>					<b>-</b>	<b>392.652.000,00</b>	
<b>5.2.3.47.01</b>	<b>Belanja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</b>								
1	Perbaikan Jembatan Dusun Jajar - Dusun Petak Kec. Malo	194.225.000,00	CV. KAYA RAYA	Ds. Ngumpakdalem RT. 12 RW. 03 Kec. Dander, Bojon	ZAINAL ABIDIN, ST	100	-	194.225.000,00	
2	Rehabilitasi TPT Jalan Desa Krondonan Kec. Gondang (P-APBD)	198.427.000,00	CV. PUTRA PANDAN WANGI	Ds. Sumberrejo 30/09 Kec. Sumberrejo Bojonegoro	YANUAR DIDIK PRIHADI	100	-	198.427.000,00	
<b>48</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN</b>								
<b>48.01</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN</b>	<b>3.566.128.182,00</b>					<b>665.624.800,00</b>	<b>2.900.503.382,00</b>	
<b>5.2.3.59.03</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
1	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Bojonegoro - Trucuk (Sisi Trucuk)	3.328.124.182,00	PT. NAHENDRA PUTRA	Pondok Mutiara RC 03 Sidoarjo	Bambang Sugito ST	100	665.624.800,00	2.662.499.382,00	
2	Pembangunan Jalan Gayam - Jelu Kec. Ngasem (P-APBD)	186.355.000,00	CV. MAKMUR ABADI	Ds. Kalicilik RT.7 RW. 1 Sukosewu Bojonegoro	Sugito	100	-	186.355.000,00	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
3	Pengawasan Pembangunan Jalan I (P-APBD)	10.824.000,00	CV. MANDALIKA	Jl. Mliwis Putih No.21 Bojonegoro	Novi Ari kristanti S.Hut	100	-	10.824.000,00	
4	Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Jembatan Bojonegoro - Trucuk (Sisi Trucuk)	28.120.000,00	CV. SUBWAY CONSULTANT	Ds. Kedungbondo Rt.02 Balen Bojonegoro	Ichwan Hadi Saputra ST	100	-	28.120.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>								
5	Perencanaan Pembangunan Jalan I (P-APBD)		CV. SOLID DESIGN	Jl. Basuki Rahmad No. 123 Bojonegoro	SLAMET WIDODO, ST	100	-		
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Kalicilik - Taniunghario Kec. Kapas (P-APBD)	6.352.500,00						6.352.500,00	
	- Perencanaan Pembangunan Jalan Gayam - Jelu Kec. Ngasem (P-APBD)	6.352.500,00						6.352.500,00	
<b>49</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JEMBATAN</b>								
<b>49.01</b>	<b>KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN</b>	<b>7.810.988.600,00</b>					<b>1.772.926.616,00</b>	<b>3.117.999.182,00</b>	
<b>5.2.3.60.03</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
1	Pembangunan Jembatan Ngadiluwih (Ngasem-Trenggulan) Kec. Ngasem	199.900.863,00	CV ADI TAMA	Desa Sugihwaras RT. 006 RW. 002 Kec. Sugihwaras	NUR JAMIL	100,00	59.970.000,00	139.930.863,00	
2	Pembangunan Jembatan Beton plat Bulu IV (Sugihwaras - Kepohkidul) Kec. Sugihwaras	530.156.307,00	CV. BINTANG TEHNIK	Jl. Raya Glagahwangi No. 217 A Sugihwaras - Bojonegoro	SUPRIYANTO	100,00	159.046.800,00	371.109.507,00	
3	Pembangunan jembatan Wadang (Ngujo - Jampet) Kec Ngasem	408.742.666,00	CV. GRAHA CIPTA BOJONEGORO	Jl. Kh. M. Rosyid 78 Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro	BASUKI WAHYU, ST.	100,00	122.622.100,00	286.120.566,00	
4	Pembangunan Jembatan Jawik Lanjutan Kec. Tambakrejo (P-APBD)	199.000.000,00	CV. AJI JAYA	Ds. Terate RT. 006 RW. 002 Kec. Sugiwaras Bojonegoro	MASHUDI	100,00	-	199.000.000,00	
5	Pembangunan Jembatan Betonplat Mlideg 1 (Kedungadem - Kesongo) Kec. Kedungadem ( P-APBD)	197.625.000,00	CV. Ersa INDO GEMILANG	Dsn. Krajan RT. 003 RW. 001 Sugihwaras - Bojonegoro	A. IRSYADUL IBAD ZR	100,00	-	197.625.000,00	
6	Pembangunan jembatan kayangan api IIA (Dander - Ngasem) Kec. Ngasem	253.515.885,00	CV. GIRI BANGUN PERKASA	Ds. Klino RT.16 Sekar - Bojonegoro	PUNJER ARDI TRIWIBOWO	94,36	76.050.000,00	163.167.590,00	
7	Pembangunan Jembatan Bakalan II (Taji-Bakalan) Kec. Tambakrejo	297.600.189,00	CV. MUTIARA ABADI	Ds. Glagahanwangi RT.09RW.03 Sugihwaras-Bojonegoro	KHOSIM	58,00	89.280.000,00	83.328.110,00	
8	Pembangunan Jembatan Jelu (Jelu - Gayam) Kec Ngasem	1.012.697.433,00	CV. DITA JAYA MAKMUR	Ds. Sumberagung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro	M. AHSANUN NI'AM	55,98	303.781.700,00	263.126.323,00	
9	Pembangunan Jembatan Beji (Kedewan - Beji) Kec. Kedewan	986.526.369,00	CV. DITA JAYA MAKMUR	Ds. Sumberagung Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro	M. AHSANUN NI'AM	59,22	295.955.800,00	288.265.116,00	
10	Pembangunan Jembatan Betonplat Patoman (Kanor-Simorejo) Kec. Kanor	282.870.388,00	CV. HAN'S KARYA PERSADA	Ds. Duyungan RT.04 Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro	PURHANTO	85,60	84.861.116,00	157.275.937,00	
11	Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Kec. Trucuk	2.906.795.500,00	PT. KYA GRAHA	Dsun Jetaan 01/02 Kec. Kauman Kab. Tulungagung	ARI KUSUMAWATI, ST.	35,70	581.359.100,00	456.366.894,00	
12	Pembangunan Jembatan Gantung Sranak Lanjutan Kec. Trucuk (P-APBD)	199.333.000,00	CV. PUTRA BAKTI UTAMA	Ds. Tambahrejo RT. 04 RW.03 Kec. Kanor, Bojonegoro	POMO	93,44	-	186.256.756,00	
13	Pembangunan Jembatan Betonplat Kesongo 3 (Kedungadem - Kesongo) Kec. Kedungadem (P-APBD)	197.550.000,00	CV. MULYA UTAMA	Ds. Wedoro RT. 04 RW. 01 Kec. Sugihwaras, Bojonego	HERMAN SUSANTO	95,04	-	187.751.520,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
14	Pengawasan Pembangunan jembatan kayangan api III (Dander - Ngasem)	10.900.000,00	CV. IDEA KARYA NUSA	Gang Sibat No. 25 RT.002 / RW.001 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	ABDUL MAJID, A.Md	100,00	-	10.900.000,00	


KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15 Pengawasan Pembangunan Jembatan Kolong (Trenggulun-Ngambon)	16.600.000,00	CV. IDEA KARYA NUSA	Gang Sibat No. 25 RT.002 / RW.001 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	ABDUL MAJID, A.Md	100,00	-	16.600.000,00	
	16 Pengawasan Pembangunan Jembatan Betonplat Kesongo 3 (Kedungadem - Kesongo) Kec. Kedungadem (P-APBD)	8.750.000,00	CV. YUDHISTIRA CONSULTANT	Jl. Pemuda RT. 20 RT. 02 Kel. Ngrowo Bojonegoro	TEGUH ARI WIBOWO, ST.	100,00	-	8.750.000,00	
	17 Pengawasan Pembangunan Jembatan Betonplat Ringinaju (Taji - Bakalan)	7.875.000,00	CV. GRAMA ENGINEERING	Jl. Lettu Suwolo Gg. Angrek No. 1 Ds. Campurejo Kab. Bojonegoro	Ir. BAMBANG TRIWAHJULARSO	100,00	-	7.875.000,00	
	18 Pengawasan Pembangunan Jembatan Beton plat Bulu IV (Sugihwaras - kepokhidul)	20.820.000,00	CV. IDEA KARYA NUSA	Gang Sibat No. 25 RT.002 / RW.001 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	ABDUL MAJID, A.Md	100,00	-	20.820.000,00	
	19 Pengawasan Pembangunan jembatan Jatiblimbing Kec Dander	15.470.000,00	CV. CAHAYA MULIA	Perumahan Puri Dander Regency Blok F No. Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro	NOVRI HENDRA PERDANA, ST.	100,00	-	15.470.000,00	
	20 Pengawasan pembangunan Jembatan Gantung Sranak Kec. Trucuk	49.480.000,00	CV. MANDALIKA	Jl. Mliwis Putih No. 21 RT. 009 RW. 002 Ds. Ngrowo Bojonegoro	NOVI ARI CHRISTANTY, S.Hut	100,00	-	49.480.000,00	
	21 Pengawasan Pembangunan Jembatan Betonplat Peger 1 (Temayang Sugiharas) Kec. Sugiharas (P-APBD)	8.780.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Gang Sibat No. 25 RT.002 / RW.001 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	8.780.000,00	
	<b>50 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN</b>								
	<b>50.01 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN</b>	<b>11.878.492.496,00</b>					<b>490.608.150,00</b>	<b>9.535.848.011,00</b>	
	<b>5.2.3.59.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Konstruksi</b>								
	1 Pemeliharaan Berkala Jalan Nglingsgo - Kedungadem	344.428.114,00	CV. ADITAMA	Jl. Merdeka tengah RT.06 RW.02 DS, Sugihwaras Kec. Sugihwaras Bojonegoro	Nur Jamil	100,00	103.328.400,00	241.099.714,00	
	2 Pemeliharaan Berkala Jalan Balen - Sugihwaras	283.708.766,00	CV. BERSAMA	Ds. Suwaloh	Euis Nawangsih	100,00	-	283.708.766,00	
	3 Pemeliharaan Berkala Jalan Sugihwaras - Kepokhidul	326.800.139,00	CV. BINTANG TEHNIK	Jl.Raya Glagahwangi 217 A Sugihwarsa Bojonegoro	Supriyanto	100,00	98.040.000,00	228.760.139,00	
	4 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberrejo - Kepokhidul	342.483.714,00	CV. HIKA TIRTA AGUNG	Desa Kalirejo 01/01, Bojonegoro	Pujo Harsono	100,00	102.700.000,00	239.783.714,00	
	5 Rehabilitasi Jalan Betek - Senganten	288.350.929,00	CV. GUNUNG HARTA	Ds. Senganten Gondang Bojonegoro	Sri Murti Ningsih	100,00	86.505.200,00	201.845.729,00	
	6 Rehabilitasi Jalan Lettu Suyitno Kec. Bojonegoro (P-APBD)	390.832.609,00	CV. SUGIHWARAS JAYA	Ds. Sugihwaras Jenu Tuban	Candra Pepei Setiawan	100,00	-	390.832.609,00	
	7 Rehabilitasi Jalan Dr. Wahidin Kec. Bojonegoro (P-APBD)	402.994.284,00	CV. SUGIHWARAS JAYA	Ds. Sugihwaras Jenu Tuban	Candra Pepei Setiawan	100,00	-	402.994.284,00	
	8 Rehabilitasi Jalan Serma Maun Kec. Bojonegoro (P-APBD)	198.999.000,00	CV. KIA	Jl. Kyai Mazad Gg.Sawah No.4 Bojonegoro	Akia Tavianto	100,00	-	198.999.000,00	
	9 Rehabilitasi Jalan Kapas - Glendeng Kec. Bojonegoro (P-APBD)	321.846.990,00	CV. SUGIHWARAS JAYA	Ds. Sugihwaras Jenu Tuban	Candra Pepei Setiawan	100,00	-	321.846.990,00	
	10 Rehabilitasi Jalan Kedaton - Tanjungharjo Kec. Kapas (P-APBD)	196.989.000,00	CV. PAMUR RISKI	Jl. Kapten Sumitro Gg. Andongsari No.124 Bojonegoro	Murtiah	100,00	-	196.989.000,00	
	11 Rehabilitasi Jalan Bojonegoro - Kunci Kec. Kapas (P-APBD)	433.776.356,00	CV. SUGIH JAYA ABADI	Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Tuban	MOHAMAD DONI FAUZI	100,00	-	433.776.356,00	
	12 Rehabilitasi Jalan Kenep - Penganten Kec. Balen (P-APBD)	197.000.000,00	CV. PUTRI ABADI	Ds. Mayangkawis RT.17 RW.02 Kec. Balen Bojonegoro	Moh. Solikin	100,00	-	197.000.000,00	
	13 Rehabilitasi Jalan Nglingsgo - Kedungadem Kec. Sumberrejo dan Kedungadem (P-APBD)	348.343.368,00	CV. ADITAMA	Jl. Merdeka tengah RT.06 RW.02 DS, Sugihwaras Kec. Sugihwaras Bojonegoro	Nur Jamil	100,00	-	348.343.368,00	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14 Rehabilitasi Jalan Sumberwangi - Kanor Kec. Kanor (P-APBD)	198.874.000,00	CV. SURYA MUSTIKA	Jl. Raya Kepohbaru No.38 Kepohbaru Bojonegoro	Sujito	100,00	-	198.874.000,00	
	15 Rehabilitasi Jalan Dander - Ngasem Kec. Ngasem (P-APBD)	199.268.000,00	CV. UNTUNG KARYA	Jl. Raya Ngambon Km.7 Ds.Ngrejeng Kec. Purwosari Bojonegoro	M Ahsanun Niam	100,00	-	199.268.000,00	
	16 Rehabilitasi Jalan Sumengko - Bandungrejo Kec. Gayam (P-APBD)	199.212.000,00	CV. MAKMUR ABADI	Ds. KalicilikRt.7 RW1 Sukosewu Bojonegoro	Sugito	100,00	-	199.212.000,00	
	17 Rehabilitasi Jalan Senganten - Klino Kec. Gondang (P-APBD)	198.888.000,00	CV. DEVISSA UTAMA	Ds.Megale RT.03 RW.01 Kedungadem Bojonegoro	Didik Setia Wibowo	100,00	-	198.888.000,00	
	18 Rehabilitasi Jalan Tambakromo - Malo Kec. Malo (P-APBD)	198.789.000,00	CV. UNTUNG KARYA	Jl. Raya Ngambon Km.7 Ds.Ngrejeng Kec. Purwosari Bojonegoro	M Ahsanun Niam	100,00	-	198.789.000,00	
	19 Rehabilitasi Jalan Talok - Malo Kec. Kalitidu (P-APBD)	170.507.000,00	CV. DITA JAYA MAKMUR	Ds. Sumberagung RT.11 RW.02 Kepohbaru Bojonegoro	Ahsanun Niam	100,00	-	170.507.000,00	
	20 Rehabilitasi Jalan Pluntu - Jepang Kec. Margomulyo (P-APBD)	198.834.000,00	CV. DEVISSA UTAMA	Ds.Megale RT.03 RW.01 Kedungadem Bojonegoro	Didik Setia Wibowo	100,00	-	198.834.000,00	
	21 Rehabilitasi Jalan Mojosari - Becok (Kab. Ngawi) Kec. Margomulyo (P-APBD)	198.870.000,00	CV. ARMAYA RAYA	Ds. Ngumpakdalem RT.12 RW.03 Dander Bojonegoro	Haidar Abda Bachtiar	100,00	-	198.870.000,00	
	22 Rehabilitasi Jalan Pleret - Becok Kec. Margomulyo (P-APBD)	198.871.000,00	CV. ARMAYA RAYA	Ds. Ngumpakdalem RT.12 RW.03 Dander Bojonegoro	Haidar Abda Bachtiar	100,00	-	198.871.000,00	
	23 Rehabilitasi Jalan Taji - Tinggang Kec. Ngraho (P-APBD)	198.840.000,00	CV. YUDISTIRA JAYA	Jl. Dr. Setia Budi 90 Bojonegoro	Edo Yosephat Oy	100,00	-	198.840.000,00	
	24 Rehabilitasi Jalan Malingmati - Bakalan Kec. Tambakrejo (P-APBD)	197.400.000,00	CV. KAWAN MAJU BERSAMA	Jl. KH. Mansur Gg.Antara no.66 Bojonegoro	Eko Agustiantoro ST	100,00	-	197.400.000,00	
	25 Rehabilitasi Jalan Lisman (P-APBD)	199.247.000,00	CV. LANCAR WIJAYA	Jl.Lettu Suyitno Gg.Eyang Manis RT.20 RW.01	Vika Ratih Wijaya	100,00	-	199.247.000,00	
	26 Rehabilitasi Jalan Kanor - Simorejo Kec. Kanor (P-APBD)	343.066.609,00	CV. SIVA INDO GEMILANG	Jl. Pandanwangi II DS. Sumberrejo Kec. Sumberrejo Bojonegoro	Moch. Zaenal Arifin	100,00	-	343.066.609,00	
	27 Rehabilitasi Jalan Sumberrejo - Kepohkidul Kec. Sumberrejo dan Kedungadem (P-APBD)	363.494.671,00	CV. MUTIARA ABADI	Ds. Glagahwangi RT.19 RW.03 Sugihwaras Bojonegoro	Khosim	100,00	-	363.494.671,00	
	28 Rehabilitasi Jalan Talun - Sumberwangi Kec. Kanor (P-APBD)	186.895.000,00	CV. AKAS	DS. Nglarangan RT.04 RW.02 Kanor Bojonegoro	Abdul Wakid	100,00	-	186.895.000,00	
	29 Rehabilitasi Jalan Sumberrejo - Kanor Kec. Kanor (P-APBD)	186.772.000,00	CV. KARYA MAKMUR	Jl. Raya Kepohbaru No.138 Kepohbaru Bojonegoro	H. Kamari	100,00	-	186.772.000,00	
	30 Rehabilitasi Jalan Balen - Sugihwaras Kec. Sugihwaras (P-APBD)	186.874.000,00	CV. NISA JAYA TEKHNIK	Jl. Masjid Ds. Campurejo RT.11 RW.02 Bojonegoro	Pomo	100,00	-	186.874.000,00	
	31 Rehabilitasi Jalan Jelu - Gayam Kec. Gayam (P-APBD)	186.838.000,00	CV. DITA JAYA MAKMUR	Ds. Sumberagung RT.11 RW.02 Kepohbaru Bojonegoro	Ahsanun Niam	100,00	-	186.838.000,00	
	32 Rehabilitasi Jalan Glagah - Turi Kec. Tambakrejo (P-APBD)	186.794.000,00	CV. DITA JAYA MAKMUR	Ds. Sumberagung RT.11 RW.02 Kepohbaru Bojonegoro	Ahsanun Niam	100,00	-	186.794.000,00	
	33 Rehabilitasi Jalan Trenggulan - Bubulan II Kec. Bubulan (P-APBD)	186.927.000,00	CV. HASIL KARYA	Jl. Raya Kepoh No.135 Ds.Kepoh Bojonegoro	Ahkmad Khaouerul A SH.	100,00	-	186.927.000,00	
	34 Rehabilitasi Jalan Baureno - Kepohbaru	333.448.676,00	CV. DIMI PUTRA	Ds. Kadungrejo Kec. Baureno Kab. Bojonegoro	MAT SHOLKAN	85,80	100.034.550,00	186.064.415,00	
	35 Rehabilitasi Jalan Kapas - Sampang Kec. Kapas (P-APBD)	437.899.379,00	CV. AGRO PUTRA	Ds. Tegalkodo RT. 03 RW. 03, Sukosewu, Bojonegoro	M. TAJAB	10,62	-	46.504.915,00	
	36 Rehabilitasi Jalan Baureno - Simorejo Kec. Kanor (P-APBD)	329.409.042,00	CV. EGI TYA	Ds. Sugihwaras RT. 04 RW. 01 Kec. Sugihwaras Bojon	GHOZALI	32,61	-	107.420.289,00	
	37 Rehabilitasi Jalan Prayungan - Mlinjeng Kec. Sumberrejo (P-APBD)	329.488.458,00	CV. FAMILY	Desa Sugihwaras, Kec. Sugihwaras, Bojonegoro	M. YASIN, S.Sos	35,09	-	115.617.500,00	
	38 Rehabilitasi Jalan Drokilo - Kepohbaru Kec. Kepohbaru dan Kedungadem (P-APBD)	362.902.889,00	CV. FAMILY	Desa Sugihwaras, Kec. Sugihwaras, Bojonegoro	M. YASIN, S.Sos	32,72	-	118.741.826,00	
	39 Rehabilitasi Jalan Ngumpakdalem - Ngujo Kec. Dander (P-APBD)	1.024.694.503,00	CV. SUGIH JAYA ABADI	Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Tuban	MOHAMAD DONI FAUZI	28,44	-	291.423.117,00	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</b>							-	
40	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Wilayah Kanor - Sumberrejo (P-APBD)	24.557.000,00	CV. MITRA SERASI CONSULTANT	Jl. Kyai Mojo Gg. Masjid Perumahan No 05 Bojonegoro	VILLA ROHMAD E.P.,SE	100,00	-	24.557.000,00	
41	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Wilayah Margomulyo - Ngraho (P-APBD)	27.885.000,00	CV. ABADI KARYA	Jl. R . Sunjani Gg. Baru No 51 Bojonegoro	GALUH SAPUTRA, ST	100,00	-	27.885.000,00	
42	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Wilayah Ngambon - Tambakrejo (P-APBD)	30.965.000,00	CV. ABADI KARYA	Jl. R . Sunjani Gg. Baru No 51 Bojonegoro	GALUH SAPUTRA, ST	100,00	-	30.965.000,00	
43	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Sumberrejo, Kepohbaru dan Kedungadem (P-APBD)	48.180.000,00	CV. SOLID DESIGN	Jl. Basuki Rahmad No. 123 Bojonegoro	SLAMET WIDODO, ST	100,00	-	48.180.000,00	
44	Perencanaan Rehabilitasi Jalan 4 (P-APBD)	35.420.000,00	CV. BHADRA BALAKOSA	Jl. Pemuda Gg. Balong No. 05, Bojonegoro	SUYANTO, ST	100,00	-	35.420.000,00	
45	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Sambiroto - Tikusan Kec. Kapas (P-APBD)	34.072.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Ds. Wedi No 25 RT 02 RW 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	34.072.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>							-	
46	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bojonegoro - Kunci dan Kapas - Sampang	30.415.000,00	CV. KINARYA FAJAR	Jl. Flores No 72 Kab. Bondowoso	ACHMAD FAISHAL, ST.	100,00	-	30.415.000,00	
47	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala 7	31.360.000,00	CV. REUSSIE	Jl. Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62 Mojokampung Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST	100,00	-	31.360.000,00	
48	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala 8	25.520.000,00	CV. SOLID DESIGN	Jl. Basuki Rahmad No. 123 Bojonegoro	SLAMET WIDODO, ST	100,00	-	25.520.000,00	
49	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala 10	33.220.000,00	CV. KINARYA FAJAR	Jl. Flores No 72 Kab. Bondowoso	ACHMAD FAISHAL, ST.	100,00	-	33.220.000,00	
50	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala 11	41.250.000,00	CV. WIJAYA	Jl. Manukan Mukti XI H-13 Kec. Tandes Surabaya	ROY WIJAYA, ST.	100,00	-	41.250.000,00	
51	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala 15	24.695.000,00	CV. MITRA SERASI CONSULTANT	Jl. Kyai Mojo Gg. Masjid Perumahan No 05 Bojonegoro	VILLA ROHMAD E.P.,SE	100,00	-	24.695.000,00	
52	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Bojonegoro (P-APBD)	37.070.000,00	CV. REUSSIE	Jl. Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62 Mojokampung Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST	100,00	-	37.070.000,00	
53	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Kapas (P-APBD)	31.680.000,00	CV. ABADI KARYA	Jl. R . Sunjani Gg. Baru No 51 Bojonegoro	GALUH SAPUTRA, ST	100,00	-	31.680.000,00	
54	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Kedungadem - Kepohbaru - Sumberrejo (P-APBD)	48.730.000,00	CV. REUSSIE	Jl. Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62 Mojokampung Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST	100,00	-	48.730.000,00	
55	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Sugihwaras - Sukosewu (P-APBD)	33.754.000,00	CV. MITRA SERASI CONSULTANT	Jl. Kyai Mojo Gg. Masjid Perumahan No 05 Bojonegoro	VILLA ROHMAD E.P.,SE	100,00	-	33.754.000,00	
56	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Ngasem - Gayam (P-APBD)	33.770.000,00	CV. SOLID DESIGN	Jl. Basuki Rahmad No. 123 Bojonegoro	SLAMET WIDODO, ST	100,00	-	33.770.000,00	
57	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Malo (P-APBD)	22.814.000,00	CV. MANDALIKA	Jl. Mliwis Putih No. 21 Bojonegoro	NOVI ARI CHRISTANTY, S.Hut	100,00	-	22.814.000,00	
58	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Margomulyo - Ngraho (P-APBD)	26.994.000,00	CV. SURYA CONSULTANT	Desa Mojodeso RT.09 RW. 02 Kec. Kapas, Bojonegoro	H.SOETIKNO, SP.	100,00	-	26.994.000,00	
59	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wilayah Ngambon - Tambakrejo (P-APBD)	28.765.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Ds. Wedi No 25 RT 02 RW 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	28.765.000,00	
60	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Monginsidi, Panglima Polim dan Lisman (P-APBD)	26.114.000,00	CV. SURYA CONSULTANT	Desa Mojodeso RT.09 RW. 02 Kec. Kapas, Bojonegoro	H.SOETIKNO, SP.	100,00	-	26.114.000,00	
61	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kanor dan Balen (P-APBD)	39.985.000,00	CV. ABDI RAMA	Desa Ngablak RT 02 RW 01 Kec. Dander, Bojonegoro	NURUL QULUH, ST	100,00	-	39.985.000,00	
62	Pengawasan Rehabilitasi Jalan 2 (P-APBD)	14.630.000,00	CV. BHADRA BALAKOSA	Jl. Pemuda Gg. Balong No. 05, Bojonegoro	SUYANTO, ST	100,00	-	14.630.000,00	



KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	PELAKSANAAN					REALISASI KEUANGAN	HUTANG BELANJA	KET
		NILAI KONTRAK (RP.)	NAMA PENYEDIA BRG/JASA	ALAMAT	DIREKTUR	CAPAIAN FISIK (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63 Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sambiroto - Tikusan Kec. Kapas (P-APBD)	21.120.000,00	CV. ABADI KARYA	Jl. R . Sunjani Gg. Baru No 51 Bojonegoro	GALUH SAPUTRA, ST	100,00	-	21.120.000,00	
	64 Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ngumpakdalem - Ngujo Kec. Dander (P-APBD)	21.340.000,00	CV. JASA KARYA ENGINEERING	Ds. Wedi No 25 RT 02 RW 01 Kec. Kapas, Bojonegoro	SANDA PRAJA RIDUWAN, ST	100,00	-	21.340.000,00	
	65 Pengawasan Rehabilitasi Jalan 5 (P-APBD)	24.530.000,00	CV. REUSSIE	Jl. Basuki Rahmat Gg. Ma'ruf No. 62 Mojokampung Bojonegoro	AHMAD SIDIG, ST	100,00	-	24.530.000,00	
	<b>51 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN</b>								
	<b>51.01 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN</b>	<b>1.238.614.118,00</b>					<b>230.822.600,00</b>	<b>984.793.518,00</b>	
	<b>5.2.3.60.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -</b>								
	<b>Belanja Konstruksi</b>								
	1 Rehabilitasi Jembatan Sambongrejo I (Senganten-Klino) Kec. Gondang	198.200.000,00	CV. ANUGRAH	Desa Suwaloh Kec. Balen Bojonegoro	BAMBANG SUJIAN TO	100,00	-	198.200.000,00	
	2 Rehabilitasi Jembatan Mojorejo (Drokilo-Kepohbaru)	400.475.428,00	CV. MULTI KARYA	Jl. Raya Bojonegoro Cepu KM 05 RT. 18 RW. 03 Ngablak Kec. Dander Kab. Bojonegoro	MUSTAIN	100,00	119.281.400,00	281.194.028,00	
	3 Rehabilitasi Jembatan Tulungagung Kec. Baureno	372.133.690,00	CV. AFIIYAH	Ds. Belun RT. 008 RW. 002 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro	OKDIANA TRIWAHYU W.	100,00	111.541.200,00	260.592.490,00	
	4 Rehabilitasi Jembatan Beton Plat Pedang (Kepohkidul - Kedungadem) Kec. Kedungadem (P-APBD)	191.650.000,00	CV. PERMATA HATI	Ds. Tejo RT. 01 RW. 01 Kec. Kanor Bojonegoro	HARIYONO	88,00	-	168.652.000,00	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan</b>								
	5 Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Malo	44.720.000,00	CV. WANGSITO KARYA	Jl. Basuki Rahmad Gg. Mu'in No. 16 Sukorejo- Bojonegoro	ABU BAKAR, ST.	100,00	-	44.720.000,00	
	6 Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Tulungagung Kec. Baureno	13.750.000,00	CV. GRAMA ENGINEERING	Jl. Lettu Suwolo Gg. Angrek No. 1 Ds. Campurejo Kab. Bojonegoro	Ir. BAMBANG TRIWAHJULARSO	100,00	-	13.750.000,00	
	7 Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Kepohkidul (Sugihwaras- Kepohkidul)	8.875.000,00	CV. GRAMA ENGINEERING	Jl. Lettu Suwolo Gg. Angrek No. 1 Ds. Campurejo Kab. Bojonegoro	Ir. BAMBANG TRIWAHJULARSO	100,00	-	8.875.000,00	
	8 Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Hargomulyo I Kec. Kedewan (P-APBD)	8.810.000,00	CV. AZHAA CONSULTANT	Jl. Letda Suradji No. 77 Ledok Kulon Bojonegoro	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Th.I	100,00	-	8.810.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.548.757.698,57</b>					<b>6.708.995.861,00</b>	<b>29.605.119.058,00</b>	

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. Hj. ANNA MU'AWANAH



Lampiran F1 : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DAFTAR REKAPITULASI UTANG PAKET KEGIATAN BELANJA MODAL TAHUN 2018**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
1.	1.03.03.16.03.5.2.3.	<b>Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan Bojonegoro</b>		5.232.292.300,00			1.051.716.480,00				0,07		9.273.702.300,00	
		Pembangunan Sistem Penanganan Genangan Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Bojonegoro	576.000.000,00	541.495.200,00	640/1221/KPA-PSU/412.2	CV. TRI SAKTI (ELI	-	541.495.200,00	-	541.495.200,00	-	1,00	34.504.800,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro	310.744.000,00	256.207.900,00	640/675/KPA-PSU/412.2	CV. MUTIARA ABAI	76.862.370,00	179.345.530,00	-	179.345.530,00	0,30	1,00	54.536.100,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mangga RW. 2, Jl. Mangga Desa Campurrejo Kecamatan Bojonegoro	354.144.000,00	302.011.300,00	640/516/KPA-PSU/412.2	CV. TEKAD (M. BUR	-	302.011.300,00	-	302.011.300,00	-	1,00	52.132.700,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Rajawali Gg Rawi 1 RW. 1 dan Jl. Tritunggal Gg Samidi RW. 2 Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro	504.308.000,00	402.635.700,00	640/553/KPA-PSU/412.2	CV. MEGA KARYA S	120.790.710,00	281.844.990,00	-	281.844.990,00	0,30	1,00	101.672.300,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Puspa Indah Rt. 01 RW. 1 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro	1.041.600.000,00	836.588.500,00	640/608/KPA-PSU/412.2	CV. LANGGENG PEI	250.976.550,00	585.611.950,00	-	585.611.950,00	0,30	1,00	205.011.500,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. MH. Thamrin Gg. Ngalimun RW. 2, RT. 8, RT. 09 RT. 10 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro	163.184.000,00	161.450.000,00	640/349/KPA-PSU/412.2	CV. SANDRIYA MAI	-	161.450.000,00	-	161.450.000,00	-	1,00	1.734.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Basuki Rahmad No. 01 RW. 1, Gg Hikmah Rt 14 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro	337.280.000,00	272.539.200,00	640/1224/KPA-PSU/412.2	CV. INDRIA KARYA	-	272.539.200,00	-	272.539.200,00	-	1,00	64.740.800,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serma Abdullah RW. 1 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro	1.951.264.000,00	1.547.029.900,00	640/609/KPA-PSU/412.2	CV. RISKY JAYA (R	464.108.970,00	371.596.581,00	711.324.349,00	1.082.920.930,00	0,30	59,02%	404.234.100,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Basuki Rahmad No. 01 RW. 1, Gg Namlo Lorong IV dan Lorong	581.560.000,00	463.259.600,00	640/547/KPA-PSU/412.2	CV. NISA JAYA TEH	138.977.880,00	324.281.720,00	-	324.281.720,00	0,30	1,00	118.300.400,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKONING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pembangunan Saluran Drainase Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander	190.960.000,00	189.071.000,00	640/1111/KPA-PSU/412.	CV. DALI ANGKASA	-	189.071.000,00	-	189.071.000,00	-	1,00	1.889.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>Kecamatan Malo</b>								-				
		Pembangunan Saluran Drainase Ds. Malo Kec. Malo	287.680.000,00	230.764.000,00	640/1222/KPA-PSU/412.	CV. NUSA UTAMA B	-	230.764.700,00	-	230.764.700,00	-	1,00	56.916.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>Pengawasan Kegiatan</b>												
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Bojonegoro	21.000.000,00	20.120.000,00	640/280/PWS PSU/412.2	CV. MYC'S CONSUL	-	20.120.000,00	-	20.120.000,00	-	1,00	880.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dander, Ngasem dan Malo	9.380.000,00	9.120.000,00	640/561/PWS.PSU/412.2	CV. REUSSIE (AHM)	-	9.120.000,00	-	9.120.000,00	-	1,00	260.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN BOJONEGORO</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dewi Sartika Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.370.000,00	640/1347/FPL.PSU/412.2	CV. TRI WIBOWO (E	-	195.370.000,00	-	195.370.000,00	-	1,00	550.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl.Dr. Suharso Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	194.680.000,00	194.075.000,00	640/1418/FPL-PSU/412.2	CV. INDRIA KARYA	-	194.075.000,00	-	194.075.000,00	-	1,00	605.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ade Irma Suryani Nasution Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	194.680.000,00	194.130.000,00	640/1354/FPL.PSU/412.2	CV. DALI ANGKASA	-	194.130.000,00	-	194.130.000,00	-	1,00	550.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. Ngalimun Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	194.680.000,00	194.069.000,00	640/1361/FPL.PSU/412.2	CV. LUMBUNG BAR	-	194.069.000,00	-	194.069.000,00	-	1,00	611.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kyai Mojo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	194.680.000,00	194.095.000,00	640/1345/FPL.PSU/412.2	CV. BINTANG TEHN	-	194.095.000,00	-	194.095.000,00	-	1,00	585.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sarimulyo Gg. Dulai sapar Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.337.000,00	640/1349/FPL.PSU/412.2	CV. HAIDAR PUTRA	-	195.337.000,00	-	195.337.000,00	-	1,00	583.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. Sumiran RT. 20 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.367.000,00	640/1360/FPL.PSU/412.2	CV. PUTRA HIDAYA	-	195.367.000,00	-	195.367.000,00	-	1,00	553.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.481.000,00	640/1441/FPL.PSU/412.2	CV. MAHA KARYA	-	195.481.000,00	-	195.481.000,00	-	1,00	439.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKUNING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Puspah Indah Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.243.000,00	640/1353/FPL.PSU/412.2	CV. INSAN JAYA (D	-	195.243.000,00	-	195.243.000,00	-	1,00	677.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. KS Tubun Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.315.000,00	640/1417/FPL.PSU/412.2	CV. DWI KARYA M	-	195.315.000,00	-	195.315.000,00	-	1,00	605.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kusandar Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.369.000,00	640/1348/FPL.PSU/412.2	CV. HAIDAR PUTRA	-	195.369.000,00	-	195.369.000,00	-	1,00	551.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	199.640.000,00	199.163.000,00	640/1416/FPL.PSU/412.2	CV. DWI KARYA M	-	199.163.000,00	-	199.163.000,00	-	1,00	477.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lettu Suwolo Desa Campurrejo Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	194.680.000,00	191.665.000,00	640/1352/FPL.PSU/412.2	CV. TRI WIBOWO (E	-	191.665.000,00	-	191.665.000,00	-	1,00	3.015.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Penanganan genangan Desa Campurrejo - Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	192.200.000,00	191.652.000,00	640/1415/FPL.PSU/412.2	CV. MARGA JAYA (I	-	191.652.000,00	-	191.652.000,00	-	1,00	548.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kapten Sumitro Gg. Andongsari RT.06 RW. 02 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.333.000,00	640/1443/FPL-PSU/412.2	CV. WAHANA KAR	-	195.333.000,00	-	195.333.000,00	-	1,00	587.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. I, II, Gg. Musholla barat dan selatan RT. 3 RW. 02 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.174.000,00	640/1529/KPA-PSU/412.2	CV. MAKMUR ABAI	-	195.174.000,00	-	195.174.000,00	-	1,00	746.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. Rukun RT. 9, 10 RW. 02 Kelurahan Ledok wetan Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.196.000,00	640/1530/KPA-PSU/412.2	CV. MAKMUR ABAI	-	195.196.000,00	-	195.196.000,00	-	1,00	724.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Wisma Indah Tengah Kel. Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.213.000,00	640/1434/KPA-PSU/412.2	CV. LUMBUNG BAR	-	195.213.000,00	-	195.213.000,00	-	1,00	707.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. Depo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	195.920.000,00	195.106.000,00	640/1521/KPA-PSU/412.2	CV. PERMADA TAM	-	195.106.000,00	-	195.106.000,00	-	1,00	814.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Gg. Sidodadi Lorong 8, 9, 10	195.920.000,00	195.045.000,00	640/1526/KPA-PSU/412.2	CV. DITA JAYA MA	-	195.045.000,00	-	195.045.000,00	-	1,00	875.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun



NO	REKUNING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Sugihwaras Desa Sugihwaras (P-APBD)	195.920.000,00	195.084.000,00	640/1523/KPA-PSU/412.	CV. CAKRA WIDAY	-	195.084.000,00	-	195.084.000,00	-	1,00	836.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Sugihwaras Desa Glagahwangi (P-APBD)	195.920.000,00	195.137.000,00	640/1412/KPA-PSU/412.	CV. CAKRA WIDAY	-	195.137.000,00	-	195.137.000,00	-	1,00	783.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN NGASEM</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Ngasem Desa Ngadiluwih (Depan SMP) (P-APBD)	195.920.000,00	195.162.000,00	640/1405/KPA-PSU/412.	CV. HAN'S KARYA I	-	195.162.000,00	-	195.162.000,00	-	1,00	758.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN GONDANG</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Gondang Desa Sambongrejo (P-APBD)	195.920.000,00	195.197.000,00	640/1437/KPA-PSU/412.	CV. EGA PUTRA PEI	-	195.197.000,00	-	195.197.000,00	-	1,00	723.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN PADANGAN</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Padangan Desa Ngasinan (P-APBD)	195.920.000,00	195.176.000,00	640/1404/KPA-PSU/412.	CV. RASEKO (IRFA)	-	195.176.000,00	-	195.176.000,00	-	1,00	744.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN TAMBAKREJO</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Tambakrejo Desa Bakalan (P-APBD)	195.920.000,00	195.221.000,00	640/1408/KPA-PSU/412.	CV. GRAHANATA (I	-	195.221.000,00	-	195.221.000,00	-	1,00	699.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Tambakrejo Desa Sukorejo (P-APBD)	195.920.000,00	195.106.000,00	640/1414/KPA-PSU/412.	CV. HAN'S KARYA I	-	195.106.000,00	-	195.106.000,00	-	1,00	814.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN TEMAYANG</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Temayang Desa Temayang (P-APBD)	194.680.000,00	193.972.000,00	640/1438/KPA-PSU/412.	CV. EGA PUTRA PEI	-	193.972.000,00	-	193.972.000,00	-	1,00	708.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN NGAMBON</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase Ikk Ngambon Desa Bondol (P-APBD)	195.920.000,00	195.199.000,00	640/1421/KPA-PSU/412.	CV. HASTA KARYA	-	195.199.000,00	-	195.199.000,00	-	1,00	721.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN KAPAS</b>												
		Pembangunan Saluran Drainase IKK Ds. Kalianyar Kec. Kapas (P-APBD)	195.920.000,00	195.215.000,00	640/1430/KPA-PSU/412.	CV. ARDHAN (ISWA	-	195.215.000,00	-	195.215.000,00	-	1,00	705.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		<b>KECAMATAN BALEN</b>												
		Pembangunan Drainase Ds. Bulu RT. 1 RW. 1 Kec. Balen	177.320.000,00	176.624.000,00	640/1427/KPA-PSU/412.	CV. BANGUN JAYA	-	176.624.000,00	-	176.624.000,00	-	1,00	696.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKONING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		<b>BELANJA PENGAWASAN P APBD</b>												
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Bojonegoro (P-APBD)	50.000.000,00	45.617.000,00	640/904/PWS.PSU/412.2	CV. BHADRA BALA	-	45.617.000,00	-	45.617.000,00	-	1,00	4.383.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dander, Trucuk, Kapas, Sukosewu, Balen, Sumberrejo dan Kanor (P-APBD)	33.755.000,00	31.549.000,00	640/903/PWS.PSU/412.2	CV. REUSSIE (AHM)	-	31.549.000,00	-	31.549.000,00	-	1,00	2.206.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Kedungadem, Sugihwaras Temayang, Gondang, Bubulan dan Sekar (P-APBD)	27.790.000,00	27.346.000,00	640/905/PWS.PSU/412.2	CV. BINA DUTA PER	-	27.346.000,00	-	27.346.000,00	-	1,00	444.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Kasiman, Purwosari, Padang Ngasem, Ngambon, gayam, Malo dan Tambakrejo (P-APBD)	25.880.000,00	25.470.000,00	640/906/PWS.PSU/412.2	CV. BINA DUTA PER	-	25.470.000,00	-	25.470.000,00	-	1,00	410.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>2.</b>	<b>1.03.03.27.02.5.2.3.</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah</b>	50.000.000,00	49.403.000,00			-			-	-		597.000,00	
		Pengawasan Pembangunan IPAL Kel.Ledok Kulon Kec.Bojonegoro	50.000.000,00	49.403.000,00	640/41/KPA.PSU-SL/412	CV. BINA CIPTA CO	-	49.403.000,00	-	49.403.000,00	-	1,00	597.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>3.</b>	<b>2.05.1.03.03.24.05</b>	<b>Penataan RTH</b>	67.763.256,50	58.595.000,00			-			-	-		9.168.256,50	
		Pengawasan Pembangunan Taman di Pertigaan Jembatan Padangan, Gondang, dan Kalitidu	17.775.000,00	16.940.000,00	650/57/PGWS.SPK.PDP/	CV. CITRA SARANA	-	16.940.000,00	-	16.940.000,00	-	1,00	835.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembuatan Sumur dan Pompa Sible di Taman Talun,Taman A.Yani ,Taman MT,Haryono.Pembangunan Taman Bermain Anak di Barat Alun - Alun, Pembuatan Akses Jalan Untuk Disabilitas di Taman Alun-Alun,Taman Batu Semar di Alun - Alun Pemkab Bojonegoro.	49.988.256,50	41.655.000,00	650/68/PGWS.SPK.PDP/	CV. ALVIN CONSUL	-	41.655.000,00	-	41.655.000,00	-	1,00	8.333.256,50	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>4.</b>	<b>1.02.1.03.03.26.01</b>	<b>Pembangunan rumah sakit</b>	37.647.807.145,00	37.418.787.000,00			23.508.046.500,00			-	0,62		229.020.145,00	
		Peningkatan sarana prasarana RSUD Padangan Tahap IV	6.419.401.905,00	6.228.450.000,00	640/29/FL-BTB/412.205	PT. PERMATA ANUGRAH	2.611.464.500,00	-	-	-	0,42	0,42	190.951.905,00	Putus kontrak
		Pengawasan Peningkatan sarana prasarana RSUD Padangan Tahap IV	126.000.000,00	120.285.000,00	640/008/PWS.BTB/412.2	CV. SCALA (Ir. AGUS)	-	120.285.000,00	-	120.285.000,00	-	1,00	5.715.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019



NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pengawasan Pembangunan RSUD Sumberrejo Tahap III	274.848.000,00	270.000.000,00	640/011/PWS.BTB/412.2	CV. AZINDA JAYA (	-	270.000.000,00	-	270.000.000,00	-	1,00	4.848.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pemasangan Interior RSUD padangan tahap 2	46.969.000,00	46.062.000,00	640/251/PWS.BTB/412.2	CV. ABYAKTA CON	-	46.062.000,00	-	46.062.000,00	-	1,00	907.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Review Design RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro (P-APBD)	99.000.000,00	82.280.000,00	640/521/PRC.BTB/412.2	CV. SCALA (Ir. AGU	-	65.824.000,00	16.456.000,00	82.280.000,00	-	0,80	16.720.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Selasar RSUD Sosodoro Djatikoesoemo (P-APBD)	89.600.000,00	83.105.000,00	640/527/PRC.BTB/412.2	CV. KITA DESAIN (F	-	66.484.000,00	16.621.000,00	83.105.000,00	-	0,80	6.495.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Pemasangan Interior RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro (P-APBD)	70.000.000,00	66.605.000,00	640/529/PRC.BTB/412.2	CV. ELEMEN TIGA	-	66.605.000,00	-	66.605.000,00	-	1,00	3.395.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>5.</b>	<b>2.13.1.03.03.01.21.02</b>	<b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga</b>		2.207.274.967,98			899.309.900,00			-	0,46		(233.623.622,98)	
		Perenc. Pembangunan Saranan dan Prasarana Olahraga Stadion Letjend H. Sudirman	90.000.000,00	30.195.000,00	640/339/PRC-BTB/412.2	CV. RIZA ENGINEER	24.156.000,00	6.039.000,00	-	6.039.000,00	0,80	1,00	59.805.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Saranan dan Prasarana Olahraga Stadion Letjend H. Sudirman	65.000.000,00	22.137.000,00	640/253/PWS.BTB/412.2	CV. ABADI KARYA	-	22.137.000,00	-	22.137.000,00	-	1,00	42.863.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR DABONSIA Kab. Bojonegoro	1.344.200.980,00	1.830.869.767,98	640/513/FL-BTB/412.20	CV. SETYA JAYA (F	836.257.900,00	168.368.800,00	826.243.067,98	994.611.867,98	0,46	78,90%	(486.668.787,98)	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR DABONSIA Kab. Bojonegoro	69.868.415,00	48.620.000,00	640/383/PRC-BTB/412.2	CV. KITA DESAIN (F	38.896.000,00	9.724.000,00	-	9.724.000,00	0,80	1,00	21.248.415,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pemasangan ACP dan sarana pendukung lainnya GOR DABONSIA (P-APBD)	185.981.950,00	185.308.200,00	640/256/FPL.BTB/412.20	CV. DITA JAYA MA	-	185.308.200,00	-	185.308.200,00	-	1,00	673.750,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pengawasan Pemasangan ACP dan sarana pendukung lainnya GOR DABONSIA (P-APBD)	8.000.000,00	7.755.000,00	640/478/PWS.BTB/412.2	CV. KITA DESAIN (P	-	7.755.000,00	-	7.755.000,00	-	1,00	245.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan peningkatan sarana prasarana GOR (P-APBD)	210.600.000,00	82.390.000,00	640/533/PRC.BTB/412.2	CV. BANGUN KARYA	-	65.912.000,00	16.478.000,00	82.390.000,00	-	0,80	128.210.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>6.</b>	<b>1.03.1.03.03.02.03</b>	<b>Pembangunan gedung kantor</b>		2.305.577.342,48			1.521.509.700,00			-	0,54		520.550.327,32	
		Pengawasan Pembangunan Gedung B Pusdiklat dan pengembangan SDM Kab. Bojonegoro Tahap 3	129.163.000,00	128.760.000,00	640/005/PWS.BTB/412.2	CV. CAHYA AKBAR	-	128.760.000,00	-	128.760.000,00	-	1,00	403.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Sarana dan Prasarana PUSDIKLAT Landscap	2.102.554.669,80	1.820.391.342,48	640/555/FL-BTB/412.20	CV. PILAR MULTIT	1.445.412.100,00	374.979.242,48	-	374.979.242,48	0,79	1,00	282.163.327,32	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan Sarana dan Prasarana PUSDIKLAT Landscap	82.800.000,00	47.217.000,00	640/401/PRC.BTB/412.2	CV. IDEA KARYA N	37.773.600,00	9.443.400,00	-	9.443.400,00	0,80	1,00	35.583.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana PUSDIKLAT Landscap	62.100.000,00	48.537.000,00	640/347/PWS.BTB/412.2	CV. JASA KARYA E	-	48.537.000,00	-	48.537.000,00	-	1,00	13.563.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gudang Asset Jl. Pattimura Kabupaten Bojonegoro	49.000.000,00	47.905.000,00	640/245/PRC.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	38.324.000,00	9.581.000,00	-	9.581.000,00	0,80	1,00	1.095.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gudang Asset Jl. Pattimura Kabupaten Bojonegoro	35.000.000,00	34.182.000,00	640/271/PWS.BTB/412.2	CV. YUDHISTIRA CV	-	34.182.000,00	-	34.182.000,00	-	1,00	818.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan Gedung Logistik dan Aula DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro	96.547.500,00	48.070.000,00	640/456/PRC.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	-	48.070.000,00	-	48.070.000,00	-	1,00	48.477.500,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Gedung Logistik dan Aula DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro	68.962.500,00	45.870.000,00	640/385/PWS.BTB/412.2	CV. BINA DUTA PER	-	45.870.000,00	-	45.870.000,00	-	1,00	23.092.500,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Dinas PKP Cipta Karya Lanjutan (P-APBD)	200.000.000,00	84.645.000,00	640/535/PRC.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	-	84.645.000,00	-	84.645.000,00	-	1,00	115.355.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>7.</b>	<b>1.03.1.03.03.02.42</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	2.424.517.616,00	2.106.136.005,82			428.753.400,00			-	0,18		318.381.610,18	

NO	REKONING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
	5.2.3.49.01	Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Diskominfo	1.594.061.100,00	1.330.604.693,00	640/497/FL.BTB/412.2019	CV. ANUGRAH MAHENDRA	399.181.400,00	737.744.400,00	193.678.893,00	931.423.293,00	0,30	86,35%	263.456.407,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Diskominfo	50.000.000,00	49.291.000,00	640/297/PWS.BTB/412.2019	CV. RIZA ENGINEERING	-	49.291.000,00	-	49.291.000,00	-	1,00	709.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Sukosewu	8.000.000,00	7.755.000,00	640/403/PRC.BTB/412.2019	CV. CAHYA AKBAR	6.204.000,00	1.551.000,00	-	1.551.000,00	0,80	1,00	245.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Sukosewu	6.000.000,00	5.890.000,00	640/341/PWS.BTB/412.2019	CV. IDEA KARYA NUSANTARA	-	5.890.000,00	-	5.890.000,00	-	1,00	110.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi Pos Keamanan Alun - alun Kab. Bojonegoro	17.500.000,00	17.110.000,00	640/387/PRC.BTB/412.2019	CV. RIZA ENGINEERING	13.688.000,00	3.422.000,00	-	3.422.000,00	0,80	1,00	390.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi Pos Keamanan Alun - alun Kab. Bojonegoro	12.500.000,00	12.265.000,00	640/331/PWS.BTB/412.2019	CV. BINA DUTA PERKASA	-	12.265.000,00	-	12.265.000,00	-	1,00	235.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Peningkatan Sarana & Prasarana Gedung Pemkab Jl. Pattimura No. 26 Bojonegoro	12.500.000,00	12.100.000,00	640/289/PRC.BTB/412.2019	CV. ABADI KARYA NUSANTARA	9.680.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00	0,80	1,00	400.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi gedung kantor BKPP	290.374.416,00	241.175.312,82	640/737/FPL.BTB/412.2019	CV. KARYA NUGRA	-	241.175.312,82	-	241.175.312,82	-	1,00	49.199.103,18	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi gedung kantor BKPP	16.250.000,00	15.977.000,00	640/458/PRC.BTB/412.2019	CV. JASA KARYA EKA	-	15.977.000,00	-	15.977.000,00	-	1,00	273.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi gedung kantor BKPP	11.375.000,00	11.165.000,00	640/383/PWS.BTB/412.2019	CV. IDEA KARYA NUSANTARA	-	11.165.000,00	-	11.165.000,00	-	1,00	210.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat gedung Pemkab Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro ( P APBD )	8.000.000,00	7.782.000,00	640/458/PWS.BTB/412.2019	CV. ALVIN CONSULTING	-	7.782.000,00	-	7.782.000,00	-	1,00	218.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKONING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Rehabilitasi Halaman Kantor DPRD Kab. Bojonegoro ( P APBD )	174.970.800,00	173.991.000,00	640/251/FPL.BTB/412.20	CV. MARGO UTOMO	-	173.991.000,00	-	173.991.000,00	-	1,00	979.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi Halaman Kantor DPRD Kab. Bojonegoro ( P APBD )	8.000.000,00	7.837.000,00	640/472/PWS.BTB/412.20	CV. ALVIN CONSUL	-	7.837.000,00	-	7.837.000,00	-	1,00	163.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Bojonegoro (P APBD)	199.986.300,00	198.536.000,00	640/252/FPL.BTB/412.20	CV. SATRIA KARYA	-	198.536.000,00	-	198.536.000,00	-	1,00	1.450.300,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Bojonegoro (P APBD)	15.000.000,00	14.657.000,00	640/474/PWS.BTB/412.20	CV. BINA DUTA PER	-	14.657.000,00	-	14.657.000,00	-	1,00	343.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>8.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.01</b>	<b>Pembangunan gedung sekolah</b>	60.214.784,00	58.547.000,00			36.761.600,00			-	0,61		1.667.784,00	
		Perenc. Pembangunan gedung SDN Temu I Kec. Kanor	14.327.508,00	13.915.000,00	640/259/PRC.BTB/412.20	CV. YUDHISTIRA CO	11.132.000,00	2.783.000,00	-	2.783.000,00	0,80	1,00	412.508,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan gedung SDN Temu I Kec. Kanor	12.858.020,00	12.595.000,00	640/369/PWS.BTB/412.20	CV. ALVIN CONSUL	-	12.595.000,00	-	12.595.000,00	-	1,00	263.020,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan gedung SDN Tejo Kec. Kanor	14.327.508,00	13.887.000,00	640/261/PRC.BTB/412.20	CV. YUDHISTIRA CO	11.109.600,00	2.777.400,00	-	2.777.400,00	0,80	1,00	440.508,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan gedung SDN Nglarangan I Kec. Kanor	18.701.748,00	18.150.000,00	640/269/PRC.BTB/412.20	CV. ALVIN CONSUL	14.520.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00	0,80	1,00	551.748,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>9.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.41</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah</b>	2.486.441.985,50	2.157.175.399,79			704.060.100,00			-	0,28		329.266.585,71	
		Pengawasan Pavingisasi halaman SDN Sukorejo Kec. Malo *	8.000.010,00	7.837.000,00	640/213/PWS.BTB/412.20	CV. GRAHA H2S CO	-	7.837.000,00	-	7.837.000,00	-	1,00	163.010,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pavingisasi halaman SDN Tanggungan II Ngraho *	178.195.150,00	176.969.000,00	640/290/FPL.BTB/412.20	CV. NOGO KENCON	-	176.969.000,00	-	176.969.000,00	-	1,00	1.226.150,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pavingisasi halaman SDN Tanggungan II Ngraho *	7.800.010,00	7.452.000,00	640/343/PRC.BTB/412.20	CV. AGRAPANA ( LI	5.961.600,00	1.490.400,00	-	1.490.400,00	0,80	1,00	348.010,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pengawasan Pavingisasi halaman SDN Tanggungan II Ngraho *	8.000.010,00	7.700.000,00	640/495/PWS.BTB/412.2019	CV. ABDI RAMA (N)	-	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-	1,00	300.010,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi bangunan SDN Wadang III Kec. Ngasem	652.108.810,50	533.863.729,68	640/491/FL-BTB/412.2019	CV. GRAHA Cipta E	360.603.500,00	173.260.229,68	-	173.260.229,68	0,68	1,00	118.245.080,82	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi bangunan SDN Pejok Kec. Kedungadem	18.558.540,00	18.040.000,00	640/313/PRC.BTB/412.2019	CV. MANDALIKA (N)	14.432.000,00	3.608.000,00	-	3.608.000,00	0,80	1,00	518.540,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi bangunan SDN Pejok Kec. Kedungadem	16.655.100,00	16.335.000,00	640/359/PWS.BTB/412.2019	CV. CAHYA AKBAR	-	16.335.000,00	-	16.335.000,00	-	1,00	320.100,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi bangunan SDN Jamberejo II Kec. Kedungadem	433.646.171,00	352.722.005,41	640/680/FL-BTB/412.2019	CV. EGA PUTRA PE	-	352.722.005,41	-	352.722.005,41	-	1,00	80.924.165,59	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi bangunan SDN Semlaran Kec. Malo	749.984.200,00	627.721.233,70	640/201/FL-BTB/412.2019	CV. I K O N (MUHAN	271.363.800,00	356.357.433,70	-	356.357.433,70	0,43	1,00	122.262.966,30	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi bangunan SDN Semlaran Kec. Malo	32.055.660,00	31.130.000,00	640/315/PRC.BTB/412.2019	CV. GRAHA H2S CO	24.904.000,00	6.226.000,00	-	6.226.000,00	0,80	1,00	925.660,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi bangunan SDN Semlaran Kec. Malo	24.658.200,00	24.282.000,00	640/221/PWS.BTB/412.2019	CV. AZHAA KONSU	-	24.282.000,00	-	24.282.000,00	-	1,00	376.200,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi bangunan SDN Sambongrejo Kec. Sumberrejo	10.122.840,00	9.845.000,00	640/317/PRC.BTB/412.2019	CV. YUDHISTIRA CV	7.876.000,00	1.969.000,00	-	1.969.000,00	0,80	1,00	277.840,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi bangunan SDN Napis IV Kec. Tambakrejo	21.089.250,00	20.597.000,00	640/237/PWS.BTB/412.2019	CV. ANRIFAH ENGI	-	20.597.000,00	-	20.597.000,00	-	1,00	492.250,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi bangunan SDN Sratujejo I Kec. Baureno *	87.099.684,00	86.582.431,00	640/288/FPL.BTB/412.2019	CV. AULIA ( RIDLW	-	86.582.431,00	-	86.582.431,00	-	1,00	517.253,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi bangunan SDN Sratujejo I Kec. Baureno *	3.900.000,00	3.767.000,00	640/345/PRC.BTB/412.2019	CV. ABYAKTA CON	3.013.600,00	753.400,00	-	753.400,00	0,80	1,00	133.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENERING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pengawasan Rehabilitasi bangunan SDN Sratujejo 1 Kec. Baureno *	4.000.000,00	3.877.000,00	640/496/PWS.BTB/412.2	CV. ABDI RAMA (N	-	3.877.000,00	-	3.877.000,00	-	1,00	123.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi Bangunan SDN Kedungrejo Kec. Sumberjo	6.000.000,00	5.830.000,00	640/385/PRC.BTB/412.2	CV. SURYA CONSUI	4.664.000,00	1.166.000,00	-	1.166.000,00	0,80	1,00	170.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi bangunan SDN Karangpacar Kec. Bojonegoro	14.470.000,00	14.052.000,00	640/391/PRC.BTB/412.2	CV. RIZA ENGINEER	11.241.600,00	2.810.400,00	-	2.810.400,00	0,80	1,00	418.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi bangunan SDN Karangpacar Kec. Bojonegoro	10.129.000,00	9.900.000,00	640/333/PWS.BTB/412.2	CV. BINA CIPTA CO	-	9.900.000,00	-	9.900.000,00	-	1,00	229.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi gedung SDN Tanjungharjo 1 Kec. Kapas (P-APBD)	199.969.350,00	198.673.000,00	640/254/FPL.BTB/412.2	CV. ENGGAL JAYA	-	198.673.000,00	-	198.673.000,00	-	1,00	1.296.350,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>10.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.12</b>	<b>Pembangunan pepustakaan sekolah</b>	19.750.000,00	19.332.000,00			7.568.000,00			-	0,38		418.000,00	
		Perenc. Pembangunan Perpustakaan SDN Sidodadi 2 Kec. Sukosewu	9.750.000,00	9.460.000,00	640/255/PRC.BTB/412.2	CV. IDEA KARYA N	7.568.000,00	1.892.000,00	-	1.892.000,00	0,80	1,00	290.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Perpustakaan SDN Sidodadi 2 Kec. Sukosewu	10.000.000,00	9.872.000,00	640/373/FPWS.BTB/412.2	CV. JASA KARYA E	-	9.872.000,00	-	9.872.000,00	-	1,00	128.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>11.</b>	<b>1.03.1.03.03.33.02</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat Sarana Peribadatan</b>	2.011.431.350,00	1.795.138.983,17			896.763.800,00			-	0,45		216.292.366,83	
	<b>5.2.3.49.08</b>	Rehabilitasi masjid Al-Abidin Jl. AKBP. M. Soeroko Kec. Bojonegoro	1.895.624.100,00	1.699.246.983,17	640/505/FL-BTB/412.205	CV. HUSADA KARYA	857.779.800,00	-	841.467.183,17	841.467.183,17	0,50	1,00	196.377.116,83	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi masjid Al-Abidin Jl. AKBP. M. Soeroko Kec. Bojonegoro	67.721.250,00	48.730.000,00	640/233/PRC.BTB/412.2	CV. BINA DUTA PER	38.984.000,00	-	9.746.000,00	9.746.000,00	0,80	1,00	18.991.250,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi masjid Al-Abidin Jl. AKBP. M. Soeroko Kec. Bojonegoro	48.086.000,00	47.162.000,00	640/295/PWS.BTB/412.2	CV. REUSSIE (AHM)	-	-	47.162.000,00	47.162.000,00	-	1,00	924.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>12.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.44</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah</b>	1.626.409.020,00	1.473.958.124,34			468.532.470,00			-	0,29		152.450.895,66	
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyorejo 2 Kec. Tambakrejo	24.658.200,00	24.255.000,00	640/259/PWS.BTB/412.2	CV. ANRIFAH ENGI	-	24.255.000,00	-	24.255.000,00	-	1,00	403.200,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKUNING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Pilangsari Kec. Kalitidu	22.963.200,00	22.055.000,00	640/319/PRC.BTB/412.2	CV. WANGSITO KALITIDU	17.644.000,00	4.411.000,00	-	4.411.000,00	0,80	1,00	908.200,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Pilangsari Kec. Kalitidu	17.664.000,00	17.297.000,00	640/261/PWS.BTB/412.2	CV. EKA KARYA CANTIK	-	17.297.000,00	-	17.297.000,00	-	1,00	367.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Sumuragung II Kec. Sumberrejo	27.416.025,00	26.510.000,00	640/367/PRC.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	21.208.000,00	5.302.000,00	-	5.302.000,00	0,80	1,00	906.025,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Sumuragung II Kec. Sumberrejo	21.089.250,00	20.707.000,00	640/311/PWS.BTB/412.2	CV. SURYA CONSUL	-	20.707.000,00	-	20.707.000,00	-	1,00	382.250,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Wedoro I Kec. Sugihwaras	27.416.025,00	26.427.000,00	640/323/PRC.BTB/412.2	CV. REUSSIE (AHMAD)	21.141.600,00	5.285.400,00	-	5.285.400,00	0,80	1,00	989.025,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Wedoro I Kec. Sugihwaras	21.089.250,00	20.790.000,00	640/351/PWS.BTB/412.2	CV. ABADI KARYA CANTIK	-	20.790.000,00	-	20.790.000,00	-	1,00	299.250,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi ruang kelas SDN Deru Kec. Sumberrejo	646.969.522,50	568.877.236,07	640/553/FL-BTB/412.205	CV. WAHYU KUSUNINGRAHA	170.663.170,00	398.214.066,07	-	398.214.066,07	0,30	1,00	78.092.286,43	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Deru Kec. Sumberrejo	27.416.025,00	26.620.000,00	640/333/PRC.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	21.296.000,00	5.324.000,00	-	5.324.000,00	0,80	1,00	796.025,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Deru Kec. Sumberrejo	21.089.250,00	20.735.000,00	640/345/PWS.BTB/412.2	CV. YUDHISTIRA CANTIK	-	20.735.000,00	-	20.735.000,00	-	1,00	354.250,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Tulungrejo Kec. Sumberrejo	27.416.025,00	26.455.000,00	640/349/PRC.BTB/412.2	CV. SURYA CONSUL	21.164.000,00	5.291.000,00	-	5.291.000,00	0,80	1,00	961.025,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Tulungrejo Kec. Sumberrejo	21.089.250,00	20.652.000,00	640/291/PWS.BTB/412.2	CV. ALVIN CONSUL	-	20.652.000,00	-	20.652.000,00	-	1,00	437.250,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo	646.969.522,50	581.353.888,27	640/541/FL-BTB/412.205	CV. GUNUNG HARTI	174.406.100,00	101.481.100,00	305.466.688,27	406.947.788,27	0,30	32,08%	65.615.634,23	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENERING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo	27.416.025,00	26.262.000,00	640/393/PRC.BTB/412.2	CV. SHAKTI KARYA	21.009.600,00	5.252.400,00	-	5.252.400,00	0,80	1,00	1.154.025,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Turi 4 Kec. Tambakrejo	21.089.250,00	20.680.000,00	640/321/PWS.BTB/412.2	CV. BINA CIPTA CO	-	20.680.000,00	-	20.680.000,00	-	1,00	409.250,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN Trucuk 1 Kec. Trucuk	24.658.200,00	24.282.000,00	640/301/PWS.BTB/412.2	CV. RIZA ENGINEER	-	24.282.000,00	-	24.282.000,00	-	1,00	376.200,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>JUMLAH</b>			65.700.108.771,80	54.882.217.123,58			29.523.021.950,00	26.825.793.872,16	3.027.585.201,42	29.853.379.073,58	0,45		10.817.891.648,22	

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. Hj. ANNA MU'AWANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DAFTAR REKAPITULASI UTANG PAKET KEGIATAN BELANJA NON MODAL TAHUN 2018**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
1.	1.03.03.30.03.5.2.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	3.830.735.000,00	2.530.476.000,00			184.935.350,00				4,83%		1.300.259.000,00	
		<b>Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga</b>												
		<b>Kecamatan Malo</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Wslie" Ds. Sukorejo Kecamatan Malo	192.000.000,00	190.240.000,00	640/601/KPA-PSU/412.205/2018 23/8/18	CV. MEGA KARYA MANDIRI (ACHMAD SIROJUL MUNIR, ST)	-	190.240.000,00	-	190.240.000,00	0%	100%	1.760.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
		<b>Kecamatan Ngraho</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Ngradin Makmur" Desa Ngradin Kecamatan Padangan	192.000.000,00	189.275.000,00	640/489/KPA-PSU/412.205/2018 8/8/18	CV. PERKASA (Hj. MUSFIROH)	-	187.825.770,00	-	187.825.770,00	0%	100%	2.725.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019 & Denda
		<b>Kecamatan Bojonegoro</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Mulyoagung Makmur" Ds. Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro	192.000.000,00	190.393.000,00	640/490/KPA-PSU/412.205/2018 8/8/18	CV. ASAHI KARYA SENTOSA (SUNARDI)	-	190.393.000,00	-	190.393.000,00	0%	100%	1.607.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
		<b>Kecamatan Baureno</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Trojalu Makmur" Ds. Trojalu Kecamatan Baureno	192.000.000,00	190.580.000,00	640/411/KPA-PSU/412.205/2018 26/7/18	CV. KARTIKA KUSUMA (RACHMAD GANDI KARTIKA)	-	189.245.940,00	-	189.245.940,00	0%	100%	1.420.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019 & Denda
		<b>Kecamatan Kepohbaru</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Tirta Asli" Ds. Turigede Kecamatan Kepohbaru	144.000.000,00	142.221.000,00	640/492/KPA-PSU/412.205/2018 8/8/18	CV. ASAHI KARYA SENTOSA (SUNARDI)	-	142.221.000,00	-	142.221.000,00	0%	100%	1.779.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Tirto Wening" Ds. Balongdowo Kec. Kepohbaru	336.000.000,00	320.006.000,00	640/538/KPA-PSU/412.205/2018 20/8/18	CV. PERMATA HATI (HARIYOKO)	-	320.006.000	-	320.006.000,00	0%	100%	15.994.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019



NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Tirta Prayungan" Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo (P-APBD)	200.000.000,00	199.118.000	640/1506/KPA-PSU/412.205/2018 13/11/18	CV. SEMBILAN BINTANG (SUHARTO)	-	199.118.000,00	-	199.118.000,00	0%	100%	882.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
		<b>Kecamatan Sugihwaras</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Drenges Makmur" Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras (P-APBD)	200.000.000,00	199.570.000	640/1481/KPA-PSU/412.205/2018 12/11/18	CV. RISKY JAYA ( RIZKY AGUSTIYAN )	-	199.570.000,00	-	199.570.000,00	0%	100%	430.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
		<b>Kecamatan Sekar</b>												
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih HIPPAM "Tirta Miyono" Desa Miyono Kecamatan Sekar (P-APBD)	200.000.000,00	199.590.000	640/1478/KPA-PSU/412.205/2018 12/11/18	CV. CAHYA GEMILANG (AGUS ERMAWAN)	-	199.590.000,00	-	199.590.000,00	0%	100%	410.000,00	Kurang Bayar dibayarkan di Tahun anggaran 2019
<b>2.</b>	<b>1.03.03.16.02.5.2.2.</b>	<b>Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>195.388.380,00</b>			-			-	<b>0,00%</b>		<b>2.611.620,00</b>	
	<b>5.2.2.35.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>								-			-	
		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga												
		Pembangunan Sanitasi Limbah Setempat Ds. Mojosari Kec. Kepohbaru (P-APBD)	198.000.000	195.388.380	640/136/KPA.PSU-SL/412.205/2018 5/11/18	CV. SUGIH ARTA (TOTOK SUGIARTO)	-	195.388.380,00	-	195.388.380,00	0%	100%	2.611.620,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>3.</b>	<b>1.04.1.03.03.01.15.06</b>	<b>Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>275.484.000,00</b>			<b>43.000.000,00</b>			-	<b>13,65%</b>		<b>39.516.000,00</b>	
	<b>5.2.2.35</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang</b>					43.000.000,00							
		Peningkatan kualitas Rumah Ds. Bakung Kec.Kanor (P-APBD)*	157.500.000,00	120.442.000,00	640/190/KPA - PP/412.205/2018 11/13/18	CV. JAYA KARYA (AGUSETYA KURNIAWAN)	-	120.442.000,00	-	120.442.000,00	0%	100%	37.058.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Peningkatan Kualitas Rumah Ds.Kedungdowo Kec.Sugihwaras (P-APBD)*	157.500.000,00	155.042.000,00	640/193/KPA - PP/412.205/2018 11/13/18	CV.AULA KARYA MANDIRI (SODIQ MUSTOFA)	-	155.042.000,00	-	155.042.000,00	0%	100%	2.458.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>4.</b>	<b>1.03.1.03.03.02.22</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.951.000,00</b>			-			-	<b>0,00%</b>		<b>6.951.000,00</b>	

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Pengawasan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Mamin Kab. Bojonegoro	7.000.000,00	6.951.000,00	050/99/SPK-BPJ/412.205/2018 11/05/18	CV. RIZA ENGINEERING (RIZA RIFA'I, ST)	-	6.951.000,00	-	6.951.000,00	0%	100%	6.951.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
5.	2.13.1.03.03.01.21.02	<b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga</b>	<b>330.477.300,00</b>	<b>314.651.000,00</b>			<b>118.878.500,00</b>			<b>-</b>	<b>35,97%</b>		<b>15.826.300,00</b>	
	<b>5.2.2.34.01</b>						4.742.500,00							
		Perenc. Pembangunan lapangan volley Sub Denpom-V/2.1	12.000.000,00	11.770.000,00	640/371.1/PRC.BTB/412.205/2018 03/02/18	CV. RIZA ENGINEERING (RIZA RIFA'I, ST)	9.416.000,00	2.354.000,00	-	2.354.000,00	80%	100%	230.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Olahraga Karang Taruna "SAMBIROTO" Desa Sambiroto Kec. Kapas (Lanjutan)*	49.500.000,00	48.400.000,00	640/237/PRC.BTB/412.205/2018 01/16/18	CV. REUSSIE (AHMAD SIDIG, ST.)	38.720.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00	80%	100%	1.100.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Peningkatan sarana prasarana lapangan Karang Taruna "Mandiri" Desa Tlogoaung Kec. Kedungadem*(P-APBD)	173.977.300,00	171.981.000,00	640/250/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. MULYA JAYA PRIMA (IMAM PRIADI)	-	171.981.000,00	-	171.981.000,00	0%	100%	1.996.300,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Pembangunan Sport Center KODIM Lanjutan(P-APBD)	95.000.000,00	82.500.000,00	640/531/PRC.BTB/412.205/2018 10/30/18	CV. CAHYA AKBAR CONSULTANT ( MOHAMMAD BUDI PRAYOGO, ST )	66.000.000,00	-	16.500.000,00	16.500.000,00	80%	80%	12.500.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
6.	1.03.1.03.03.02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	<b>1.541.939.800,00</b>	<b>1.514.287.707,32</b>			<b>1.143.168.800,00</b>			<b>-</b>	<b>74,14%</b>		<b>27.652.092,68</b>	
	<b>5.2.2.34.01</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung PMI Jl. Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro	1.501.939.800,00	1.474.976.707,32	640/232/FL-BTB/412.205/2018 07/02/18	CV. YUMANA KARYA (Ir. DANIEL FERDIANTA)	1.143.168.800,00	331.807.907,32	-	331.807.907,32	78%	100%	26.963.092,68	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung PMI Jl. Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro	40.000.000,00	39.311.000,00	640/231/FL-BTB/412.205/2018 07/02/18	CV. JASA KARYA ENGINEERING (SANDA PRAJA RIDUWAN, ST)	-	39.311.000,00	-	39.311.000,00	0%	100%	689.000,00	kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
7.	1.03.1.03.03.02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>298.844.000,00</b>	<b>209.220.000,00</b>			<b>167.376.000,00</b>			<b>-</b>	<b>56,01%</b>		<b>89.624.000,00</b>	
		Perencanaan Rehabilitasi gedung Satlantas ( P-APBD )	158.100.000,00	82.720.000,00	640/523/PRC.BTB/412.205/2018 10/30/18	CV. BINA DUTA PERMATA (VENTY WIDYA N, Spd.)	66.176.000,00	-	16.544.000,00	16.544.000,00	80%	80%	75.380.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perencanaan Rehabilitasi Kantor Sat. Reskoba Polres ( P-APBD )	76.644.000,00	65.395.000,00	640/525/PRC.BTB/412.205/2018 10/30/18	CV. ALVIN CONSULTANT (LELI DARMAYANTI, ST)	52.316.000,00	-	13.079.000,00	13.079.000,00	80%	80%	11.249.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan SKCK Polres ( P-APBD )	64.100.000,00	61.105.000,00	640/539/PRC.BTB/412.205/2018 10/30/18	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	48.884.000,00	-	12.221.000,00	12.221.000,00	80%	80%	2.995.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>8.</b>	<b>1.03.1.03.03.35.02</b>	<b>Pembangunan gedung bukan kantor</b>	<b>1.651.305.950,00</b>	<b>1.555.509.034,64</b>			<b>181.169.830,00</b>			<b>-</b>	<b>10,97%</b>		<b>95.796.915,36</b>	
	<b>5.2.2.23.01</b>	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga												
		Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Yayasan Kirana Larasati Ds. Sembung Kec. Kapas *	10.500.000,00	10.257.000,00	640/287/PWS-BTB/412.205/2018 07/09/18	CV. IDEA KARYA NUSA ( ABDUL MAJID)	-	10.257.000,00	-	10.257.000,00	0%	100%	243.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Gedung Serbaguna MWC NU Ds. Temayang Kec. Temayang RT 1 RW 1*	554.999.850,00	465.890.434,64	640/493/FL-BTB/412.205/2018 08/28/18	CV. ALFA GELORA SEJAHTERA (AGUS WAHYUDI, ST)	139.767.130,00	326.123.304,64	-	326.123.304,64	30%	100%	89.109.415,36	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Gedung Ponpes YASPIRA Ds. Tulungagung Kec. Baureno * (P-APBD)	174.970.800,00	174.280.000,00	640/227/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. DHIBRA JAYA (PUTRI YUNITA DEWI)	-	102.162.900,00	72.117.100,00	174.280.000,00	0%	63,62%	690.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan PonPes "Salafiah Mambaul Ulum" Ds. Bulu Kec. Sugihwaras * (P-APBD)	174.970.800,00	173.742.000,00	640/268/FPL.BTB/412.205/2018 6/11/18	CV. KURNIA JAYA (DIKI HARIYANTO)	41.402.700,00	-	132.339.300,00	132.339.300,00	24%	71%	1.228.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Pagar Kantor IPHI Ds. Sidomukti Kec. Kepohbaru * (P-APBD)	87.986.000,00	87.315.500,00	640/225/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. ALZI PUTRA (MOCH.NASIHIN)	-	50.258.800,00	37.056.700,00	87.315.500,00	0%	62,56%	670.500,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Gedung Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Al Kautsar Ds. Campurejo Kec. Bojonegoro * (P-APBD)	122.966.100,00	122.057.400,00	640/220/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. PUTRA PANDAN WANGI (YANUAR DIDIK PRIHADI, ST)	-	122.057.400,00	-	122.057.400,00	0%	100%	908.700,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Gedung Serbaguna PC Muslimat NU Ds. Pacul Kec. Bojonegoro * (P-APBD)	174.970.800,00	173.970.000,00	640/226/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. NUSANTARA UTAMA (AMROZI, SH)	-	173.970.000,00	-	173.970.000,00	0%	100%	1.000.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Asrama PonPes "Al-Munawar" Ds. Kunci Kec. Dander * (P-APBD)	174.970.800,00	174.046.700,00	640/228/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. BAROKAH (H.M. HARIS, S.Ag)	-	123.051.000,00	50.995.700,00	174.046.700,00	0%	75,70%	924.100,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan Gedung Asrama Santri Ponpes An Nuroniyah Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander * (P-APBD)	174.970.800,00	173.950.000,00	640/226/FPL.BTB/412.205/2018 11/05/18	CV. NUSANTARA UTAMA (AMROZI, SH)	-	124.322.000,00	49.628.000,00	173.950.000,00	0%	76,47%	1.020.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>9.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.01</b>	<b>Pembangunan gedung sekolah</b>	<b>563.770.830,00</b>	<b>466.586.048,78</b>			<b>76.919.800,00</b>			<b>-</b>	<b>13,64%</b>		<b>97.184.781,22</b>	
	<b>5.2.2.34.01</b>	Pembangunan gedung MI Muhammadiyah Ds. Klepek Kec. Sukosewu *	270.785.970,00	218.629.592,72	640/688/FL-BTB/412.205/2018 10/02/18	CV. AGRO PUTRA (M. TAJAB )	-	-	218.629.592,72	218.629.592,72	0%	100%	52.156.377,28	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGA N	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Perenc. Pembangunan gedung MI Muhammadiyah Ds. Klepek Kec. Sukosewu *	11.699.415,00	11.220.000,00	640/263/PRC.BTB/412.205/2018 01/22/18	CV. IDEA KARYA NUSA (ABDUL MAJID., A.Md.)	8.976.000,00	-	2.244.000,00	2.244.000,00	80%	100%	479.415,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pengawasan Pembangunan gedung MI Muhammadiyah Ds. Klepek Kec. Sukosewu *	10.499.475,00	10.257.000,00	640/379/PWS.BTB/412.205/2018 10/01/18	CV. JASA KARYA ENGINEERING (SANDA PRAJA RIDUWAN, ST)	-	-	10.257.000,00	10.257.000,00	0%	100%	242.475,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan gedung MI Islamiyah Ds. Batokan Kec. Kasiman *	270.785.970,00	226.479.456,06	640/674/FL-BTB/412.205/2018 10/01/18	CV. GRAHANATA (HERI CAHYONO PUTRA)	67.943.800,00	-	158.535.656,06	158.535.656,06	30%	100%	44.306.513,94	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>10.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.41</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah</b>	<b>358.999.506,00</b>	<b>300.011.000,00</b>			<b>243.953.900,00</b>			<b>-</b>	<b>67,95%</b>		<b>58.988.506,00</b>	
	<b>5.2.2.34.01</b>	Rehabilitasi Bangunan Darud Dakwah Ds. Pasinan Kec. Baureno*	358.999.506,00	300.011.000,00	640/533/FL-BTB/412.205/2018 08/29/18	CV. KAWE PERTAMA (EKO GUNDOYO)	243.953.900,00	-	56.057.100,00	56.057.100,00	81%	80,45%	58.988.506,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>11.</b>	<b>1.01.1.03.03.16.44</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah</b>	<b>835.817.941,00</b>	<b>713.525.603,07</b>			<b>230.461.180,00</b>			<b>-</b>	<b>27,57%</b>		<b>122.292.337,93</b>	
	<b>5.2.2.34.01</b>	Rehabilitasi ruang kelas MI Islamiyah Ds. Kacangan Kec. Tambakrejo	801.911.341,00	680.718.603,07	640/573/FL-BTB/412.205/2018 09/03/18	CV. RAHAYU (RONI)	204.215.580,00	384.857.800,00	91.645.223,07	476.503.023,07	30%	87,91%	121.192.737,93	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Perenc. Rehabilitasi ruang kelas MI Islamiyah Ds. Kacangan Kec. Tambakrejo	33.906.600,00	32.807.000,00	640/235/PRC.BTB/412.205/2018 01/16/18	CV. BINA CIPTA CONSULTANT (IBNU SURYONO, ST)	26.245.600,00	6.561.400,00	-	6.561.400,00	80%	100%	1.099.600,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>12.</b>	<b>1.01.1.03.03.17.01</b>	<b>Pembangunan gedung sekolah</b>	<b>1.431.983.456,50</b>	<b>1.251.807.043,27</b>			<b>337.205.100,00</b>			<b>-</b>	<b>23,55%</b>		<b>180.176.413,23</b>	
							4.819.500,00							
		Pengawasan Pembangunan gedung serbaguna MTs Miftahul Ulum Ds. Sitiaji Kec. Sukosewu	13.125.000,00	12.760.000,00	640/371/PWS.BTB/412.205/2018 10/01/18	CV. IDEA KARYA NUSA ( ABDUL MAJID)	-	-	12.760.000,00	12.760.000,00	0%	100%	365.000,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan gedung SMP Muhammadiyah 9 Kec. Bojonegoro	923.496.455,00	782.963.043,27	640/535/FL-BTB/412.205/2018 08/29/18	CV. TIAN KARYA (YAYUK SRI WINARTIASIH)	234.888.900,00	-	547.862.743,27	547.862.743,27	30%	100%	140.533.411,73	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019 & Denda
		Pembangunan gedung mushola SMK 4 Kec. Bojonegoro	363.399.501,50	324.989.000,00	640/583/FL-BTB/412.205/2018 09/03/18	CV. MUBAROK (H. MOCH AGUS SALIM, SE)	97.496.700,00	-	227.492.300,00	227.492.300,00	30%	100%	38.410.501,50	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
		Pembangunan RKB Pondok Pesantren ATTAUHID AL MALIKI Ds. Leran Kec. Kalitidu * (P-APBD)	131.962.500,00	131.095.000,00	640/257/FPL.BTB/412.205/2018 11/06/18	CV. ENGGAL JAYA PUTRA (MOCH. AGUS ROZAK)	-	-	131.095.000,00	131.095.000,00	0%	100%	867.500,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019
<b>13.</b>	<b>1.01.1.03.03.17.41</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah</b>	<b>1.937.530.800,00</b>	<b>1.714.797.000,00</b>			<b>1.045.168.721,50</b>			<b>-</b>	<b>53,94%</b>		<b>222.733.800,00</b>	

NO	REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	REKANAN	REALISASI PER 31 DESEMBER	YANG BELUM TERSERAP (UTANG)			PRESENTASE		SISA ANGGARAN	KET
								PERGESERAN	P-APBD	JUMLAH	KEUANGAN	FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11 = 5 - 8)	(12)	(13)	(14 = 4 - 5)	(15)
		Rehabilitasi Gedung SMPK Shanto Tarsisius Kec. Bojonegoro	1.937.530.800,00	1.714.797.000,00	640/27/FL-BTB/412.205/2018 03/02/18 640/823/FPL.BTB/412.205/2018 12/14/18	CV. ARBI JAYA (MOCH. ZAINAL ABIDIN, SE) CV. YUMANA KARYA (Ir. DANIEL FERDIANTA)	1.045.168.721,50	-	436.873.000,00	436.873.000,00	61%	77,30%	222.733.800,00	Kurang bayar dibayarkan tahun anggaran 2019 ( P-APBD ) dan Putus Kontrak
<b>JUMLAH</b>			<b>13.301.404.583,50</b>	<b>11.048.693.817,08</b>			<b>3.772.237.181,50</b>	<b>5.682.587.260,96</b>	<b>2.419.668.832,12</b>	<b>8.102.256.093,08</b>	<b>28,36%</b>		<b>2.259.612.766,42</b>	

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. H. ANNA MU'AWANAH

Lampiran G : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor :

Tanggal :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**  
**KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
1	PURWOSARI	Pelem	75.000.000,00	1.373.051.400,00	-	1.448.051.400,00	430.886.720,00	637.500.000,00	70.651.985,00	309.012.695,00	-	1.448.051.400,00	-	-	-
		Ngrejeng	113.557.255,00	1.857.785.728,00	-	1.971.342.983,00	491.950.404,00	1.063.488.216,00	109.875.000,00	155.807.167,00	-	1.821.120.787,00	-	-	150.222.196,00
		Tlatah	105.446.831,51	1.839.144.899,00	-	1.944.591.730,51	530.421.141,50	1.127.402.400,00	127.825.000,00	32.765.000,00	2.329.700,00	1.820.743.241,50	3.266.940,32	-	127.115.429,33
		Kaliombo	74.661.500,00	1.881.040.200,00	13.176.817,46	1.968.878.517,46	518.626.016,43	1.042.163.677,82	129.375.000,00	149.200.000,00	-	1.839.364.694,25	-	-	129.513.823,21
		Tinumpuk	36.000.000,00	1.125.721.400,00	159.759,23	1.161.881.159,23	382.289.999,23	566.942.410,00	67.750.000,00	144.898.750,00	-	1.161.881.159,23	-	-	-
		Pungkur	75.000.000,00	1.442.563.750,00	-	1.517.563.750,00	495.159.586,00	655.434.244,00	29.524.000,00	148.607.350,00	-	1.328.725.180,00	-	-	188.838.570,00
		Sedahkidul	58.000.000,00	1.521.503.950,00	-	1.579.503.950,00	446.899.380,00	746.823.900,00	59.767.200,00	180.865.820,00	-	1.434.356.300,00	-	-	145.147.650,00
		Pojok	60.740.000,00	1.855.756.900,00	800.000,00	1.917.296.900,00	595.265.000,00	469.984.100,00	771.859.000,00	80.188.800,00	-	1.917.296.900,00	-	-	-
		Purwosari	239.124.152,00	1.537.928.900,00	7.083.454,00	1.784.136.506,00	438.662.718,00	812.726.550,00	157.627.600,00	226.309.388,00	-	1.635.326.256,00	15.000.000,00	15.000.000,00	148.810.250,00
		Gapluk	83.500.000,00	1.293.691.095,00	-	1.377.191.095,00	555.645.095,00	626.891.000,00	42.000.000,00	152.655.000,00	-	1.377.191.095,00	1.975.000,00	-	-
2	DANDER	Kuniran	71.050.000,00	1.794.956.143,00	-	1.866.006.143,00	522.339.000,00	1.062.604.543,00	177.762.600,00	103.300.000,00	-	1.866.006.143,00	-	-	-
		Donan	25.000.000,00	1.287.804.300,00	-	1.312.804.300,00	425.571.800,00	709.928.200,00	107.787.300,00	69.517.000,00	-	1.312.804.300,00	-	-	-
		Ngunut	204.439.000,00	1.875.851.590,00	-	2.080.290.590,00	613.888.300,00	1.217.781.015,00	193.129.000,00	53.487.000,00	-	2.078.285.315,00	1.381.552,00	-	3.386.827,00
		Dander	154.000.000,00	2.036.977.775,14	4.684.134,20	2.195.661.909,34	594.003.399,92	829.108.269,00	426.729.266,00	149.131.200,00	-	1.998.972.134,92	-	-	196.689.774,42
		Growok	132.447.000,00	1.406.789.800,00	-	1.539.236.800,00	571.225.700,00	603.237.500,00	162.897.000,00	201.876.600,00	-	1.539.236.800,00	-	-	-
		Sumberarum	95.500.000,00	1.412.012.400,00	369.499.000,00	1.877.011.400,00	562.723.900,00	664.962.039,00	356.931.000,00	147.300.000,00	-	1.731.916.939,00	33.802.322,00	-	178.896.783,00
		kunci	37.680.000,00	1.905.142.200,00	-	1.942.822.200,00	555.844.172,00	989.397.328,00	224.224.500,00	166.389.500,00	-	1.935.855.500,00	-	-	6.966.700,00
		Jatiblimbing	215.404.000,00	1.663.933.000,00	20.000.000,00	1.899.337.000,00	614.950.650,00	838.090.993,00	30.340.000,00	312.350.450,00	-	1.795.732.093,00	-	-	103.604.907,00
		Ngraseh	201.300.000,00	1.635.684.400,00	3.815.597,74	1.840.799.997,74	631.380.670,00	1.012.383.500,00	40.483.597,74	102.115.000,00	-	1.786.362.767,74	-	-	54.437.230,00
		Mojoranu	410.067.911,31	1.732.240.400,00	-	2.142.308.311,31	725.418.244,35	1.025.288.510,00	251.744.000,00	151.212.100,00	-	2.153.662.854,35	18.430.000,00	-	7.075.456,96
Sendangrejo	110.553.000,00	2.303.391.700,00	38.000.000,00	2.451.944.700,00	615.745.900,00	915.332.500,00	189.750.000,00	69.715.000,00	-	1.790.543.400,00	1.270.292,00	-	662.671.592,00		
Karangsono	29.000.000,00	2.225.455.150,00	-	2.254.455.150,00	433.671.800,00	1.120.315.695,00	152.886.100,00	87.020.450,00	-	1.793.894.045,00	23.541.500,00	-	484.102.605,00		
Sumberagung	135.035.000,00	2.435.656.800,00	1.951.485,00	2.572.643.285,00	612.991.085,00	1.417.845.300,00	231.300.000,00	124.986.300,00	-	2.387.122.685,00	1.877.727,00	-	187.398.327,00		
Somodikaran	171.676.000,00	1.810.746.400,00	41.994.000,00	2.024.416.400,00	460.017.836,00	1.106.306.264,00	227.134.000,00	129.790.000,00	-	1.923.248.100,00	-	-	101.168.300,00		
Ngumpakdale	387.164.000,00	2.773.751.166,00	-	3.160.915.166,00	777.199.645,00	1.638.090.621,00	469.375.000,00	177.809.000,00	-	3.062.474.266,00	1.560.000,00	-	100.000.900,00		
Sumbertlaseh	406.237.190,00	1.498.285.000,00	-	1.904.522.190,00	720.313.740,00	757.092.150,00	205.000.000,00	141.040.000,00	-	1.823.445.890,00	1.000,00	-	81.077.300,00		
Ngulanan	175.000.000,00	1.451.737.567,00	1.470.000,00	1.628.207.567,00	562.593.900,00	729.767.200,00	152.500.000,00	182.287.300,00	-	1.627.148.400,00	42.900,00	-	1.102.067,00		



No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Campurejo	443.635.000,00	1.586.684.100,00	-	2.030.319.100,00	941.071.398,00	496.331.900,00	345.750.000,00	125.502.350,00	5.000.000,00	1.913.655.648,00	-	-	116.663.452,00
4	KANOR	Bakung	433.191.216,00	1.379.060.500,00	51.800.120,00	1.864.051.836,00	814.052.226,00	637.988.859,00	204.126.000,00	197.721.800,00	-	1.853.888.885,00	-	-	10.162.951,00
		Bungur	289.840.000,00	1.291.032.900,00	14.619.461,00	1.595.492.361,00	683.516.550,00	669.509.450,00	142.610.000,00	76.656.800,00	-	1.572.292.800,00	-	-	23.199.561,00
		Cangaan	181.620.000,00	2.001.511.161,00	16.000.000,00	2.199.131.161,00	598.881.200,00	1.266.613.061,00	208.800.000,00	124.836.900,00	-	2.199.131.161,00	-	-	-
		Caruban	376.064.476,00	1.200.347.300,00	55.988.940,00	1.632.400.716,00	682.328.477,00	707.023.260,00	108.990.000,00	131.820.100,00	1.676.000,00	1.631.837.837,00	-	-	562.879,00
		Gedongarum	950.267.602,00	1.473.462.145,00	-	2.423.729.747,00	1.051.733.002,00	1.019.986.045,00	148.500.000,00	189.120.200,00	-	2.409.339.247,00	-	-	14.390.500,00
		Kabalan	387.840.000,00	1.664.182.761,00	-	2.052.022.761,00	748.074.900,00	826.931.861,00	106.423.200,00	154.592.800,00	10.000.000,00	1.846.022.761,00	-	-	206.000.000,00
		Kanor	538.070.162,00	1.336.964.700,00	127.000.000,00	2.002.034.862,00	946.962.204,00	571.232.200,00	230.200.000,00	239.016.000,00	14.624.458,00	2.002.034.862,00	-	-	-
		Kedungprimper	666.527.000,00	1.395.613.300,00	-	2.062.140.300,00	634.509.850,00	1.130.952.750,00	130.600.000,00	128.892.200,00	10.000.000,00	2.034.954.800,00	-	-	27.185.500,00
		Nglarangan	470.544.847,44	1.556.638.512,35	23.009.134,07	2.050.192.493,86	769.334.649,47	898.326.600,00	184.950.000,00	84.201.000,00	2.500.000,00	1.939.312.249,47	-	-	110.880.244,39
		Palembon	521.443.439,19	1.465.819.761,00	40.760.800,00	2.028.024.000,19	842.313.443,00	857.561.961,00	143.498.000,00	174.777.800,00	-	2.018.151.204,00	-	-	9.872.796,19
		Pesen	238.119.000,00	1.157.885.132,52	4.649.187,91	1.400.653.320,43	675.033.919,63	516.779.100,00	46.600.000,00	156.750.000,00	1.400.000,00	1.396.563.019,63	-	-	4.090.300,80
		Pilang	280.000.000,00	1.263.503.000,00	-	1.543.503.000,00	509.607.400,00	768.895.600,00	225.800.000,00	39.200.000,00	-	1.543.503.000,00	-	-	-
		Piyak	137.342.000,00	1.142.671.900,00	31.943.208,00	1.311.957.108,00	502.892.980,00	483.855.000,00	75.136.000,00	222.875.312,00	12.816.000,00	1.297.575.292,00	-	-	14.381.816,00
		Prigi	442.067.938,00	1.370.396.500,00	11.203.883,24	1.823.668.321,24	664.454.195,75	737.906.955,47	150.837.200,00	246.479.500,00	5.808.000,00	1.805.485.851,22	-	-	18.182.470,02
		Samberan	315.990.500,00	1.232.958.500,00	-	1.548.949.000,00	682.330.300,00	568.680.000,00	125.273.200,00	164.656.500,00	8.000.000,00	1.548.949.000,00	-	-	-
		Sarangan	193.726.852,08	1.220.981.100,00	10.624.000,00	1.425.331.952,08	555.673.387,10	688.681.910,00	79.250.000,00	95.400.000,00	4.445.675,00	1.423.450.972,10	-	-	1.880.979,98
		Sedeng	484.145.900,00	1.450.568.861,00	-	1.934.714.761,00	813.946.560,00	815.775.161,00	102.300.000,00	186.941.800,00	14.500.000,00	1.933.463.521,00	-	-	1.251.240,00
		Semambung	526.088.000,00	1.239.436.400,00	8.987.261,00	1.774.511.661,00	675.809.200,00	625.323.400,00	172.186.500,00	300.285.500,00	907.061,00	1.774.511.661,00	-	-	-
		Simbatan	204.000.000,00	1.563.981.961,00	35.044.851,00	1.803.026.812,00	580.967.300,00	857.236.461,00	105.525.000,00	241.925.000,00	10.000.000,00	1.795.653.761,00	-	-	7.373.051,00
		Simorejo	400.443.040,26	1.876.118.859,19	4.595.400,00	2.281.157.299,45	754.754.565,00	945.261.200,00	205.537.500,00	133.023.200,00	-	2.038.576.465,00	-	-	242.580.834,45
		Sroyo	237.900.000,00	1.212.318.244,00	17.619.235,00	1.467.837.479,00	614.827.785,00	565.192.900,00	97.200.000,00	188.800.000,00	-	1.466.020.685,00	-	-	1.816.794,00
		Sumberwangi	365.957.000,00	1.427.207.793,23	115.933.208,50	1.909.098.001,73	628.992.520,12	714.581.442,84	222.511.000,00	311.190.900,00	-	1.877.275.862,96	-	-	31.822.138,77
		Tambahrejo	379.740.000,00	1.354.160.600,00	197.580.844,00	1.931.481.444,00	559.148.731,90	996.154.400,00	120.814.400,00	231.373.000,00	-	1.907.490.531,90	-	-	23.990.912,10
		Tejo	480.350.000,00	1.369.795.600,00	-	1.850.145.600,00	642.159.500,00	808.396.100,00	163.690.000,00	235.900.000,00	-	1.850.145.600,00	-	-	-
		Temu	489.000.000,00	1.788.784.871,57	99.221.028,06	2.377.005.899,63	809.110.900,00	982.546.261,01	310.350.000,00	250.574.400,00	13.086.000,00	2.365.667.561,01	-	-	11.338.338,62
5	KEDEWAN	Kawengan	13.020.000,00	1.377.654.800,00	20.000.000,00	1.410.674.800,00	428.782.650,00	802.496.200,00	41.500.000,00	135.626.500,00	-	1.408.405.350,00	27.820.000,00	27.820.000,00	2.269.450,00
		Wonocolo	7.080.000,00	1.253.232.400,00	-	1.260.312.400,00	482.935.800,00	593.508.948,00	57.000.000,00	125.550.000,00	-	1.258.994.748,00	-	-	1.317.652,00
		Hargomulyo	53.181.996,00	1.655.075.200,00	27.681.700,00	1.735.938.896,00	565.820.696,00	929.202.000,00	-	229.534.500,00	11.381.700,00	1.735.938.896,00	-	-	-
		Kedewan	55.900.000,00	2.176.499.300,00	-	2.232.399.300,00	470.632.600,00	1.351.519.800,00	173.930.000,00	235.325.000,00	-	2.231.407.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	991.900,00
		Beji	112.253.668,00	2.408.641.500,00	-	2.520.895.168,00	540.992.436,00	1.636.802.732,00	176.500.000,00	166.600.000,00	-	2.520.895.168,00	-	-	-
6	MARGOMULYO	Kalangan	45.000.000,00	1.715.320.900,00	54.775.000,00	1.815.095.900,00	437.429.300,00	1.063.401.500,00	87.900.000,00	96.069.100,00	-	1.684.799.900,00	-	-	130.296.000,00
		Ngelo	12.926.000,00	1.535.771.000,00	88.777.200,00	1.637.474.200,00	423.465.450,00	764.160.800,00	62.255.000,00	234.147.100,00	-	1.484.028.350,00	-	-	153.445.850,00
		Margomulyo	32.000.000,00	2.669.209.900,00	14.462.650,00	2.715.672.550,00	463.088.560,00	1.591.296.800,00	231.070.000,00	101.663.000,00	-	2.387.118.360,00	-	-	328.554.190,00

No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Simorejo	356.000.000,00	1.299.348.900,00	1.364.000,00	1.656.712.900,00	716.839.700,00	644.073.200,00	121.600.000,00	172.000.000,00	2.200.000,00	1.656.712.900,00	-	-	-
		Krangkong	490.080.000,00	1.342.450.400,00	-	1.832.530.400,00	816.142.100,00	679.663.100,00	156.373.200,00	180.152.000,00	200.000,00	1.832.530.400,00	-	-	-
		Nglumber	538.750.000,00	1.333.146.100,00	1.847.000,00	1.873.743.100,00	773.009.800,00	641.847.000,00	38.700.000,00	402.895.300,00	17.291.000,00	1.873.743.100,00	-	-	-
		Brangkal	363.745.000,00	1.243.717.600,00	233.482.968,00	1.840.945.568,00	704.148.695,00	818.750.800,00	139.475.000,00	175.387.000,00	1.347.500,00	1.839.108.995,00	-	-	1.836.573,00
		Mojosari	285.675.000,00	1.255.487.800,00	-	1.541.162.800,00	577.960.400,00	665.302.400,00	167.350.000,00	130.075.000,00	475.000,00	1.541.162.800,00	-	-	-
		Balondowo	365.850.000,00	1.262.509.900,00	-	1.628.359.900,00	629.028.600,00	559.452.200,00	328.004.600,00	111.874.500,00	-	1.628.359.900,00	-	-	-
		Sumberoto	494.720.000,00	1.196.341.168,79	9.452.854,93	1.700.514.023,72	675.660.102,98	705.665.000,00	89.255.000,00	161.060.250,00	-	1.631.640.352,98	-	-	68.873.670,74
		Pohwates	315.990.000,00	1.256.373.986,59	-	1.572.363.986,59	589.302.900,00	699.429.000,00	110.500.000,00	172.939.200,00	161.000,00	1.572.332.100,00	-	-	31.886,59
		Turigede	360.000.000,00	1.392.388.100,00	-	1.752.388.100,00	728.741.300,00	686.921.800,00	106.800.000,00	229.925.000,00	-	1.752.388.100,00	-	-	-
		Bayemgede	465.120.000,00	1.342.749.200,00	-	1.807.869.200,00	655.042.000,00	869.563.200,00	198.200.000,00	85.064.000,00	-	1.807.869.200,00	-	-	-
		Tlogorejo	617.850.000,00	1.255.964.400,00	-	1.873.814.400,00	889.324.850,00	737.539.550,00	138.300.000,00	108.650.000,00	-	1.873.814.400,00	-	-	-
		Sumberagung	554.250.000,00	1.457.523.800,00	-	2.011.773.800,00	729.350.300,00	846.797.646,00	67.360.000,00	228.550.000,00	-	1.872.057.946,00	-	-	139.715.854,00
		Woro	556.498.100,00	1.315.489.001,00	19.485.561,16	1.891.472.662,16	742.422.464,38	786.854.000,00	128.000.000,00	203.667.500,00	250.000,00	1.861.193.964,38	-	-	30.278.697,78
		Bumirejo	511.770.000,00	1.237.810.800,00	133.500.000,00	1.883.080.800,00	673.815.800,00	975.495.000,00	32.000.000,00	201.770.000,00	-	1.883.080.800,00	-	-	-
		Betet	336.000.000,00	1.317.876.900,00	895.000,00	1.654.771.900,00	680.947.450,00	670.675.350,00	123.300.000,00	179.849.100,00	-	1.654.771.900,00	-	-	-
		Jipo	320.353.000,00	1.385.858.400,00	-	1.706.211.400,00	712.690.200,00	838.461.600,00	118.200.000,00	36.859.600,00	-	1.706.211.400,00	-	-	-
		Mudung	270.600.000,00	1.194.427.100,00	197.000.000,00	1.662.027.100,00	388.284.200,00	754.593.100,00	233.710.000,00	285.439.800,00	-	1.662.027.100,00	-	-	-
		Ngranggonanya	295.200.000,00	1.135.777.600,00	243.508.102,00	1.674.485.702,00	592.655.290,00	865.904.802,00	190.925.610,00	21.000.000,00	-	1.670.485.702,00	-	-	4.000.000,00
		Karangan	447.600.000,00	1.551.572.900,00	-	1.999.172.900,00	854.586.429,00	806.556.500,00	244.400.000,00	93.629.971,00	-	1.999.172.900,00	-	-	-
		Sugihwaras	467.423.500,00	1.526.805.200,00	2.500.000,00	1.996.728.700,00	814.833.800,00	777.908.400,00	224.280.000,00	169.995.000,00	-	1.987.017.200,00	-	-	9.711.500,00
		Sumbergede	213.580.000,00	1.485.950.600,00	1.200.000,00	1.700.730.600,00	619.388.000,00	822.911.500,00	177.650.000,00	45.230.100,00	10.000.000,00	1.675.179.600,00	-	-	25.551.000,00
<b>8</b>	<b>NGAMBON</b>	Bondol	66.408.783,00	1.711.953.400,00	40.000.000,00	1.818.362.183,00	487.045.400,00	640.292.000,00	14.289.000,00	236.029.000,00	-	1.377.655.400,00	-	-	440.706.783,00
		Karangmangu	14.000.000,00	1.929.010.200,00	31.842.835,00	1.974.853.035,00	438.801.610,00	1.086.157.200,00	85.162.000,00	124.934.000,00	-	1.735.054.810,00	-	40.760.000,00	199.038.225,00
		Ngambon	80.953.622,39	1.295.746.200,00	165.229.198,00	1.541.929.020,39	500.165.608,31	765.997.600,00	134.000.000,00	139.876.100,00	-	1.540.039.308,31	-	-	1.889.712,08
		Nglampin	46.270.000,00	1.836.089.900,00	41.049.152,00	1.923.409.052,00	503.578.962,00	1.077.614.052,00	125.500.000,00	205.126.000,00	-	1.911.819.014,00	-	11.250.000,00	340.038,00
		Sengon	30.520.000,00	1.478.359.700,00	39.665.000,00	1.548.544.700,00	439.729.000,00	901.804.700,00	132.550.000,00	74.391.100,00	-	1.548.474.800,00	-	-	69.900,00
<b>9</b>	<b>SEKAR</b>	Bobol	15.780.000,00	3.027.257.900,00	-	3.043.037.900,00	518.579.800,00	2.133.270.500,00	157.500.000,00	185.507.600,00	48.180.000,00	3.043.037.900,00	-	-	-
		Sekar	38.089.000,00	2.008.708.800,00	22.750.000,00	2.069.547.800,00	566.439.000,00	1.045.874.000,00	263.680.000,00	177.955.600,00	15.599.200,00	2.069.547.800,00	-	-	-
		Bareng	3.000.000,00	1.932.700.100,00	60.290.000,00	1.995.990.100,00	432.208.200,00	1.245.685.600,00	144.000.000,00	174.096.000,00	-	1.995.989.800,00	-	-	300,00
		Klino	18.000.000,00	2.227.735.000,00	96.682.000,00	2.342.417.000,00	479.723.600,00	1.559.300.200,00	151.400.000,00	147.520.000,00	-	2.337.943.800,00	-	-	4.473.200,00
		Deling	16.300.000,00	2.265.894.000,00	30.800.000,00	2.312.994.000,00	522.251.800,00	1.483.189.300,00	126.000.000,00	180.805.000,00	747.900,00	2.312.994.000,00	-	-	-
		Miyono	27.000.000,00	1.641.939.300,00	172.281.550,00	1.841.220.850,00	492.783.100,00	872.732.750,00	233.200.000,00	185.505.000,00	57.000.000,00	1.841.220.850,00	-	-	-
<b>10</b>	<b>PADANGAN</b>	Tebon	111.600.000,00	1.485.252.100,00	-	1.596.852.100,00	378.679.400,00	982.481.200,00	8.560.000,00	181.931.600,00	-	1.551.652.200,00	-	-	45.199.900,00
		Prangi	133.000.000,00	1.267.298.300,00	8.901.900,00	1.409.200.200,00	437.650.500,00	714.936.000,00	84.884.400,00	171.729.300,00	-	1.409.200.200,00	-	-	-







No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Jawik	96.900.000,00	1.528.101.700,00	132.082.900,00	1.757.084.600,00	502.434.100,00	721.954.400,00	5.250.000,00	164.710.000,00	2.000.000,00	1.396.348.500,00	-	100.000.000,00	260.736.100,00
		Sukorejo	180.900.000,00	1.529.935.700,00	-	1.710.835.700,00	516.615.000,00	677.468.500,00	186.875.000,00	329.287.150,00	489.500,00	1.710.735.150,00	-	-	100.550,00
		Gading	90.000.000,00	1.581.865.600,00	-	1.671.865.600,00	416.646.420,00	902.121.280,00	124.593.200,00	127.504.700,00	1.000.000,00	1.571.865.600,00	14.900.000,00	100.000.000,00	14.900.000,00
		Pengkol	87.891.000,00	1.206.119.500,00	-	1.294.010.500,00	456.969.060,00	537.775.120,00	101.804.200,00	231.855.120,00	5.000.000,00	1.333.403.500,00	39.393.000,00	-	-
		Tanjung	88.000.000,00	1.348.056.139,00	-	1.436.056.139,00	340.995.690,00	760.970.239,00	61.600.000,00	272.690.210,00	-	1.436.256.139,00	200.000,00	-	-
		Gamongan	87.851.250,00	1.614.928.300,00	-	1.702.779.550,00	565.054.175,00	855.085.375,00	146.200.000,00	136.440.000,00	-	1.702.779.550,00	-	-	-
		Kalisumber	87.600.000,00	1.855.334.300,00	-	1.942.934.300,00	536.875.700,00	1.031.713.600,00	11.530.000,00	262.315.000,00	500.000,00	1.842.934.300,00	-	100.000.000,00	-
17	GONDANG	Jari	35.200.000,00	1.523.716.600,00	490.440.470,00	2.049.357.070,00	594.072.520,00	951.739.700,00	92.773.600,00	407.735.250,00	-	2.046.321.070,00	-	-	3.036.000,00
		Krandonan	45.250.000,00	2.018.712.700,00	-	2.063.962.700,00	481.673.600,00	1.157.812.100,00	155.420.000,00	265.105.000,00	3.952.000,00	2.063.962.700,00	-	-	-
		Senganten	80.000.000,00	1.904.821.200,00	-	1.984.821.200,00	509.276.780,00	868.116.920,00	324.154.300,00	273.800.000,00	5.000.000,00	1.980.348.000,00	-	-	4.473.200,00
		Gondang	162.000.000,00	1.629.085.000,00	-	1.791.085.000,00	451.868.000,00	723.656.000,00	146.300.000,00	456.401.000,00	12.860.000,00	1.791.085.000,00	-	-	-
		Pajeng	7.048.077,00	1.804.539.567,00	-	1.811.587.644,00	498.752.535,00	778.948.376,00	12.000.000,00	399.498.000,00	-	1.689.198.911,00	-	-	122.388.733,00
		Pragelan	32.000.000,00	1.956.135.200,00	-	1.988.135.200,00	577.706.200,00	919.432.000,00	19.500.000,00	446.497.000,00	25.000.000,00	1.988.135.200,00	-	-	-
		Sambongrejo	164.983.000,00	2.168.175.687,00	-	2.333.158.687,00	591.496.100,00	1.113.347.067,00	411.241.120,00	212.364.400,00	4.710.000,00	2.333.158.687,00	-	-	-
18	KASIMAN	Batokan	179.200.000,00	2.721.259.350,00	190.500.000,00	3.090.959.350,00	624.502.670,00	1.862.635.950,00	255.500.000,00	243.320.730,00	35.000.000,00	3.020.959.350,00	-	-	70.000.000,00
		Betet	99.999.424,00	2.735.015.040,00	-	2.835.014.464,00	383.844.400,00	1.694.017.664,00	187.789.000,00	101.715.400,00	27.648.000,00	2.395.014.464,00	-	-	440.000.000,00
		Ngaglik	154.390.000,00	1.594.666.700,00	22.801.200,00	1.771.857.900,00	542.890.564,00	847.928.083,00	159.610.000,00	202.980.000,00	9.300.000,00	1.762.708.647,00	-	-	9.149.253,00
		Sidomukti	164.000.000,00	1.989.654.800,00	-	2.153.654.800,00	494.108.000,00	1.042.661.100,00	86.600.000,00	90.275.000,00	-	1.713.644.100,00	-	-	440.010.700,00
		Besah	430.054.883,00	1.772.537.100,00	68.569.500,00	2.271.161.483,00	689.461.728,00	1.089.078.950,00	85.000.000,00	229.078.500,00	19.473.200,00	2.112.092.378,00	-	-	159.069.105,00
		Tembeling	376.750.000,00	1.390.618.900,00	20.000.000,00	1.787.368.900,00	740.323.000,00	643.642.700,00	125.000.000,00	188.510.000,00	-	1.697.475.700,00	-	-	89.893.200,00
		Sambeng	140.980.000,00	1.365.761.200,00	18.033.000,00	1.524.774.200,00	613.298.600,00	576.972.400,00	184.500.000,00	148.560.000,00	1.443.200,00	1.524.774.200,00	-	-	-
		Kasiman	72.526.500,00	1.739.391.800,00	10.000.000,00	1.821.918.300,00	559.850.800,00	904.914.000,00	32.278.500,00	313.875.000,00	11.000.000,00	1.821.918.300,00	-	-	-
		Sekaran	154.200.000,00	1.566.832.100,00	-	1.721.032.100,00	530.877.800,00	855.966.100,00	125.020.000,00	152.300.000,00	1.500.000,00	1.665.663.900,00	-	-	55.368.200,00
		Tambakmerak	70.000.000,00	1.646.885.500,00	10.000.000,00	1.726.885.500,00	496.864.500,00	881.821.000,00	217.700.000,00	130.500.000,00	-	1.726.885.500,00	-	-	-
19	KEDUNGADEM	Babad	136.600.000,00	1.793.928.300,00	-	1.930.528.300,00	571.229.300,00	859.700.000,00	-	499.599.000,00	-	1.930.528.300,00	-	-	-
		Pejok	94.000.000,00	1.826.016.900,00	-	1.920.016.900,00	490.379.200,00	1.085.937.000,00	-	338.700.000,00	5.000.000,00	1.920.016.200,00	-	-	700,00
		Dayukidul	130.000.000,00	1.302.780.420,00	-	1.432.780.420,00	478.549.000,00	600.159.000,00	129.496.520,00	224.575.900,00	-	1.432.780.420,00	-	-	-
		Panjang	155.200.000,00	1.544.101.600,00	8.040.000,00	1.707.341.600,00	601.609.100,00	694.609.100,00	147.223.400,00	263.900.000,00	-	1.707.341.600,00	-	-	-
		Tondomulo	160.153.500,00	1.617.160.700,00	385.000.000,00	2.162.314.200,00	594.033.300,00	1.160.774.600,00	184.418.100,00	221.388.200,00	1.700.000,00	2.162.314.200,00	-	-	-
		Kesongo	103.000.000,00	1.478.011.000,00	49.500.000,00	1.630.511.000,00	583.485.600,00	565.119.400,00	-	481.906.000,00	-	1.630.511.000,00	-	-	-
		Kendung	78.660.000,00	2.041.184.800,00	49.500.000,00	2.169.344.800,00	446.144.910,00	1.210.018.600,00	4.777.500,00	347.124.790,00	5.000.000,00	2.013.065.800,00	-	-	156.279.000,00
		Mlideg	115.500.000,00	1.310.535.600,00	-	1.426.035.600,00	462.346.920,00	617.726.680,00	159.853.600,00	163.430.000,00	800.000,00	1.404.157.200,00	-	-	21.878.400,00
		Tumbrasanom	161.998.750,00	1.657.109.175,00	2.700.000,00	1.821.807.925,00	492.530.075,00	794.971.744,00	148.412.000,00	160.028.950,00	-	1.595.942.769,00	41.599.650,00	200.000.000,00	67.464.806,00
		Kedungadem	131.000.000,00	1.942.747.300,00	3.000.000,00	2.076.747.300,00	571.455.200,00	559.091.100,00	641.821.100,00	296.379.900,00	8.000.000,00	2.076.747.300,00	-	-	-

No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Mojorejo	56.250.000,00	1.249.827.200,00	1.489.000,00	1.307.566.200,00	448.973.400,00	659.594.100,00	54.426.000,00	94.572.700,00		1.257.566.200,00	-	50.000.000,00	-
		Jamberejo	192.020.000,00	1.642.984.800,00	3.507.700,00	1.838.512.500,00	549.618.000,00	892.802.500,00	212.399.000,00	183.693.000,00		1.838.512.500,00	-	-	-
		Sidomulyo	259.440.000,00	1.571.348.400,00	2.365.000,00	1.833.153.400,00	658.338.400,00	545.190.000,00	283.100.000,00	341.525.000,00	5.000.000,00	1.833.153.400,00	-	-	-
		Tlogoagung	155.000.000,00	1.716.712.712,00	4.050.000,00	1.875.762.712,00	554.363.100,00	955.901.612,00	188.500.000,00	175.215.000,00	700.000,00	1.874.679.712,00	-	-	1.083.000,00
		Ngrandu	32.450.500,00	1.513.584.400,00	3.199.000,00	1.549.233.900,00	427.009.240,00	714.670.200,00	25.759.260,00	376.363.145,00	5.250.000,00	1.549.051.845,00	-	-	182.055,00
		Balongcabe	57.000.000,00	1.537.394.550,00	-	1.594.394.550,00	494.310.100,00	858.099.450,00		226.985.000,00	15.000.000,00	1.594.394.550,00	-	-	-
20	BAURENO	Drajat	461.531.000,00	1.298.300.700,00	3.022.418,00	1.762.854.118,00	686.673.300,00	757.969.400,00	19.581.000,00	292.554.400,00		1.756.778.100,00	-	-	6.076.018,00
		Banjaranyar	365.000.000,00	1.435.601.139,00	-	1.800.601.139,00	577.217.749,00	818.370.990,00	280.689.800,00	114.578.000,00		1.790.856.539,00	-	-	9.744.600,00
		Ngemplak	489.012.500,00	1.494.050.389,00	61.186.933,00	2.044.249.822,00	773.714.822,00	854.722.100,00	310.480.000,00	105.332.900,00		2.044.249.822,00	-	-	-
		Sratujejo	398.400.000,00	1.403.895.339,00	-	1.802.295.339,00	585.485.039,00	527.560.000,00	221.950.000,00	198.125.200,00		1.533.120.239,00	-	-	269.175.100,00
		Blongsong	200.250.000,00	1.420.800.700,00	2.767.688,00	1.623.818.388,00	481.178.560,00	772.700.000,00	227.500.000,00	142.439.828,00		1.623.818.388,00	-	-	-
		Baureno	153.943.304,00	1.551.236.272,00	-	1.705.179.576,00	469.687.304,00	922.519.050,00	206.128.500,00	104.113.300,00	2.500.000,00	1.704.948.154,00	-	-	231.422,00
		Trojalu	121.500.000,00	1.293.722.100,00	12.000.000,00	1.427.222.100,00	542.769.500,00	449.799.000,00	116.500.000,00	218.153.600,00		1.327.222.100,00	-	-	100.000.000,00
		Tulungagung	204.700.000,00	1.130.733.200,00	125.571.099,00	1.461.004.299,00	474.097.399,00	598.249.100,00	44.000.000,00	344.657.800,00		1.461.004.299,00	-	-	-
		Selorejo	222.500.000,00	1.386.318.600,00	41.400.000,00	1.650.218.600,00	521.443.400,00	853.865.200,00	149.560.000,00	125.350.000,00		1.650.218.600,00	-	-	-
		Tlogoagung	292.364.000,00	2.797.566.780,00	115.000.000,00	3.204.930.780,00	620.642.577,00	1.429.042.250,00	101.850.000,00	138.395.953,00		2.289.930.780,00	-	-	915.000.000,00
		Sumuragung	289.500.000,00	1.309.434.800,00	211.541.129,00	1.810.475.929,00	811.915.029,00	686.840.900,00	24.500.000,00	287.220.000,00		1.810.475.929,00	-	-	-
		Gajah	164.000.000,00	1.437.716.300,00	1.538.000,00	1.603.254.300,00	443.610.500,00	787.800.000,00	268.600.000,00	103.243.800,00		1.603.254.300,00	-	-	-
		Kalisari	46.000.000,00	1.697.957.748,00	40.500.107,00	1.784.457.855,00	444.511.691,00	1.001.488.139,00	129.996.800,00	198.470.600,00	9.990.625,00	1.784.457.855,00	-	-	-
		Tanggung	68.875.000,00	1.242.647.172,00	363.072,00	1.311.885.244,00	489.115.194,00	610.925.500,00	30.400.000,00	181.444.550,00		1.311.885.244,00	-	-	-
		Gunungsari	263.850.000,00	2.037.492.500,00	586.927,00	2.301.929.427,00	585.679.437,00	699.295.190,00	243.100.000,00	102.801.200,00	10.000.000,00	1.640.875.827,00	-	-	661.053.600,00
		Bumiayu	174.965.000,00	1.447.747.900,00	2.346.330,20	1.625.059.230,20	529.168.200,00	705.729.700,00	11.600.000,00	378.215.000,00		1.624.712.900,00	-	-	346.330,20
		Kauman	412.500.000,00	1.551.882.467,00	15.000.000,00	1.979.382.467,00	610.057.519,00	925.909.900,00	42.900.000,00	400.269.800,00		1.979.137.219,00	-	-	245.248,00
		Karangdayu	328.320.000,00	1.395.843.588,00	12.000.000,00	1.736.163.588,00	643.637.601,00	748.046.800,00	60.000.000,00	274.479.187,00	10.000.000,00	1.736.163.588,00	-	-	-
		Pasinan	1.580.319.699,00	1.251.382.035,00	2.585.369,91	2.834.287.103,91	821.394.046,00	1.475.790.500,00	181.030.000,00	329.290.000,00	9.500.000,00	2.817.004.546,00	-	-	17.282.557,91
		Banjaran	371.202.500,00	1.448.172.686,00	76.042.307,00	1.895.417.493,00	632.055.289,00	839.883.224,00	27.128.945,00	330.307.728,00		1.829.375.186,00	-	-	66.042.307,00
		Sembunglor	75.000.000,00	1.201.406.860,00	8.664.145,00	1.285.071.005,00	410.174.205,00	632.459.400,00	88.700.000,00	132.600.000,00		1.263.933.605,00	-	-	21.137.400,00
		Pomahan	187.305.000,00	1.183.290.100,00	417.130.907,00	1.787.726.007,00	598.588.310,00	919.783.997,00	144.345.200,00	122.508.500,00	2.500.000,00	1.787.726.007,00	-	-	-
		Pucangarum	432.529.717,00	1.650.656.165,00	100.000.000,00	2.183.185.882,00	755.436.015,00	784.105.000,00	88.825.000,00	551.519.867,00	3.300.000,00	2.183.185.882,00	-	-	-
		Kadungrejo	303.993.250,00	1.699.641.902,00	1.485.443,00	2.005.120.595,00	665.461.152,00	710.631.000,00	239.241.000,00	388.302.000,00	1.485.443,00	2.005.120.595,00	-	-	-
		Lebaksari	167.124.000,00	1.932.045.605,00	18.569.266,00	2.117.738.871,00	489.855.309,00	1.260.346.387,00	36.367.925,00	328.169.250,00	3.000.000,00	2.117.738.871,00	-	-	-
21	BUBULAN	Bubulan	90.886.800,00	1.950.555.000,00	2.034.000,00	2.043.475.800,00	494.508.400,00	1.124.997.100,00	215.204.800,00	208.765.500,00		2.043.475.800,00	-	-	-
		Cancang	34.556.000,00	1.512.767.200,00	-	1.547.323.200,00	375.712.656,00	652.725.518,00	288.526.088,00	230.358.938,00	-	1.547.323.200,00	-	-	-
		Clebung	73.130.000,00	1.441.280.600,00	-	1.514.410.600,00	504.952.000,00	601.338.600,00	171.000.000,00	237.120.000,00	-	1.514.410.600,00	-	-	-

No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Ngujung	96.000.000,00	1.409.511.800,00	-	1.505.511.800,00	374.019.200,00	619.626.680,00	262.317.000,00	249.548.920,00	-	1.505.511.800,00	-	-	-
		Klitech	45.000.000,00	2.341.123.200,00	-	2.386.123.200,00	520.161.700,00	1.273.901.500,00	42.000.000,00	145.060.000,00	5.000.000,00	1.986.123.200,00	-	-	400.000.000,00
		Tambakromo	80.000.000,00	1.697.847.300,00	-	1.777.847.300,00	491.522.520,00	951.394.780,00	10.000.000,00	324.930.000,00	-	1.777.847.300,00	-	-	-
		Sumberjo	102.652.000,00	2.559.329.800,00	-	2.661.981.800,00	433.478.080,00	1.903.181.720,00	16.822.000,00	308.500.000,00	-	2.661.981.800,00	-	-	-
		Tinawun	145.500.000,00	1.932.466.561,00	-	2.077.966.561,00	512.262.000,00	1.109.423.000,00	59.502.000,00	385.064.000,00	-	2.066.251.000,00	-	-	11.715.561,00
		Banaran	48.000.000,00	1.172.826.000,00	-	1.220.826.000,00	466.906.600,00	609.563.400,00	25.000.000,00	119.356.000,00	-	1.220.826.000,00	-	-	-
		Kedungrejo	60.000.000,00	1.157.752.200,00	-	1.217.752.200,00	376.512.500,00	671.289.700,00	128.450.000,00	41.500.000,00	-	1.217.752.200,00	-	-	-
		Ketileng	55.488.000,00	1.170.626.000,00	-	1.226.114.000,00	392.803.800,00	592.534.250,00	145.374.900,00	95.401.050,00	-	1.226.114.000,00	-	-	-
		Rendeng	50.000.000,00	1.981.221.315,00	-	2.031.221.315,00	391.073.320,00	1.428.887.995,00	52.000.000,00	159.260.000,00	-	2.031.221.315,00	-	-	-
		Malo	31.500.000,00	1.530.882.000,00	-	1.562.382.000,00	456.548.700,00	849.848.850,00	113.000.000,00	118.511.250,00	-	1.537.908.800,00	-	-	24.473.200,00
		Sukorejo	20.000.000,00	1.148.864.600,00	-	1.168.864.600,00	394.007.700,00	609.861.900,00	11.325.000,00	153.670.000,00	-	1.168.864.600,00	-	-	-
		Trembes	108.000.000,00	1.404.574.245,00	-	1.512.574.245,00	414.085.270,00	888.898.975,00	30.000.000,00	179.590.000,00	-	1.512.574.245,00	-	-	-
		Semlaran	101.260.000,00	1.576.975.700,00	2.286.932,00	1.680.522.632,00	421.886.000,00	979.625.000,00	93.317.000,00	69.750.000,00	-	1.564.578.000,00	-	-	115.944.632,00
		Tanggir	114.696.400,00	1.512.775.500,00	-	1.627.471.900,00	456.290.940,00	883.715.150,00	72.631.160,00	214.834.650,00	-	1.627.471.900,00	-	-	-
		Tulungagung	125.158.000,00	2.157.993.700,00	-	2.283.151.700,00	478.820.000,00	1.520.393.300,00	36.593.400,00	247.345.000,00	-	2.283.151.700,00	-	-	-
23	NGRAHO	Luwihaji	117.750.000,00	1.368.003.200,00	-	1.485.753.200,00	544.831.700,00	630.219.000,00	155.000.000,00	145.790.000,00	-	1.475.840.700,00	-	-	9.912.500,00
		Sugiharwas	103.000.000,00	1.672.400.900,00	506.000,00	1.775.906.900,00	472.362.300,00	869.334.600,00	85.700.000,00	248.004.000,00	-	1.675.400.900,00	-	-	100.506.000,00
		Sumberagung	133.750.000,00	1.425.790.800,00	-	1.559.540.800,00	575.577.600,00	641.481.664,00	121.500.000,00	220.981.536,00	-	1.559.540.800,00	-	-	-
		Mojorejo	260.000.000,00	1.703.530.100,00	-	1.963.530.100,00	611.903.000,00	915.367.675,00	203.207.100,00	233.052.325,00	-	1.963.530.100,00	-	-	-
		Ngraho	84.640.000,00	1.274.628.400,00	11.922.866,00	1.371.191.266,00	459.828.277,00	468.486.400,00	128.400.000,00	206.018.000,00	3.700.000,00	1.266.432.677,00	-	-	104.758.589,00
		Blimbinggede	199.405.000,00	1.417.998.300,00	7.343.000,00	1.624.746.300,00	400.243.700,00	828.956.700,00	128.405.000,00	267.140.900,00	-	1.624.746.300,00	-	-	-
		Jumok	150.000.000,00	2.016.823.100,00	-	2.166.823.100,00	573.086.300,00	1.206.976.450,00	126.500.000,00	112.683.050,00	-	2.019.245.800,00	-	-	147.577.300,00
		Nganti	125.000.000,00	2.312.010.400,00	20.000.340,00	2.457.010.740,00	667.597.000,00	1.329.503.740,00	343.250.000,00	116.660.000,00	-	2.457.010.740,00	-	-	-
		Pandan	94.500.000,00	1.669.841.600,00	1.365.000,00	1.765.706.600,00	474.300.300,00	1.011.876.000,00	126.500.000,00	153.030.300,00	-	1.765.706.600,00	-	-	-
		Tanggungan	262.838.000,00	1.834.441.000,00	-	2.097.279.000,00	573.785.700,00	1.120.024.700,00	168.493.500,00	234.975.100,00	-	2.097.279.000,00	-	-	-
		Kalirejo	199.600.000,00	1.419.675.400,00	-	1.619.275.400,00	510.858.100,00	783.485.300,00	194.650.000,00	125.055.000,00	-	1.614.048.400,00	-	-	5.227.000,00
		Tapelan	86.231.600,00	1.465.702.500,00	-	1.551.934.100,00	429.393.600,00	636.557.000,00	149.640.000,00	166.343.500,00	20.000.000,00	1.401.934.100,00	-	-	150.000.000,00
		Sumberarum	330.577.500,00	1.748.606.000,00	50.500.000,00	2.129.683.500,00	645.368.500,00	749.630.000,00	202.500.000,00	99.685.000,00	2.500.000,00	1.699.683.500,00	-	-	430.000.000,00
		Payaman	153.000.000,00	1.336.541.200,00	-	1.489.541.200,00	555.219.400,00	669.468.800,00	148.219.000,00	116.634.000,00	-	1.489.541.200,00	-	-	-
		Bancer	76.400.000,00	1.448.769.900,00	-	1.525.169.900,00	500.051.300,00	689.489.600,00	158.500.000,00	177.129.000,00	-	1.525.169.900,00	-	-	-
		Klempun	84.115.200,00	1.333.243.900,00	-	1.417.359.100,00	505.290.400,00	605.328.700,00	96.700.000,00	160.040.000,00	50.000.000,00	1.417.359.100,00	-	-	-
24	NGASEM	Butoh	142.382.000,00	1.672.669.100,00	22.400.000,00	1.837.451.100,00	523.191.740,00	978.054.600,00	55.004.860,00	270.006.900,00	1.193.000,00	1.827.451.100,00	-	10.000.000,00	-
		Trenggulunan	111.275.000,00	1.724.371.500,00	1.681.000,00	1.837.327.500,00	547.532.635,00	777.532.940,00	95.458.900,00	409.538.300,00	1.500.000,00	1.831.562.775,00	-	-	5.764.725,00
		Setren	76.600.000,00	2.089.550.100,00	605.804,00	2.166.755.904,00	490.723.689,00	1.292.113.250,00	27.738.400,00	355.505.200,00	-	2.166.080.539,00	-	-	675.365,00





No	Kecamatan	Desa	PENDAPATAN (Rp)			JUMLAH	BELANJA (Rp)					PEMBIAYAAN		SILPA	
			Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Transfer (DTKD)	Pendapatan Lain-lain		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Tak Terduga	JUMLAH	PENERIMAAN		PENGELUARAN
		Soko	92.922.000,00	1.719.600.500,00	-	1.812.522.500,00	598.350.700,00	952.481.800,00	30.765.000,00	221.425.000,00	9.500.000,00	1.812.522.500,00	-	-	-
		Pandantoyo	120.000.000,00	1.554.874.600,00	13.000.000,00	1.687.874.600,00	526.486.500,00	799.304.100,00	119.500.000,00	164.200.000,00	-	1.609.490.600,00	-	-	78.384.000,00
		Buntalan	75.600.000,00	1.529.957.900,00	2.323.000,00	1.607.880.900,00	473.012.000,00	823.737.200,00	188.511.700,00	119.920.000,00	2.700.000,00	1.607.880.900,00	-	-	-
		Pancur	67.000.000,00	1.355.693.600,00	2.000.000,00	1.424.693.600,00	450.748.800,00	742.484.800,00	160.800.000,00	70.660.000,00	-	1.424.693.600,00	-	-	-
<b>28</b>	<b>GAYAM</b>	Begadon	136.500.000,00	1.391.577.500,00	51.391.000,00	1.579.468.500,00	619.697.400,00	737.151.900,00	112.560.000,00	121.609.200,00	-	1.591.018.500,00	11.550.000,00	-	-
		Beged	79.000.000,00	1.569.005.100,00	-	1.648.005.100,00	532.344.100,00	725.841.805,00	149.390.195,00	240.429.000,00	-	1.648.005.100,00	-	-	-
		Bonorejo	100.000.000,00	1.546.946.700,00	200.000.000,00	1.846.946.700,00	618.616.500,00	769.469.800,00	101.910.725,00	136.949.675,00	-	1.626.946.700,00	-	-	220.000.000,00
		Brabowan	96.840.000,00	1.406.881.458,00	-	1.503.721.458,00	537.100.500,00	731.367.000,00	141.980.000,00	93.263.000,00	-	1.503.710.500,00	-	-	10.958,00
		Cengungklung	146.125.500,00	1.359.080.300,00	-	1.505.205.800,00	616.212.532,00	634.998.578,00	123.319.850,00	130.674.840,00	-	1.505.205.800,00	-	-	-
		Gayam	243.453.950,00	2.865.921.399,00	145.301.978,00	3.254.677.327,00	1.488.041.100,00	1.723.476.197,00	221.440.000,00	258.837.560,00	-	3.691.794.857,00	1.157.626.434,00	-	720.508.904,00
		Katur	359.191.500,00	2.572.174.900,00	60.000.000,00	2.991.366.400,00	674.524.500,00	1.035.903.700,00	248.115.200,00	407.823.000,00	-	2.366.366.400,00	-	25.000.000,00	600.000.000,00
		Manukan	89.475.000,00	1.546.177.300,00	303.500.000,00	1.939.152.300,00	514.337.775,00	1.079.781.450,00	74.221.675,00	270.811.400,00	-	1.939.152.300,00	-	-	-
		Mojodelik	104.580.000,00	2.515.234.300,00	-	2.619.814.300,00	850.248.878,00	1.026.535.222,00	165.098.200,00	307.932.000,00	-	2.349.814.300,00	-	50.000.000,00	220.000.000,00
		Ngraho	115.250.000,00	1.673.395.700,00	-	1.788.645.700,00	572.138.200,00	935.251.975,00	184.063.600,00	97.191.925,00	-	1.788.645.700,00	-	-	-
		Ringintunggal	109.185.000,00	1.396.671.800,00	-	1.505.856.800,00	580.199.700,00	705.431.900,00	112.975.000,00	107.250.200,00	-	1.505.856.800,00	-	-	-
		Sudu	569.250.000,00	1.662.940.400,00	-	2.232.190.400,00	791.572.100,00	994.647.560,00	127.930.400,00	318.039.580,00	-	2.232.189.640,00	-	-	760,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>94.796.846.542,04</b>	<b>659.644.564.691,24</b>	<b>18.076.836.776,30</b>	<b>772.518.248.009,58</b>	<b>244.513.248.231,52</b>	<b>358.619.265.490,69</b>	<b>60.864.342.937,82</b>	<b>81.930.844.824,00</b>	<b>1.469.923.169,00</b>	<b>747.397.624.653,03</b>	<b>5.948.822.882,49</b>	<b>5.781.058.885,00</b>	<b>25.263.627.354,04</b>

Bojonegoro, 28 Mei 2019  
 BUPATI BOJONEGORO  
  
 DR. HJ. ANNA MU'AWANAH